KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2023.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, kami telah menyusun LKPJ Tahun 2023 untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya yang diberikan, semoga LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, Maret 2024

BUPATI KEBUMEN



ARIF SUGIYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Dasar Hukum 1

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 1

1.2.1 Visi dan Misi 1

1.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 4

1.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 9

1.3 Data Umum Daerah 11

1.3.1 Data Geografis Wilayah 11

1.3.2 Jumlah Penduduk 12

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 13

1.3.4 Jumlah PNS 14

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 16

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 18

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan 18

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **20**

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 21

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah 23

2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 24

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH **26**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 26

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 26

1. Urusan Pendidikan 26
2. Urusan Kesehatan 75
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98
4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 129

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 144
6. Urusan Sosial 166

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 185

1. Urusan Tenaga Kerja 185
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 195
3. Urusan Pangan 209
4. Urusan Pertanahan 223
5. Urusan Lingkungan Hidup 225
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 251
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 264
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 281
9. Urusan Perhubungan 294
10. Urusan Komunikasi dan Informatika 307
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 320
12. Urusan Penanaman Modal 332
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 352
14. Urusan Statistik 359
15. Urusan Persandian 362
16. Urusan Kebudayaan 366
17. Urusan Perpustakaan 376
18. Urusan Kearsipan 382

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan 388

1. Urusan Kelautan dan Perikanan 388
2. Urusan Pariwisata 410
3. Urusan Pertanian 417
4. Urusan Perdagangan 474
5. Urusan Perindustrian 486
6. Urusan Transmigrasi 495

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 498

1. Fungsi Perencanaan, Penelaitian dan Pengembangan 498
2. Fungsi Keuangan 509
3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 522
4. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan 531
5. Urusan Transparasi dan Partisipasi Publik 550

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 553

1. Sekretariat Daerah 553
2. Sekretariat DPRD 576

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum 600

1. Kesatuan Bangsa dan Politik 600

3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan 617

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 617
b. Permasalahan, Upaya Mengatasi, dan Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja 760
3.1.8 Evaluasi Capaian 775
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 776
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 778
c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 779
d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah 781
e. Analisis Pencapaian Kinerja 783
f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai 820
g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja 843
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan 859
3.2.1 Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen 926
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 926
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 928
3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah 929
3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen 929
3.2.4 Inovasi Daerah 930
3.2.5 Penghargaan yang diterima 937
3.3 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2022 939
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 957
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan 957
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya 957
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 959
4.2 Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 960
BAB V PENUTUP 961

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 5

Tabel 1. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 7

Tabel 1. 3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen 10

Tabel 1. 4 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 12

Tabel 1. 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen..... 14

Tabel 1. 6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2023 15

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*) 17

Tabel 1. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*) 18

Tabel 1. 9 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*) 19

Tabel 2. 1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*) 22

Tabel 2. 2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*) 23

Tabel 2. 3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*) 25

Tabel 3. 1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 27

Tabel 3. 2 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 73

Tabel 3. 3 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 76

Tabel 3. 4 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 96

Tabel 3. 5 Data Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 98

Tabel 3. 6 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 100

Tabel 3. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2023..... 125

Tabel 3. 8 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 126

Tabel 3. 9 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen 127

Tabel 3. 10 Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan..... 128

Tabel 3. 11 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2023 130
Tabel 3. 12 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 142
Tabel 3. 13 Data Lokasi Kawasan Kumuh dan Penanganan s/d tahun 2023..... 143
Tabel 3. 14 Capaian Penanganan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023..... 144
Tabel 3. 15 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023..... 146
Tabel 3. 16 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 162
Tabel 3. 17 Perkembangan Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban..... 162
Tabel 3. 18 Data Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 163
Tabel 3. 19 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 165
Tabel 3. 20 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023 167
Tabel 3. 21 Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen..... 184
Tabel 3. 22 Persentase capaian SPM Sosial tahun 2023..... 185
Tabel 3. 23 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 186
Tabel 3. 24 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 194
Tabel 3. 25 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 196
Tabel 3. 26 Rekapitulasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2023 209
Tabel 3. 27 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 211
Tabel 3. 28 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 222
Tabel 3. 29 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 224
Tabel 3. 30 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 227
Tabel 3. 31 Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup 249
Tabel 3. 32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup..... 250

Tabel 3. 33 Realisasi IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Kebumen 251
Tabel 3. 34 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023 252
Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 261
Tabel 3. 36 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 265
Tabel 3. 37 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 280
Tabel 3. 38 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023 282
Tabel 3. 39 Perkembangan Indikator Kinerja Tahun 2023 293
Tabel 3. 40 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif 294
Tabel 3. 41 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 295
Tabel 3. 42 Perkembangan Indikator Kinerja 306
Tabel 3. 43 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen 306
Tabel 3. 44 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023 308
Tabel 3. 45 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 320
Tabel 3. 46 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 321
Tabel 3. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 328
Tabel 3. 48 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 330
Tabel 3. 49 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 331
Tabel 3. 50 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2023 333
Tabel 3. 51 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 351
Tabel 3. 52 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2023 353
Tabel 3. 53 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan 358
Tabel 3. 54 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi 359
Tabel 3. 55 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 360
Tabel 3. 56 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2022-2023 361
Tabel 3. 57 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 363

Tabel 3. 58 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2022-2023 365
Tabel 3. 59 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 367
Tabel 3. 60 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2023 374
Tabel 3. 61 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2023 375
Tabel 3. 62 Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan 375
Tabel 3. 63 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan 376
Tabel 3. 64 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 377
Tabel 3. 65 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 382
Tabel 3. 66 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 382
Tabel 3. 67 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 383
Tabel 3. 68 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2003 387
Tabel 3. 69 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 387
Tabel 3. 70 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 389
Tabel 3. 71 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan 408
Tabel 3. 72 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Perikanan dan Kelautan 409
Tabel 3. 73 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2023 411
Tabel 3. 74 Persentase Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 417
Tabel 3. 75 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 419
Tabel 3. 76 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 472
Tabel 3. 77 Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023 474
Tabel 3. 78 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 475
Tabel 3. 79 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 483
Tabel 3. 80 Data Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023 484
Tabel 3. 81 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 487

Tabel 3. 82 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 493
Tabel 3. 83 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 496
Tabel 3. 84 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen 498
Tabel 3. 85 Targetkan Transmigran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 498
Tabel 3. 86 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 500
Tabel 3. 87 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2022-2023..... 509
Tabel 3. 88 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 509
Tabel 3. 89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 510
Tabel 3. 90 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD..... 521
Tabel 3. 91 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepegawaian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 523
Tabel 3. 92 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian..... 530
Tabel 3. 93 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 532
Tabel 3. 94 Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Pegawasan Tahun 2023..... 543
Tabel 3. 95 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen 2023 548
Tabel 3. 96 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 551
Tabel 3. 97 Tabel Nilai dan Status Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Kebumen..... 552
Tabel 3. 98 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 554
Tabel 3. 99 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 577
Tabel 3. 100 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen..... 600
Tabel 3. 101 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 601
Tabel 3. 102 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum 616
Tabel 3. 103 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 618
Tabel 3. 104 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja..... 775
Tabel 3. 105 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 776
Tabel 3. 106 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 776

Tabel 3. 107 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 778
Tabel 3. 108 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 779
Tabel 3. 109 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD 781
Tabel 3. 110 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 783
Tabel 3. 111 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja IKM 785
Tabel 3. 112 Realisasi dan Capaian Kinerja Dari Sasaran Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel..... 787
Tabel 3. 113 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE 788
Tabel 3. 114 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Tujuan Kedua 790
Tabel 3. 115 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup 791
Tabel 3. 116 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah 792
Tabel 3. 117 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) 794
Tabel 3. 118 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 795
Tabel 3. 119 Capaian Dari Empat Sasaran 796
Tabel 3. 120 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia) 798
Tabel 3. 121 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan 800
Tabel 3. 122 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka 802
Tabel 3. 123 Realiasi dan Capaian Indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup..... 804
Tabel 3. 124 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah 805
Tabel 3. 125 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 807
Tabel 3. 126 Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 pada 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah 809
Tabel 3. 127 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesalehan Sosial..... 810
Tabel 3. 128 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan 811
Tabel 3. 129 Perbandingan Jumlah Konflik Yang Ditangani 812
Tabel 3. 130 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir 812
Tabel 3. 131 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Budaya Yang Dilestarikan..... 813

Tabel 3. 132 Indikator Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan..... 814
Tabel 3. 133 Indikator Persentase Kesenian Yang Dikembangkan 814
Tabel 3. 134 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kondusivitas Wilayah Yang Dilestarikan..... 816
Tabel 3. 135 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Persentase Penegakan Perda..... 817
Tabel 3. 136 Rincian Perda-Perda Yang Ditegakkan 817
Tabel 3. 137 Realisasi dan Capaian Persentase Desa Tangguh Bencana..... 818
Tabel 3. 138 Persentase Desa Tangguh Bencana 819
Tabel 3. 139 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... 821
Tabel 3. 140 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja..... 843
Tabel 3. 141 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan..... 859
Tabel 3. 142 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2023..... 927
Tabel 3. 143 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2022 dan Rencana tindak lanjut 939
Tabel 4. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2023 958
Tabel 4. 2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 959

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 11
Gambar 3. 1 Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 223
Gambar 3. 2 Kontribusi Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 473
Gambar 3. 3 Realisasi IRB 2020-2022 784
Gambar 3. 4 Nilai IKM Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir 785
Gambar 3. 5 Perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023 787
Gambar 3. 6 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023 789
Gambar 3. 7 Realisasi IPM 2021-2023 790
Gambar 3. 8 Realisasi Angka Harapan Hidup 2021-2023 791
Gambar 3. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jateng, dan Kebumen 796
Gambar 3. 10 Ketimpangan Pendapatan Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir 798
Gambar 3. 11 Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi, dan Nasional 808
Gambar 3. 12 Perhitungan Efisiensi Anggaran 820

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023; dan
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

adalah **”Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Mandiri : Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal

dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan;

3. Berakhlak : Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter;
4. Bersama Rakyat : Bersama Rakyat diterjemahkan sebagai peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan peran masyarakat dalam pembangunan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki (handarbeni).

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 5 (lima) misi yaitu:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Selanjutnya Rumusan strategi disusun menjadi langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan public
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil,	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
	berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Tabel 1. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan *opengov* dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui	Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan sektor pertanian, industri dan jasa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia yang berdaya saing

Arah Kebijakan					
2021	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
			peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia		

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

1.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan prioritas:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya:
   a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
   b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
   c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
   a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
   b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
   a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
   b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
   c. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan
   d. Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
   a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
   b. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
   c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
   d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi; dan
   e. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
   a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
   b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
   c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diharapkan dapat menjawab isu strategis Tahun 2023 yaitu:

1. Profesionalisme Aparatur;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pengembangan Perekonomian Daerah;

4. Pembenahan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi; dan
5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah. Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2023. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2023

Prioritas Kabupaten Kebumen	**Prioritas Provinsi Jawa Tengah**	**Prioritas Nasional**
Prioritas 1 Peningkatan profesionalisme aparatur	**Prioritas 4** Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	**Prioritas 7** Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	**Prioritas 3** Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	**Prioritas 3** Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
Prioritas 3 Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskina	**Prioritas 1** Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana **Prioritas 2** Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	**Prioritas 1** Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Prioritas 4 Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah	**Prioritas 1** Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Prioritas 2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan **Prioritas 5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar **Prioritas 6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 5 Peningkatan kondusivitas wilayah	**Prioritas 4** Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	**Prioritas 4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan **Prioritas 6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim **Prioritas 7** Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen.

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7º27'-7º50' Lintang Selatan dan 109º22'-109º50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudra Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km^2 atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km^2 atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km^2.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.434.023 jiwa, tumbuh sebesar 1,7% dari tahun 2022. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 727.418 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 706.605 jiwa. Adapun secara terperinci jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 4 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	33.05.01	AYAH	34,470	50.69%	33,537	49.31%	68,007	4.74%
2	33.05.02	BUAYAN	35,501	51.06%	34,027	48.94%	69,528	4.85%
3	33.05.03	PURING	33,861	50.65%	32,996	49.35%	66,857	4.66%
4	33.05.04	PETANAHAN	32,071	50.56%	31,362	49.44%	63,433	4.42%
5	33.05.05	KLIRONG	34,027	50.69%	33,102	49.31%	67,129	4.68%
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	31,499	50.90%	30,391	49.10%	61,890	4.32%
7	33.05.07	AMBAL	33,827	51.00%	32,500	49.00%	66,327	4.63%
8	33.05.08	MIRIT	28,614	50.84%	27,669	49.16%	56,283	3.92%
9	33.05.09	PREMBUN	15,154	50.25%	15,006	49.75%	30,160	2.10%
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	25,435	50.68%	24,754	49.32%	50,189	3.50%
11	33.05.11	ALIAN	36,065	50.99%	34,661	49.01%	70,726	4.93%
12	33.05.12	KEBUMEN	69,026	50.59%	67,420	49.41%	136,446	9.51%
13	33.05.13	PEJAGOAN	29,353	50.94%	28,274	49.06%	57,627	4.02%
14	33.05.14	SRUWENG	32,426	50.47%	31,820	49.53%	64,246	4.48%

15	33.05.15	ADIMULYO	19,519	49.98%	19,534	50.02%	39,053	2.72%
16	33.05.16	KUWARASAN	27,137	50.96%	26,115	49.04%	53,252	3.71%
17	33.05.17	ROWOKELE	27,229	50.58%	26,603	49.42%	53,832	3.75%
18	33.05.18	SEMPOR	36,993	50.77%	35,878	49.23%	72,871	5.08%
19	33.05.19	GOMBONG	25,277	49.85%	25,430	50.15%	50,707	3.54%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19,457	50.46%	19,103	49.54%	38,560	2.69%
21	33.05.21	KARANGGAYAM	32,032	51.09%	30,668	48.91%	62,700	4.37%
22	33.05.22	SADANG	12,391	51.48%	11,677	48.52%	24,068	1.68%
23	33.05.23	BONOROWO	11,549	50.90%	11,142	49.10%	22,691	1.58%
24	33.05.24	PADURESO	8,855	50.72%	8,602	49.28%	17,457	1.22%
25	33.05.25	PONCOWARNO	10,008	51.00%	9,616	49.00%	19,624	1.37%
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	25,642	50.92%	24,718	49.08%	50,360	3.51%
Jumlah			**727,418**	**50.73%**	**706,605**	**49.27%**	**1,434,023**	**100 %**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2023 berkisar pada angka 103. Nilai ini diartikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 103 penduduk laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen yaitu sebanyak 136.446 jiwa, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan yaitu 9,51% berada di Kecamatan Kebumen Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso yaitu sebanyak 17.457 jiwa.

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1,7%. Faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2023 dibandingkan dengan 2022 yaitu dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang berstatus kawin sejumlah 709.265 di Tahun 2022 dan 716.542 di Tahun 2023. Secara rinci data pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2022	2023	
1	Ayah	66.868	68.007	1,70%
2	Buayan	68.189	69.528	1,96%
3	Puring	65.491	66.857	2,08%
4	Petanahan	62.085	63.433	2,17%
5	Klirong	65.772	67.129	2,06%
6	Buluspesantren	60.673	61.890	2,00%
7	Ambal	65.117	66.327	1,85%
8	Mirit	55.180	56.283	1,99%
9	Prembun	29.559	30.160	2,03%
10	Kutowinangun	49.492	50.189	1,40%
11	Alian	69.486	70.726	1,78%
12	Kebumen	134.397	136.446	1,52%
13	Pejagoan	56.469	57.627	2,05%
14	Sruweng	63.379	64.246	1,36%
15	Adimulyo	38.475	39.053	1,50%
16	Kuwarasan	52.336	53.252	1,75%
17	Rowokele	53.157	53.832	1,26%
18	Sempor	71.842	72.871	1,43%
19	Gombong	50.246	50.707	0,91%
20	Karanganyar	38.169	38.560	1,02%
21	Karanggayam	61.724	62.700	1,58%
22	Sadang	23.803	24.068	1,11%
23	Bonorowo	22.267	22.691	1,90%
24	Padureso	17.130	17.457	1,91%
25	Poncowarno	19.254	19.624	1,92%
26	Karangsambung	49.391	50.360	1,96%
Jumlah		**1.409.951**	**1.434.023**	**1,70%**

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten kebumen berkisar pada 1-2%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada pada Kecamatan Petanahan yaitu mencapai 2,17% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah ada pada Kecamatan Gombong yaitu 0,91%.

1.3.4 Jumlah PNS

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 16 (enam belas) Dinas, 3 (tiga) Badan, dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	Sekretariat Daerah	79	61	140
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	17	41
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	4	21
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	3	18
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	53	23	76
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19	12	31
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	10	17
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	13	29
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	481	1.485	1966
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	7	19
11	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	82	31	113
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34	15	49
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151	32	183
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	16	27
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	15	19
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.071	4.882	7.953
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	82	31	113
18	Dinas Pertanian dan Pangan	34	15	49
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	151	32	183
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	16	27
21	Dinas Tenaga Kerja	4	15	19
22	Inspektorat Daerah	29	25	54
23	Kecamatan Adimulyo	10	7	17
24	Kecamatan Alian	13	3	16
25	Kecamatan Ambal	14	2	16

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
26	Kecamatan Ayah	12	6	18
27	Kecamatan Bonorowo	12	4	16
28	Kecamatan Buayan	9	3	12
29	Kecamatan Buluspesantren	10	6	16
30	Kecamatan Gombong	21	8	29
31	Kecamatan Karanganyar	28	14	42
32	Kecamatan Karanggayam	11	3	14
33	Kecamatan Karangsambung	11	9	20
34	Kecamatan Kebumen	30	19	49
35	Kecamatan Klirong	9	4	13
36	Kecamatan Kutowinangun	9	6	15
37	Kecamatan Kuwarasan	14	3	17
38	Kecamatan Mirit	11	6	17
39	Kecamatan Padureso	9	4	13
40	Kecamatan Pejagoan	14	3	17
41	Kecamatan Petanahan	9	7	16
42	Kecamatan Poncowarno	7	6	13
43	Kecamatan Prembun	10	7	17
44	Kecamatan Puring	11	4	15
45	Kecamatan Rowokele	10	5	15
46	Kecamatan Sadang	12	3	15
47	Kecamatan Sempor	11	6	17
48	Kecamatan Sruweng	12	4	16
49	Satuan Polisi Pamong Praja	34	6	40
50	Sekretariat DPRD	22	5	27
	JUMLAH	**4.977**	**6.866**	**11.843**

Sumber : BKPSDM Kab. Kebumen, 2023

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Perbandingan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022 dengan 2023 (unaudited) tumbuh sebesar 1,89%, dimana di tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.847.196.017.404,00 dan di tahun 2023 (unaudited) realisasi pendapatan sebesar Rp.2.901.129.535.425,00, sedangkan capaian realisasi tahun 2023 terhadap target di tahun 2023 mencapai 101,55%, hal tersebut

dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp. 2.856.981.438.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.901.129.535.425,00.

Kondisi tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 463.723.188.215,00 atau tercapai 107,14% dari target sebesar Rp 432.821.047.000,00, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.2.435.886.237.648,00 dari anggaran sebesar Rp.2.421.983.808.000,00 atau sebesar 100,57% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp 2.176.583.000,00 tercapai Rp.1.520.109.562,00 atau 69,84%.

Untuk rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2023 (*unaudited*) dan realisasi tahun 2022 (*audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022 (Audited)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp.)
	PENDAPATAN	**2.856.981.438.000,00**	**2.901.129.535.425,00**	**101,55**	**2.847.196.017.404,00**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
	Pajak Daerah	133.030.000.000,00	137.222.705.502,00	103,15	129.843.875.322,00
	Retribusi Daerah	36.368.440.000,00	28.898.155.929,00	79,46	28.375.110.419,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.337.000,00	19.123.340.688,00	100,00	17.640.585.052,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.299.270.000,00	278.478.986.096,00	113,99	336.486.804.682,00
	JUMLAH (I)	**432.821.047.000,00**	**463.723.188.215,00**	**107,14**	**512.346.375.475,00**
2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.233.962.752.000,00	2.251.003.022.457,00	100,76	2.123.296.694.941,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.021.056.000,00	184.883.215.191,00	98,33	206.406.947.000,00
	JUMLAH (II)	2.421.983.808.000,00	2.435.886.237.648,00	100,57	**2.329.703.641.941,00**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
	Pendapatan Hibah	2.176.583.000,00	1.520.109.562,00	69,84	5.145.999.988,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	JUMLAH (III)	**2.176.583.000,00**	**1.520.109.562,00**	**69,84**	**5.145.999.988,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel diatas untuk jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target yaitu Retribusi Daerah, kemudian apabila ditinjau dari sumber dana pendapatan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih merupakan sumber dana yang dominan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp 2.435.886.237.648,00

atau 83,96% dari seluruh realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.2.901.129.535.425,00.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2023 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos anggaran. Secara umum realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen mencapai 96,25%, dari pagu anggaran sebesar Rp.3.093.927.960.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp.2.977.767.388.681,00.

Berikut ini Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 :

Tabel 1. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**BELANJA OPERASI**	**2.124.708.998.900,00**	2.021.024.011.832,00	95,12
1	Belanja Pegawai	1.226.237.772.050,00	1.153.775.444.865,00	94,09
2	Belanja Barang dan Jasa	753.610.646.850,00	726.725.297.839,00	96,43
3	Belanja Subsidi	730.000.000,00	675.656.402,00	92,56
4	Belanja Hibah	132.241.048.000,00	128.807.444.203,00	97,40
5	Belanja Bantuan Sosial	11.889.532.000,00	11.040.168.523,00	92,86
II	**BELANJA MODAL**	**290.509.850.100,00**	**278.842.943.538,00**	**95,98**
1	Belanja Modal Tanah	1.594.820.000,00	1.400.551.240,00	87,82
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.599.220.763,00	65.799.426.633,00	94,54
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.195.858.337,00	75.265.208.901,00	96,25
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.636.032.000,00	124.921.560.732,00	96,36
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.483.919.000,00	11.456.196.032,00	99,76
III	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.235.728.000,00**	**427.050.311,00**	**34,56**
1	Belanja Tidak Terduga	1.235.728.000,00	427.050.311,00	34,56
IV	**BELANJA TRANSFER**	**677.473.383.000,00**	**676.974.543.619,00**	**99,93**
1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000,00	13.743.166.881,00	99,64
2	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000,00	663.231.376.738,00	99,93
BELANJA DAERAH		**3.093.927.960.000,00**	**2.977.767.388.681,00**	**96,25**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan

Secara umum pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2023 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos anggaran. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan sebagaimana data berikut ini:

Tabel 1. 9 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**283.277.522.000,00**	**283.142.890.877,98**	**99,95**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	258.826.262.000,00	258.817.350.877,98	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	22.351.260.000,00	22.225.540.000,00	99,44
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**46.331.000.000,00**	**42.331.000.000,00**	**91,37**
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000,00	20.231.000.000,00	83,49
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**236.946.522.000,00**	**240.811.890.877,98**	**101,63**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berakhirnya Pandemi Covid-19 pada tahun 2023 membuat perekonomian global, khususnya Indonesia dan Kabupaten Kebumen kembali bergerak. Penguatan pengendalian pandemi yang dilakukan Pemerintah juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama. seperti sektor industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi membuat pendapatan daerah mengalami pertumbuhan pada tahun 2023. Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dengan tetap mengendalikan inflasi daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan serta dengan prioritisasi dan optimalisasi sektor unggulan dan sektor pendukungnya yang tangguh terhadap berbagai ancaman *disruptive* di kemudian hari. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal maupun non formal;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik melalui upaya padat karya dan penggunaan tenaga kerja lokal pada proyek infrastruktur
12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah paling substantif yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah akibat pandemi Covid-19 serta mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan tahunan maupun jangka menengah. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2023 juga dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2023, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang bergerak ke arah positif Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah, dimana selain mendapat Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD melalui:
    a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
    b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
    c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
    d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
    e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
    f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
    g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
    h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
    i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
    j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan dan investasi;
    k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan dividen atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
    l. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional;

m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah; dan
3. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Secara umum pendapatan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2023 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pendapatan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**432.558.905.000**	**432.821.047.000**	**262.142.000**	**0**
1.	Pajak Daerah	124.170.200.000	133.030.000.000	8.859.800.000	7
2.	Retribusi Daerah	36.044.435.000	36.368.440.000	324.005.000	1
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	19.123.337.000	2.623.337.000	16
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	255.844.270.000	244.299.270.000	(11.545.000.000)	5
B.	**Pendapatan Transfer**	**2.370.792.725.000**	**2.398.168.868.000**	**27.376.143.000**	1
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.213.301.302.000	2.210.147.812.000	(3.153.490.000)	0
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.491.423.000	188.021.056.000	30.529.633.000	19
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2.176.583.000**	**2.176.583.000**	**0**	**0**
1.	Pendapatan Hibah	2.176.583.000	2.176.583.000	0	0
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	0	0	0	0

NO	URAIAN	APBD 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
	Peraturan Perundang-Undangan				
Pendapatan Daerah		**2.805.528.213.000**	**2.833.166.498.000**	**27.638.285.000**	**1**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Adapun kebijakan umum perubahan belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 antara lain:

1. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
3. Pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan tangguh serta pengendalian inflasi daerah;
4. Akselerasi pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
5. Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
6. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2023 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan. Perubahan anggaran belanja pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Belanja Operasi**	**1.975.886.855.100**	**2.123.448.355.900**	**147.561.500.800**	**7**
1.	Belanja Pegawai	1.183.761.878.000	1.226.237.239.050	42.475.361.050	4

NO	URAIAN	APBD 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
2.	Belanja Barang dan Jasa	670.370.164.100	752.350.536.850	81.980.372.750	12
3.	Belanja Subsidi	600.000.000	730.000.000	130.000.000	22
4.	Belanja Hibah	110.349.596.000	132.241.048.000	21.891.452.000	20
5.	Belanja Bantuan Sosial	10.805.217.000	11.889.532.000	1.084.315.000	10
II.	**Belanja Modal**	**260.238.657.900**	**279.837.765.100**	**19.599.107.200**	**8**
1.	Belanja Modal Tanah	994.820.000	1.594.820.000	600.000.000	60
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	69.038.220.763	(1.942.800.200)	3
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	71.798.645.337	1.546.997.400	2
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	125.922.160.000	16.174.924.000	15
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	11.483.919.000	3.294.986.000	40
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	0	75.000.000	100
III.	**Belanja Tak Terduga**	**2.000.000.000**	**1.362.728.000**	**(637.272.000)**	**32**
1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.362.728.000	(637.272.000)	32
IV.	**Belanja Transfer**	**662.164.171.000**	**665.464.171.000**	**3.300.000.000**	**0**
1.	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	13.792.758.000	0	0
2.	Belanja Bantuan Keuangan	648.371.413.000	651.671.413.000	3.300.000.000	1
Jumlah Belanja		**2.900.289.684.000**	**3.070.113.020.000**	**169.823.336.000**	**6**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diantaranya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dan Pengembalian Pinjaman Daerah dari Kelompok Tani untuk Dana Talangan Pangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diantaranya untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah pada Perda APBD Tahun Anggaran 2023 dan pemberian pinjaman kepada kelompok tani (gabungan kelompok tani). Perubahan dari pemberian dana bergulir kepada nelayan untuk antisipasi keterlambatan pelaksanaan lelang ikan sebesar Rp.600.000.000,00,-.

Tabel 2. 3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Penerimaan Pembiayaan**	**141.092.471.000**	**283.277.522.000**	**142.185.051.000**	**101**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.992.471.000	258.826.262.000	119.833.791.000	86
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	22.351.260.000	22.351.260.000	100
3.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
II.	**Pengeluaran pembiayaan**	**46.331.000.000**	**46.331.000.000**	**0**	**0**
1.	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000	24.231.000.000	0	0
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
3.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
Pembiayaan Netto		**94.761.471.000**	**236.946.522.000**	**142.185.051.000**	**150**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2023

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui program prioritas Program Pengelolaan Pendidikan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN		A PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	%	83,51	97,58	116,84	Banyak anak-anak dari wilayah kabupaten lain terutama di perbatasan yang bersekolah di Kebumen	
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	93,2	93,2	Adanya siswa usia SD sudah mengikuti pendidikan jenjang di atasnya	Mengeluarkan rekomendasi tertulis dari Psikolog profesional atau dari RS Pemerintah yang menyatakan bahwa anak tersebut mampu untuk mengikuti KBM
			Pemulihan perekonomi	a Sub Kegiatan Pembangunan	Jumlah Pembangunan	Paket/ unit	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pagar SDN 1 Mulyosri Kecamatan Prembun (aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran)						
					Jumlah Pembangunan Talud (DAU) ; 1. SDN Kalipuru Kec. Karangsambung, 2. SDN 2 Giyanti Kec. Rowokele, 3. SDN 2 Giripurno Kec. Karanganyar, 4. SDN Srati Kec. Ayah.	Paket	4	4	100		
					Jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan yang	Ruang	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dibangun (DAU) : SDN 2 Puliharjo Kec. Puring						
					Jumlah Ruang Jamban yang Dibangun (DAU) : SDN 2 Srati Kecamatan Ayah dan Perpustakaan	Ruang	2	2	100		
					Jumlah Ruang Perpustakaan yang Dibangun (DAK) : 1. SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong; 2. SDN 1 Purwosari Kec. Puring; 3. SDN 1 Somagede Kec. Sempor.	Ruang	3	3	100		
					Jumlah Pembangunan ruang UKS :						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1. SDN Pasir Kec. Ayah; 2. SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong; 3. SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; 4. SDN 1 Purwosari Kec. Puring; 5. SDN 1 Somagede Kec. Sempor.	Ruang	5	5	100		
					Jumlah Ruang Guru dibangun (DAK): SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong.	Ruang	1	1	100		
					Jumlah Toilet/Jamban yang Dibangun (DAK) : 1. SDN Kaligesing Kec. Sadang; 2. SDN Pasir Kec. Ayah; 3. SDN 2	Paket	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Ambalresmi Kec. Ambal; 4. SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele. dan Ruang Jumlah Laboratorium TIK dibangun (DAK) 1. SDN Kaligesing Kec. Sadang; 2. SDN Argopeni Kec. Ayah; 3. SDN 2 Surotrunan Kec. Alian; 4. SDN 3 Banjareja Kec. Kuwarasan; 5. SDN Pasir Kec. Ayah; 6. SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong; 7. SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; 8. SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele; 9. SDN 1 Purwosari Kec. Puring;	ruang	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SDN 1 Somagede Kec. Sempor.						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang direhab (DAK) : SDN Argopeni Kec. Ayah; SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong.	Paket	2	2	100		
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas : 1. SDN 2 Pakuran Sruweng, 2. SDN Tlogodepok Mirit, 3. SDN 1 Padureso Padureso, 4. SDN 1 Kalirejo Karanggayam 5. SDN Kradenan Ambal, 6. SDN 2	Ruang	43	43	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tambakmulyo Puring, 7. SDN 2 Kritig Petanahan, 8. SDN 1 Sidoharjo Sruweng, 9. SDN 2 Surorejan Puring, 10. SDN Gadungrejo Klirong, 11. SDN 2 Patukgawemulyo Mirit, 12. SDN 1 Patukgawemulyo Mirit, 13. SDN 1 Kertodesa Mirit, 14. SDN Erogemiwang Karangsambung, 15. SDN Tlepok Karangsambung, 16. SDN Pencil Karangsambung, 17. SDN						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rowosari Bonorowo, 18. SDN 2 Kalibening Karanggayam 19. SDN Grogolpena-tus, Petanahan.						
					Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan : SDN 4 Krakal Kec. Alian	Ruang	1	1	100		
					Jumlah Ruang Guru yang direhab (DAK) : 1. SDN 2 Surotrunan Kec. Alian; 2. SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal.	Ruang	2	2	100		
					Jumlah Ruang						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kelas yang direhab (DAK) : 1. SDN Kaligesing Kec. Sadang; 2. SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; 3. SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele; 4. SDN 1 Somagede Kec. Sempor.	Ruang	7	7	100		
					Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU/aspirasi masyarakat m memalui Pokok Pikiran) : MI Babadsari Kec. Kutowinangun	Paket	1	1	100		
					Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU/ Aspirasi masyarakat melalui	Paket	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pokok Pikiran) : MI KHR Ilyas Rantewringin Kec. Buluspesntren,. Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU/ aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran) : MI Muhammadiyah semondo, Kec Gobong	Paket	1	1	100		
					SDN Babadsari Kec. Kutowinangun	Paket	1	1	100		
					Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU) : 1. SDN 1 Somagede Sempor, 2. SDN 5 Kutosari Kec. Kebumen, SDN Kaibon	Ruang	22	22	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kec. Ambal, 3. SDN 3 Tersobo Kec. Prembun, SDN 4 Bumirejo Kec. Kebumen, 4. SDN 3 Wagirpandan Kec. Rowokele, 5. SDN 1 Pejagatan Kec. Kutowinangun						
					Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU/Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran) : MI Ar-Rahmah Desa Nogoraji Kec. Buayan	Paket	2	2	100		
					Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab (DAK) : SDN 2 Ambalresmi	Ruang	3	3	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kec. Ambal; SDN 1 Purwosari Kec. Puring; SDN Pringtutul Kec. Rowokele. Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab (DAK) : 1. SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, 2. SDN Pasir Kec. Ayah. Jumlah Toilet/Jamban yang direhab (DAU / Aspirasi Masyarakat mellui Pokok Pikiran) : MI Sultan Agung Karangduwur Kec. Ayah	 Ruang Paket	 2 1	 2 1	 100 100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	c Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Aspirasi Masyarakat):SDN Arjowinangun Kec. Puring	Paket	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket peralatan TIK SD (DAK) : SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele, SDN 1 Purwosari Kec. Puring, SDN 1 Somagede Kec. Sempor, SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal, SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong, SDN 2 Surotrunan	Paket	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kec. Alian, SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, SDN Argopeni Kec. Ayah, SDN Kaligesing Kec. Sadang, SDN Pasir Kec. Ayah						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	e Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI (DTKS DINSOS)	Siswa	2.000	2.000	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan	satuan pendidik	751	751	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	bagi Peserta Didik	Ujian Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian dan Monev BOS	Sekolah	751	751	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	g Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Orang Satuan Pendi-dik	838 751	838 751	100 100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahtera	h Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan lomba/Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD, KOSN SD, FLS2N SD,	Sekolah	751	751	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an masyarakat yang berkeadilan		LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	763	763	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	i Sub Kegiatan Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	GTT, P2K dan PTT di Lingkungan Sekolah Dasar negeri danDisdikpora Kabupaten Kebumen Jumlah Calon Kepala Sekolah Yang Mengikuti Seleksi dan Pembekalan Serta Pelantikan / Pengambilan Sumpah Calon	Orang Orang	1.212 100	1.212 100	100 100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kepala Sekolah						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	k Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan pemilihan PTK berprestasi	Orang	3.770	3.770	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	j Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	751	751	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	k Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah	751	751	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar	%	97,70	101,95	114,87	Banyak anak-anak dari wilayah kabupaten lain terutama perbatasan yang bersekolah di Kebumen	-
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Talud : SMPN 2 Sruweng, Pembangunan	Paket	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		Toilet (jamban) beserta sanitasinya/DAK:	Paket	2	2	100		
					SMPN 2 Mirit,						
					SMPN 1 Buluspesantren	Paket	1	1	100		
					SMPN 1 Poncowarno	Paket	1	1	100		
					Pembangunan area parkir bus pnumpang	Paket	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Guru :	Ruang	1	1	100		
					SMPN 1 Pejagoan,						
					Rehabilitasi Ruang Kelas :						
					SMPN 1 Buayan,	Ruang	2	2	100		
					SMPN 2 Kutowinangun,	ruang	2	2	100		
					SMPN 2 Satap	ruang	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Alian 2, SMPN 3 Satap Sempor	ruang	2	2	100		
					Rehabilitasi Ruang Kelas: SMPN 1 Prembun,	Paket	1	1	100		
					Rehabilitasi Ruang Kelas/DAK :	ruang	3	3	100		
					SMPN 1 Rowokele,	ruang	3	3	100		
					SMPN 2 Mirit,	ruang	3	3	100		
					SMPN 6 Kebumen						
					Rehabilitasi Ruang Lab Komputer : SMPN 1 Poncowarno,	ruang	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan	c Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP/MTs	Siswa	1.000	1.000	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Sekolah Menengah Pertama	(DTKS DINSOS)						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Asesmen Nasional dan Monev BOS	Peserta Didik Sekolah	14.571 120	14.571 120	100 100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan	f Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi	orang	73	73	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendi-dik	59	59	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	g Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP, KOSN SMP, FLS,GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	paket Peserta Didik	8 59	8 70	100 118	Adanya penambahan beberapa cabang lomba antara lain lomba cerdas cermat (LCC) museum,	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) sehingga jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi bertambah	
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	h Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi dan jumlah GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen	Orang	347	347	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	I Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.000	1.000	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	J Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (bintek, KOSP) Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Sekolah Satuan Pendi-dik	400 120	400 120	100 100		
				k Sub Kegiatan Pengelolaan	SMP Negeri yang mendapatkan	Sekolah	59	59	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Biaya Operasional Sekolah (BOS)						
				3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar Paud	%	41,5	41,5	100%		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Ruang UKS yang dibangun (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec.Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec.Karanggayam.	Lembaga	3	3	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) : Pos PAUD Bina Ceria Desa Semanding Kec. Gombong, TK Tunas Mekar Desa Tunjungsejo Kec. Sempor, Pos PAUD Budi Rahayu Desa Sidoharjo Kec. Puring, TK Pertiwi PGRI Desa Krandegan Kec. Puring, Pos PAUD Permata Hati Desa Padureso Kec. Padureso, TK Trisula Desa Prembun Kec.	Lembaga	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Prembun.						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	c Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah paket penerima Siswa PAUD Berprestasi (hibah/bansos)	Paket	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang	d Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : KB Bina Mandiri Desa Semanding Kec. Gombong, Pos PAUD Wijaya Kusuma Desa Ambalkumolo Kec. Buluspesantren, Pos PAUD Turi	Paket	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			berkeadilan		Kencana Desa Wetonwetan Kec. Puring, Pos PAUD Harapan Nusa Desa Bumirejo Kec. Puring, TK Tunas Bangsa Desa Arjosari Kec. Adimulyo, Pos PAUD Mawar Sakti Desa Banyurata Kec. Adimulyo, Pos PAUD Dini Kusuma Desa Kabuaran Kec. Prembun. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) Pos PAUD Bangun Indah Desa	Paket	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Argopeni Kec.Kebumen, RA Nurul Islam Desa Kawedusan Kec. Kebumen, Pos PAUD Cempaka Indah Desa Karangsari Kec. Kebumen, TK Pertiwi 14.07.02 Desa Lundong Kec.Kutowinangun. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Lestari Desa Banjurmuka Dan Kec.Buluspe- santren, Pos PAUD Setia Bhakti Desa Tambakmulyo Kec. Puring,	Paket	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pos PAUD Ngesti Siwi Desa Waluyorejo Kec. Puring, TK Akbar PGRI Desa Wonosari Kec. Kebumen, Pos PAUD Mutiara Hati Desa Kalirejo Kec. Kebumen, Pos PAUD Putra Harapan Desa Candi Kec. Karanganyar. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Perintis Bangsa Desa Peneket Kec. Ambal, Pos PAUD Flamboyan Desa Singosari Kec.	Paket	9	9	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Ambal, Pos PAUD Lestari Desa Entak Kec. Ambal, Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Gondanglegi Kec. Ambal, Pos PAUD Mekar Melati Desa Kaibon petangkuran Kec. Ambal, Pos PAUD Sido Asih Desa Kenoyojayan Kec. Ambal, Pos PAUD Pelita Harapan Desa Benerkulon Kec. Ambal, TK Melati Desa Benerkulon Kec. Ambal, TK Harapan Mulya						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Desa Pucangan Kec. Ambal. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Tarbiyatul Athfal Desa Karangsari Kec.Kutowinangun, TK Pertiwi 14.07.04 Desa Karangsari Kec.Kutowinangun, Pos PAUD Ibu Pertiwi Desa Geblug, Kec. Buayan, TK Pertiwi 14.25.06 Desa Geblug Kec. Buayan, TK Ar Rahmah Desa Nogoraji Kec. Buayan, Pos PAUD Kenanga Desa	Paket	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rogodadi Kec. Buayan, KB Ibu Pertiwi Desa Geblug Kec. Buayan, Pos PAUD Permata Bunda Desa Jintung Kec. Ayah. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Islam Bhakti Ibu Desa Ambalresmi Kec. Ambal, Pos PAUD Sanggar Pertiwi DesaKlepusanggar Kec. Sruweng, TK Pertiwi 14.06.15 Desa Kloposawit Kec. Buluspesan-tren, TK Pertiwi 14.06.03	Paket	9	9	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Desa Setrojenar Kec. Buluspesan-tren, TK Pertiwi 14.06.04 Desa Brecong, Kec Buluspesantren, TK PGRI Tunas Rahayu Desa Brecong Kec.Buluspesan-tren, TK Aisyiyah BA Desa Banjurmu- kadan Kec. Buluspesantren, TK PGRI Mardisiwi Desa Banjurpasar Kec. Buluspeantren. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Islam Bhakti Ibu Desa Ambalresmi	Paket	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kec. Ambal, TKIT Ibnu Abbas Desa Kawedusan Kec. Kebumen, KB Bina Insani Kel. Kebumen Kec. Kebumen, Pos PAUD Kasih Ibu 2 Kel. Selang Kec. Kebumen, KB Cempaka Putih Kel. Kebumen Kec. Kebumen, Pos PAUD Larasati 2 Desa Mengkowo Kec. Kebumen, KB Permata Bunda Desa Kutosari Kec.Kebumen, TK Nurul Iman Desa Kembaran Kec. Kebumen, Pos PAUD Melati Kel. Bumirejo Kec.Kebumen.						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Lestari Desa Entak Kec. Ambal, TK Melati Desa Ambalkebrek Kec. Ambal, Pos PAUD Lentera Nusantara Desa Blengorkulon Kec. Ambal, TK Kuncup Mekar Desa Sumberjati Kec. Ambal, TK Mekarsari Desa Ambalresmi Kec. Ambal, Pos PAUD Permata Hati Desa Mangunranan Kec. Mirit, Pos PAUD Harapan Bunda	Paket	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Desa Kertodeso Kec.Mirit. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Pancasila PGRI Kel. Panjatan Kec. Karanganyar, TK Pertiwi 14.13.17 Desa Krakal Kec. Alian, TK Pertiwi 14.09.02 Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno, TK Pertiwi 14.09.07 Desa Soka Kec. Poncowarno, Pos PAUD Umbul Mulyo Desa Karangtengah Kec. Poncowarno, TK Pertiwi 14.06.08 Desa Kloposawit Kec. Buluspesan-tren.	Paket	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK PGRI Nurul Iman Desa Ayamputih Kec.Buluspesan-tren, TK Utami PGRI Desa Maduretno Kec. Buluspesan-tren, TK Puspita Harum PGRI Desa Ambalkumolo Kec. Buluspesantren, Pos PAUD Larasati 2 Desa Mengkowo Kec. Kebumen, TK Pertiwi 14.06.14 Desa Ampih Kec. Buluspesantren, TK Lestari I PGRI Desa Waluyo Kec.Buluspesan-tren,	Paket	11	11	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pos PAUD Wiji Asih Desa Muktisari Kec. Kebumen, Pos PAUD Anggrek Desa Kalijirek Kec. Kebumen, KB Putra Dharma Desa Sinungrejo Kec. Ambal						
					Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (DAK) : TK Tarbiyatul Masyitoh Jogosimo Kec. Klirong	Paket	1	1	100		
					Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (DAU) : KB Tunas Bangsa Desa Banjarejo Kec. Kuwarasan, TK Permata Hati	Paket	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					PGRI Desa Banjarejo Kec. Puring, TK Pertiwi PGRI Desa Krandegan Kec. Puring, PP Yudha Harapan Desa Seboro Kec. Sadang, PP Pelita Harapan Desa Cangkring Kec. Sadang, TK Pertiwi 14.19.14 Desa Glontor Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.01 Desa Kebakalan Kec.Karanggayam, TK Pertiwi 14.191.12 Desa Kalibening Kec. Karanggayam Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(DAU) : PP Anggrek Desa Logandu Kec. Karanggayam, KB Putra Giri Harapan Desa Giripurno Kec. Karanggayam, PP Mutiara Bunda DesaSendangda-lem Kec.Padureso, PP Al Barokah Desa Kritik Kec. Petanahan, KBIT Ibnu Abbas Kel. Bumirejo Kec.Kebumen, PP Nilna Muna Desa Kaliwungu Kec. Klirong	Paket	7	7	100		
					Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (DID)	Paket	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Penyelenggara An Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga PAUD negeri dan swasta yang dibina	Lembaga	1.152	1.152	100		
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	31.273	31.273	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	e Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang di monev, evaluasi Kepala dan Pengawas TK yang dievaluasi	Lembaga	68	68	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	f Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi +	orang orang	2.176 2.473	2.176 2.473	100 100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahtera	g Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Lembaga	27	27	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an masyarakat yang berkeadilan								
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	h Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD negeri dan swasta yang dibina	Lembaga	1.152	1.152	100		
				4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang terkelola	%	100	100	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi	a Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung/ ruang kelas/ ruang guru Pendidikan Non Formal/	Unit	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kesetaraan (SKB)						
				b. Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Non formal / kesetaraan	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang difasilitasi dan evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Anak	3.465	3.465	100		
				c. Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang difasilitasi akreditasi, lembaga dan penguatan program bindikel.	Lembaga	144	144	100		
					Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang difasilitasi akreditasi, lembaga	Satuan Pendidik	61	61	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan penguatan program bindikel.						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM	Lembaga	8	8	100		
				e. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	96	96	100		
					Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM	Lembaga	16	16	100		

2) Permasalahan

a) Angka partisipasi sekolah jenjang PAUD dan disabilitas masih perlu ditingkatkan karena masih relatif rendah.
b) Ketercukupan jumlah pendidik ASN, distribusi, dan mutu tenaga pendidik masih kurang.
c) Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan karena tingkat kerusakan yang belum sepenuhnya dapat rehabilitasi.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Mengoptimalkan kinerja bunda PAUD dan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mendorong partisipasi sekolah jenjang PAUD dan disabilitas.
b) Mengusulkan penambahan pendidik ASN serta mengoptimalkan kinerja pendidik yang ada.
c) Efektifitas ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas sarpras pendidikan dan mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan pendidikan adalah 116,84%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 101,97%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023		TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	CAPAIAN	
1. Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kebumen, 2022

Indikator kinerja urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga meliputi persentase capaian SPM Pendidikan, persentase organisasi pemuda

yang aktif, dan persentase prestasi olahraga. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal (Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022). SPM Bidang Pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen meliputi 4 (empat) jenis layanan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Menengah Pertama menggunakan indikator jumlah anak 12-15 tahun yang tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra. Layanan Pendidikan Kesetaraan menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun Renstra.

Persentase capaian SPM Bidang Pendidikan secara kumulatif di tahun 2023 sebesar 100,68%. Dengan rincian pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini (umur 5-6 tahun) sebesar 101,02%, Pendidikan Dasar umur 7-12 Tahun sebesar 103,92%, Pendidikan Dasar umur 13-15 Tahun sebesar 97,80%, dan Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun sebesar 100%. Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen usia 5-6 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 5-6 tahun ada di SD/MI dan sudah menyelesaikan jenjang PAUD). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun ada di SMP/MTs/sederajat dan sudah menyelesaikan jenjang SD/MI/sederajat). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar jenjang SD/MI/sederajat (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun ada di

SMP/MTs/sederajat dan sudah menyelesaikan jenjang SD/MI/sederajat). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 13-15 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar setingkat SMP/MTs/sederajat (angkanya 97,80 kurang dari 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs/sederajat atau tidak menyelesaikan pendidikannya di jenjang tersebut). Faktor penyebab penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah, pernikahan di usia dini, sebagian penduduk usia sekolah yang ada di pondok pesantren tidak bersekolah, dan faktor kemiskinan. Selanjutnya capaian untuk layanan pendidikan kesetaraan capaiannya 100%, sesuai target yang ditetapkan.

Sebagai pembanding capaian kinerja yang telah disebutkan diatas, diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah anak sekolah yang menerima Program Indonesia Pintar 2023 tingkat Sekolah Dasar sebanyak 19.037 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama 3.354 siswa. Sementara jumlah siswa miskin yang menerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) Kelas Akhir tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.000 siswa dan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.000 siswa.

2. Urusan Kesehatan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (khusus untuk Peningkatan Pelayanan BLUD);
e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	**Kesehatan**	**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				A Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	6	6	100		
				B Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangannya	Orang	2.000	2.000	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Orang	58	58	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	6	6	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					dan Penggandaan						
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas luar daerah terlaksana	Kali	25	25	100		
				g Penyelenggaraan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pendukung arsip	Paket	2	2	100		
				4 Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	130	130	100		
				a Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang	130	130	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				dan fungsi	berdasarkan tugas dan fungsi						
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	18	18	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur terbeli	Unit	8	8	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	10	10	100		
				6 Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	138	138	100		
				a Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	30	30	100		
				b Pemeliharaan mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	Unit	81	81	100		
				c Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah unit Peralatan dan	Unit	23	23	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				lainnya	Mesin Lainnya terpelihara (PC, Laptop, Printer, Scanner, Kabel), jumlah unit peralatan mesin lainnya (RS Prembun)						
				d Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	Unit	4	4	100		
				8 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	Keg	4	4	100		
				a Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan Pelayanan BLUD (Operasional BLUD DINKES, BLUD RSDS, BLUD RS PREMBUN, BLUD PUSK)	Keg	4	4	100		
				B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	Paket	35	35	100		
				a Pembangunan Puskesmas	Jumlah paket pembangunan Pusk	Paket	1	1	100		
				b Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah paket pembangunan faskes	Paket	5	5	100		
				d Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah paket rehabilitasi	Paket	3	3	100		
				g Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah paket Pengembangan Rumah Sakit	Paket	1	1	100		
				h Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	Jumlah paket Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Paket	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kesehatan	Pelayanan Kesehatan						
				i Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	4	4	100		
				j Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Paket Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	2	2	100%		
				k Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	2	2	100%		
				2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan Kesehatan utk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	%	100%	100%	100%		
				a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang dilayani sesuai standar	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100		
				c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase BBL dilayani sesuai standar	%	100	100	100		
				d Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pely balita sesuai standar	%	100	100	100		
				e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100		
				f Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelayanan usia produktif sesuai standar	%	100	100	100		
				g Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase usia lanjut dilayani sesuai standar	%	100	100	100		
				h Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	persentase penderita hipertensi dilayani	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Hipertensi	sesuai standar						
				i Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase penderita DM dilayani sesuai standar	%	100	100	100		
				j Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase pelayanan ODGJ sesuai standar	%	100	100	100		
				k Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	prosentase pelayanan orang terduga TB dilayani sesuai standar	%	100	100	100		
				l Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	prosentase pelayanan orang beresiko terinfeksi HIV dilayani sesuai standar	%	100	100	100		
				m Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	persentase KLB ditangani dalam waktu < 24 jam	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				n Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesh	Keg	3	3	100		
				o Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita stunting	%	<14	9,87	100%		
					Persentase Kasus Gizi Buruk	%	<0,02	0,05	40%	Adanya penyakit penyerta pada balita, BBLR, Pola asuh, pemenuhan gizi di rumah tangga belum menjadi prioritas anak Balita	Peningkatan kualitas surveilans gizi, pencega-han kurang gizi pada ibu hamil, peningkatan PHBS, Kelas Bumil dan Balita terkait pola asuh dan pembe-rian makan (PMBA) yang benar, meningkatkan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
											pengetahuan ibu balita tentang pentingnya pemenuhan zat gizi pada anak balita.
				p Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelayanan kesorga	Lokasi	35	35	100		
				q Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Capaian desa STBM	%	18	18	100		
				r Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskes-mas	35	35	100		
				s Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	Keg	6	6	100		
				t Pengelolaan Upaya	Jumlah Kegiatan	Keg	3	3	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kesehatan Khusus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus						
				u Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita DBD ditemukan dan ditangani	%	100	100	100		
				v Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	%	91	96,76	106,33	Komitmen pimpinan daerah melalui peningkatan dukungan anggaran terhadap capaian UHC 95%.	
				w Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi	Keg	10	10	100		
				x Operasional pelayanan RS	Jumlah pegawai Non PNS dan THL yang mendapatkan gaji	Orang	343	343	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				y Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi	Puskes-mas	35	35	100		
				z Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kegiatan investigasi (KIPI dan obat massal)	Keg	6	6	100		
				3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	%	100	100	100		
				a Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumentasi/publikasi data dan informasi tentang kesehatan	Dokumen	2	2	100		
				C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				1 Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	Dokumen	2	2	100		
				a Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dok perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM Kesehatan	Dokumen	2	2	100		
				2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab / kota	orang	100	100	100		
				a Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	Keg	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				D PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100	100	100		
				1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian Izin dan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal (UMOT)	Dokumen	100	100	100		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berizin yang diawasi	Lokasi	135	135	100		
				2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sebagai izin Produksi untuk makanan	Dokumen	259	259	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT						
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Diawasi dan Dikendalikan serta Ditindaklanjuti	Lokasi	259	259	100		
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	95,20	96,5	101,37	Keberhasilan PHBS dikarenakan adanya peningkatan kepesertaan JKN karena	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										adanya komitmen pemerintah daerah dalam capaian UHC	
				1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100		
				a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	15	15	100		
				2 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kabupaten/ Kota	Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
				a Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga sehat	%	95,20	96,5	101,36	Keberhasilan PHBS dikarenakan adanya peningkatan kepesertaan JKN sebagai bentuk adanya komitmen pemerintah daerah dalam capaian UHC	
				3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				a Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	50,58	60	118,62	Peningkatan dukungan dana desa untuk kegiatan desa siaga.	

2) Permasalahan

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 capaian kinerja program urusan kesehatan secara keseluruhan telah mencapai target. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan adalah angka kejadian gizi buruk yang masih di atas target sebesar 0,05% (45 anak balita) dari target <0,02%. Penyebab kejadian gizi buruk masih didominasi karena penyakit bawaan atau penyekit penyerta.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Pada permasalahan gizi buruk langkah yang dapat ditempuh di antaranya adalah rawat bersama dengan dokter sesuai penyakit penyerta, pendampingan pemberian makanan tambahan berbahan lokal dari berbagai sumber dana, pendampingan pola asuh anak terutama pada balita rentan dan penanganan sesuai kondisi sasaran.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan kesehatan adalah 100,27%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
b) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Angka Harapan Hidup	tahun	73,70	73,70	73,83	100,18	74
2. Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	97,54	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Tabel di atas menunjukkan indikator kinerja utama urusan kesehatan dapat tercapai sesuai target. Tetapi masih ditemukan permasalahan Persentase kasus Gizi Buruk tercapai (0,05%) dari target 0,02%. Permasalahan gizi buruk dan balita *stunting* dipengaruhi oleh bermacam hal seperti masalah kesehatan adanya penyakit penyerta pada balita, bayi lahir dengan berat badan kurang, masalah pengetahuan masyarakat seperti pola asuh dan pemberian makanan balita kurang tepat serta peningkatan kualitas surveilans gizi sehingga semakin banyak ditemukan kasus-kasus baru. Pada saat yang sama, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) akan lebih cenderung mengalami *stunting*, atau memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka.

Deteksi dini *wasting* anak adalah kunci keberhasilan pencegahan dan pengobatan. Meningkatkan pendekatan pencegahan berbasis bukti untuk mengatasi balita *stunting* dan *wasting* pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati *wasting.* Menghasilkan data dan informasi berkualitas tentang balita *stunting* dan *wasting* pada anak. Meningkatkan akses ke komoditas esensial yang diproduksi secara lokal untuk perawatan *wasting* anak. Meningkatkan pelayanan gizi untuk anak-anak dan keluarga yang rentan, termasuk pemantauan pertumbuhan, distribusi gizi mikro, dukungan bagi para ibu untuk pemberian makan bayi dan anak secara memadai, dan penapisan serta perawatan anak balita karena gizi buruk.

Upaya yang sudah dilakukan dalam menanggulangi masalah gizi, salah satunya dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:

a) penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan melalui kelas ibu balita.
b) perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
c) perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
d) peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
e) peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan dan ibu hamil dan menyusui.

Percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) rembug *stunting*

b) kampanye kesehatan;

c) advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;

d) dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;

e) pelatihan bagi kader dan ibu balita;

f) intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi;

g) intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan;

Tabel 3. 5 Data Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Gizi Buruk
1.	Ayah	1
2.	Buayan	3
3.	Puring	5
4.	Petanahan	4
5	Klirong	0
6.	Buluspesantren	0
7.	Ambal	3
8.	Mirit	4
9.	Bonorowo	3
10.	Prembun	0
11.	Kutowinangun	1
12.	Alian	4
13.	Padureso	1
14.	Poncowarno	0
15.	Kebumen	3
16.	Pejagoan	0
17.	Sruweng	0
18.	Adimulyo	0
19.	Kuwarasan	2
20.	Rowokele	2
21.	Sempor	2
22.	Gombong	3
23.	Karanganyar	1
24.	Karanggayam	0
25.	Sadang	2
26.	Karangsambung	1
JUMLAH		45

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA);

c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
e) Program Penataan Bangunan Gedung;
f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
h) Program Penyelenggaraan Jalan;
i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG	1	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	112,72	112,72	target pengadaan barang daerah adalah 32 unit, dengan realisasi 65 unit, karena adanya penambahan anggaran.	
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	17	17	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN mendapatkan gaji dan Tunjangan	Bulan	12	12	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Bulan	12	12	100		
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	paket	1	1	100		
				a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	paket	1	1	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	kegiatan	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	kegiatan	2	2	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	unit	32	65	203.13	target pengadaan barang daerah adalah 32 unit, dengan realisasi 65 unit, karena adanya penambahan anggaran.	
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	65	65	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	bulan	12	12	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	12	12	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor DPUPR yang layak fungsi	paket	1	1	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80	76,31	98,39	1 Adanya kejadian bencana yg menyebab-kan kerusakan jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi tidak baik. 2 Adanya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra	Diusulkan di tahun berikutnya

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	Unit	1	1	100		
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	1	1	100		
				b Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	unit	1	1	100		
				c Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev SDA yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	kegiatan	7	7	100		
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	7	7	100		
				b Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT yang terbangun	paket	13	13	100		
				c Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan	Lokasi	1	1	100		
				d Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang direhabilitasi	daerah irigasi	13	13	100		
				e Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah daerah irigasi yang terpelihara	daerah irigasi	18	18	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Jaringan Irigasi Permukaan							
				f Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT terpelihara	Lokasi	1	1	100		
				g Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Komir/P3A/Petugas Alokasi Air yang Di Koordinasi	kegiatan	30	30	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	21,25	24,14	113,60	Adanya bantuan DAK yang semula diasumsikan hanya untuk 86.319 SR, tetapi dana DAK dapat mengcover 86.510 SR, atau terjadi penambahan 191 SR	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani	SR	86.319	86.510	100,32	adanya bantuan DAK yang semula diasumsikan hanya untuk 86.319 SR, tetapi dana DAK dapat mengcover 86.510 SR, atau terjadi penambahan 191 SR	
				a Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terbangun	lokasi	28	26	92,86	Terdapat 2 (dua) Lokasi Pamsimas yang tidak dikerjakan karena Kebumen tidak mendapatkan program Pamsimas	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				b Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	lokasi	13	13	100		
				c Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah pelatihan KP SPAM	Kegiatan	1	1	100		
				d Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terpelihara	lokasi	4	4	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	17,04	16,19	95,01	1 Adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan drainase mengalami longsor dan kebocoran drainase 2	Diusulkan di tahun berikutnya

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
										Adanya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saluran drainase yang dipelihara / direhabilitasi/ dibangun	Lokasi	14	14	100		
				a Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/ dibangun	Lokasi	12	12	100		
				b Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terbangun	Lokasi	2	2	100		
				c Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang direhabilitasi	Lokasi	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				d Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	6	6	100		
				E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	81,14	80,81	99,59	Pembangunan gedung yang bukan aset Pemda tidak masuk perhitungan kinerja. (Pembangunan,rehabilitasi gedung pada tahun 2023 lebih banyak dilakukan untuk gedung-gedung milik instasi vertikal)	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Capaian Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	81,14	80,81	99,59	Pembangunan gedung yang bukan aset pemda tidak masuk perhitungan kinerja	
				a Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Penilik Bangunan dalam Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG	pemohon	400	437	109,25	Jumlah pemohon yang semula ditargetkan 400, Adapun realisasi penerimaan permohonan IMB mencapai 437 pemohon. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				b Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/ kota yang terbangun	kegiatan	1	1	100		
				c Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada semua instansi pemerintah Kabupaten Kebumen *Screen reader support enabled*	unit	9	9	100		
				d Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen	Kegiatan	9	9	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				e Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen	unit	100	100	100		
				f Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang terpelihara	unit	7	7	100		
				F PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,91	13,91	100		
				1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	10	10	100		
				a Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota							
				b Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/ kelurahan	zak	153.803	152.309	99,03	Adanya lokasi yang tidak siap swadaya	Pelaksanaan verifikasi yang lebih akurat
				G PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	76,23	73,96	97,02	1 Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan 4 yang disebabkan oleh bencana alam dan adanya kendaraan ODOL (Over Dimension/Overloading) untuk menyelesai-	Mengajukan usulan penganggaran baik melalui APBD,DAK dan Banprov

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
										kan proyek jalan nasio-nal dan rehabilitasi jaringan irigasi kewe-nangan pusat DI.Wadaslin-tang dan DI.Sempor yang melalui jalan kabupaten menyebab-kan Kerusak-an Jalan Kabupaten 2 Adanya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada Renstra	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang tertangani	Km	40	48,31	120,78	Adanya bantuan Provinsi dan DAK	
				a Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	18	18	100		
				b Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan	lokasi	1	1	100		
				c Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan	dokumen	1	2	200	Pemecahan dokumen Jalan dan Jembatan	
				d Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang terbangun	km	2,8	2,83	100,99	Adanya bantuan Provinsi	
				e Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan menuju standar	km	6,5	10	153,79	Adanya bantuan provinsi	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				f Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala	km	9,50	14,07	148,10	Adanya tambahan anggaran pada perubahan	
				g Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin	km	21,20	21,42	101,03	Adanya tambahan anggaran pada perubahan	
				h Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	unit	1	1	100		
				i Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	unit	3	3	100		
				j Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	unit	3	3	100		
				k Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	unit	1	1	100		
				l Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	paket	36	36	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				H PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	50,15	50,15	100		
				1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan	1	1	100		
				a Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah kegiatan yang diadakan	Kegiatan	1	1	100		
				2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota	kegiatan	1	1	100		
				Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				H PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,25	91,25	100		
				1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100		
				a Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				b Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan	kegiatan	27	27	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RTRW dan RRTR yang dilaksanakan						
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW yang terlaksana	kegiatan	12	12	100		
				b Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR yang terlaksana	Kegiatan	12	12	100		
				c Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait penataan ruang kepada masyarakat yang terlaksana	kegiatan	3	3	100		
				3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	dokumen	120	312	260	Penambahan jumlah penerbitan dokumen pemanfaatan ruang	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen KRK yang tersusun	dokumen	120	312	260	Penambahan jumlah penerbitan dokumen KRK	
				b Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang terupdate	%	100	219	219	Updating informasi tata ruang	
				4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	kegiatan	12	12	100		
				a Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi TKPRD yang terlaksana	kegiatan	12	12	100		

2) Permasalahan

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap memiliki target pada Tahun 2023 yaitu 76,23 % dan realisasinya masih dibawah target yaitu 73,96%, hal ini disebabkan karena Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan IV yang disebabkan oleh bencana alam dan adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension / Overloading*) untuk menyelesaiakan proyek jalan nasional dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat DI.Wadaslintang dan DI.Sempor yang melalui jalan kabupaten menyebabkan Kerusakan Jalan Kabupaten dan Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.

b) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik memiliki target pada tahun 2023 yaitu 80% dan realisasi baru mencapai 76,31% atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan irigasi mengalami longsor dan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.

c) Persentase drainase dalam kondisi baik memiliki target 17,04% pada tahun 2023, sedangkan realisasi 16,19% atau dengan capaian 95,01% hal tersebut disebabkan karena adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan drainase mengalami longsor dan kebocoran drainase serta ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.

d) Persentase pelayanan air minum sudah memenuhi target di tahun 2023 yaitu terealisasi 24,14% dari target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 21,25%, angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum sampai dengan Tahun 2023, dimana realisasi SPM mencapai 100%.

e) Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2023 dengan capaian 99,59% atau realisasi 80,81% dari target 81,14%. Hal tersebut disebabkan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pada tahun 2023 lebih banyak dilakukan terhadap gedung-gedung instansi vertikal.

f) Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani dengan target 13,91%, terealisasi 100%. Indikator tersebut mengampu 2 (dua) sub yaitu perencanaan bidang Cipta Karya baik SPAM, gedung dan bantuan semen ke tingkat desa/kelurahan.

g) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sudah memenuhi target RPJMD tahun 2023 yaitu 91,25% dan realisasi tahun 2023 yaitu 91,25%.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
b) Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
c) Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
d) Pelaksanaan verifikasi bantuan hibah semen yang lebih akurat agar tepat sasaran
e) Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar desa sangat membantu masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan dimana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 81,2%. Sementara rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 102,04%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Adapun perkembangan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	74,23	76,23	73,96	97,02	85,18
Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	76,31	80	76,31	98,39	87,50
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	16	17,04	16,19	95,01	20,04

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase pelayanan air bersih	%	23,53	21,25	24,14	113,60	25
Persentase Bangunan Gedung pemerintah dalam Kondisi Baik	%	81,14	81,14	80,81	99,59	83,84
Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,91	13,91	13,91	100	15
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	91,15	91,25	91,25	100	91,55

Sumber : DPUPR Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 7 (tujuh) indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah, dengan penjelasan pencapaian target dan realisasi sebagai berikut :

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah 1.017,150 kilometer. Dimana proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 119,820 Km atau sebesar 11,78% yang lokasinya tersebar di 19 wilayah yaitu kecamatan Buayan, Gombong, Adimulyo, Ayah, Puring, Kuwarasan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Petanahan, Klirong, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Bonorowo, Mirit dan Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023

NO.	URAIAN	Kondisi awal	Panjang Jalan (km)	Panjang Jalan (Km)
		2021	2022	2023
1	Kondisi Baik	365,191	292,179	470,620
2	Kondisi Sedang	337,400	414,841	281,665
3	Kondisi Rusak Ringan	124,364	162,026	145,045
4	Kondisi Rusak Berat	133,403	89,312	119,820
5	Jalan secara keseluruhan	960,358	960,358	1.017,150
Proporsi Kondisi Baik (%)		38,027	30,242	46,27
Proporsi Kondisi Sedang (%)		35,133	43,405	27,69
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		12,950	16,871	14,26
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		13,891	9,30	11,78

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2023

Dengan bertambahnya panjang jalan kewenangan kabupaten pada tahun 2023 menyebabkan beban kerja yang semakin meningkat Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023 adalah sepanjang 752,29 kilometer atau mencapai sebesar 73,96%. Kondisi ini mengalami peningkatan sepanjang 45.27 Km dari tahun 2022 yang hanya 709,180. dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 panjang 702,591 Kilometer atau mencapai 73,64% juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk target DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2022 sebesar 74,23%.

b) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang saluran irigasi sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten Kebumen yaitu 186.105 m dengan luas sasaran daerah irigasi 12.260 Ha. Adapun data panjang saluran irigasi sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
1	Irigasi Teknis Sekunder	M	184.418	186.105	186,105
2	Irigasi Kondisi Baik	%	75,17	76,31	78,71
3	Irigasi Kondisi Sedang	%	1,55	1,51	1,44
4	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	%	1,23	1,23	1,17
5	Irigasi Kondisi Rusak Berat	%	22,04	20,95	18,67

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2023

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2023 yaitu 78,71% dengan target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 80,00%, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 76,31%. Sedangkan untuk kinerja DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 87,50%. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dibutuhkan kinerja yang optimal dari semua pihak serta dukungan anggaran dari pemerintah. Adapun kendala tidak tercapainya target disebabkan adanya beberapa titik bendungan dan saluran irigasi mengalami kerusakan dikarenakan tingginya curah hujan serta adanya refocusing penganggaran pada tahun 2023.

c) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Panjang drainase keseluruhan sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yaitu 1.032,85 km. panjang tersebut meliputi panjang drainase jalan kewenangan kabupaten sesuai SK jalan, drainase sekunder, drainase perkotaan dan panjang drainase kewenangan kabupaten sesuai SK Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep./2016, Tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Kebumen. Realisasi drainase dalam kondisi baik 16,19% atau memiliki capaian 95,01% dari target pada tahun 2023, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya 16%. Beberapa penyebab tidak tercapainya target yaitu adanya bencana mengakibatkan drainase mengalami kerusakan karena daya tampung yang berlebihan dan adanya refocusing anggaran pada tahun 2023.

d) Persentase pelayanan air bersih

Pelayanan air bersih di kabupaten Kebumen oleh PDAM, SPAM Perdesaan dan Sumber Air lainnya. Namun dalam penghitungan capaian pelayanan air bersih untuk rumah tangga hanya memperhitungkan saluran perpipaan, sehingga untuk capaian tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

INDIKATOR PROGRAM	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	Sambungan s/d Tahun 2023	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI		JUMLAH = (4)+(5)	CAPAIAN= (6): (2)x100%
			PDAM	SPAM PERDESAAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2023	1.409.951	85.044	141.320	198.856	340.176	24.14%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2023

e) Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik

Menurut data RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kebumen data gedung pemerintah kabupaten kebumen 297 unit, pada tahun 2023 memiliki target 241 unit atau sekitar 81,14% dari keseluruhan. akan tetapi realisasi pada tahun 2023 hanya 80,81% dengan capaian 99,59%. hal

tersebut dikarenakan adanya refocusing dan pembangunan pada tahun 2023 untuk instansi vertikal.

f) Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertangani

Persentase bangunan dan lingkunganya memiliki rumus perhitungan yaitu jumlah bangunan dan lingkungan yang ditangani dengan DED / jumlah bangunan dan lingkungan yang membutuhkan DED x 100%. Capaian dari indikator tersebut yaitu 100% sesuai dengan target, dan indikator tersebut juga mengakomodir usulan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran DPRD tentang hibah semen.

g) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Realisasi pada tahun 2023 memenuhi target yaitu 91,25% atau dengan capaian 100%. tetapi kondisi ini belum menggambarkan kondisi riil 2021 dikarenakan untuk update kesesuaian penataan ruang masih menunggu update data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Pengembangan Perumahan ;
b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
c) Program Kawasan Permukiman
d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 11 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		A PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	Lokasi	26	26	100		
				a Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan dan Identifikasi Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	26	26	100		
				2 Kegiatan Pembangunan dan	Jumlah rumah korban bencana	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	yang direhabilitasi / direlokasi						
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengu-rangan Penganggur an Berbasis Pembangun an Perdesa an	a Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direloka si di Kabupaten Kebumen: Desa Kedunggong Kec. Sadang sebanyak 4 Unit (3 Rehabilitasi, 1 Relokasi) , Desa Kali gending, Kec Karangsambung sebanyak 2 Unit (Relokasi), Desa Peniron Kec. Pejagoan sebanyak 1 Unit (Relokasi), Desa Kedawung Kec. Pejagoan	Unit	11	11	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sebanyak 2 Unit (Relokasi), Desa Jemur Kec. Pejagoan sebanyak 1 Unit (Rehabilitasi), Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno sebanyak 2 unit (Rehabilitasi), Desa Blater Kec. Ponowarno sebanyak 1 Unit (Relokasi) Desa Sidototo Kec. Padureso sebanyak 1 Unit (Relokasi), Desa Kalijering Kec. Padureso sebanyak 2 Unit (Relokasi), Desa Pesuningan Kec. Prembun sebanyak 1 Unit (Relokasi), Desa Sekarteja Kec.						

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Adimulyo sebanyak 1 unit (Relokasi), Desa Sampang Kec. Sempor sebanyak 3 Unit (Relokasi).						
				B PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganankawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	15,94	16,70	104,777	Target penanganan kumuh sudah tercapai di tahun 2022 sebesar 16,70% karena mendapat-kan alokasi DAK.	
				1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Ha	7,5	2,16	28,80	Anggaran Tahun 2023 refocusing anggaran sehingga hanya dapat	Mengupaya-kan usulan penanganan kawasan kumuh dengan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ha						menangani 4 desa dan 3 kelurahan kumuh dari rencana 6 desa kumuh dan 5 Kelurahan	luasan 15 Ha melalui program DAK Integrasi / Penanganan skala kawasan pada pemerintah pusat, dan berkolabora-si dengan Desa, dalam penanganan kumuh mandiri.
				a Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	11	11	100	Tahun 2023 terjadi refocusing anggaran sehingga hanya dapat menangani 4 desa dan 3	Mengupaya-kan usulan penanganan kawasan kumuh dengan luasan 15 Ha melalui

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										kelurahan kumuh dari rencana 6 desa kumuh dan 5 Kelurahan	program DAK Integrasi / Penanganan skala kawasan pada pemerintah pusat, dan berkolabora-si dengan Desa, dalam penanganan kumuh mandiri.
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	60	67	111,67	Terdapat tambahan laporan kegiatan penanganan kawasan kumuh di 4 Desa dan 3	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Kelurahan (Desa Kalibagor Kebumen, Desa Wonosigro Gombong, Desa Karangke-miri, Karanganyar, Desa Mengkowo Kebumen, Kelurahan Panjer, Kelurahan Kebumen dan Bumirejo.	
				C PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	64,48	62,35	96,70	Tidak semua penerima bantuan siap swadaya	Mengupaya-kan gotong royong dengan keluarga dan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KUMUH							lingkungan masyarakat.
				1 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni tertangani	unit	102	100	98,04	Tidak semua penerima bantuan siap swadaya	Mengupaya-kan gotong royong dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
			Percepatan Upaya Penanggu-langan Kemiskinan dan Pengu-rangan Penganggur an Berbasis Pembangun an Perdesa an	a Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh (unit) (P2MKM 100 unit)	unit	102	100	98,04	Tidak semua penerima bantuan siap swadaya	Mengupaya-kan gotong royong degan keluarga dan lingkungan masyarakat.
				b Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Kec	26	26	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Kesepakatan Kerja sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha						
				D Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase peningkatan akses air limbah aman	%	1,17	2,02	172,65	Peningkatan akses air limbah aman dapat melampaui target karena ada tambahan layanan sedot tinja masyarakat termasuk di wilayah dengan *stunting*	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										tinggi.	
				1 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	Paket	27	29	107,41	Hasil sinkronsasi lokasi dengan pusat mendapat-kan tambahan lokasi pengolahan air limbah domestik untuk desa dengan prevalensi *stunting* tinggi.	
				a Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	29	29	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hunian	yang Menunjang Fungsi Hunian						
				b Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan sub sistem Pengelolaan Setempat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	12	12	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Tahun 2023 ditargetkan sebesar 64,48%, namun hanya terealisasi sebesar 62,35% atau dengan tingkat capaiannya adalah 96,70%. Target tahun 2023 sebanyak 102 unit terealisasi sebanyak 100 unit terdiri dari 96 unit berupa aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran dan 4 unit reguler. 2 unit RTLH yang tidak terlaksana, disebabkan 2 penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria.
b. Untuk Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh alokasi anggaran Tahun 2023 ditargetkan dapat menangani kawasan kumuh seluas 7,5 Ha, namun terjadi refocusing anggaran sehingga hanya dapat menangani kawasan kumuh seluas 2,16 Ha di Desa Panjer Kecamatan Kebumen. Dengan demikian, target penanganan kawasan kumuh seluas 7,5 Ha pada tahun 2023 tidak tercapai atau hanya tercapai seluas 2,16 Ha.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Untuk mengatasi permasalahan pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan dan lahan aman dari bencana sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan di lapangan.
b. Untuk mengatasi permasalahan pada Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh tersebut, dilakukan optimalisasi anggaran yang tersedia sehingga dapat menangani kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen. Selain itu juga dilakukan usulan penanganan kawasan kumuh dengan luasan diatas 15 Ha melalui program DAK Integrasi / Penanganan Kumuh skala kawasan kepada Pemerintah Pusat.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Perumahan dan Permukiman dengan Indeks Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 118,52% dari target 100%. rata-rata capaian kegiatan adalah 86,85%

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kawasan Permukiman diketahui capaian kinerja program sampai dengan Triwulan IV

adalah 16,07% dari target 15,94 % menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 104,77% atau kategori sangat tinggi. Capaian program dan kegiatan urusan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) diketahui capaian kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah 2,02% dari target 1,17% menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 172,65% atau kategori sangat tinggi.

5) Capaian Kinerja Urusan

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha (%)	%	16,07	15,94	16,70	104,77	31,46
2. Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	54,46	64,48	62,35	96,70	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2023

Dalam penanganan kawasan kumuh target tahun 2023 seluas 7,5 Ha namun hanya terealisasi 2,16 Ha. Capaian kinerja Tahun 2023 penanganan kawasan kumuh belum sesuai dengan target, dari rencana 6 desa dan 5 kelurahan menjadi 4 desa dan 3 kelurahan. Upaya yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan pengusulan penanganan kumuh dari program pemerintah provinsi dan pusat.

Data lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen berdasarkan SK Nomor 663/385 Tahun 2020 dan penanganannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 13 Data Lokasi Kawasan Kumuh dan Penanganan s/d tahun 2023

No	Uraian Luas	Penanganan (Ha)			
		2020	2021	2022	2023
1	Luas Permukiman Kumuh	343,27	343,27	343,27	343,27
2	Luas Permukiman Kumuh yang tertangani	25,42	0	0,5	2,16
3	Luas Permukiman Kumuh yang belum tertangani	312,36	312,36	311,86	309,7

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2023

Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/385/2020 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 343,27 Ha, meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kec. Sempor (1 Desa), Kec. Gombong (2 kelurahan dan 3 desa), Kec. Karanganyar (4 kelurahan dan 6 desa), Kec. Sruweng (1 Desa), Kec. Pejagoan (1 Desa), Kec. Kebumen (4 kelurahan dan 13 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Dari luasan kumuh seluas 343,27 Ha yang sudah tertangani dari tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 33,57 Ha. Sehingga sisa luas penanganan kumuh pada akhir tahun 2023 adalah seluas 309,7 Ha.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Adapun sebaliknya rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan luas bangunan serta Kesehatan penghuni.

Berikut data perkembangan cakupan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023 :

Tabel 3. 14 Capaian Penanganan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah	306.885	354.807	354.807	354.807
2	Jumlah rumah layak huni	306.285	328.465	329.912	331.359
3	Jumlah rumah tidak layak huni	600	26.342	24.895	23.266
4	Persentase rumah layak huni	99,80	92,98	92,98	93,4
5	Persentase rumah tidak layak huni	0,20	7,42	7,02	6,6

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan,2023

Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 26.260 unit, sehingga masih tersisa 600 unit yang akan ditangani pada tahun 2021, sehingga persentase rumah layak huni sampai dengan Tahun 2020 adalah 99,80%.

Pada Tahun 2020 dilakukan *updating* data RTLH dengan hasil jumlah rumah sebanyak 354.807 unit dengan jumlah RTLH 39.680 unit, namun setelah dilakukan cross cek dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 terdapat 28.035 unit RTLH yang masuk dalam data DTKS, sehingga persentase rumah layak huni di akhir Tahun 2020 adalah 99,80%. Penanganan RTLH Tahun 2021 adalah 2.293 unit terdiri dari 600 unit sisa database 2014 dan 1.693 unit data Tahun 2020, sehingga sisa jumlah RTLH menjadi 26.342 unit dan persentase rumah layak huni menjadi 92,58%, kemudian penanganan tahun 2022 jumlah 1.447 unit sehingga sisa jumlah RTLH menjadi 24.895 unit dan persentase rumah layak huni adalah 92,98%. Pada Tahun 2023 menangani 1.629 unit sehingga prosentase menjadi 93,4%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penanggulangan Bencana;

b) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program prioritas di atas terbagi di dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		A PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda; Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan; persentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal;	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kegiatan	4	4	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintah-an yang baik dan bersih dan Pencipta an	a Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium PTT dan THL (165 orang) beserta asuransi	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Kondu-sifitas Wilayah	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan, dan Pengawalan	kesehatan dan ketenagakerjaan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Penertiban dan Pengawalan Bupati	Kegiat-an	250	250	100		
				b Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas meningkat keterampilan Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri	orang bulan	60 6	60 6	100 100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				c Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota satlinmas meninggal yang mendapat Santunan	orang	20	20	100		
					Jumlah SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas yang ditingkatkan	orang	49	60	122	Adanya efisiensi anggaran sehingga dapat menambah kuota Satlinmas yang dilatih sebanyak 11 orang	
				d Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru	kegiatan	3	3	100		
				2 Kegiatan Penegakan Peraturan	Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah	kegiatan	3	3	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota						
				a Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	24	24	100		
					Jumlah orang memperoleh sosialisasi/penyuluhan/ pembinaan Perda dan atau Perkada untuk masyarakat/ badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkada	orang	480	480	100		
				b Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda, dan / atau Perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha	kali	36	36	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Peraturan Bupati/Wali Kota							
				c Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan	jenis	18	18	100		
				3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan	orang	10	10	100		
				B PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Persentase kesiapsiagaan Damkar; Persentase Respon time pemadaman kebakaran ; kesiapsiagaan SDM	%	73,08	73,08	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran ;						
				1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan THL Damkar yang terbayar	Bulan	12	12	100		
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam	laporan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					kabupaten/ kota Jumlah Paket pengadaan APD, selang, dan peralatan rescue	paket	1	1	100		
				b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah bulan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	bulan	12	12	100		
				1 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	%	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kecamatan terdata sarana dan prasarana proteksi kebakaran	kecamatan	26	26	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	Persentase kesiapsiagaan Damkar Jumlah anggota	%	73,08	73,08	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kebakaran	Linmas meningkat keterampilan	orang	60	60	100		
					Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah anggota masyarakat dibina dalam penanggulangan kebakaran	orang	60	60	100		
		2 BPBD		C PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kabupaten/Kota							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara kat	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	726.453	726.453	100		
				2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Doku-men	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	200	100		
				c Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan pusdalops dan upah petugas Pusdalops dan EWS (Tsunami, Banjir, Longsor)	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100		
				d Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah paket peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Paket	1	1	100		
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	200	200	100		
				e Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pengelolaan SITANA	Bulan	12	12	100		
					Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan	Dokumen	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana						
				f Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan/Desa	30	30	100		
				g Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	100	100	100		
				h Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	400	400	100		
				3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah bulan Pelaksanaan respon cepat/darurat bencana	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kabupaten/Kota	kabupaten						
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Penyediaan Dapur Umum	Bulan	12	12	100		
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	Orang	244	244	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Evakuasi Korban Bencana						
				4 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2	2	100		
					Jumlah lembaga kebencanaan terfasilitasi penguatan	Kelompok	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah Sekolah Aman bencana yang	Sekolah	15	15	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					dilaksanakan						
				c Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah paket penanganan pasca bencana	Paket	3	3	100		

2) Permasalahan

Pada Urusan Trantibumlinmas beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah:

a) Banyak Perda yang sudah tidak aplikatif dan tidak sesuai perkembangan zaman sehingga sulit diterapkan;
b) Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat terkait Perda dan Perkada yang ada di Kabupaten Kebumen;
c) Kurangnya Penyidik yang ada di Kabupaten Kebumen.

Pada Urusan Trantibumlinmas, pelaksanaan Operasi Trantibum dan Operasi Penegakan Perda yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selalu mengedepankan humanisme, sehingga tidak mengakibatkan dampak negatif / yang merugikan masyarakat / melanggar peraturan. Dengan demikian capaian SPM bidang Trantibumlinmas adalah 100%.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Kebakaran, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama *respon time* kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yang belum terjangkau untuk memenuhi *response time* yaitu wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang dan Padureso dikarenakan belum adanya pos Damkar di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di wilayah wilayah tersebut untuk memenuhi SPM *response time* kebakaran 15 menit.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) melakukan revisi Perda dan Perkada yang sudah tidak aplikatif dan tidak sesuai kondisi saat ini;
b) melakukan sosialisasi secara masif tentang Perda dan Perkada yang ada di kabupaten Kebumen
c) Mengirimkan peserta diklat PPNS;
d) mengalokasikan anggaran untuk mengirimkan peserta diklat PPNS;

Guna mengatasi permasalahan terkait pendataan penduduk di kabupaten Kebumen yang beresiko terdampak langsung akibat bencana maka pada tahun 2023 akan mulai di lakukan pendataan penduduk yang berada di desa- desa, dengan prioritas pada desa yang memiliki risiko tinggi dan sedang.

Dalam hal wilayah-wilayah yang tidak terjangkau respon cepat pemadam kebakaran, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tentang pemadaman bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan, dimana urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Kebumen, diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Demikian juga untuk rata-rata capaian kegiatan juga telah mencapai 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indicator kinerja tercapai 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 16 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2023

Adapun perkembangan capaian kinerja ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikiut:

Tabel 3. 17 Perkembangan Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kebumen Tahun 2022-2023

NO	URAIAN KINERJA	CAPAIAN TAHUN	
		2022	2023
1.	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9750	12.442
2.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	71,59	87,20
3.	Jumlah Pelanggaran Perda	5.525	16.796

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah Persentase Penegakan Perda, dengan target tiap tahun adalah 100% penegakan Perda tertangani. Kinerja tahun 2023 dengan hasil 20 jenis Perda yang ditegakkan dengan rincian 3 Penegakan Perda ditemukan Pelanggaranan sedangkan 17 Penegakan Perda Lainnya tidak ditemukan Pelanggaran dengan rincian Pelanggaran Perda sebagaimana Tabel di bawah ini. Pelanggaran Perda tersebut telah tertangani secara keseluruhan atau dengan capaian 100%.

Tabel 3. 18 Data Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang	Keterangan
1	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	-	-	
2	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA TANDA DAFTAR GUDANG	-	-	-
3	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI	-	-	-
4	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN, MINUMAN DAN IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL	-	-	-
5	NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA	-	-	-
6	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK RESTORAN	-	-	-
7	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN	-	-	-
8	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME	-	-	-
9	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR	-	-	-
10	PERDA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	-	-	-
11	PERDA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	-		-
12	PERDA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	-	-	-
13	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	7 pelanggar	-	-

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang	Keterangan
14	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	-	-	-
15	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	-	-	-
16	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	-	-	-
17	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN	-	-	-
18	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	-	-	-
19.1	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	178 orang	24 orang	18 tempat Hotel/kost/hunian
19.2	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	17 orang	8 orang	1.924 botol miras
19.3	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	7 tempat	-	tempat hiburan malam
19.4	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	43 pelajar	-	operasi pelajar
19.5	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	6 toko	-	2.875 botol tanpa ijin edar
19.6	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	212 orang	-	ODGJ, anak jalanan dan PGOT
19.7	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	15.827 buah reklame	-	Penertiban reklame (spanduk,banner, bendera,baliho)
19.8	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	457 PKL	-	penertiban PKL
20	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	42 Toko	-	-
		16.796	32 pelanggar	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2023

Pelaksanaan kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100

Pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa di kabupaten Kebumen serta peningkatan kapasitas Destana yang telah dilaksanakan sudah sesuai target yang direncanakan namun masih mengalami permasalahan antara lain:

1. Belum siapnya sumber daya manusia untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana, masih ada masyarakat yang memiliki kesibukan lainnya sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan yang bersangkutan berhalangan hadir;
2. Keterbatasan anggaran sehingga program Desa Tangguh bencana tidak sampai dengan penyediaan sarana dan prasaranya;
3. Kwalitas Desa Tangguh belum tercermin dalam pelaksanaan penanggulangan bencana oleh desa, masih tingginya ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten/ BPBD

Solusi atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Meningkatkan program/kegiatan sosialisasi dan pelatihan destana yang telah dilakukan dengan menambah unsur-unsur perwakilan masyarakat serta lebih banyak mengembangkan fasilitator Desa Tangguh Bencana dari Desa;
2. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dengan menyesuaikan kondisi kerawanan bencana pada masing masing desa di Kabupaten Kebumen;
3. Mendorong Desa Tangguh Bencana yang ada untuk saling kerjasama sehingga pada saat terjadi kedaduratan bencana yang bisa ditangani Desa bisa terselesaikan.

6. Urusan Sosial

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Rehabilitasi Sosial;
b) Program Pemberdayaan Sosial;
c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
e) Program Penanganan Bencana; dan
f) Program Pengelolaan Tempat Makam Pahlawan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Sosial	1 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		A PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	%	70	70,51	100,72	Faktor pendorong : adanya Peningkatan kapasitas Karang Taruna yang dilakukan oleh PemKab.	
				1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Keg	3	3	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia danLayan-an Sosial Dasar Masyara-kat	a Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	Orang	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga Karang Taruna yang diberdayakan	Lembaga	3	3	100		
				c Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan	Orang	10	10	100		
				B PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeras-an dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	Orang	10	0	0	Tidak adanya laporan warga negara migran korban tindak kekerasan	Melakukan koordinasi dengan *migran care,*TKSK, Tagana dan masyara - kat serta menyiap kan stok bantuan dan anggaran secara optimal
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara - kat	a Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	Orang	10	0	0	Tidak adanya laporan warga negara migran korban tindak kekerasan	Melakukan koordinasi dengan *migran care*,TKSK, Tagana dan masyara- kat serta menyiap kan stok bantuan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desa/Kelurahan Asal							dan anggaran secara optimal
				C PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	%	100	104,94	104,94	Faktor pendorong : adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintahan desa terkait kelengkapan data dukung penerima manfaat serta melakukan kerjasama dengan lintas sektoral dan lembaga terkait	
				1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	orang	1.535	1.611	104,95	Faktor pendorong : adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintahan desa terkait	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						kelengkapan data dukung penerima manfaat serta melakukan kerjasama dengan lintas sektoral dan lembaga terkait	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (disabilitas terlantar 50 orang, anak terlantar 100 orang, lansia terlantar 100 orang, gepeng 20 orang dan RTM 250 orang)	Orang	520	520	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	Orang	120	120	100		
				c penyediaan sandang	jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang (disabilitas terlantar 50 orang, anak terlantar 100 orang, lansia terlantar 100 orang, gepeng 20 orang)	orang	270	270	100		
				d Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	140	140	100		
				e Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	50	95	190	Faktor pendorong: adanya peran masyarakat dalam memberikan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										informasi, adanya koordinasi lintas sektoral, dukungan pemerintahan desa dan kerjasama dengan panti milik Pemerintah Provinsi Jateng	
				f Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan	Orang	50	80	160	Faktor pendorong: Adanya koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi PPKS	
				2 Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	kegiatan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NAPZA di Luar Panti Sosial	Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	45	45	100		
				b Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan	Orang	140	140	100		
				c Penyediaan sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Singgah Dosaraso)						
				d Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	Orang	100	100	100		
				e Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi	lembaga	1	1	100		
				D PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	cakupan perlindungan jaminan sosial	%	77,25	83,30	107,83	Faktor pendorong : karena perubahan data DTKS yang dinamis sehingga jumlah DTKS berubah-ubah setiap periode sedangkan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										data target yang digunakan adalah DTKS periode 2021	
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	kecamatan	26	26	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Kecamatan	26	26	100		
				b. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah penerima BLT DBHCHT	Jiwa	3.305	3.037	91,89	Adanya calon penerima BLT yang telah terdaftar dalam SK Bupati tetapi	Koordinasi dengan Bagian Hukum untuk

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pindah domisili / ke luar kota	dapat difasilitasi perubahan SK Bupati untuk mengganti kan calon penerima BLT DBHCHT yang pindah domisili dengan calon penerima prioritas berikutnya
					Jumlah Puskesos yang terbentuk	desa	78	78	100		
				E PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten/ kota						
				1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Keg	5	5	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan.	orang	480	480	100		
				b Penyediaan Sandang	jumlah orang korban bencana yang	orang	150	150	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					mendapatkan bantuan sandang						
				c Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah paket Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	paket	3	3	100		
				d Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket penanganan khusus bagi kelompok rentan	paket	2	2	100		
				e Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	orang	150	150	100		
				2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana yang difasilitasi	KSB	4	4	100		
				b Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah taruna siaga bencana yang diberdayakan	orang	26	26	100		
				F PROGRAM PENGELOLA-AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	prosentase TMP yang dikelola	%	100	100	100		
				1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang direhab	Unit TMP	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pengamanan TMPN Kabupaten/Kota	Jumlah orang pengaman TMP	Orang	1	1	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Sosial adalah:

a) Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani :
b) Ada beberapa Penerima Manfaat yang meninggal dunia dan pindah domisili;
c) Data PPKS yang dinamis;
d) Masih didapati PPKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi;
e) Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera;
f) Banyaknya Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani. pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
g) Tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS;
h) DTKS kurang fleksibel untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA;
i) Pembaharuan menu aplikasi oleh Pusdatin tidak disertai dengan sosialisasi ke pengelola DTKS Kabupaten/Kota
j) Kendala dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pusdatin dikarenakan tidak adanya kontak person yang dapat memberikan solusi setiap muncul permasalahan atau komplain.
k) Kabupaten/kota hanya bisa melakukan usulan data, tetapi untuk berhasil atau tidaknya sepenuhnya keputusan Pusdatin Kesos Kemensos RI
l) Masih kurangya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan migran korban tindak kekerasan.
m) Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana
n) Kesulitan mencari relawan yang aktif berperan serta dalam penanggulangan bencana;
o) Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas selama tahun 2023 antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   a) Melakukan pendataan dan pemutakhiran berkala DTKS

b) Dicarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat, seperti melakukan koordinasi dengan BAZNAS dan Sentra
c) melakukan pendataan dan mengeluarkan data KPM yang sudah mampu dari data penerima bantuan sosial
d) Memaksimalkan SDM dan PSKS yang sudah ada dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait
e) Berkoordinasi dengan panti sosial milik pemerintah Provinsi.

2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
   a) Melakukan pengecekan DTKS melalui entry NIK satu persatu di aplikasi dan melaksanakan verval Data Terpadu Jawa Tengah (Provinsi) yang didalamnya terdapat variabel-variabel untuk perangkingan status kesejahteraan sosial
   b) Melaksanakan verval ketidaklayakan untuk menonaktifkan Program Bansos bagi KPM yang sudah mampu, meninggal dan pindah.
   c) Pengelola DTKS Kabupaten/kota selalu memantau grup whatsapp untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran DTKS/Bansos
   d) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota lain
   e) update data secara berkala sesuai jadwal dari Pusdatin Kesos Kemensos RI
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan migran korban tindak kekerasan
   a) Sosialisasi pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana, kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada sekolah dari tingkat PAUD sampai SLTA kawasan pesisir, longsor dan banjir, serta kesiapan logistik dan distribusi logistik ke penyintas.
   b) Sosialisasi tentang permasalahan bencana sosial (korban tindak kekerasan), pemberian layanan kesehatan, pelayanan psikososial dan pelayanan psikologi bagi migran korban tindak kekerasan
   c) Bimtek Tagana meliputi pengenalan karakteristik bencana, PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dan layanan dukungan psikososial dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan sosial adalah 102,24%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 88,11%.Salah satu penyebab belum optimalnya capaian indikato kegiatan karena tidak adanya laporan migran korban tindak kekerasan.

5) Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100
2	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Kebumen, 2023

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian SPM Sosial sebesar 100%, dengan kriteria penilaian Baik

Dari hasil penilaian sendiri/*Self assessment* atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023, menunjukan rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran yang telah ditetapkan adalah 100% (baik).

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk Persentase capaian SPM Sosial tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian SPM Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 capaian SPM Sosial sebesar 99,93%. Adapun hambatan dalam penanganan PPKS tersebut antara lain berupa tingginya angka PPKS dan adanya calon penerima manfaat yang meninggal, serta kurangnya dukungan lingkungan keluarga.

Adapun rincian capaian SPM Sosial dengan formulasi pengukuran persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai standar ditambah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

kabupaten/kota sesuai standar telah mencapai 100% untuk semua indikator SPM urusan Sosial, sebagaimana berikut:

Tabel 3. 22 Persentase capaian SPM Sosial tahun 2023

NO	URAIAN	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti socia	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kebumen, 2023

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penempatan Tenaga Kerja;
b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c) Program Hubungan Industrial.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 23 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENE-NGAH	1 Meningkat-nya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	A PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai"A"	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetens	Jumlah Paket Pelatihan berdasar-kan unit kompetensi	paket	7	7	100		
			Pemulihan Perekonomi-an Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah orang pencari kerja yang mengikuti pelatihan	paket	6	6	100		
				b Sub Kegiatan	Jumlah paket	paket	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	kerjasama dengan LPKS						
				2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	orang	30	30	100		
			Pemulihan Perekonomi-an Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPKS yang terbina A	orang	30	30	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase penempat-an tenaga kerja/ pencari kerja terdaftar	%	25,33	35,21	139	Lowongan tenaga kerja bertambah dan penerimaan tenaga kerja bertambah serta telah melaporkan	
				1 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	2.312	4.355	188,36	1. Penambahan tenaga kerja terserap setelah pelatihan 2. Animo bekerja ke luar negeri bertambah 3. Negara penempatan banyak yg telah dibuka	
			Pemulihan Perekonomi-an Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja Jumlah Kegiatan Pelayanan	Jumlah pencari kerja yang terlayani melalui mekanisme antar kerja	orang	14.000	12.367	88,34	1. Pembuatan kartu kuning melalui aplikasi E-Makaryo milik provinsi, sehingga tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 2. Setelah lulus SMA/SMK tidak membuat kartu	1. Permohonan data ke Disnaker Provinsi 2. Layanan PATRIOT (Pelayanan AK1, Karier, Info loker terpadu) untuk mempermudah mencari informasi loker

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										AK-1 (kartu kuning) 3. Banyak perusahaan sudah tidak lagi mensyaratkan kartu AK-1 untuk melamar	
				b Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah orang Terserapnya tenaga kerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga	Jumlah orang terserapnya tenaga kerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga miskin dan di PH	Orang	30	30	100		
				2 Kegiatane Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungi	orang	2.130	2.722	126,76	Penambahan Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri	
			Pemulihan Perekonomi-an Daerah Berbasis Komoditas dan	a Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah calon PMI atau PMI yang terlindungi	orang	180	180	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
				b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah orang calon PMI yang mengurus paspor	Orang	1.800	2.492	138,444	Penambahan Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri	
				c Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Orang	50	50	100		
				C PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	%	100	150	150	Penyelesaian kasus bertambah	
				1 Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	Kasus	10	15	150	Penyelesaian kasus bertambah	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota							
			Pemulihan Perekonomi-an Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdam-pak pada kepentingan di 1(satu)daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial	Kegiat an	6	6	100		

2) Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dijumpai permasalahan sebagai berikut:

a) Kondisi pencari Kerja setiap tahun rata-rata di atas 11.000 orang, sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak banyak sehingga disparitas antara jumlah lowongan kerja yang harus disediakan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja akan menyebabkan banyak pencari tidak mendapatkan pekerjaan.
b) Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebanding jumlah pertumbuhan angkatan kerja serta rendahnya kompetensi tenaga kerja
c) Minimnya lapangan kerja sampai dengan saat ini tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan
d) Era revolusi industri modern berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan, Era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan lama yang sudah ada.Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara komputerisasi. Oleh karena itu pencari kerja juga harus respon terhadap perkembangan zaman
e) Rendahnya minat bekerja di daerah sendiri dikarenakan UMK rendah.
f) Adanya informasi lowongan pekerjaan baik dalam dan luar negeri lewat media sosial yang kurang dapat dipertanggung jawabkan

3) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja antara lain:

a) Meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Terdapat kebijakan yang mendorong iklim investasi sehingga menarik investor ke Kebumen sehingga banyak tenaga kerja yang diserap.
b) Jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi dan potensi angkatan kerja yang cukup tinggi, Pemkab melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan sekolah dalam upaya mendorong transformasi/ paradigma dalam era sekarang dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ketenagakerjaan melalui rakor dengan kepala sekolah SMA/ SMK/ MA

yang nantinya diimplementasikan dalam kurikulum yang bisa menyediakan kebutuhan tenaga kerja

c) Memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta *Career Development Center* (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi agar berupaya agar alumni dapat bekerja
d) Intervensi pencari kerja dengan kegiatan *mini Job Fair, Job Fair*, serta *Job Canvassing* (mencari lowongan kerja dan memasarkan tenaga kerja) kepada perusahaan serta layanan karir bergerak
e) Fasilitasi rekrut tenaga kerja oleh perusahaan di Dinas Tenaga Kerja
f) Monitoring penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan yang dijalani dengan perjanjian kerja serta kondisi dan kelayakan pekerja di perusahaan tempat bekerja
g) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia dan Balai Latihan Kerja di Provinsi dan Kabupaten
h) Tahun 2023 Pelatihan di BBPVP Medan sebanyak 29 orang
i) Tahun 2023 Pelatihan di BBPVP Makasar sebanyak 11 orang
j) Tahun 2023 pelatihan berbasis Kompetensi di Balatker klampok sebanyak 11 orang
k) Memaksimalkan website dan media sosial (facebook, instagram, twitter dan youtube)
l) Dinas Tenaga Kerja dalam menginformasikan tentang kegiatan Dinas dan layanan kerja secara update melalui Web Bursakerja.kebumen.go.id
m) Inovasi dalam Pelayanan Antar Kerja dengan PATRIOT (Pelayanan AK-1,Karier, Pelatihan dengan info loker ke wilayah)
n) Inovasi Si PEMIKAT (Sinergi Perlindungan PMI Keluarga dan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Stakeholder dalam bekerja keluar negeri
o) Inovasi Gayatri (Gerbang Layanan Terpadu PMI LTSA) memudahkan akses layanan ke luar negeri melalui layanan terpadu satu atap.
p) Inovasi Kalih Pitri K2P3-Klinik Konseling Penyelesaian Permasalahan Perusahaan dengan memanfaatkan website Disnaker Kabupaten Kebumen

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Tenaga kerja diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 129,66%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 134,59%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Hasil pelaksanaan program urusan tenaga kerja adalah capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah peningkatan keterserapan tenaga kerja dihitung dengan rumus % (persentase) jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata ditambah dengan % (persentase) jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan, kemudian dibagi 2, atau lebih jelasnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja} = \frac{\text{\% jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata} + \text{\% jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan}}{2}$$

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja tahun 2023 sebesar 30,66%. Capaian tersebut berdasarkan persentase jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja yang terdata sebesar 35,21% ditambah Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan 26,11% dibagi 2. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 24 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2022	2023
1	Pencaker	15.104	12.367
2	penempatan pencaker	12.459	4.355
3	prosentase penempatan	82,48	35,21
4	Pelatihan	576	448
5	penempatan pelatihan	185	175
6	prosentase penempatan pelatihan	32,11	26,11

Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen, 2023

Pada tahun 2023 Jumlah pengangguran mencapai 5,11%. Angka ini diperoleh dari persentase jumlah angkatan kerja tahun 2023 sejumlah 813.172 orang dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja sejumlah 41.590 orang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
b) Program Perlindungan Perempuan;
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
f) Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 25 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pemberda yaan Perempuan dan Perlin-dungan Anak	DINAS PEMBER-DAYAAN MASYARA-KAT DAN DESA DAN PEMBER-DAYAAN PEREMPU-AN DAN PERLINDU -NGAN ANAK	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.	A PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	cakupan Pengarusutama-an Gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	%	15,63	51,36	328,5 9	belum semua desa/kelurahan dan kecamatan menjadi target cakupan sosialisasi PUG dan PPRG	menambahkan jumlah sasaran sosialisasi dan melakukan sosialisasi dengan dengan jumlah sasaran 30 desa/kelurahan/ kecamatan sekaligus dalam satu kali pertemuan
				1 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelembagaan pengarusutama-an gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Kegiat an	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan	a Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan	Jumlah OPD/kec/desa/ kelurahan yang mendapatkan	instansi	59	263 desa/insta nsi	445,7 6	belum semua desa/kelura han dan	menambahkan jumlah sasaran sosialisasi dan melakukan

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penciptaan Kondusifitas Wilayah	PUG termasuk PPRG	fasilitasi penguatan PUG					kecamatan menjadi target cakupan sosialisasi PUG dan PPRG	sosialisasi dengan dengan jumlah sasaran 30 desa/kelurahan/ kecamatan sekaligus dalam satu kali pertemuan
				2 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyaraka-tanKewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Kegiat-an	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum,	jumlah kelompok organisasi wanita (GOW dan DWP) yang mendapatkan fasilitasi raker, sosialisasi dan pelatihan	Kelomp ok/orga nisasi	36	35	97,22	terdapat 35 kelompok yang telah melaksana-kan sosialisasi dan pelatihan, serta masih	dilakukan pergeseran anggaran menjadi kegiatan evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan rapat persiapan pelaksanaan

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sosial dan Ekonomi						terdapat 1 kelompok yang belum	verifikasi lapangan APE
			Pemenuhan hak perempuan anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak	B PROGRAM PERLINDUNG-AN PEREMPUAN	cakupan program perlindungan perempuan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kegiat-an	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	Jumlah dokumen kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan /TPPO	Doku-men	1	1	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kegiat-an	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	jenis layanan	6	6	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penanganan kasus perempuan korban kekerasan	layanan rujukan	2	2	100		
			3 Peningkatan kualitas perempuan dalam keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga	C PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan program peningkatan kualitas keluarga	%	15,63	20	127,96	belum semua desa basis TKI membentuk pokja Bina Keluarga TKI.	Dibentuknya 4 pokja Bina Keluarga TKI : 2 Kecamatan: Karanggayam dan Buayan, 2 Desa: Jatiroto dan Purbowangi Untuk upaya pemenuhan hak-hak TKI, advokasi keluarga TKI,

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pelatihan-pelatihan keluarga TKI
				1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiat-an	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi peningkatan kualitas keluarga	Kelom-pok	5	5	100		
				D PROGRAM PENGELOLA-AN SISTEM DATA	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				GENDER DAN ANAK							
				1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiat-an	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi data terpilih gender dan anak tingkat kabupaten	Doku men	1	1	100		
				E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	kategori kabupaten layak anak (KLA)	madya	madya	madya	100		
				1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada	jumlah kegiatan pelembagaan PHA pada	Kegiat-an	3	3	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah desa yang mendapatkan forum anak desa	Desa / kec.	52	124	238,46	sebagai pendukung pengembangan kabupaten layak anak	dilakukan pembentukan forum anak pada 124 desa
				2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Kegiat-an	2	2	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota						
			Peningkatan TataKelolaPemerintahan yang baik dan bersih danPenciptaanKondusi-fitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KPAD/K yang terfasilitasi	Kelom-pok	52	52	100		
				F PROGRAM PERLINDUNG-AN KHUSUS ANAK	Cakupan perlindungan khusus anak	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Kegiat an	1	1	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak						
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Paket	1	1	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	keg	2	2	100		
			Kelola Pemerintahan yang	a Sub Kegiatan Penyediaan	jumlah jenis pelayanan	jenis layanan	6	6	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Kasus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pen-dampi-ngan dan pelayan an	2	2	100		
				c Penguatan Dan Pengembanga Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Kegiatan Penguatan Dari Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan	keg	1	1	100		

No	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISA SI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Perlindungan Khusus						
				Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah Kab/Kota	jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yang handal dan terlatih	Lembaga	1	1	100		

2) Permasalahan

Adapun permasalahan yang ada pada Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a) Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak
b) Belum optimalnya peran Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)
c) Masih rendahnya jumlah Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan
d) Masih rendahnya sarana komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak
e) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
f) Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen dan pengambil keputusan di birokrasi
g) Rendahnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak
h) Belum optimalnya peran lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
i) Belum optimalnya pemanfaatan data pilah gender sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan
j) Belum semua sekolah di semua tingkatan menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA)
k) Belum semua desa menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
l) Belum terbentuknya UPTD PPA
m) Masih kurangnya fasilitas bermain ramah anak yang aman, nyaman dan tidak berbayar.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media offline maupun online dan mendorong/melibatkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan;
b) Optimalisasi Gugus Tugas KLA melalui rapat-rapat koordinasi dan Bimtek bagi Gugus Tugas KLA
c) Pembentukan Forum Anak tingkat desa di Kabupaten Kebumen
d) Memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan menghadirkan narasumber (expert) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
e) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
f) Mendorong terpenuhinya kuota perempuan di parlemen dan pengambil keputusan di birokrasi;
g) Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang peran orang tua dalam tumbuh kembang anak
h) Meningkatkan kapasitas dan mengoptimalkan peran lembaga layanan

perlindungan perempuan dan anak

i) Mengoptimalkan pemanfaatan data pilah gender sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan

j) Meningkatkan sekolah di semua tingkatan menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA)

k) Membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

l) Meningkatkan fasilitas bermain ramah anak yang aman, nyaman dan tidak berbayar

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 142,75%. Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Realisasi indikator sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Kriteria penilaian realisasi kinerja adalah baik. Berikut adalah daftar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dan tertangani:

Tabel 3. 26 Rekapitulasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2023

No	Korban kekerasan yang melapor		Korban kekerasan yang tertangani		Capaian (%)	
	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan
1	66	55	66	55	100	100

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen, 2023

3. Urusan Pangan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pangan dilaksanakan melalui 4 (Empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan

Kemandirian Pangan

b) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
d) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 27 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan kemampuan ekonomi dan keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin	A PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	20,22	20,22	100	-	-
				1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persen	20,22	20,22	100	-	-
				a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah kelompok Lumbung Pangan yang Dibina (Jumlah Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan)	Kelompok/ Unit	8	8	100	-	-
				B PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persen	45,55	47,3	103	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan tercapai lebih dari 100%, hal tersebut karena terdapat kenaikan realisasi	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										program dari target awal renstra, berdasarkan indikator kinerja, rumus indikator persentase diversifikasi dan ketahanan pangan didukung dari 2 indikator kegiatan yaitu (1) persentase desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal s/d tahun n dan (2) persentase kelompok sasaran pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan s/d tahun (n)), yang kemudian dua indikator kegiatan tersebut dijumlahkan dan dibagi 2. Pada indikator pertama yaitu persentase	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal s/d tahun n terdapat kenaikan realisasi dari target awal renstra yaitu senilai 74,35 dari target awal 64,34, dan kenakan pada indikator kegiatan kedua yaitu persentase kelompok sasaran pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan s/d tahun (n)) senilai 20,24 dari target awal renstra 17,24. Kenaikan realisasi dipengaruhi oleh adanya penambahan anggaran dari dana DAK yang berpengaruh terhadap	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										realisasi program dan kegiatan.	
				1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persen	20,24	20,24	100	-	-
				a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan penentuan harga minimum daerah untuk pangan pokok lokal	Dokumen	4	4	100	-	-
					Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	4	100	-	-
				b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kelompok	10	27	270	Realisasi jumlah kelompok sasaran pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan lebih besar dibandingkan dengan target awal renstra	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dikarenakan terdapat penambahan kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Mitra Tani yang bersinergi dengan kegiatan provinsi dan pusat.	
					Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	10	27	270	Realisasi jumlah kelompok sasaran pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan lebih besar dibandingkan dengan target awal renstra dikarenakan terdapat penambahan kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Mitra Tani yang bersinergi dengan kegiatan provinsi dan pusat.	
				2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	Persen	10	9,08	90,80	Persentase cadangan pangan yang di kelola dihitung berdasarkan stok tahun n-1 ditambah pengadaan tahun n	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dibagi target ideal cadangan pangan dikali 100. Target RPJMD Tahun 2023 adalah 10 % dari target ideal cadangan pangan dengan perhitungan 10% x 512 ton GKG (target ideal cadangan pangan berdasarkan permentan no 11 tahun 2018) atau 51,2 ton GKG dengan asumsi stok tahun 2022 sebanyak 1,2 ton GKG dan target pengadaan tahun 2023 sebanyak 50 ton GKG. Namun anggaran yang tersedia pada tahun 2023 hanya cukup untuk melakukan pengadaan cadangan pangan sebanyak 20 ton GKG sehingga realisasi sebagai berikut : stok tahun 2022 + pengadaan tahun 2023 dibagi 512 dikali 100 atau 26,5 ton + 20 ton dibagi 512 dikali 100 = 9,08 %	
				a. Pengadaan Cadangan Pangan	Jumlah pengadaan cadangan pangan berupa	Ton (GKG)	20	20	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintah Kabupaten/Kota	gabah kering giling (GKG)						
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	20	100		
				3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	Persen	70,86	74,35	104,92	Sampai dengan Tahun 2023 desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal sejumlah 342 desa atau 74,35% dari jumlah 460 desa/ kelurahan di Kabupaten Kebumen	
				a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit/ benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	Desa	4	4	100		
					Jumlah Pemberdayaan	Laporan	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
				C PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	Persen	57,25	58,78	102,67	masih banyaknya desa rawan pangan di Kabupaten Kebumen, berkorelasi pada meningkatnya persentase desa yang tertangani kerawanan pangan	
				1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	100		
				a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	100		
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	100		
				2 Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa yang tertangani	Desa	9	16	177,78	Masih banyak desa rawan pangan yang memerlukan	Penyesuaian target dan anggaran dalam

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kewenangan Kabupaten/Kota	kerawanan pangannya					intervensi penanganan kerawanan pangan	penanganan desa rawan pangan
				a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	16	16	100		
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	16	16	100		
				D PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	90	91,63	101,81	Pangan aman yang diawasi melebihi target sehingga pagan di Kabupaten Kebumen maosh relatif aman	
				1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Segar Daerah Kabupaten/Kota							
				a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Buah	170	215	126,47	Pengambilan sampel pangan situasional, sehingga terjadi penambahan jumlah sampel pangan yang diawasi dari target awal	
					Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1	1	100		
				b. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	13	325	mulai tumbuhnya minat pelaku usaha PSAT dalam mengajukan permohonan registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) PDUK (Produk Dalam Negeri Usaha Kecil)	

2) Permasalahan

Permasalahan-permasalah yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan oleh masyarakat.
b) Masih minimnya lumbung pangan di daerah.
c) Belum Mantapnya Pengelolaan Cadangan Makanan Pemerintah.
d) Masih perlu updatenya Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan.
e) Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Konsumsi Pangan B2SA.
f) Kurangnya keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan pekarangan;
g) Masih Tingginya Makanan Sisa/Terbuang (Food Waste).
h) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam penjaminan keamanan pangan melalui registrasi PSAT PDUK.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

a) Pembinaan pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan kemandirian pangan.
b) Pemaksimalan pembangunan lumbung pangan.
c) Edukasi Masyarakat, melalui kampanye edukasi mengenai pemahaman tentang pentingnya cadangan makanan pribadi dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
d) Pembuatan Peta Rawan Pangan yang berkelanjutan.
e) Edukasi tentang pentingnya pengkonsumsian makanan yang B3SA kepada masyarakat.
f) Sosialisasi dan monitoring pemanfaatan lahan pekarangan (P2L).
g) Kampanye edukasi tentang stop boros pangan guna mengurangi Makanan Sisa/ Terbuang (*Food Waste*).
h) Sosialisasi, Edukasi, Komunikasi kepada pelaku usaha untuk melaksanakan penjaminan keamanan pangan melalui registrasi PSAT PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil).

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja program, capaian indikator kinerja empat program rata-rata 102,08% dan capaian indikator kinerja tujuh kegiatan rata-rata 110,50%.

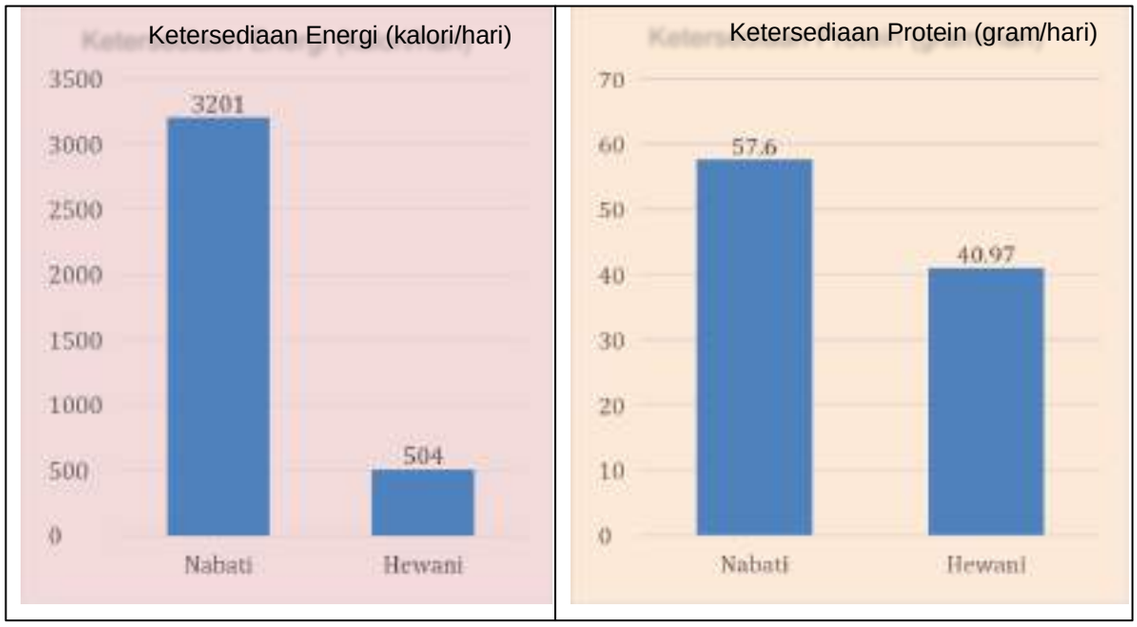
5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program yang telah disampaikan, telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan berkurangnya penduduk miskin, dengan sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	5,62	3	6,52	217,33	6

Indikator kinerja Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 6,52% diperoleh dengan perhitungan : (jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2023 - jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020) / jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020 x 100%. Dimana hasil perhitungan tersebut yaitu: (3803,57-3.570,55)/3.570,55 x 100% = 6,52%. Nilai ketersediaan energi pangan dan ketersediaan protein pangan berdasarkan sumber bahan makanan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 1 Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Dilihat dari gambar di atas diketahui kontribusi ketersediaan energi pangan Tahun 2023 dari kelompok bahan pangan nabati sebesar 86,40%, dan dari kelompok bahan pangan hewani 13,60%. Sedangkan kontribusi protein kelompok bahan pangan nabati sebesar 58,44% lebih tinggi dibandingkan ketersediaan protein kelompok bahan pangan dari hewani sebesar 41,56%.

4. Urusan Pertanahan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan melalui 1 (satu) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 29 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	A	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100		
				1	Penyelenggaraan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesai-an Penanganan Sengketa Lahan	Sengketa	12	12	100		
				a	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesai-an Penanganan Sengketa Lahan	Sengketa	12	12	100		

2) Permasalahan

Permasalahan urusan pertanahan adalah belum adanya laporan dari masyarakat terkait Sengketa Tanah Garapan

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dilaksanakan sosialisasi terkait inventarisasi sengketa tanah garapan dengan sasaran masing-masing kecamatan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Program sengketa lahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersifat persediaan. Indikator dari program tersebut persentase penanganan sengketa lahan pada tahun 2023 mempunyai target 100% dan realisasi 100%. Hal tersebut belum memvisualkan keadaan nyata dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada sengketa lahan yang masuk. Pada tahun 2023 kegiatan tersebut digunakan untuk sosialisasi dan rapat-rapat terkait aset tanah milik pemerintah daerah.

5) Capaian Kinerja Urusan (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 2 (dua) urusan salah satunya adalah urusan pertanahan yang menjadi sasaran strategis dari tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mempunyai indikator indeks kepuasan masyarakat. Untuk capaian dari sasaran atau IKU (Indikator Kinerja Utama) tersebut adalah 100% dari target 100%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program prioritas yang meliputi:

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup untuk Masyarakat;

g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
i) Program Pengelolaan Persampahan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 30 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP)		A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	62,50	68,75	110	Terdapat penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045, KLHS RPJMD 2025-2030 dan Perda RPPLH 2023-2053	
				1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	dokumen	2	3	150	Terdapat penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045, KLHS RPJMD 2025-2030 dan Perda RPPLH 2023-2053	
				a. Subkeg. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (D3TLH / RPPLH)	dokumen	1	1	100		
					Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang	Dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					Disusun						
				b. Subkeg. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD)	dokumen	4	4	100		
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3	300	Terdapat penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045, KLHS RPJMD 2025-2030 dan Perda RPPLH 2023-2053	
				B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74,19	67,16	90,52	Adanya musim kemarau panjang akibat El Nino dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak menyebabkan nilai IKA turun	Melakukan upaya pengendalian pencemaran berupa kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, peringatan larangan pencemaran, bimbingan teknis kepada kegiatan sumber pencemaran air
				1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran	Kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dan/atau kerusakan lingkungan hidup						
				a. Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan	paket	2	3	150	Penambahan belanja peralatan alat uji CO2, water sampler, vakum penguji logam	
				b. Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah penanganan	dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					emisi gas rumah kaca						
				c. Subkeg. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelayanan laboratorium lingkungan hidup	bulan	12	12	100		
					Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	500	860	172	Permintaan Uji parameter kualitas lingkungan dari pelanggan melebihi target	
				2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	kegiatan	11	6	54,55	Refocusing anggaran untuk melakukan sosialisasi, penyediaan papan informasi dan kegiatan penghentian sumber pencemar yang berpengaruh nyata terhadap perolehan IKLH Kab. Kebumen	Menambah anggaran untuk mencegah pencemaran sesuai hasil mitigasi daerah rawan sumber pencemar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				a. Subkeg. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan	paket	1	2	200	Sosialisasi dilaksanakan 2 kali	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	2	200	Sosialisasi dilaksanakan 2 kali	
				b. Subkeg. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun	paket	0	0	0	Refocusing anggaran, Biaya pembangunan IPAL sangat mahal	Menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	4	4	100		
				3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran	kegiatan	15	19	126,67	Ada penambahan anggaran sehingga	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dan/atau kerusakan lingkungan hidup					menambah 1 (satu) Sub Kegiatan pemulihan pencemaran	
				a. Subkeg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	100		
					Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah industri kecil	Paket	4	4	100		
				b. Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah fasilitasi	paket	11	10	90,91	Tidak	Membangun sarana

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangrove dan Sarpras tanaman konservasi					terlaksananya semua kegiatan, dan dialihkan ke kegiatan PPTKH bekerjasama dengan Kehutanan CDK wilayah VIII dalam rangka pemetaan Wilayah Hutan Kabupaten Kebumen	komunikasi dalam rangka kerjasama antar lembaga daerah dan perwakilan pusat di daerah, melalui Forkopimda dan meningkatkan kecepatan koordinasi dan transparansi
				c. Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	dokumen	5	5	100		
					Jumlah Fasilitasi Pembinaan/Sosialisasi dan Rencana Aksi/Demplot Pelestarian Sumber Daya Genetik dan HCPSN	paket	5	5	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	%	33,33	36,67	110,01	Realisasi sudah melampau target dari tahun 2021	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				HAYATI (KEHATI)						terdapat 4 dokumen penyusunan RTH dari target 2 dokumen	
				1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	dokumen	1	1	100		
				a. Subkeg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH	bulan	12	12	100		
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	731,99	874,75	119,5	Update data luasan RTH secara mandiri untuk keperluan perhitungan IKLH tahunan dan untuk update pengelolaan RTH di Aplikasi SIPSN Kementerian LHK	
				b. Subkeg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	50	50	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
					Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah	paket	1	1	100		
				c. Subkeg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati	paket	1	4	400	Terdapat paket pengadaan bibit tanaman pakan walet, tanaman pendukung taman kehati, penyusunan dokumen Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Lokal, dan pembinaan pengelolaan sarpras kehati. (4 kegiatan)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				D. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan LB3	%	40,00	40,17	100,42	Permintaan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 melebihi target yang ditentukan	
				1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	kali	30	31	103,33	Permintaan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 melebihi target yang ditentukan	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3	kali	4	5	125	Permintaan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 melebihi target yang ditentukan	
					Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin	Dokumen	4	5	125	Permintaan fasilitasi dan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					pembinaan pengelolaan B3 melebihi target yang ditentukan	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b. Subkeg. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3	kali	26	26	100		
					Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	26	26	100		
				E. PROGRAM PEMBINAAN	Persentase pengawasan	%	10,43	8,64	82,82	Realisasi kinerja	Meningkatkan kegiatan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LING-KUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING-KUNGAN HIDUP (PPLH)	kegiatan usaha dan penanganan izin lingkungan					ditentukan oleh jumlah permohonan persetujuan lingkungan yang masuk, Ada perbedaan kriteria perizinan pada penerbitan izin usaha, sehingga menurunkan jumlah fasilitasi perizinan usaha secara signifikan karena hanya diperlukan surat pernyataan yang bisa dilakukan secara online tanpa fasilitasi dari dinas lingkungan hidup	pengawasan baik langsung atau tidak langsung untuk mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terakumulasi dalam jangka panjang
				1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	unit	125	69	55,20	Perubahan peraturan perizinan berdasarkan UUCK	Meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran melalui peningkatan pengawasan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	60	9	15	Perubahan peraturan perizinan berdasarkan UUCK	Meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran melalui peningkatan pengawasan
					Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi izin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Izin PPLH (IPLC)	unit	60	9	15	Perubahan peraturan perizinan berdasarkan UU Cipta Kerja	Meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran melalui peningkatan pengawasan
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b. Subkeg. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi	unit	60	60	100		
					Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	Laporan	60	60	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
				F. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	%	15,65	15,43	98,62	Belum semua pengajuan penyusunan perdes melalui musrenbang dapat ditindaklanjuti karena kekurang SDM dan anggaran	Merekomendasikan anggaran desa dalam fasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Pelestarian Lingkungan Hidup, Meningkatkan kegiatan pelatihan melalui lembaga pendidikan seperti adiwiyata dan lainnya
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	Lokasi	15	126	840	Banyaknya pembinaan sekolah calon adiwiyata jauh dari yang ditargetkan dari target 6 sekolah diperoleh 120 sekolah	
			Peningkatan Kualitas	a. Subkeg. Peningkatan Kapasitas dan	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan	desa	6	9	150	Jumlah pendampingan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	penyusunan Perdes					penyusunan Perdes ditingkatkan demi mencapai target Program	
					Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	6	6	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b. Subkeg. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	7	48	685,71	Antusiasme yang tinggi untuk mengikuti sekolah adiwiyata sehingga meningkatkan capaian pembinaan	
					Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Sekolah	6	120	2.000	Banyaknya pembinaan sekolah calon adiwiyata jauh dari yang ditargetkan dari target 6 sekolah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										diperoleh 120 sekolah	
				G. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase fasilitas penghargaan lingkungan hidup	%	50,00	51,02	102	Peningkatan pemantauan untuk penghargaan adipura	
				1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	Lokasi	16	18	112,5	Peningkatan pemantauan untuk penghargaan adipura	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	16	18	112,5	Peningkatan pemantauan untuk penghargaan Adipura	
					Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup	lokasi	16	18	112,5	Peningkatan pemantauan untuk penghargaan adipura	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				H. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	%	100	113,33	113,33	Penambahan penanganan aduan masyarakat	
				1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	kasus	15	17	113,33	Penambahan penanganan aduan masyarakat	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	kasus	10	17	170	Penambahan penanganan aduan masyarakat	
					Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Dokumen	10	17	170	Penambahan penanganan aduan masyarakat	
				I. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	%	27,00	49,74	184,22	Fokus peningkatan pengelolaan sampah untuk mengurangi biaya penanganan sampah oleh	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										pemerintah daerah yang semakin meningkat, dialihkan ke kegiatan penyuluhan/ peningkatan kelembagaan masyarakat yang dibina oleh Dinas dan Tenaga Fasilitator Lapangan	
				1. Kegiatan Pengolahan Sampah	Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	Kegiatan	5	5	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada	dokumen	2	2	100		
					Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					yang Disusun dan Ditetapkan						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b. Subkeg. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	1	2	200	Terdapat 2 laporan wajib (semesteran) ke aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan ditandatangani oleh kepala daerah	
					Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah	lokasi	9	12	133,33	Efektifitas pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan fokus peningkatan pengurangan sampah oleh masyarakat	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	c. Subkeg. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR)	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Layanan Sosial Dasar Masyarakat	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
					Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	30.558,20	29.693,78	97,17	UPTD PALS TIMUR: ada beberapa kondisi kontainer sampah rusak dan belum dilakukan pemeliharaan (11 kontainer rusak berat, 9 rusak ringan), UPTD PALS BARAT: Sebagian besar kondisi kontainer sampah rusak dan belum dapat diperbaiki. Bahkan ada 4 kontainer yang tidak dapat	UPTD PALS TIMUR: 1. Koordinasi dengan Bidang PPKLHPP 2. Koordinasi dengan instansi penghasil sampah (RSUD Kebumen dan RSUD Prembun) supaya menyediakan container sendiri, UPTD PALS BARAT: 1. Koordinasi dengan penyediaan sarpras persampahan (Bidang PPKLHPP); 2. Sedang proses pengajuan proposal guna bantuan CSR dari pihak lain.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										digunakan	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d. Subkeg. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	3	3	100		
					Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R	Kec.	3	3	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e. Subkeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	13	13	100		
					Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Unit	13	13	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten kebumen dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

a) Adanya pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
b) Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan;
c) Penentuan target IKLH belum akuntabel dengan penyediaan anggaran yang seharusnya disiapkan dalam rencana pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau target dalam Perda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka panjang;
d) Terbatasnya waktu, anggaran dan prasarana (maps yang belum update) dalam inventarisasi luasan Tutupan Lahan untuk perhitungan IKLH setiap tahunnya.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya mengatasi permasalahan yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten kebumen dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

a) Sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik;
b) Adanya demplot/percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran;
c) Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH;
d) Melakukan konservasi lahan secara masif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” dan pelaksanaan program unggulan Bupati Kebumen “Nandur Wit Nggo Anak Putu”;
e) Fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Restorasi;
f) Pelatihan dan Sosialisasi terhadap industri kecil;
g) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan;
h) Inventarisasi mandiri Luasan RTH Kabupaten Kebumen, Luasan Tutupan Lahan Kabupaten.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 110,28%. Sedangkan rata-rata capaian kegiatan adalah 168,9%

Capaian Program dan Kegiatan memiliki situasi yang linear dimana keduanya saling mendukung dan mempengaruhi. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dikarenakan refocusing anggaran pada sub kegiatan sehingga mempengaruhi capaian kegiatan itu sendiri.

5) Capaian Kinerja Urusan

Urusan Lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai misi keempat RPJMD yaitu “peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan sasaran empat poin dua yaitu “meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	2023			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,19	67,16	90,52	● *Laporan IKLH DLHKP Kab. Kebumen 2023* ● *Ekspose IKLH DLHK Provinsi Jateng* ● *Ekspose IKLH Kementerian KLHK*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2023

Tabel 3. 32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2022	2023			TARGET AKHIR RPJMD 2026
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,17	74,19	67,16	90,52	74,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Urusan Lingkungan Hidup:

a) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c) Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Realisasi IKLH pada tahun 2023 mencapai 67,16 (prosentase capaian sebesar 90,52%), Mengalami penurunan terhadap tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Adanya musim kemarau panjang akibat El Nino dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak menyebabkan nilai IKA turun.

Ketiga variabel yang digunakan yaitu;

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara; dan
3. Indek Tutupan Lahan.

Dengan rentang predikat IKLH sebagai berikut :

IKLH <40 = waspada
IKLH 40-50 = sangat kurang baik
IKLH 50-60 = kurang baik
IKLH 60-70 = cukup baik

IKLH 70-80 = baik

IKLH > 80 = sangat baik

Pada tahun 2023, realisasi IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 67,16 atau masuk kategori “CUKUP BAIK”.

Tabel 3. 33 Realisasi IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Kebumen

No	Variabel	Capaian Tahun		Predikat
		2022	2023	
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,94	90,41	Sangat Baik
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,49	51,74	Sedang
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,53	50,63	Kurang
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,17	67,16	Cukup Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2023

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pendaftaran Penduduk;

b) Program Pencatatan Sipil; dan

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUK-AN DAN PENCATATAN SIPIL		A PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100		
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP, KIA)	Kegiatan	7	7	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Pencatatan, Penatausahaan, dan penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP,KIA)	Dokumen	110.000	140.565	127,8	terdapat upaya percepatan perekaman KTP elektronik dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024	
				b Peningkatan Pelayanan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan	Kegiatan	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendaftaran Penduduk	pendaftaran penduduk						
				c Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah lokasi monitoring evaluasi dan pelaporan peristiwa kependudukan	Lokasi	27	27	100		
				2 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan	Kegiatan	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir dan buku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jenis	2	2	100		
				B PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pendaftaran Penduduk		100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	Kegiatan	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Percepatan capaian IKU penerbitan akta kematian dan penerbitan dokumen pencatatan sipil lainnya	Dokumen	1.000	1.000	100		
				b Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	Dokumen	27.000	26.829	99.37	1.Bayi lahir belum disiapkan nama oleh orang tuanya sehingga tidak langsung dibuatkan akta kelahiran 2.Bayi lahir tidak dibuatkan akta kelahiran karena status	1.Inovasi Baladewa PAK-KIS dengan 50 fasilitas layanan kesehatan untuk pembuatan Akta bagi bayi yang baru lahir 2.Pelayanan online melalui WA Tiket.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										bapak ibu yang belum mennikah, tercatat anak seorang ibu 3.Adanya budaya memberi nama setelah puputan/selamatan sehingga belum langsung dibuatkan Akta Kelahiran 4.Masih terdapat pelayanan public yang tidak mempersyaratkan akta kelahiran	3.Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan untuk pelayanan Akta kelahiran 0-3 tahun 4.Membuat surat edaran kepada instansi terkait untuk menggunakan administrasi kependudukan sebagai syarat pelayanan public. 5.Kerjasama pemanfaatan KIA dengan lembaga Swasta/Dunia Usaha
				2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan penyelenggarak	Kegiatan	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					an urusan administrasi kependudukan						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Institusi Lainya	Kali	2	2	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase Penggunaan Data Informasi	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KEPENDUDUKAN	Administrasi Kependudukan						
				1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	Buku	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah agregat buku kependudukan	Buku	2	2	100		
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Kegiatan	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	a Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah lokasi Penerima pengadaan sarana	Lokasi	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	Administrasi Kependudukan	dan prasarana fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan						
			Sda	b Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	lembaga	5	6	120	Adanya sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan data kependudukan	
			Sda	c Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Orang	150	150	100		

2) Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dijumpai permasalahan sebagai beriut:

a) Pada indikator cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Tapi pada indikator capaian penerbitan Akta Kematian sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100% namun pada pencapaiannya ada sebagian akta kematian yang memiliki status terlambat melapor sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap data yang harus selalu update agar kantor, lembaga dan pihak-pihak yang memanfaatkan data dukcapil dapat terintegrasi dengan baik;
b) Pada indikator capaian Kartu Keluarga sudah mencapai target yang ditetapkan namun dalam pelaporannya masih mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat hanya melaporkan perubahan data kependudukan jika dibutuhkan saja;
c) Pada indikator capaian KTP-el sudah mencapai target yang ditetapkan namun masih ada sebagian jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman;

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen maka dapat dilakukan upaya mengatasi permasalahan diantaranya :

a) Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
    a. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya;
    b. Perkembangan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat;
    c. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan adminduk;
b) Satu data kependudukan secara nasional atau NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia sehingga diperlukan NIK sebagai identitas tunggal administrasi.
    a. Implementasi integrasi *big data* kependudukan dalam semua proses

pemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi *big data* ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi terhadap data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi- instansi pelayanan publik.

b. *Big data* mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik;

c) Administrasi kependudukan menuju *Go-Digital*.

a. Implementasi *Go-Digital* bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan memudahkan masyarakat;
b. Mulai tahun 2019 jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan digital untuk mengurus data administrasi kependudukan (Adminduk).
c. Masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Cukup mengisi formulir online, tekan *enter* dan data kependudukan yang diperlukan dapat diperoleh dengan cepat, bisa di-*print out* atau dicetak sendiri aktanya oleh penduduk dari rumah.

d) Semua penduduk memiliki identitas.

Salah satu hak penduduk diantaranya adalah setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen kependudukan tersebut maka penduduk tercatat dalam *database* kependudukan sehingga kementerian/lembaga (K/L) hingga swasta dapat memanfaatkan data administrasi kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-elektronik untuk segala keperluan pelayanan publik maupun penegakan hukum.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya Program adalah 100%. Rata-rata capaian Kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Tahun 2023 ini tingkat capaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen (%)	99.20	95.00	99.77	105.02	94.45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2023

Tabel 3.33 menjelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 terkait cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu 105,02%. Ketercapaian indikator kinerja tidak lepas dari berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Melaksanakan program GO-LAK (GO – Layanan Administrasi Kependudukan). GO-LAK merupakan Program Unggulan Bupati Kebumen yaitu program pelayanan administrasi kependudukan jembut bola ke rumah (*door to door*) utamanya kelompok difabel dan yang berkebutuhan khusus;
b) Melakukan sosialisasi pelayanan Administrasi Kependudukan melalui tatap muka dan melalui media sosial (facebook, Instagram), sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki dan memperbarui dokumen administrasi kependudukan (Masyarakat sadar Adminduk);
c) Proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan semakin cepat, mudah dan gratis;
d) Pelayanan melalui tatap muka dan online dengan whatsapp, aplikasi lawet Kebumen dan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
e) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
f) Pelayanan Terintegrasi yaitu di Mall Pelayanan Publik (MPP);

g) Melakukan beberapa inovasi pelayanan diantaranya:

1) KeTaPel-17

Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi wajib KTP-el pemula atau usia 17 tahun, dimana pada saat usia 17 tahun, langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2) Balada PAK-KIS

Inovasi ini merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen. Inovasi “BALADA PAK-KIS” (Bayi Lahir Dapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Indonesia Sehat) ditandai dengan Penandatanganan PKS pada tanggal 1 September 2021 dan telah di launching tanggal 16 September 2021 oleh Bupati Kebumen Di Mexolie Hotel Kebumen. Dalam kerjasama ini, bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kebumen, serta KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kebumen. Balada Pak-KIS juga bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik bersalin untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut.

3) Kios Pelanduk

Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan di Desa/Kelurahan. Inovasi Kios Pelanduk merupakan inovasi pelayanan publik yang melayani Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan Keluar, Kedatangan dalam satu Desa/Kelurahan.

4) Pesona *Sunday Morning* (Pelayanan Adminduk untuk Semua Orang Sinambi Santai Dokumen Adminduk Bisa Anyar Maning)

Inovasi ini merupakan pelayanan administrasi kependudukan untuk semua orang yang membahagiakan pada hari minggu pagi yang dilaksanakan di alun-alun dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Pelayanan administrasi kependudukan yang diperuntukkan bagi semua orang yang membahagiakan sambil santai dokumen administrasi kependudukan bisa anyar maning (sambil bersantai juga bisa mendapat dokumen adminduk baru lagi).

5) Lawet Kebumen

Pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Kabupaten Kebumen secara Elektronik dan Terintegrasi dari Smartphone Android.

6) **Gerlin Difaduk (Gerakan Perlindungan Difabel sadar Adminduk)**

Inovasi ini merupakan program jemput bola untuk melayani proses pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat Disabilitas/Difabel yang tidak bisa datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Tempat Perekaman Data Penduduk (TPDK) di 26 Kecamatan. Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen di area Disdukcapil Kebumen.

7) **Peti Megatruh (Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Adminduk Cepat, Akurat, dan Handal)**

Inovasi ini merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan berbagai pihak seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan fasilitas kesehatan dalam pelaporan kematian penduduk. Hal ini sangat penting dalam rangka memutakhirkan data kependudukan di Kabupaten Kebumen Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen di area Disdukcapil Kebumen.

8) **Yandis Terpadu**

Pelayanan Administrasi Kependudukan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).

9) **Pulpen ASN (Paket Untuk Layanan Pensiunan ASN)**

Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk mempermudah pegawai pensiunan dalam mendapatkan dokumen – dokumen kependudukannya. Yaitu para ASN yang pensiun pada saat menerima SK Pensiunan/Taspen langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP-El, dengan status pekerjaan berubah menjadi pensiunan.

10) **Gerbang Harapan**

Gerakan bersama Administrasi Kependudukan mengelola hasil laporan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Kebumen.

11) **Layak Menikah Ijabah**

Inovasi yang bekerja sama dengan kantor Kemenag Kabupaten Kebumen melalui pernikahan Identitas jadi berubah.

12) **Santri One Paduka**

Memudahkan Masyarakat yang telah bercerai dalam mengurus hanya melelalui satu pintu.

h) Peningkatan dan Perluasan Layanan pada *event-event* besar di Kabupaten Kebumen seperti Kebumen *International Expo* (KIE), Program

Bupati Mubeng Kebumen, Program Bupati dan Forkopimda Mengajar dan beberapa kegiatan lainnya baik even di Tingkat kecamatan dan desa;

i) Mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia usaha sebagai wujud peningkatan pelayanan prima pada masyarakat.
j) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek), Peningkatan Kapasitas SDM dan refreshing petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penataan Desa
b) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
c) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 36 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
13	Pemberda-yaaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Tertata	%	2	2	100		
				1. Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda Penataan desa dan Jumlah Perubahan Perda Pilkades yang tersusun	Kegiatan	2	5	250	Realisasi melebihi target karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan adanya regulasi di daerah, sehingga komitmen Pemkab dan Desa antusias dalam melaksanakan hal tersebut.	
				2. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan	Jumlah Perda Penataan desa yang tersusun dan Jumlah Perubahan Perda Pilkades yang	Dokumen	2	5	250	Realisasi melebihi target karena adanya kebijakan pemerintah	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Perubahan Status Desa.	tersusun					pusat yang mewajibkan adanya regulasi di daerah, sehingga komitmen Pemkab dan Desa antusias dalam melaksanakan hal tersebut.	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100		
				Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama desa	Kegiat-an	3	3	100		
			Peningkat-an Tata Kelola Pemerinta han yang baik dan bersih dan Penciptaan	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar Desa	Desa	7	449	6.414	Realisasi melebihi target karena adanya penambahan jumlah desa yang melaksanakan kerjasama	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Kondusifi-tas wilayah							antar desa pembentukan kawasan pertanian (13 desa) dan terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat terhadap UPK eks PNPM MPd wajib bertrans-formasi ke BUMDesa Bersama, Berdasarkan PP 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT nomor 15 Tahun 2021.	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD	Desa	3	3	100		
					Jumah Desa yang mendapat fasilitasi	Desa	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					kerjasama Desa dengan pihak ketiga						
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD Karya Bhakti Manunggal	Desa	8	8	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa kawasan perdesaan yang terfasilitasi	Desa	22	22	100		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya	lembaga	56	56	100		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan	12	12	100		
			Peningkat-an Tata Kelola	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan	Desa/ Orang	449	449	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Pemerinta-han yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifi-tas Wilayah	Administrasi Pemerintahan Desa	KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli						
					Jumlah Kegiatan Penghargaan Desa Award/ Lomba Desa penilaian 1 tahun periode April 2022 s/d April 2023.	Kegiat-an/Kegiatan	1	1	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	kecamatan	26	26	100		
					Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pendampingan perencanaan	Desa	449	449	100		
					Jumlah Desa/Kelurahan	Desa;/ Kelurah	449	449	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					yang melaksanakan musrenbangdes	an					
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menyusun APBDes dan APBDes Perubahan	Desa	449	449	100		
					Jumlah Ikhtisar Pelaporan Pertanggungjawaban APBDes yang disusun	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah Pedoman Penyusunan APBDes yang Disusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa, aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	Orang	78	78	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksana-an Musdes	Kecamatan	26	26	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesma yang terfasilitasi	Lembaga	32	32	100		
					Jumlah BUMDesa yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	25	25	100		
					Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dari tumbuh menjadi berkembang dan betrkembang menjadi maju	Lembaga	68	68	100		
					Jumlah Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Desa	Unit	26	26	100		
					Jumlah Unit Usaha UPK ((Bumdesa Bersama LKD) yang terfasilitasi	Unit	26	26	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kegiatan	1	1	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	1	1	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah perangkat desa, pendamping desa dan aparatur kecamatan yang mengikuti Bimtek Penyusunan SID dan Desa online	Orang	200	200	100		
					Jumlah perangkat desa dan aparatur Kecamatan serta pendamping desa yang mengikuti Bimbingan Teknis Indeks	Orang	200	200	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Pembangunan (IDM)						
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah perangkat desa mendapat fasilitasi inventarisasi dan tukar menukar aset	Desa	3	3	100		
					Jumlah perangkat desa mendapat Bimtek Pengelolaan Aset Desa	orang	297	297	100		
					Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mengikuti rapat koordinasi terkait dengan aset desa	orang	52	52	100		
				Sub Kegiatan Pembinaan Peningkat-an Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD (130 orang), aparatur kecamatan (26 orang) pendamping desa (26 orang) yang mengikuti Bimtek	Orang	130	130	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi DD (Dana Desa APBN)	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap)	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi BPJS bagi Kades dan Perangkat Desa	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	449	449	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan Bantuan keuangan lainnya	Desa	449	449	100		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa /Kelurahan Tertib Administrasi	%	15,87	15,87	100		
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat.	Kegiatan	5	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang mendapat pemberdayaan/ pembinaan : Karang taruna	Desa	50	50	100		
					Jumlah Desa yang mendapatkan Pemberdayaan WPA	Desa	35	35	100		
					Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan KP SPAMS	Kelompok	35	35	100		
					Jumlah Desa yang mendapatkan	Desa	349	349	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)						
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan PKK, RT Dan RW	desa	50	50	100		
					Jumlah Desa yang mendapatkan pemberdayaan/pembinaan posyandu	Desa	50	50	100		
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk	Unit	2	3	150	Keterlambatan dalam pembentukan Posyantekdes di Kebumen, menjadikan pemicu semangat untuk membentuk Posyantekdes bagi desa yang memiliki embrio teknologi tepat	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										guna.	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang dibina	lokasi	20	44	220	Adanya kemauan para pengelola pasar desa untuk meningkatkan PAD dan makin banyak pasar desa yang ingin berkembang sehingga Pemda maupun Provinsi memberikan pembinaan, pendampingan dan peningkat-an kapasitas kelembagaan	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM	Desa	449	449	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK	Jumlah Desa/ Kelurahan yang	Desa/Kelurahan	52	52	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	mendapatkan kegiatan Evaluasi TP.PKK						
					Jumlah TP PKK Desa/ Kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Desa/ Kel	460	460	100		
					Jumlah TP PKK Kabupaten yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kabupaten	1	1	100		
					Jumlah TP PKK Kecamatan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kecamatan	26	26	100		

2) Permasalahan

Pelaksanaan Program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang pada Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa tahun 2023 ditiadakan, dikarenakan adanya r*efocusing* anggaran.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengalokasikan anggaran pada tahun yang akan datang (2024), agar target dapat terealisasi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan masyarakat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%. Rata-rata capaian kegiatan sebesar 137,50%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Tabel 3. 37 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	44,32	29,17	71,49	245,08	42,09

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, 2023

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka Renstra/RPJMD menargetkan sebanyak 449 telah membentuk Bumdes. Adapun tujuan pendirian Bumdes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, meningkatkan, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pada tahun 2023 yang merupakan tahun kedua RPJMD/ Renstra 2022-2026, pendirian Bumdes sejumlah 449 desa yang telah tercapai di tahun 2022, dilakukan pembinaan atau pada akhir periode Renstra ditargetkan sebanyak 100% atau sebanyak 449 Bumdes dan telah terealisasi sebanyak 449 Bumdes atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa. Untuk tahun 2023 Dinas PMD Kabupaten Kebumen telah menargetkan sebanyak 78 orang aparatur pemerintah desa, dan terealisasi sejumlah 78 aparatur pemerintah desa telah difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur. Tahun 2023 merupakan tahun awal dengan Renstra Dinas PMD yang baru, sehingga pencapaian dalam peningkatan kapasitas aparatur telah memenuhi target.

Penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dapat tertangani 100%, meskipun ada beberapa kasus yang masih dalam kondisi mediasi maupun masuk pada Aparat Penegak Hukum. Jumlah pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2023 sejumlah 8 pengaduan dan pengaduan sudah ditindaklanjuti/penyelesaian. Dari jumlah kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, hampir sebagian besar adalah kasus mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun yang berkaitan dengan etika Perangkat Desa.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengendalian Penduduk;
b) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3. 38 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 DINAS KESEHATAN PENGENDALI-AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		A PROGRAM PENGENDALI-AN PENDUDUK	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan meman - faatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	25	25	100		
				1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah lembaga yang melaksanaka n sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengendalian kuantitas	Lembaga	5	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					penduduk						
			Peningkat-an Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah pendidikan kependuduk-an formal dan nonformal yang mendapatkan sosialisasi kependuduk-an	Lembaga	5	5	100		
				2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Dok	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya	a Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen kajian dampak kependuduk-	Dok	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat		an yang tersusun						
				b Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang tersusun	Dok	1	1	100		
				B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	%	63,5	69,96	110,17 %	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti KB	
				1 Pelaksanaan	Penyediaan	Kegiat-	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	sarana dan prasarana KIE program KKBPK , Promosi dan Advokasi serta sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK	an -BKB -BKR -BKL - UPPKA					
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	jumlah advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	kali	3	3	100		
				b Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program	Jumlah paket sarana KIE program KKBPK yang	Kec.	26	26	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KKBPK	tersedia dan terdistribusi						
				c Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dalam promosi dan KIE program KKBPK	Paket	1	1	100		
				d Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	jumlah lokasi tersedianya sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK	Kecamatan	26	26	100		
				2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional PKB/PLKB dalam menggerakan	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					kader IMP						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	- Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia - Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Unit Kecamatan	5 26	5 26	100 100		
			Sda	b Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	Orang	2.647	2.647	100		
				3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Jumlah fasilitas kesehatan terfasilitasi alat dan dan obat kontrasepsi	Klinik/ unit	57	57	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	dan sarana penunjang pelayanan KB dalam meningkatkan kesertaan penggunaan MKJP, serta kesehatan dan hak-hak reproduksi						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya yang difasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	Alat	57	57	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi	Akseptor	9.101	8.938	98,02	Kepesertaan KB untuk metode kontrasepsi MOW masih rendah	Perlu Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi untuk KB Metode MKJP MOW
				c Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang difasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan yang terfasilitasi promosi dan konseling dan hak-hak reproduksi	Orang	750	750	100		
				4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakat Tingkat Daerah	jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Desa	77	77	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten Kebumen/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Desa	77	77	100		
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	32,27	45,25	140,2	Meningkat-nya kesadaran sasaran keluarga binaan yang mengikuti sosialisasi	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan pembinaan di wilayahnya	
				1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	Kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyara-kat	a Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberda-yaan Ekonomi Keluarga /	- Jumlah BKB KIT Stunting - Jumlah KIT Nikah Anti Stunting	Paket Paket	10 10	10 10	100 100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UPPKS							
			Sda	b Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan / Kader Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	jumlah anggota kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R) yang di bimtek	Orang	104	104	100		
			Sda	c Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	80	80	100		

2) Permasalahan

Capaian peserta KB aktif sebesar 69,96% dari target 63,5% dimana capaian pada tahun 2023 memanfaatkan momentum dengan mitra kerja dalam melakukan pelayanan KB. Capaian program KB secara keseluruhan telah tercapai 100% sesuai dengan target.

Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada jenis MOP dan MOW belum sesuai target karena minat pengguna yang masih rendah.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang ditempuh di tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Memaksimalkan KB pasca salin dan pasca keguguran;
b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 116,79%. Rata-rata capaian kegiatan adalah 99,95%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Adapun capaian kinerja urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 39 Perkembangan Indikator Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	70,60	63,50	69,96	110,17	65,00

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen, 2023

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2023 sebesar angka 69,96%. Realisasi 2023 sebesar 110,17% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 130.712 dibagi jumlah PUS sebesar 186.846. Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat

mengentaskan kemiskinan. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 40 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2022-2023

NO.	URAIAN KINERJA	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	131.040	130.712
	a. Laki-Laki	8.731	9.631
	b. Perempuan	122.309	121.081
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	190.343	186.846
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	131.040	130.712

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen, 2023

9. Urusan Perhubungan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 41 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Perhubungan	DINAS PERHUBU-NGAN	1	A PROGRAM PENYELENGGARA-AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	78,44	75,30	95,99	Kebutuhan perlengkapan jalan cukup banyak karena luas jangkaua-nya bertambah terus	Mengusul-kan alokasi anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan ke provinsi maupun pusat
				1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	52	59,23	113,90	Mendapat-kan tambahan alokasi anggaran dan tambahan hibah dari pusat untuk 260 titik LPJU	
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung	a Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket sarpras perlengkapan jalan	Paket	8	15	187,5	Mendapat-kan alokasi tambahan kebijakan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan							pemerintah daerah	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	666	839	125,98	Mendapatkan alokasi tambahan kebijakan pemerintah daerah	
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjut-an	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pembayaran Listrik LPJU	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Bulan	12	12	100		
				2 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjut-an	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	Bulan	12	12	100		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	Laporan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
				3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik (yaitu Jumlah alat uji KIR yang baik dibagi jumlah alat uji KIR yang ada)=9 unit 100% baik	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	Bulan	12	12	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan	Unit	9	9	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bermotor yang dipelihara						
				4 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan pengamanan dan	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah OLJ/ patroli pengendalian lalu lintas Jumlah koordinasi lintas sektoral (Forum LLAJ) Jumlah pelaksanaan pengamanan Posko Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	50	142	284	Peningkatan operasi laik jalan dalam rangka kondusifitas wilayah	
				5 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio-Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Penilaian Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan								
					Hasil Andalalin Jumlah rakor penilai andalalin	Dokumen	12	3	25	Persetujuan pengesahan andalalin sesuai izin yang diajukan ke Dinas Perkimhub	Berkoordinasi dengan DPMPTSP dan DLHKP
				6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur	a Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan	Jumlah bulan pelaksanaan audit inspeksi dan pemantauan keselamatan transportasi	Laporan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Bermotor Kabupaten/Kota							
				7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	b Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pengendalian angkutan umum; angkutan sungai dan kereta api	Bulan	12	12	100		
				8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi	Dok	80	35	43,75	Sistem Perizinan (SIPERI) baru dimulai bulan Mei 2023, banyak nya kendaraan angkutan mati usia lebih dari 25 tahun	Berkoordi-nasi dengan DPMPTSP
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Laporan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						

2) Permasalahan

Beberapa sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal di tahun 2023 antara lain :

a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
   a. kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran rekening LPJU.
   b. kurangnya sumber SDM ketenagalistrikan untuk pemeliharaan perlengkapan jalan

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
   a. Kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha untuk mengajukan dokumen andalalin
   b. Masih banyak bangunan yang belum mempunyai dokumen andalalin

c) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Angkutan yang ada saat ini masih belum memenuhi standar yang layak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

d) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota mengalami kendala karena
pemeliharaan pos perlintasan sebidang KA karena sarana dan prasarana banyak yang mengalami kerusakan. Terdapat 9 orang petugas perlintasan tidak lolos seleksi P2K

e) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor karena alat uji harus dalam keadaan standar berdasarkan ambang batas

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sosialisasi terhadap pengusaha angkutan untuk menyiapkan angkutan yang layak sesuai dengan standar kementerian perhubungan

b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. Diusulkan penambahan biaya perawatan dan penggantian sarpras yang rusak. diajukan seleksi P2K petugas keamanan perlintasan pada tahun 2024

c) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor alat uji harus dilakukan perawatan setahun sekali karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perhubungan, dapat diketahui capaian rata-rata capaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 95,99%. Rata-rata capaian kegiatan adalah 87,09%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan Capaian Kinerja urusan Perhubungan dengan indikator Indeks Infrastruktur Perhubungan dari target 78,44% capaian realisasi sebesar 75,30%. Adapun dalam pelaksanaan urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Perkembangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	73,55	78,44	75,30	95,99	80,44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen, 2023

Indeks Infrastruktur Perhubungan diperoleh dengan cara menghitung persentase dari perbandingan (persentase ketersediaan perlengkapan jalan + persentase ketersediaan terminal tipe-C + persentase alat uji KIR dalam keadaan baik) : 3

Keterangan: Persentase ketersediaan perlengkapan jalan = jumlah perlengkapan jalan (LPJU, rambu dan APILL) yang tersedia / jumlah perlengkapan jalan yang ideal x 100%

Persentase ketersediaan terminal tipe-C = jumlah terminal yang terbangun / jumlah terminal yang ideal x 100%

Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik = jumlah alat uji KIR dalam keadaan baik / jumlah total alat uji KIR x 100%

Tabel 3. 43 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen

No	Kelengkapan Jalan	Jumlah	Kebutuhan	%
1	LPJU	6.528	14.000	46,63

2	APILL	58	60	96,67
3	Rambu	2.751	8.000	34,39
	Persentase I			59,23
4	Terminal	4	6	66,67
	Persentase II			66,67
5	Alat Uji Kir	9	9	100,00
	Persentase III			100,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen, 2023

Dengan demikian perhitungan Capaian kinerja adalah sebagai berikut :(59,23+66,67+100) / 3= 75,3%

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 44 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI-KA		A PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	%	30,20	32,16	106,49	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi OPD dan Desa telah melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan baik yakni sebanyak 164 PPID	
				1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	%	154	164	106,49	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi OPD dan Desa telah melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan baik yakni sebanyak 164 PPID	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jam siar Kebumen Tv dan Radio In Fm	jam	11.315	11.315	100		
				b Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	OPD dan desa	154	164	106,49	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi OPD dan Desa telah melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan baik yakni sebanyak 164 PPID	
				c Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,	jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	kali	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Media dan Kemitraan Komunitas							
				B PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	Nilai	3,85	4,44	115,02	Kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik meningkat	
				1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	7	7	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kondusifitas Wilayah								
				2 Kegiatan Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	aplikasi	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	aplikasi	100	100	100		
				b Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa	Desa	100	100	100		
				C PROGRAM PENUNJANG	Cakupan pelayanan	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan daerah						
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	10	100		
				a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100		
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100		
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	20	100		
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	2	2	100		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	250	250	100		
					Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	ASN	30	30	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Peraturan Perundang-Undangan	implementasi peraturan perundangan-undangan						
				4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	12	100		
				5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	4	4	100		
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	3	3	100		
				6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi,	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Sumber Daya Air, dan Listrik						
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Pemeliharan Peralatan dan Mesin	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara	unit	3	3	100		

2) Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika adalah:

Belum lengkapnya pedoman formal untuk manajemen SPBE seperti pedoman manajemen risiko, manajemen asset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK. Hal ini menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan pedoman manajemen SPBE dapat merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Permenpan RB nomor 5 tahun 2020, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021, dan Permen PPN/Bappenas nomor 16,17,18 tahun 2020. Pedoman ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen SPBE yang lebih optimal.
b) Perlu implementasi pedoman yang dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah sehingga terjadi keseragaman dalam penerapan dan dalam pemenuhan indikator serta kriteria penilaian.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata- rata capaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota adalah sebesar 107,27%. Adapun rata-rata capaian kegiatan dari seluruh program adalah 101,62%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya tata kelola SPBE. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 45 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks SPBE	Indeks	3,44	3,45	3,70	107,24%	3,60

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pada tahun 2023 pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selama periode 2023 adalah nilai indeks SPBE 3,70 atau sudah dapat menggambarkan predikat **sangat baik** dalam penerapan SPBE.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
b) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
e) Program Pengembangan UMKM.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 46 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		A PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	persen	40	83,33	208	Dari target penilaian terhadap 12 koperasi terealisasi 25 koperasi dinyatakan koperasi sehat.	
				1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/ Kota	Unit	115	174	151,30	dari target 115 koperasi patuh terealisasi 174 koperasi patuh. dan masih terdapat 227 koperasi yang belum patuh.	.
				a Sub.Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan	Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap	Unit	115	174	151,30	dari target 115 koperasi patuh terealisasi 174	Melakukan Pendampingan dan pembinaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Peraturan Perundang-undangan Kab/ Kota					koperasi patuh. dan masih terdapat 227 koperasi yang belum patuh.	kepada koperasi yang belum patuh.
				B PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	persen	20.36	20.36	100		
				1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan	Keg	4	4	100		
				a Sub.Kegiatan Peningkatan	Jumlah SDM Koperasi yang	orang	135	155	114,8	dari target SDM koperasi 135	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kompeten					orang terealisasi 155 orang yang kompeten. Tetapi masih ada pengurus koperasi 1048 orang belum kompeten.	
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	persen	29.59	29,59	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberda-yaan dan Perlindungan Koperasi	orang	140	174	124	dari target 140 koperasi terealisasi 174 koperasi yang terfasilitasi pendampingan	
				a Sub.Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan	orang	140	174	124	target pelatihan dari 140 koperasi	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					terealisasi 174 koperasi.	
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas	persen	10,89	12.42	114	Di tahun 2023 terseralisasi 19.925 UKM yang sudah mendapatkan fasilitasi perizinan (NIB, PIRT, Halal, Merk, Haki)	
				1 Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Usaha Mikro yang	Unit	308	308	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	terbina						
				a Sub.Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang teridentifikasi berpotensi Naik Kelas	Unit	600	600	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi dan standar mutu produk	Unit	30	30	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Bimtek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas UMKM	Kegiatan	7	24	342	Meningkatnya jumlah kegiatan bimtek bagi pelaku UMKM naik kelas	
				E PROGRAM PENGEMBANG-AN UMKM	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya	Unit	40	40	100		
				1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terselenggara nya jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100	100	100		
				a Sub.Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi	Jumlah Nasabah yang mendapat kan subsidi	Nasa-bah	1.000	1.132	113,2	Jumlah debitur yang mendapatkan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	bunga melalui penyalur (BUMD/BUMS)					subsidi bunga melalui penyaluran (BUMD/BUMS) melebihi target mencapai 1.132 debitur	
					Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain teknologi	UMKM	225	520	231.1	Jumlah pelaku UKM yang terfasilitasi melebihi target awal, yakni 520 UKM.	

2) Permasalahan

a) Masih kurangnya kompetensi SDM koperasi baik pengurus maupun pengawas dalam mengelola koperasi, sehingga pertumbuhan koperasi relatif lambat.
b) Belum optimalnya koperasi untuk berkembang secara mandiri.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Peningkatan kompetensi SDM baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan produktif.
b) Perlu adanya peningkatan dukungan dari stakeholder untuk meningkatkan produktivitas koperasi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Koperasi Dan UMKM diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 124,4%. Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 115,06% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan.

5) Capaian Kinerja Urusan

Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Koperasi Sehat	%	36.67	40	83,33	208,33	63.33
Prosentase Usaha Kecil menengah yang berkualitas	%	10.41	10.89	12.42	114	13.22

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2023

Kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 meningkat dari 36,67% menjadi 83,33% dalam hal urusan persentase koperasi sehat. Sedangkan cakupan persentase usaha kecil menengah yang berkualitas dari tahun 2022 yaitu 10,41% pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,42%.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2023 mempunyai target penilaian sebanyak 30 koperasi, dengan mengambil sampel sebanyak 30 koperasi untuk dilakukan penilaian. Hasil penilaian koperasi dalam satu tahun berjalan dari 30 koperasi terdapat 25 koperasi sehat, 5 koperasi cukup sehat, dan tidak terdapat koperasi dalam pengawasan maupun pengawasan khusus. Sehingga indikator persentase koperasi sehat dapat diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$Persentase\ Koperasi\ Sehat = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\ \% = \frac{25}{30}\ x\ 100\%$$
$$= 83.33\ \%$$

Indikator kinerja Persentase Koperasi yang sehat di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 83,33 % bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 40%, dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan koperasi sehat dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\% = \frac{83{,}33}{40}\ x\ 100\%$$
$$= 208.33\%$$

Nilai realisasi target persentase koperasi sehat sebesar 88,33% dengan target sebesar 40% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya jumlah koperasi sehat sebesar 208,33% lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 110,02% atau naik sebesar 98,30%.

Perkoperasian di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian meningkatkan SDM perkoperasian tidak lepas dari pematuhan prinsip koperasi, pengelolaan keuangan yang baik, diversifikasi usaha, pengembangan produk dan layanan, peningkatan keanggotaan, partisipasi anggota.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2023 mempunyai target UKM yang tersertifikasi sebanyak 1.485 UKM, dengan UKM tersertifikasi sebanyak 19.925 UKM yang difasilitasi dinas maupun sertifikasi secara mandiri yang dilakukan oleh UKM. Sehingga indikator Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas dapat diperoleh perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$Persentase\ Peningkatan\ UMKM\ yang\ Berkulitas$$

$$= \frac{(\ jumlah\ UKM\ yang\ bersertifikat\ tahun\ (n) - \ Jumlah\ UKM\ yang\ bersertifikat\ tahun\ (n-1)}{Jumlah\ UKM\ yang\ bersertifikat\ tahun\ (n-1)}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{19.925 - 1.485}{1.485}\ x\ 100\% \ = \ 12{,}42\ \%$$

Indikator kinerja Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 12,42% bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,53%, dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan UMKM dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\% \ = \frac{12{,}42}{10{,}89}\ x\ 100\% \ = 114{,}05\%$$

Nilai realisasi target Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas sebesar 12,42% dengan target sebesar 10,89 % maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas sebesar 114,05%lebih tinggi dari capaian tahun 2022.

Adapun rincian persentase jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif di Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 48 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	KUD	21	2	23
2	Koperasi Pertanian	7	6	13
3	Koperasi Nelayan	5	0	5
4	Kopti	1	0	1
5	Kopinkra	2	0	2
6	Kopontren	3	6	9
7	Kopkar	11	3	14
8	Koperasi Angkatan darat	2	0	2
9	Koperasi kepolisian	1	0	1
10	Koperasi Serba usaha	46	9	55
11	Koperasi Pasar	3	2	5
12	Koperasi Simpan Pinjam	47	3	50

No	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
13	Koperasi Angkutan Darat	1	0	1
14	Koperasi Pegawai Negeri (KPRI)	88	1	89
15	Koperasi Wanita	4	0	4
16	Koperasi veteran	1	0	1
17	Koperasi Wredatama	6	1	7
18	Koperasi Pepabri	3	0	3
19	Koperasi Lainnya	78	0	78
20	KSPPS	29	6	35
21	Koperasi Sekunder	2	1	3
Jumlah		361	40	401

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah 401 koperasi yang berada di Kabupaten Kebumen, terdapat 361 Koperasi aktif dan 40 Koperasi tidak aktif.

Adapun untuk sebaran keberadaan UMKM di Kabupaten Kebumen dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 49 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Adimulyo	1.973
2	Ambal	1.113
3	Ayah	885
4	Buayan	14
5	Buluspesantren	3.371
6	Gombong	4.478
7	Karanganyar	767
8	Kebumen	7.612
9	Klirong	3.942
10	Kutowinangun	1.089
11	Kuwarasan	1.205
12	Mirit	1.169
13	Padureso	457
14	Petanahan	1.452
15	Poncowarno	1.041
16	Prembun	1.106
17	Puring	1972
18	Rowokele	1.436
19	Sempor	1.505
20	Sruweng	1.766

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
21	Bonorowo	878
22	Pejagoan	857
23	Karangsambung	1.388
24	Alian	3.504
25	Sadang	667
26	Karanggayam	503
	Total	**46.100**

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen sebanyak 46.100, tersebar didalam 26 Kecamatan. Adapun dari 26 Kecamatan tersebut terdapat 3 kecamatan yang memiliki UMKM terbanyak yaitu 7.612 UMKM di Kecamatan Kebumen, 4.478 UMKM di Kecamatan Gombong dan 3.942 UMKM di Kecamatan Klirong. Adapun yang terendah adalah Kecamatan Buayan yang hanya terdapat 14 UMKM.

12. Urusan Penanaman Modal

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b) Program Promosi Penanaman Modal
c) Program Pelayanan Penanaman Modal
d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 50 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
18	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		A	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/ PMA	Milyar Rupiah	401	628,23	156,66	Realisasi Investasi mencapai 156,66% melebihi target yang ditetapkan krn adanya kegiatan promosi investasi seperti : KIE, IBIF, Sosialisasi dan fasilitasi perizinan mendorong tumbuhnya iklim investasi di Kabupaten Kebumen Sehingga realisasi mencapai Rp.628.230.300.587 (156,66%). Untuk menghitung IKU (Persentase Peningkatan Investasi)dengan rumus: Jumlah nilai investasi berskala nasional dlm rupiah tahun 2023	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
										Rp.628.230.300.587 dikurangi Rp.388.644.285.520 (nilai investasi th 2020) dibagi Rp.388.644.285.520 kali 100 = 61,64 dikurangi 45,29 (peningkatan investasi th 2022) sama dengan 16,37. Dengan demikian Persentase peningkatan Investasi th 2023 16,35 tercapai diatas target yang ditetapkan 1.	
				1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dok	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dok	1	1	100		
				b Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	kegiatan	1	1	100		
				2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	Dok	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian	a Penyusunan Rencana Umum	Jumlah peraturan	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	daerah RUPM daerah kabupaten/kota						
				b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten / kota	Dokumen	1	1	100		
				B. Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	5	4	80	Dokumen LOI yang direncakan 5 tetapi realisasinya 4 (PT Sugeng Joyo Lautan Semesta, UMNU, PKU Muhammadiyah Sruweng, Naura Amusement Park)	Mengoptimalkan komunikasi dengan Pelaku Usaha yang merencanakan LOI.
				1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan kegiatan	kegiatan	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/ Kota	promosi penanaman modal						
				a Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kabupaten / kota	Dokumen	2	2	100		
				b Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan	persen	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
					berusaha terintegrasi secara elektronik						
				1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah dokumen perizinan dan non- perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				b Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Dok	650	650	100		
				c Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	kali	10	10	100		
				d Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Keg	10	10	100		
				D PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai	persen	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				PENANAMAN MODAL	dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku						
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	persen	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	kali	60	60	100		
				b Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	kali	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				c Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	kali	40	40	100		
				E PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	persen	100	100	100		
				1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah	a Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
				F Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	dok	13	13	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	7	7	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dok	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
					perangkat daerah						
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	47	47	100		
				a pendidikan pelatihan pegawai	Jumlah yang mengikuti	orang	47	47	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				berdasarkan tugas dan fungsi	pendidikan dan pelatihan						
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	80	80	100		
				g Penatausahaan Arsip dinamis SKPD	Jumlah arsip yang tertata	boks	25	25	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	3	3	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	3	3	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah BUlan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumla unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	21	21	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah pemeliharaan,	unit	20	20	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				Operasional atau Lapangan	jumlah biaya pajak kendaraan bermotor						
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang dipelihara	unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	50	50	100		
				d Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	unit	1	1	100		

2) Permasalahan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 503/168 Tahun 2022 Tentang Standar Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, pelayanan pada masyarakat mempunyai SOP, memiliki durasi waktu tertentu dan penyelesaiannya merupakan unsur prioritas pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pada penyelesaian tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 2163 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis yang didalamnya telah tersusun alur tahapan setiap kegiatan baik kegiatan penunjang IKU maupun kegiatan prioritasnya. Peta Proses Bisnis telah memiliki dokumen turunannya yaitu SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 5003 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang mencakup alur, waktu, dan tahapan setiap kegiatan/aktivitas yang sering dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah dilakukan publikasi dan legalitas melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 168 Tahun 2022 yang telah mencakup perizinan berusaha dan nonperizinan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal, diantaranya :

a) Belum maksimalnya penyebarluasan informasi terkait pemberian fasilitas/insentif daerah,
b) Kurang selarasnya regulasi satu dengan lainnya
c) Keterbatasan dokumen publik terkait peta potensi investasi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian optimalisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan antara lain :

d) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP)
e) Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD teknis terkait
f) Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif
g) Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (SBK)
h) Data profil peluang investasi belum lengkap fiturnya
i) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan

perizinan dan nonperizinan guna kegiatan usahanya.

j) Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat

k) Kurangnya petugas pelayanan di MPP.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Telah diterbitkannya Peraturan Bupati terkait pemberian fasilitas/Insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kebumen berupa Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b) Program Promosi Penanaman Modal;

a. Telah dibangun Aplikasi berbasis Web yang terintegrasi dengan SIPERI (Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi) berupa GALAKSI (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi).

b. Telah diberikan apresiasi dalam rangka AUT (Anugrah Usaha Terbaik) Tahun 2023 kepada Kategori usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Telah diselenggarakan kegiatan promosi penanaman modal berupa IBIF (*International Business Invesment Forum*) Tahun 2023 dalam rangkaian kegiatan KIE (*Kebumen International Expo*) tahun 2023 dan diselenggarakan mini expo serta bisnis matching dan bisnis klinik pada kegiatan Invesment Center. Penyelenggaraan forum bisnis, dan penandatanganan *Letter of intent* (LOI) dokumen kepeminatan investasi.

c. Telah diikuti CJIBF (*Central Java Invesment Business Forum*) tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Telah diikuti *Invesment Chalenge* yang diselenggarakan oleh BI (Bank Indonesia) Perwakilan Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berkontribusi pada CJIP (*Central Java Invesment Platform*) berupa IPRO (*Invesment Project Ready to Offer*) yang potensial di Pengembangan Investasi Kabupaten Kebumen.

c) Program Pelayanan Penanaman Modal, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan:

a. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen.

b. Sosialisasi Fasilitasi Layanan Izin usaha bagi UMKM di 15 lokasi diantaranya : Kec. Ayah, Kec. Ambal, KPPS Ummat, Pasar Tumenggungan, Kec.Karanggayam, Asosiasi UMKM Petanahan,

Stand di KIE, Toserba Jadi Baru, Kec. Klirong, Kec. Buluspesantren, Kec. Kuwarasan, Gedung PLUT, Kec. Padureso, Kec. Karanggayam, dan Kec. Karanganyar.

c. Penyelesaian Layanan Pengaduan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Penanaman modal, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 106,11%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tindak lanjut berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen, antara lain :

a) Pengadaan sarana prasarana penunjang layanan secara berkala dan upaya dalam melakukan perbaikan/pemeliharaan guna meningkatkan kualitas layanan perizinan
b) Pemeliharaan pada sistem perizinan (Siperi) dan beberapa perubahan guna memudahkan proses perizinan kepada masyarakat
c) Penataan arsip dan monitoring arsip secara bertahap
d) Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK
e) Upaya update data pada aplikasi Galaksi (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi)
f) Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional.
g) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan, atau gathering terhadap pelaku usaha
h) Koordinasi terkait pembahasan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
i) Melakukan analisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
j) Penyelenggaraan seminar penanaman modal, forum bisnis, pameran penanaman modal, dan publikasi informasi potensi investasi baik melalui digital maupun media cetak.
k) Pemetaan kebutuhan SDM, dilakukan bimbingan/pelatihan dan evaluasi pada pegawai
l) Percepatan penanganan proses izin, dan penanganan pengaduan masyarakat

5) Capaian Kinerja Urusan

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal sebanyak 1 Indikator yang seluruhnya telah mencapai target tahunan yang tetapkan di dalam RPJMD 2022-2026. Secara lengkap capaian kinerja Urusan Penanaman Modal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 51 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Peningkatan Investasi	Persen (%)	45,29	1	61,64	16,35 (61,64-45,29)	6

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Target nilai investasi PMA / PMDN tahun 2023 adalah Rp.401.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp.628.230.300.587,- atau prosentase mencapai 156,66% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Investasi dengan rumus: Jml nilai investasi berskala nasional dalam rupiah tahun (n) yaitu tahun 2023 senilai Rp.628.230.300.587 dikurangi Rp.388.644.285.520 (nilai investasi berskala nasional dalam rupiah tahun 2020) dibagi 388.644.285.520 (nilai investasi berskala nasional dalam rupiah tahun 2020) kali 100 sama dengan 61,64 dikurangi 45,29 (peningkatan investasi th 2022) sama dengan 16,35. Dg demikian Persentase peningkatan Investasi th 2023 sebesar 16,35 tercapai diatas target IKU urusan yang ditetapkan sebesar 1.

Fungsi utama Pemerintah Daerah adalah melayani masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan

kesetaraan menjadi hal yang penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat, memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
c) Program Pengembangan Kepramukaan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 52 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDA-AN DAN OLAHRAGA		A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	3,07	48,95	1.594,5	Adanya tambahan anggaran (aspirasi masyarakat) kepada organisasi Pemuda sehingga organisasi pemuda di Kecamatan menjadi aktif	
				1 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemu-da Pelopor Kab./Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Keg	21	48	228	Adanya tambahan anggaran (asirasi masyarakat) kepada organisasi Pemuda sehingga organisasi pemuda di Kecamatan menjadi aktif	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggara-an Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab./Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Orang	1.094	1.094	100		
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi Olahraga (persen)	%	56,67	59,37	104,7	Mendapatkan prestasi di event NPC dan di Prorprov mendapatkan peningkatan rangking	
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	7	7	100		
			Peningkatan kualitas	a Sub Kegiatan Koordinasi,	Jumlah lokasi pemeliharaan	Lokasi	50	61	122	Adanya tambahan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			sumber daya manusia	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga					anggaran (aspiasi masyarakat) menambah sasaran pemeliharaan prasarana olah raga sampai dengan desa-desa	
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	Kegiatan	3	3	100		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut serta dalam penye - lenggaraan kejuaraan	Orang	4.000	10.135	277	Bertambahnya keikutsertaan event NPC dan Prorprov	
				3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	13	25	188	Bertambahnya event NPC dan Prorprov	.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengeta-huan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	13	13	100		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	b Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	60	69	115	Tersedianya anggaran yang cukup untuk diberikan kepada 69 atlet berprestasi	
				4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	Keg	2	4	200	Bertambahnya anggaran pada KORMI dan SOINA	
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah unit organisasi yang dibina	Unit	2	4	200	Bertambahnya anggaran pada KORMI dan SOINA	
				C PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKA-AN	Cakupan prestasi kepramukaan	%	66,67	66,67	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Keg	13	13	100		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan.	Orang	5.040	23.814	472	Adanya tambahan DAU *Emarked* untuk kegiatan kemah wisata Pramuka yang melibatkan 14.614 peserta	

2) Permasalahan

a. Terdapat sarana prasarana olahraga yang rusak sebagai tempat atau alat untuk kegiatan olahraga
b. Kurangnya minat masyarakat berolahraga
c. Rendahnya prestasi olah raga di Kebumen

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana di kabupaten kebumen dan mengadakan fasilitas olahraga baru
b. Menambahkan fasilitas olahraga terbuka yaitu Joging track di alun-alun
c. Membuat pembinaan olahraga secara prioritas dan dengan keikutsertaan kompetisi di luar daerah.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kepemudaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 599,73%. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 136%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan kepemudaan dan olahraga melalui pelaksanaan program diatas adalah persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase prestasi olahraga, yang kesemuanya mencapai target, bahkan persentase organisasi pemuda yang aktif melebihi target RPJMD, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 53 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	34,42	3,58	45,95	1.594,5	3,92
Persentase Prestasi Olahraga	%	66,66	55	69,47	107,94	70

Pada indikator sasaran persentase organisasi pemuda yang aktif realisasinya sebesar 34,42% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 3,58% atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 1.594,5%,

Sedangkan sasaran persentase prestasi olahraga realisasinya sebesar 59,37% atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 107,94%.

Indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dihitung dengan rumus = Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda x 100%. Selanjutnya untuk persentase prestasi olahraga dihitung dengan rumus = Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi (mendapat medali emas/perak/perunggu di tingkat provinsi dan nasional) / Jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga x 100%.

Tabel 3. 54 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi

Tahun	Capaian Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		Capaian Prestasi Olahraga	
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi (mendapat medali emas/ perak/ perunggu di tingkat Provinsi dan Nasional)	Jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga
2021	42	122	16	24
2022	42	122	19	32
2023	68	148	11	25

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, 2023

14. Urusan Statistik

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 55 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	A PROGRAM PENYELENGGA-RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	dokumen	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	OPD	50	50	100		

2) Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan SDM dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem serta kegiatan pengelolaan data
b) Belum optimalnya respon beberapa OPD dalam pengumpulan data.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

a) Optimalisasi dan peningkatan kompetensi Sumber Daya yang ada.
b) Sosialisasi, pelibatan stakeholder, dan penguatan koordinasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan data.
c) Pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Program Penyelenggaraan statistik Sektoral adalah 100%. Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan *website* Satu Data. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase OPD yang Mengisi *Website* Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2023

Capaian kinerja urusan statistik selama periode 2023 adalah seluruh OPD di Kabupaten Kebumen mengisi portal Satu Data sesuai SOP dan tersedianya Buku Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

15. Urusan Persandian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 57 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI-KA		A PPROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase desa dan kelurahan yang mene-rapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	61,30	70,65	115,25		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa dan kelurahan yang mene-rapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	61,30	70,65	115,25	Tingginya respon desa/kel dalam penerapan TTE yakni 325 desa/kel.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mene-rapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Desa dan Kelurahan	282	325	115,25	Tingginya respon desa/kel dalam penerapan TTE yakni 325 desa/kel.	
				b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mene-rapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Desa dan Kelurahan	282	325	115,25	Tingginya respon desa/kel dalam penerapan TTE yakni 325 desa/kel.	

2) Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan persandian adalah sebagai berikut:

a) Masih adanya desa yang belum menerapkan Tanda Tangan Elektronik.
b) Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat desa dapat menghambat penggunaan Tanda Tangan Elektronik,

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut:

a) Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
b) Peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat desa untuk mendukung implementasi Tanda Tangan Elektronik.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah 115,25%. Adapun rata-rata capaian kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 115,25%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 58 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	39,57	61,35	70,65	115,25	100

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2023

Capaian kinerja urusan persandian selama periode 2023 adalah terlaksananya penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Kepala OPD dan 325 Kepala Desa/Kelurahan.

16. Urusan Kebudayaan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengembangan Kebudayaan; dan

b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 59 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		A	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan (%)	%	34,38	44,44	129,27	Program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya seni dalam budaya dan kehidupan membantu meningkatkan apresiasi dan partisipasi dalam kesenian.	
				1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	%	39	44,57	114,28	Semakin banyak orang yang mengakui nilai dan pentingnya seni dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar kemungkinan akan ada dukungan untuk pengembangan dan pertumbuhan kesenian.	
			Peningkatan kualitas infrastruktur	a	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Paket Pemeliharaan dan	Paket	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan opengov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana		Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	pengelolaan Kampung Jawa Kebumen						
						Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen	Kali	1	1	100		
				b	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina	Orang	50	50	100		
						Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen	Orang	50	50	100		
						Jumlah peserta sosialisasi	Orang	50	50	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						tentang Pemajuan Kebudayaan						
				2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggarakan	kali	17	17	100		
				b	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	jenis	25	25	100		
22	Kebudayaan	Dinas Pariwisata		B	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	%	25,27	76,15	301,36	Kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya semakin	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		dan Kebudayaan			CAGAR BUDAYA	yang Dilestarikan					meningkat di masyarakat.	
				1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	%	25	76,15	304,62	Semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya melestarikan cagar budaya, semakin besar dukungan untuk pengelolaannya.	
			Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan open-gov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	a	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi/ dikelola secara terpadu	objek	6	6	100		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	91	91	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah peserta bimtek juru kunci, komunitas dan pemerhati cagar budaya	orang	50	50	100		
			sda	b	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dialih mediakan	objek	1	1	100		
						Jumlah cagar budaya yang didata termasuk dalam wilayah geopark	objek	30	30	100		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	1	1	100		

2) Permasalahan

Capaian indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan sebesar 60,30%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 29,82%, menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam upaya pelestarian budaya. Meskipun demikian pencapaian yang signifikan ini mungkin juga memberikan beberapa permasalahan/kendala yang perlu diperhatikan. Berikut adalah analisis mengenai permasalahan/kendala :

a) Ketidakpastian Kualitas Pelestarian:
   a. Permasalahan: Meskipun angka persentase tinggi, masih mungkin terdapat ketidakpastian terkait kualitas pelestarian budaya.
   b. Analisis: Persentase tinggi tidak selalu mencerminkan keberlanjutan atau keaslian pelestarian. Mungkin ada aspek-aspek tertentu yang terlupakan atau pelestarian yang tidak merata di berbagai elemen budaya.

b) Tingkat Keberlanjutan dalam Jangka Panjang:
   a. Permasalahan: Pencapaian tinggi saat ini belum menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang.
   b. Analisis: Keberlanjutan pelestarian budaya memerlukan upaya berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Terlalu fokus pada pencapaian target singkat mungkin mengabaikan aspek keberlanjutan ini.

c) Partisipasi Masyarakat yang Tidak Merata:
   a. Permasalahan: Capaian yang tinggi mungkin mencerminkan partisipasi tinggi dari beberapa kelompok masyarakat, sementara kelompok lain mungkin kurang terlibat.
   b. Analisis: Perlu memastikan bahwa upaya pelestarian mencakup seluruh komunitas dengan cara yang adil dan merata.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, beberapa strategi yang akan diimplementasikan:

a) Pemberdayaan Komunitas Lokal:

   Dengan Memperkuat pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pelestarian budaya. Ini menciptakan rasa tanggung jawab dan keberlanjutan dalam menjaga warisan budaya.

b) Pengembangan Program Edukasi Budaya:

   Dengan meningkatkan program edukasi budaya yang melibatkan masyarakat, pelaku pariwisata, dan generasi muda. Peningkatan

pemahaman akan warisan budaya akan menciptakan kesadaran dan dukungan yang lebih besar.

c) Digitalisasi dan Aksesibilitas Informasi:

Dengan mengadopsi teknologi digital untuk mengarsipkan, mempromosikan, dan membuat akses lebih mudah terhadap informasi budaya. Ini dapat melibatkan pengembangan platform daring dan aplikasi yang mendukung interaksi virtual dengan warisan budaya.

d) Program Kreativitas dan Seni Lokal:

Dengan mendukung dan mempromosikan program seni dan kreativitas lokal yang melibatkan masyarakat dalam produksi dan ekspresi seni. Ini dapat mencakup pameran seni, pertunjukan budaya, dan kegiatan kreatif lainnya.

e) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan:

Dengan mengembangkan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk memasukkan materi pelajaran dan program pelestarian budaya dalam kurikulum. Ini dapat menciptakan pemahaman budaya yang lebih dalam sejak dini.

f) Penelitian dan Inventarisasi Budaya:

Dengan melakukan penelitian dan inventarisasi secara rutin untuk memastikan bahwa semua elemen budaya terdokumentasi dan mendapatkan perhatian yang memadai. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya.

g) Diversifikasi Pendekatan Pelestarian:

Dengan menerapkan pendekatan pelestarian yang beragam untuk mencakup berbagai aspek budaya, termasuk tradisi lisan, seni rupa, dan praktik budaya lainnya. Diversifikasi ini dapat memastikan keberlanjutan pelestarian.

h) Pengembangan Destinasi Budaya:

Dengan mengembangkan destinasi budaya yang lebih luas dan menarik untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata dapat mendukung perkembangan destinasi tersebut.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian program adalah 215,32% atau kategori hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 209,45%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja

program adalah 212,38% atau kategori sangat tinggi. Secara umum, baik program maupun kegiatan kebudayaan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

5) Capaian Kinerja Urusan

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah (objek di duga cagar budaya/ODCB) yang ada hingga tahun 2023 yang terdata sebanyak 130 buah, dan yang dilestarikan 99 buah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian objek di duga cagar budaya/ODCB dan Cagar Budaya/CB. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, melestarikan seni budaya asli Kebumen dan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017.

Tabel 3. 60 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2023

No	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR 2026
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1.	Persentase budaya yang dilestarikan	42,62	29,82	44,44	129,27	43,05

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2023

Persentase budaya yang dilestarikan pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 44,44% dengan capaian kinerja 129,27%. Dan target akhir RPJMD mencapai 103,23%. Indikator Persentase budaya yang dilestarikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2023

TAHUN	PERSENTASE KESENIAN YANG DIKEMBANGKAN	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	TARGET	CAPAIAN
	%	%	%	%
2020	39,34	21,98	18,16	30,99
2021	60,66	0	20,82	30
2022	42,62	26,92	25,05	34,89
2023	44	76,15	29,82	88,08

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan, dengan Rumus = Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 62 Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan

TAHUN	JUMLAH BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	TOTAL BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TERDATA	TARGET	CAPAIAN
			%	%
2020	20	91	17,58	21,98
2021	0	91	19,78	0
2022	35	130	21,98	26,92
2023	99	130	25,27	76,15

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Dari tabel diatas pada tahun 2020 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 20 objek cagar budaya / diduga cagar budaya dari 91 objek yang terdata. Pada tahun 2021 karena ada pandemi Covid19 jadi hampir semua kegiatan terhenti, karena ada r*ecofusing* anggaran. Dan ditahun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 35 objek cagar budaya/ diduga cagar budaya, dari 130 objek yang terdata. Pada tahun 2022 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 55 objek cagar budaya/diduga cagar budaya dari 130 objek yang terdata. Dan di tahun 2023 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 99 objek dari dari 130 objek yang terdata.

Indikator persentase kesenian yang dikembangkan, dengan rumus: Jumlah kebudayaan /jumlah kegiatan x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 63 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan

TAHUN	JUMLAH KEBUDAYAAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
			%	%
2020	61	24	18,75	39,34
2021	61	37	21,88	60,66
2022	61	26	28,13	42,62
2023	63	28	34,38	44,44

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Capaian kinerja urusan kebudayaan menunjukkan bahwa secara umum kinerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dilaksanakan tepat waktu.

17. Urusan Perpustakaan

1) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 64 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA-AN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	%	12,93	18,85	145,78	Adanya dukungan dan kolaborasi pegiat, komunitas dan bunda literasi serta CSR	-
				1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah / Kabupaten	%	32,87	32,87	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas	a Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	5	5	100	-	-
				b Sub kegiatan peningkatan	Jumlah Tenaga Perpustakaan	orang	25	25	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota						
			Sda	c Sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	Buku	1.500	1.500	100	-	-
				2 Kegiatan Pembudayaan Gemar	Persentase Jumlah pengunjung ke	%	19,47	19,71	101,23	Adanya pameran buku, akademi	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan					literasi dan layanan wisata edukasi	
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas	a Sub Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.	Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan Pendidikan	kali	80	80	100	-	-
				b Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	5	5	100		
				B PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	%	60	60	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	dokumen	1	1	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas	a Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	6	6	100	-	-

2) Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target program dan kegiatan yaitu :

a) Jumlah pustakawan di Kabupaten Kebumen belum mencukupi.
b) Titik akses informasi layanan perpustakaan (Perpustakaan dan Perpustakaan Digital) belum merata.
c) Dukungan pegiat literasi (bunda literasi dan duta literasi) dan komunitas literasi (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Komunitas Literasi Sekolah, Institut literasi Indonesia) di Kabupaten Kebumen belum optimal.
d) Sarana prasarana layanan perpustakaan dan perpustakaan digital belum merata.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu:

a) Mengusulkan formasi Pustakawan.
b) Kerjasama dan CSR dengan PT. Enam KUBUKU Indonesia dalam rangka penyediaan layanan perpustakaan digital sekolah.
c) Mendorong Duta Literasi Kabupaten, Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan serta Desa.
d) Mengusulkan sarpras layanan perpustakaan dan perpustakaan digital yang berbasis teknologi informasi.
e)

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perpustakaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 122,89% atau kategori hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan rata-rata adalah 100,41%.

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya skor Indeks Peningkatan Literasi masyarakat menempati peringkat kelima di Jawa Tengah, adanya penghargaan perpustakaan binaan (SMKN 1 Puring) sebagai Juara Harapan 2 Lomba Perpustakaan SMA/SMK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditargetkan 12,93 dan terealisasi 18,85 atau telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini

dikarenakan banyak melakukan inovasi layanan perpustakaan, kerjasama dengan penggiat literasi, omunitas, aktif di media sosial, pengukuhan bunda literasi kabupaten dan duta literasi kabupaten. Secara lengkap capaian kinerja Urusan perpustakaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 65 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	18,69	12,93	18,85	145,78	13,06

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2023

Cara menghitung capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Jumlah Semua Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek masyarakat x 100. Semakin banyak unsur pembangun Literasi Masyarakat maka semakin baik pula Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dihasilkan. Dari target kinerja tahun 2023 yaitu 12,93 terealisasi menjadi 18,85 sehingga capaian yang didapat 145,78%.

Secara rinci perkembangan capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 66 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN	
		2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	998	1.003
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (Orang)	287.364	290.339
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Buku)	46.844	48.844
4	Prosentase Pengunjung Perpustakaan %	29,42	29,71

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2023

18. Urusan Kearsipan

1) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Program Pengelolaan Arsip. Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 67 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Kearsipan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		A PROGRAM PENGELOLA-AN ARSIP	Persentase Jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	%	74,31	74,51	100,27	Adanya tambahan pendampingan kepada pencipta arsip diluar yang direncanakan	-
				1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	50	50	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pembinaan pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan	OPD	30	50	166,67	Pengawasan kearsipan diluar OPD yang ditarget dilaksanakan dengan mengguna-kan metode zoom sebagai persipan pengawasan pada tahun	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										berikutnya	
			Sda	b Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	2.000	4.031	201,55	Banyaknya arsip inaktif dari OPD yang harus diolah oleh LKD	-
				2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Kebumen	Kegiatan	2	2	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	kali	4	4	100	-	-
				3 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi	Jumlah berkas arsip statis yang diunggah	Berkas	24	24	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	melalui JIKN						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Penggu-na	1	1	100	-	-

2) Permasalahan

Masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Sumber daya manusia belum memenuhi kriteria arsiparis pada pengelola kearsipan.
b) Pengelola arsip di OPD masih banyak belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan kearsipan.
c) Sarana prasarana kearsipan belum sepenuhnya memadai sesuai kriteria yang dibutuhkan.
d) Keterbatasan kegiatan bimtek kearsipan karena minimnya alokasi anggaran sehingga pengelola arsip belum sepenuhnya memahami pengelolaan kearsipan secara baik.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya mengatasi permasalahan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yaitu :

a) Diharapkan setiap OPD memiliki arsiparis yang betul-betul berlatar belakang pendidikan kearsipan.
b) Dilakukan bimtek kearsipan secara berkala untuk semua OPD.
c) Setiap OPD menganggarkan pemenuhan sarpras kearsipan dan mendorong untuk mengalihmediakan arsip menuju digitalisasi arsip.
d) Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bidang kearsipan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kearsipan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100,27% atau kategori hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip baku.

Tabel 3. 68 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2003

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	%	72,35	74,31	74,51	100,27	80,20

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2023

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2022-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, persentase unit kerja yang telah menerapkan arsip baku 72,35 % atau 369 unit kerja, Namun pada tahun 2023, unit kerja yang telah menerapkan arsip baku telah mencapai 380 unit kerja atau 74,51%. Dari target yang telah direncanakan, Urusan Kearsipan telah mencapai 100,27%.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pada pencipta arsip, dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kearsipan. Hal ini bertujuan untuk tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Guna mendukung terwujudnya pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku juga dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 69 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

URAIAN	2022	2023
1. Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	369	380
2. Jumlah OPD	510	510
3. Persentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	72,35%	74,51

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2023

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

memperoleh Peringkat I dengan kategori AA (sangat memuaskan) dengan nilai 96,87. Prestasi tersebut juga menempatkan Kabupaten Kebumen di peringkat 6 dengan kategori sangat memuaskan dengan nilai 92,08 berdasarkan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional Tahun 2023.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 70 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP)		A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	3,75	42,23	1.126,09	Musim Ubur-ubur pada triwulan III dan IV sejumlah 43,99% (4.007,3 ton) dari hasil total produksi perikanan tangkap laut tahun 2023 dengan harga jual rata-rata Rp.900/Kg	
				1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	9.246,23	12.898,02	139,49	Musim Ubur-ubur pada triwulan III dan IV sejumlah 43,99% (4.007,3 ton) dari hasil total produksi perikanan tangkap laut tahun 2023 dengan harga jual rata-rata	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										Rp.900/Kg	
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Subkeg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1	100		
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata wisata	b. Subkeg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	16	16	100		
					Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap	Unit	16	16	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	Kelom-pok	35	31	88,57	Ketersediaan anggaran hanya mencukupi untuk 31 kelompok (*refocusing)*	Menambah anggaran untuk pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan renstra.
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Subkeg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Kelompok	8	18	225	Adanya tambahan sumber dana dari KKP untuk pelaksanaan pelatihan sehingga jumlah peserta bisa bertambah.	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	90	300	Adanya tambahan sumber dana dari KKP untuk pelaksanaan pelatihan sehingga jumlah peserta bisa bertambah.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b. Subkeg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	10	13	130	Koordinasi dengan Rukun Nelayan untuk melaksanakan fasilitasi secara komunal per Rukun, tidak per kelompok. Sehingga semua kelompok dalam Rukun Nelayan dapat terfasilitasi.	
					Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pemantauan	Kelompok	10	13	130	Koordinasi dengan Rukun Nelayan untuk melaksanakan fasilitasi secara komunal per Rukun, tidak per kelompok. Sehingga semua kelompok dalam Rukun Nelayan dapat terfasilitasi.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				3. Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	unit	8	8	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	8	8	100		
					jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	Unit	8	8	100		
				4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan	Persentase kapal perikanan yang berizin	%	34,15	35,24	103,19	Membuka gerai perizinan kerjasama dari Provinsi sehingga memudahkan proses perizinan kapal perikanan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Subkeg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) yang diterbitkan	Dokumen	400	400	100		
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomedasi	400	400	100		
				B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	%	15,00	16,64	110,95	Adanya penambahan produksi perikanan dari BUBK dan ada peningkatan produksi perikanan (jenis ikan lele dan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										gurame) di beberapa kecamatan	
				1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	Dokumen	105	126	120	Banyaknya pertumbuhan Pokdakan karena tertarik program aspirasi sehingga hasil akhir pengajuan Pokdakan dan (Izin Usaha Perikanan) IUP meningkat melebihi target	
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis	a. Subkeg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	105	126	120	Banyaknya pertumbuhan Pokdakan karena tertarik program aspirasi sehingga hasil akhir Pengajuan Pokdakan dan (Izin Usaha	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pertanian dan Pariwisata							Perikanan) IUP meningkat melebihi target	
					Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	dokumen	50	72	144	Banyaknya penumbuhan Pokdakan karena tertarik program aspirasi	
				2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	95,44	132,07	138,38	Adanya penambahan produksi perikanan dari BUBK dan ada peningkatan produksi perikanan (jenis ikan lele dan gurame) di beberapa kecamatan	
			Pemulihan	a. Subkeg.	Jumlah Prasarana	Unit	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
					jumlah prasarana pembudidaya ikan kabupaten yang dibangun/direhabilitasi	lokasi	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b. Subkeg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan	Kelompok	41	41	100		
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	41	41	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	c. Subkeg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	50	69	138	Ada yang mengajukan lebih dari 1 uji parameter / sampel pada satu kelompok	
					Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidaya ikan	Kelompok	50	48	96	Kesadaran pentingnya uji kesehatan ikan di tingkat kelompok masih rendah	Pembinaan tentang pentingnya kesehatan ikan untuk peningkatan produksi hasil perikanan
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan	d. Subkeg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan	Kelompok	68	68	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	340	345	101,47	Target setiap kelompok sebanyak 10 orang, tetapi ada beberapa kelompok yang anggotanya lebih dari 10 orang,	
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	e. Subkeg. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah balai benih ikan (BBI) dan tambak dinas yang mendapat sarana operasional	lokasi	3	3	100		
					Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	4,09	4,09	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				C. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	%	78,57	96,43	122,73	Ada bantuan dari pusat untuk penebaran benih ikan di PUD	
				1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	lokasi	7	7	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	lokasi	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Berkualitas dan Berkelanjutan	dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	7	7	100		
				D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	%	32,50	395,18	1.215,93	Harga bahan baku naik sehingga meningkatkan harga jual produk pengolahan hasil perikanan	
				1. Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok	Kelom-pok	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan						
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Subkeg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan	Kelompok	7	7	100		
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha	unit usaha	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko						
				2. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	ton	97,33	21,58	22,17	1. Produksi garam menurun drastis karena kerusakan *tunnel* untuk produksi garam 2. Mahalnya bahan baku pengolahan hasil perikanan, Daya beli masyarakat yang menurun untuk produk hasil perikanan terutama perikanan laut	1. Pemilihan bahan baku pembuatan *tunnel* yang lebih tahan cuaca (angin, hujan, panas matahari) 2. Proses pengadaan bahan baku dari luar daerah yang lebih murah, Meningkatkan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Fasilitasi Izin Usaha Perikanan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Subkeg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN	kegiatan	3	3	100		
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	97,33	21,58	22,17	Mahalnya bahan baku pengolahan hasil perikanan, Daya beli masyarakat yang menurun untuk produk hasil perikanan terutama perikanan laut	Proses pengadaan bahan baku dari luar daerah yang lebih murah, Meningkatkan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Fasilitasi Izin Usaha Perikanan
			Pemulihan Perekonomian Daerah	b. Subkeg. Pemberian Fasilitas bagi	Jumlah Kelompok Usaha Garam (Kugar) serta Kelompok	Kelompok	7	7	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang Mendapatkan Fasilitasi Sarana Prasarana Usaha						
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	7	7	100		

2) Permasalahan

Adapun permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

a) Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga mengurangi trip melaut oleh sebab itu kapal diatas 5 Gross Ton (GT) belum bisa mendaratkan ikan di Kabupaten Kebumen dan kapal dengan ukuran dibawah 5 GT tidak optimal melaut dalam waktu satu tahun;
b) Ukuran kapal yang kecil di Kabupaten Kebumen sehingga tidak bisa melaut lebih lama dan sangat tergantung oleh cuaca;
c) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha budidaya ikan untuk mandiri;
d) Kelompok Pengawas Masyarakat terhadap Perairan Umum Daratan (PUD) masih sedikit;
e) Pengetahuan dan keterampilan SDM serta modal yang kurang;
f) Adanya hasil tangkapan yang bernilai jual rendah dalam jumlah besar yaitu ubur-ubur (Rp.900/Kg) yang memiliki porsi sekitar 43,99% terhadap total produksi satu tahun produksi perikanan tangkap laut;
g) Jumlah produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan) sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim. Sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 2023 ini sering terjadi adanya gelombang pasang yang sering terjadi, menjadi penyebab terbatasnya trip penangkapan nelayan, akibatnya hasil tangkapan belum maksimal;
h) Penanganan hasil tangkapan oleh nelayan kurang baik, sehingga menurunkan mutu dan nilai jual hasil tangkapan;
i) Produktivitas Garam yang masih rendah, karena belum semua kelompok usaha garam (KUGAR) aktif;
j) Masih tingginya ketergantungan usaha kelompok kepada bantuan pemerintah karena modal yang besar serta resiko kerusakan akibat cuaca;
k) Belum adanya produk olahan ikan di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan;
l) Belum adanya sentra kuliner atau sentra ikan segar di pusat kota atau dengan konsep pariwisata;
m) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hasil olahan ikan karena mahalnya bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan;
n) Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil perikanan yang sebagian lebih mahal daripada sumber protein lain. Hal ini dapat dilihat dari perolehan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Kebumen yang sangat rendah yaitu rata-rata dalam setahun hanya 22,33 kg/ka/ta.

3) Upaya Mengatasi Masalah

Adapun solusi untuk mengatasi masalah yang ada pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a) Pemberian Hibah Sarpras Perikanan tangkap;
b) Mengusulkan anggaran hibah melalui APBD Kabupaten, provinsi maupun pusat;
c) Melaksanakan diklat teknis budidaya ikan;
d) Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Pringtutul dan Pasar Ikan di Kutowinangun;
e) Mendorong peningkatan jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
f) Peningkatan produksi tambak udang masyarakat maupun BUBK melalui penyuluhan dan pemberian sarpras;
g) Meningkatkan restocking ikan di PUD;
h) Bimtek, Pelatihan, Sertifikasi terhadap produk dan SDM;
i) Pembangunan Prasarana Pendaratan Ikan (*Breakwater* sekaligus sandaran kapal) yang aman dan bisa untuk melakukan kegiatan penangkapan sepanjang tahun kecuali musim Angin Barat untuk kapal dengan Gross Ton (GT) kecil;
j) Meningkatkan Tonase Kapal Penangkapan Ikan dan Lama Trip;
k) Meningkatkan jumlah kapal dengan Tonase di atas 5 GT;
l) Pemberian fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang sesuai standar;
m) Memberikan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan yang baik;
n) Meningkatkan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok usaha garam, supaya produknya dapat bersaing di pasaran;
o) Menumbuhkan kemandirian kelompok usaha garam (Kugar);
p) Mendorong tumbuhnya Inovasi Produk Usaha Garam;
q) Menetapkan/mengangkat salah satu produk olahan ikan asli kebumen sebagai produk unggulan hasil olahan ikan khas kabupaten Kebumen; dan
r) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan dengan terus melakukan pembinaan poklahsar serta menjamin ketersediaan bahan baku olahan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 4 (empat) program, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 643,92% atau kategori Hasil Sangat Tinggi, hal ini menghasilkan capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Capaian program yang capaiannya sangat tinggi atau lebih dari 200% sesuai dengan ketentuan efisiensi kinerja, antara lain ;

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian 1.126,09% hal ini dikarenakan hasil tonase tangkapan ikan melambung tinggi pada Triwulan III dan IV karena banyaknya tangkapan jenis ubur-ubur dalam jumlah besar secara kuantitas namun masuk kategori nilai ekonomis rendah harga per kg sangat rendah yaitu sekitar 900 rupiah. Hal itu dapat dilihat pada kinerja Kegiatan yaitu dengan target Produksi Perikanan Tangkap tahun 2023 sebesar 9.246,23 ton dan realisasi sebesar 12.898,02 ton. Mengalami peningkatan dari tahun dasar sebesar 42,23 % yaitu angka dasar tahun 2020 sebesar 9.068,53 ton ke 12.898,02 ton.
b) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan indikator kinerja program Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan yaitu sebesar 1.215,93% hal tersebut dikarenakan kenaikan harga bahan baku sehingga menaikkan harga jual.

Sedangkan indikator kegiatan adalah Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam dengan target 97,33 ton, dan tercapai 21,58 ton dengan capaian 22,17%. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan *tunnel* garam sehingga produksi garam menurun drastis. Dan untuk pengolahan hasil perikanan mengalami penurunan tonase karena bahan baku yang mahal sehingga produksi pengolahan hasil perikanan secara umum mengalami penurunan.

Dari kedua pencapaian program dan kegiatan terlihat ada perbedaan dimana harga peningkatan nilai produksi (dalam rupiah) tercapai namun target peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (dalam ton) tidak tercapai karena penjelasan diatas.

5) Capaian Kinerja Urusan

Terdapat 1 Indikator Capaian Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun capaian kinerja urusan kelautan sesuai dengan perjanjian kinerja dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3. 71 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
		Target	Realisasai	Capaian	
Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	%	4,50	8,97	199,40	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, 2023

Tabel 3. 72 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	5.657,88 Milyar Rupiah (Target gabungan beberapa OPD)	363,94 Milyar Rupiah	6,43
2.	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	4,50 %	8,97%	199,40
		Nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	Rp. 348.999.390.298,-	Rp. 363.941.467.288,-	103,78
		Nilai Produksi perikanan budidaya (Pendukung IKU)	Rp. 150.269.795.050,-	Rp. 152.416.467.300,-	101,43
		Nilai Produksi perikanan tangkap (Pendukung IKU)	Rp. 203.618.194.185,-	Rp. 176.664.480.191,-	86,76
		Nilai produksi hasil pengolahan perikanan dan garam (Pendukung IKU)	Rp. 9.331.737.825,-	Rp. 34.860.519.797,-	373,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, 2023

Data dasar tahun 2020 untuk 3 indikator pendukung IKU memperoleh nilai produksi yaitu;

a) Nilai Produksi perikanan budidaya Rp. 130.669.387.000,-
b) Nilai Produksi perikanan tangkap Rp. 196.258.500.419,-
c) Nilai produksi hasil pengolahan perikanan dan garam Rp. 7.042.821.000,-

Dari ketiga indikator diatas memperoleh nilai produksi sebesar Rp.333.970.708.419,- jika dimasukkan ke dalam rumus peningkatan maka terjadi peningkatan Nilai Produksi sebesar 8,97% dengan Nilai Produksi pada tahun 2023 sebesar Rp. 363.941.467.288,-

$$\textit{Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan} = \frac{(\text{Rp. } 363.941.467.288 - \textit{Rp. } 333.970.708.419)}{(\textit{Rp. } 333.970.708.419)} \; X\ 100\%$$

Dari Tabel diatas jika dimasukkan ke dalam rumus maka diperoleh Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 8,97 % dari tahun dasar 2020. Dai target peningkatan 4,5 % maka diperoleh capaian 199,40% dengan predikat **"Baik Sekali".**

2. Urusan Pariwisata

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pemasaran Pariwisata;

b) Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan

c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 73 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Pariwisata	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		A	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	%	84,64	88,72	104,82	Mulai dibangunnya fasilitas wahana wisata yang modern	
				1	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)	Keg	1	1	100		
			Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan *open-gov* dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan	a	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	orang	450	450	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
			adaptif bencana									
				2	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	unit	9	9	100		
				a	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pariwisata kab/kota	Dokumen	2	2	100		
				b	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola	Destinasi	5	5	100		
				c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	3	3	100		
				3	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha	Persentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
					Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan						
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit bidang usaha pariwisata yang terbina/ sosialisasi (bidang)	bidang	2	2	100		
				b	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola pemda (obwis)	obwis	8	8	100		
				B	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	20	32,47	162,34	Mulai menggeliatnya pariwisata di Kebumen	
				1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	orang	1.300.160	2.151.109	165,45	Makin banyaknya tempat tempat wisata baru di Kebumen	
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (kegiatan)	Keg	14	14	100		
				C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	25	100	400	Mulai aktifnya para pengusaha	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
					PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						ekonomi kreatif di daerah	
				1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Keg	1	1	100		
				a	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar	orang	150	150	100		

2) Permasalahan

Capaian indikator kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,31%, yang di bawah target yang ditetapkan sebesar 1,91%, menunjukkan beberapa permasalahan dan kendala dalam sektor pariwisata yang perlu diperhatikan. Berikut adalah mengenai permasalahan/kendala yang terjadi:

a) Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Tertentu:
   a. Permasalahan: Terdapat ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan tertentu di sektor pariwisata.
   b. Analisis: Bergantung pada jenis wisata tertentu atau segmen pasar yang terbatas dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan tren wisata.

b) Ketidakpastian Ekonomi Global:
   a. Permasalahan: Ketidakpastian dalam kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk melakukan perjalanan.
   b. Analisis: Ketidakpastian terkait ekonomi global, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan ketidakstabilan pasar, dapat menjadi hambatan bagi wisatawan yang merencanakan perjalanan.

c) Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Produk Pariwisata:
   a. Permasalahan: Kurangnya inovasi dan diversifikasi dalam produk pariwisata dapat membatasi daya tarik bagi berbagai segmen pasar.
   b. Analisis: Produk dan pengalaman wisata yang kurang inovatif dan bervariasi mungkin tidak mampu menarik perhatian wisatawan dengan preferensi yang beragam.

d) Keterbatasan Anggaran Pemasaran:
   a. Permasalahan: Keterbatasan anggaran untuk pemasaran dan promosi pariwisata dapat menghambat upaya untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik destinasi.
   b. Analisis: Tanpa anggaran yang memadai untuk pemasaran, sulit untuk bersaing dan menarik perhatian wisatawan di tingkat regional atau internasional.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Melihat capaian indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar 1,31%, di bawah target 1,91%, sektor pariwisata perlu merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Berikut adalah beberapa strategi yang akan diimplementasikan:

a) Penguatan Strategi Pemasaran:

Dengan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan

agresif untuk meningkatkan visibilitas destinasi pariwisata. Pemanfaatan teknologi digital, kampanye daring, dan kemitraan dengan influencer dapat menjadi kunci dalam menarik perhatian wisatawan.

b) Diversifikasi Produk Pariwisata:

Dengan mendorong diversifikasi produk pariwisata dengan memperkenalkan pengalaman wisata baru dan mengembangkan destinasi tematik. Ini dapat mencakup pengembangan destinasi budaya, petualangan alam, atau kegiatan khusus yang dapat menarik berbagai segmen pasar.

c) Stimulasi Investasi dalam Infrastruktur Pariwisata:

Dengan mendorong investasi dalam infrastruktur pariwisata seperti pembangunan dan pemeliharaan akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas wisata lainnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan daya tarik destinasi.

d) Peningkatan Kualitas Layanan:

Fokus pada peningkatan kualitas layanan di sektor pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan bagi pelaku bisnis pariwisata. Pengalaman wisatawan yang positif akan menciptakan reputasi yang baik bagi destinasi.

e) Kolaborasi dengan Sektor Swasta:

Membangun kemitraan yang erat dengan sektor swasta untuk mendukung promosi, pengembangan produk, dan investasi dalam sektor pariwisata. Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan memperluas jangkauan pemasaran.

f) Analisis dan Pembaruan Target:

Melakukan analisis ulang dan pembaruan terhadap target kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD. Target yang realistis dan relevan perlu diperbarui berdasarkan perkembangan terkini dan potensi sektor pariwisata.

g) Kampanye Khusus dan Penawaran Promosi:

Meluncurkan kampanye khusus dan penawaran promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam periode tertentu. Penawaran khusus dapat mencakup paket liburan, diskon akomodasi, atau pengalaman unik.

h) Pelibatan Komunitas Lokal:

Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan implementasi program pariwisata. Pemberdayaan komunitas lokal akan menciptakan keberlanjutan dan dampak positif pada pembangunan ekonomi lokal.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pariwisata dapat diketahui rata-rata capaian program adalah 222,39%. Rata-rata capaian kegiatan adalah 113,09%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan pariwisata ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata.

Tabel 3. 74 Persentase Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
		Target	Realisasai	Capaian	
Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	1,91	1,31	68,63	2,24

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2023

Kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 jumlah kontribusi PAD hanya terealisasi 1,31% dari target 1,91% atau tercapai 68,63%. Penurunan minat wisatawan mempengaruhi jumlah kunjungan dan pengeluaran wisatawan sehingga PAD menurun. Kualitas layanan dan pengalaman wisata yang belum memadai juga menjadi faktor penentu dalam menarik wisatawan untuk berkunjung kembali. Peningkatan dalam hal ini dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pariwisata.

Dalam menghadapi penurunan PAD ini, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan serta upaya perbaikan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur, peningkatan promosi dan pemasaran, serta peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan dapat menjadi langkah-langkah yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang.

3. Urusan Pertanian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
e) Program Perizinan Usaha Pertanian;
f) Program Penyuluhan Pertanian.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 75 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia pertanian. Mengembangkan klaster/ kawasan pertanian	A PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	12,62	36,19	286,77	1. Rumusan perhitungan adalah jumlah kelompok yang difasilitasi sarana pertanian / total jumlah kelompok x 100% 2. Target persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 12,62%, yaitu jumlah Kelompok yang terfasilitasi sarana pertanian	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										targetkan 302 (Alsintan: 185; Perkebunan: 2; Tanaman Pangan: 32; Hortikultura : 40 Pasca Panen : 31; Pakan ternak: 12) atau 12,62% dari total 2.393 kelompok. 3. Tahun 2023 kelompok yang terfasilitasi sarana pertanian sejumlah 866 kelompok (alsintan: 639, Tanaman pangan,	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										hortikultura dan Perkebunan :175, pasca panen: 32 dan kegiatan pakan ternak: 20) atau 36,19% dari total 2.393 kelompok, hal ini dikarenakan penyesuaian ketersedian anggaran, jenis, volume serta satuan harga berdasarkan kebutuhan kelompok.	
				1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	Persen	65,00	81,61	125,55	1. Rumus peng-hitungan adalah Jumlah sarana	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										yang layak dan tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana dikali 100% 2. Target persentase penyediaan sarana pertanian berdasarkan restra tahun 2023 adalah 65 %, yaitu Jumlah sarana yang layak dan tersedia berjumlah 509 unit atau 65% dari jumlah kebutuhan sarana sejumlah 783 unit	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3. Realisasi sarana yang layak dan tersedia tahun 2023 sejumlah 639 unit atau 81,61% dari jumlah kebutuhan sarana sejumlah 783 unit.	
				a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian	Unit	509	639	125,54	1. Penambahan alsintan dari tambahan DBHCHT (90 unit), pengurangan belanja hibah (6 unit) dan tambahan belanja modal 46 unit.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										2. Penambahan alsintan DBHCHT berupa *handsprayer* dan belanja modal berupa *cultivator, power thresher,* kendaraan roda tiga, gerobak dan mesin potong rumput	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Laporan	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Teknologi dan Spesifik Lokasi						
				b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah dokumen pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida	Dokumen	2	2	100	-	-
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	2	100	-	-
				2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Persentase luas area tanaman pertanian/ perkebunan yang difasilitasi	Persen	0,79	0,63	79,75	1. Luas area yang difasilitasi tahun N dibagi Luas Area Tahun 2020 dikali 100%	Mengusulkan melalui APBN

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						2. Target persentase luas area tanaman pertanian/ perkebunan yang difasilitasi Tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 0,79% yaitu luas area yang difasilitasi tahun 2023 ditargetkan 962 Ha atau 0,79% dari jumlah lahan pertanian sejumlah 121.781 Ha (Tahun 2020) 3. Realisasi Tahun 2023 adalah 0,63%, yaitu luas area yang	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										difasilitasi hanya 775 Ha atau 0,63% dari luas lahan pertanian 121.781 Ha. Sehingga 187 ha tidak terfasilitasi pada Tahun 2023 karena penyesuaian pagu anggaran.	
				a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah lokasi sumber bibit Kelapa GEK yang difasilitasi	Lokasi	9	9	100	-	-
					Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Areal Tanam Pertanian Yang Mendapatkan Fasilitasi	Ha	775	775	100	-	-
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	3	100	-	-
				c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitasi pasca panen	Kelompok	32	32	100	-	-
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	32	32	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	Persen	123,55	123,55	100	-	-
				a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas Gizi pakan ternak	Kelompok	20	20	100	-	-
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Laporan	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
				4 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	Persen	10,00	22,00	220	1. Rumusan persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi adalah Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi dibagi jumlah pengecer obat hewan dikali 100% 2. Target tahun 2023 berdasarkan renstra adalah 10%.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3. Realisasi pengecer obat hewan yang diawasi sejumlah 13 atau 22% dari jumlah pengecer obat hewan sejumlah 59 Unit	
				a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi	Unit	10	13	130	Jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi sejumlah 13 atau 130% dibanding target 10 unit	-
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat	Laporan	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Hewan yang Beredar						
				5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	Persen	3,62	3,79	104,70	1. Rumusan per - sentase ternak yang mendapat-kan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit adalah Jumlah ternak yang mendapat-kan kartu ternak dan SKLB Tahun N dibagi populasi ternak sapi Tahun N dikali 100% 2. Target Jumlah ternak yang	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										mendapatkan kartu ternak dan SKLB tahun 2023 sejumlah 2.385 ekor atau 3,62% dari jumlah populasi ternak tahun 2023 sejumlah 65.898 Ekor 3. Realisasi jumlah ternak yang mendapatkan kartu ternak dan SKLB tahun 2023 sejumlah 2.500 ekor atau 3,79% dari jumlah populasi ternak	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										tahun 2023 sejumlah 65.898 Ekor	
				a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak	Buah	2.000	2.000	100	-	-
					Jumlah Benih/Bibit Ternak yang beredar	Ekor	2.000	2.000	100	-	-
				b. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Bibit Ternak Sapi PO Kebumen yang mendapatkan surat keterangan layak bibit (SKLB) dan LS Pro	Ekor	500	500	100	-	-
					Jumlah Benih/Bibit Ternak	Ekor	500	500	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang Beredar dan Bersertifikat						
				B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	Persen	22,00	18,20	82,73	1. Rumus persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak adalah Jumlah prasarana pertanian yang layak dibagi Jumlah kebutuhan prasarana dikali 100% 2. Target sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan renstra panjang prasarana	1. Usulan kegiatan bersumber dana APBN; 2.Desa bersama kelompok tani melakukan pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi dengan anggaran desa maupun swadaya masyarakat

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pertanian yang layak 134.970 meter atau 22% dari 613.500 meter yang dibutuhkan. 3. Realisasi tahun sampai dengan 2023 adalah 111.656 meter atau 18,2% dari panjang prasarana yang dibutuhkan yaitu 613.500 meter karena penyesuaian pagu anggaran.	3. Peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A) dalam memelihara saluran irigasi.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	Kegiatan	2	2	100	-	-
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dokumen	2	2	100	-	-
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	2	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	70	59	84,29	1. Rumusan adalah Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian tahun N. 2. Target jumlah pembangunan prasarana pertanian tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 70 Unit; 3. Realisasi pembangunan prasarana pertanian tahun 2023 adalah 59 unit , hal ini	1. Usulan kegiatan bersumber dana APBN; 2.Desa bersama kelompok tani melakukan pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi dengan anggaran desa maupun swadaya masyarakat; 3. Peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A)

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dikarenakan penyesuaian anggaran	dalam memelihara saluran irigasi.
				a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	6	6	100	-	-
					Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	6	6	100	-	-
				b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan	Unit	18	18	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	18	18	100	-	-
				c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1	1	100	-	-
					Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh/Puskeswan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	3	3	100		
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	3	100	-	-
				e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan	Unit	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Prasarana Pertanian Lainnya	Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	6	100	-	-
				3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100	-	-
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	2,89	0,25	8,65	1. Rumus persentase penurunan kejadian dan kasus Penyakit Hewan Menular adalah Jumlah kejadian penyakit atau kasus penyakit hewan menular tahun N-1 dikurangi jumlah kejadian penyakit atau kasus penyakit hewan menular tahun N dibagi jumlah kejadian penyakit atau kasus penyakit hewan menular	1.Mengintensifkan pengendalian dan pemberantasan PHM (Penyakit Hewan Menular); 2. Kedisiplinan Biosecurity 3. Penanganan setiap penyakit hewan seperti Pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskeswanling ;

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										tahun N-1 dikali 100%; 2. Target tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 2,89%, yaitu diasumsikan jumlah kasus penyakit tahun 2022 adalah 1.903 ekor dan tahun 2023 adalah 1.848 ekor sehingga penurunan 55 ekor atau 2,89% dari tahun 2022.	4. Prosedur Isolasi kasus ; 5. Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen populasi sapi ; 6. surveilan/ pengamatan penyakit hewan secara rutin; 7. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3. Realisasi jumlah kasus penyakit menular tahun 2022 adalah 1.967 ekor dan tahun 2023 adalah sejumlah 1.962 ekor penurunan hanya sejumlah 5 ekor atau 0,25 dari Tahun 2022. Hal ini diantaranya dikarenakan masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penyakit hewan	dengan FKH UGM; 8. Mengusulkan anggaran untuk Pelestarian Wilayah sumber Bibit dan Bibit Sapi PO Kebumen kepada Kementan serta peningkatan produktivitas Sapi PO Kebumen.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										menular (vaksinasi) dan kasus penyakit PHM (penyakit Hewan Menular) naik akibat masuknya penyakit yang sdh tidak ada muncul kembali.	
				1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	Ekor	1.846	1.962	106,28		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya	Ekor	15.500	15.585	100,55	1.Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular sehingga menghambat proses vaksinasi sebagai upaya pencegahan PMK dan LSD. 2. Melaksanakan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen populasi sapi	-
					Jumlah Wilayah Pengendalian dan	Laporan	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						
				2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Kali	3.200	8.847	276,47	1. Target pemeriksaan hewan dan produk hewan tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 3.200 Kali 2. Realisasi Tahun 2023 adalah 8.847 kali, hal ini dikarenakan adanya lonjakan kasus LSD pada tahun 2023 sehingga perlu pemeriksaan	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										hewan dan produk hewan lebih intensif	
				a. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel yang mendapatkan diagnostik veteriner	Buah	800	931	116,38	1. Adanya PMK dan LSD menghambat proses pengambilan sampel pada ternak SKLB 2. Melaksanakan uji laboratorium diagnostik veteriner berupa pemeriksaan sampel serum darah untuk penyakit di wilayah sumber	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										bibit terutama Paratuberculosis dan Ros Bengal Test	
					Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	1	100		
				b. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan yang diawasi	Ekor	3.200	7.916	247,38	1. Ketatnya pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk daerah yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit hewan 2. Melaksana kan pembinaan	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										kepada para pedagang ternak dan memperketat pengawasan keluar masuknya ternak sesuai persyaratan administrasi yang berlaku	
					Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	29.160	1611,05	1. Target pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia Tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 1.810 Kali. 2. Jumlah pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai target dari Operasional Anggaran DAK Non Fisik untuk 8 puskeswan, dan penyediaan obat dan prasarana	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dari DAK Non Fisik membuat pelayanan kesehatan hewan semakin tinggi	
				a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	29.160	1611,05	1. Target pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia Tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 1.810 Kali. 2. Jumlah pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai target dari Operasional	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Anggaran DAK Non Fisik untuk 8 Puskeswan, dan penyediaan obat dan prasarana dari DAK Non Fisik membuat pelayanan kesehatan hewan semakin tinggi	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	100		
				4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan	Unit	6	6	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Masyarakat Veteriner	Masyarakat Veteriner						
				a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang didampingi	Unit	12	12	100	-	-
					Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	100		
				b. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	Buah	100	100	100	-	-
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Masyarakat Veteriner						
				5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	Unit	6	6	100	-	-
				a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan	Kali	6	6	100	-	-
					Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULA-NGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	9,42	1,25	13,27	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Hama Penyakit Tanaman adalah (luas lahan yang ditanggulangi dari OPT* + luas lahan yang mengikuti AUTP**) / luas lahan pertanian x 100% 2. Target pada Tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada petani pentingnya pengendalian OPT secara preventif dan upaya antisipasi dampak perubahan iklim (kebanjiran/ kekeringan) 2. Sosialisasi kepada kelompok tani untuk bisa mengikuti AUTP secara mandiri

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										9,42%, yaitu luas lahan yang ditanggulangi dari OPT 555 Ha dan luas lahan yang mengikuti AUTP seluas 8.245 Ha sehingga jumlahnya 8.800 Ha atau 9,42% dari luas lahan pertanian 93.448,53 Ha 3. Realisasi Tahun 2023 adalah 1,25%, yaitu luas lahan yang ditanggulangi dari OPT 555 Ha dan luas lahan yang mengikuti AUTP	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										hanya seluas 613 Ha sehingga jumlahnya 1.168 Ha atau 1,25% dari luas lahan pertanian 93448,53 Ha	
				1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Hektar	8.800	1.168	13,27	1. Target Luas area pengendalian dan penanggu-langan Bencana Pertanian Kab.s/Kota Tahun 2023 berdasarkan Renstra adalah 8.800 Ha. 2. Realisasi Tahun 2023 adalah	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada petani pentingnya pengendalian OPT secara preventif dan upaya antisipasi dampak perubahan iklim (kebanjiran/ kekeringan)

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										1.168 Ha, hal ini dikarenakan penyesuaian luasan penjaminan AUTP yang difasilitasi kegiatan hanya seluas 613 ha	2. Sosialisasi kepada kelompok tani untuk bisa mengikuti AUTP secara mandiri
				a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas area yang ditanggulangi	Ha	555	555	100	-	-
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Ha	555	555	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan						
				b. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Luas Area yang dijamin AUTP	Ha	3.237	613	18,94	Tidak terlaksana-nya pelaksanaan AUTP seluas 3237 ha dikarenakan adanya refocusing anggaran, sehingga anggaran hanya untuk memfasilitasi kegiatan seluas 613 ha	Sosialisasi kepada kelompok tani untuk bisa mengikuti AUTP secara mandiri
					Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana	Laporan	2	2	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan						
				E PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Persen	100	100	100	-	-
				1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	Persen	100	100	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	Persen	100	100	100	-	-
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	100	-	-
				2 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	Persen	100	100	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan							
				a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	Persen	100	100	100	-	-
					Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak	Dokumen	1	1	100	-	-

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						
				F PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen	57,00	57,00	100	-	-
				1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	Point	2,60	2,60	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh	Kegiatan	44	44	100	-	-
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5	5	100		
				b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Jumlah kelompoktani yang meningkat kapasitas dan kualitas	Kelompok	150	150	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kecamatan dan Desa	kelembagaan taninya						
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	150	150	100	-	-
				c. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah kelompok tani/gapoktan yang sudah membentuk Badan usaha milik petani yang berbadan hukum	Kelompok/ Gapoktan	2	2	100	-	-
					Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang	Unit	5	5	100	-	-
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	5	100	-	-

2) Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

a) Penggunaan teknologi yang belum optimal;
b) Tingginya Biaya Produksi Pertanian;
c) Terbatasnya Ketersediaan dan Akses Pupuk Bersubsidi;
d) Masih tingginya angka kehilangan produksi (*Food Loss*);
e) Minimnya rata-rata luas kepemilikan dan penguasaan lahan petani dan masih terjadinya alih fungsi lahan ke non pertanian;
f) Kondisi jaringan Irigasi belum memadai;
g) Produktivitas ternak Sapi Unggulan (Sapi PO Kebumen) terganggu akibat Penyakit Hewan Menular Strategis;
h) Masih awamnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin penyakit hewan menular. Adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) menghambat proses pengambilan sampel pada ternak Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB). Belum optimalnya pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk daerah yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit hewan;
i) Masih maraknya Hama Penyakit Tanaman, dan anomali Iklim yang ekstrim mempengaruhi produksi;
j) Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap izin usaha, dan Ketersediaan data usaha pertanian dan peternakan yang belum optimal;
k) Masih kurangnya jumlah penyuluh;
l) Kurangnya minat Generasi Muda pada Sektor Pertanian
m) Masih kurangnya Kompetensi SDM Petani/ Peternak termasuk dalam Peningkatan Nilai Tambah, belum optimalnya tingkat Adopsi dan Inovasi Teknologi, dan Kelembagaan Belum Berorientasi Bisnis;
n) Berkembangnya Digitalisasi Pasar;
o) Belum optimalnya peningkatan kelas kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan kelompok tani;
p) Masih sedikit Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbadan hukum.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya pemecahan masalah dan tindak lanjutnya dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

a) Mekanisasi pertanian dengan mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi;

b) Subsidi biaya produksi yaitu dengan memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk pupuk, benih, dan pestisida kepada petani untuk mengurangi beban biaya produksi;
c) Diversifikasi pupuk, dengan mengembangkan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan serta memberikan pelatihan tentang penggunaan pupuk organik kepada petani. Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bahwa pupuk tersebut sampai kepada petani yang membutuhkannya;
d) Peningkatan teknologi pasca panen yaitu dengan meningkatkan akses petani terhadap teknologi pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan yang tepat guna mengurangi kerugian hasil panen. Memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pasca panen yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pengolahan dan penyimpanan;
e) Menegakkan perizinan alih fungsi lahan dengan ketat dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Menginisiasi program konsolidasi lahan untuk menggabungkan lahan pertanian kecil menjadi area yang lebih besar, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengawasi dan menegakkan aturan penataan ruang;
f) Merehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang ada untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata. Pengelolaan partisipatif yang melibatkan petani dalam pengelolaan irigasi, termasuk perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan;
g) Kedisiplinan Biosecurity, penanganan setiap penyakit hewan seperti pengobatan massal PMK dan LSD dengan Puskeswanling, dan prosedur isolasi kasus. Peningkatan Pelayanan Medik Reproduksi bekerjasama dengan FKH UGM. Mengusulkan anggaran untuk Pelestarian Wilayah sumber Bibit dan Bibit Sapi PO Kebumen kepada Kementan serta peningkatan produktivitas Sapi PO Kebumen.
h) Pelaksanaan vaksinasi PMK dan LSD dengan target minimal 80 persen dari populasi sapi. Surveilan/ pengamatan penyakit hewan secara rutin;
i) Sosialisasi dan pembinaan kepada petani pentingnya pengendalian OPT secara preventif dan upaya antisipasi dampak perubahan iklim (kebanjiran/ kekeringan). Sosialisasi kepada kelompok tani untuk bisa mengikuti AUTP secara mandiri;
j) Penyusunan dokumen usaha pertanian dan peternakan dan pembinaan dan sosialisasi perizinan usaha pertanian dan peternakan;
k) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
l) Mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan

praktis, dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan. Mendorong inklusi pendidikan pertanian di tingkat sekolah, serta menjadikan materi pertanian menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda;

m) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, pendampingan teknis, pendidikan teknologi, fasilitasi akses teknologi, adanya pusat inovasi pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengenalan Konsep Agribisnis;

n) Pengenalan teknologi digital yaitu dengan memberikan pelatihan kepada petani dalam penggunaan teknologi digital, termasuk pemasaran online, aplikasi pertanian, dan platform perdagangan digital;

o) Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam mengelola kelembagaan mereka dengan pendekatan bisnis yang lebih baik;

p) Pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) agar dapat berbadan hukum.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 rata-rata capaian indikator kinerja dari enam program mencapai 98,57% dan dari 17 kegiatan tercapai 201,26%.

5) Capaian Kinerja Urusan

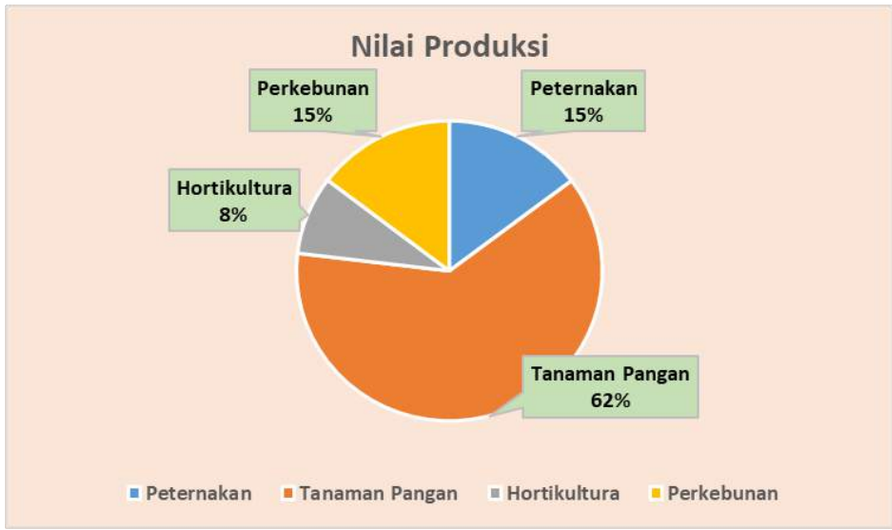
Keseluruhan program yang telah disampaikan, telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2023 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer, dengan capaian kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 76 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	6,68	3	15,98	532,81	6

Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2023

Indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 15,98% diperoleh dengan formulasi Pengukuran = (nilai produksi pertanian tahun (n) dalam rupiah - nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah) / nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah x 100%. Nilai produksi pertanian tahun 2020 sebesar Rp.4.535.602.068.918,- dan nilai produksi tahun 2023 sebesar Rp. 5.260.584.761.722,- yang terdiri dari nilai produksi peternakan (daging dan telur), tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (buah-buahan, sayur–sayuran, biofarmaka), dan perkebunan, dengan kontribusi nilai produksi hasil pertanian tahun 2023 masing – masing sektor dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2023

Gambar 3. 2 Kontribusi Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Dilihat dari tabel di atas di ketahui kontribusi terbesar nilai produksi pertanian di Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah dari komoditas tanaman pangan sebesar 62%, kemudian komoditas perkebunan dan komoditas peternakan masing – masing sebesar 15%, sedangkan komoditas hortikultura sebesar 8% dari total nilai produksi pertanian sejumlah Rp.5.260.584.761.722,-.

Dilihat dari Nilai produksi pertanian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dari komoditas peternakan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3. 77 Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023

NO	Komoditas	Nilai Produksi (Rp.)			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Peternakan	955.329.468.518	794.374.208.000	675.472.222.750	775.521.422.130
2.	Tanaman Pangan	2.729.463.615.000	2.913.177.189.000	2.838.161.639.900	3.268.936.332.000
3.	Hortikultura	415.148.135.900	606.848.086.266	532.507.711.400	444.910.433.092
4.	Perkebunan	435.660.849.500	805.791.010.000	792.213.860.000	771.216.574.500
	Jumlah	4.535.602.068.918	5.120.190.493.266	4.838.355.434.050	5.260.584.761.722

Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2023

Dilihat dari data diatas, nilai produksi pertanian Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,89%, kontribusi kenaikan terbesar adalah komoditas perkebunan sebesar 84,96%, komoditas hortikultura 46,18%, dan komoditas tanaman pangan 6,73 %, sedangkan untuk komoditas peternakan mengalami penurunan sebesar 16,85%. Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,50%, dengan kontribusi penurunan terbesar adalah komoditas peternakan sebesar 14,97%, hortikultura 12,25%, tanaman pangan 2,58%, dan perkebunan 1,68%. Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 mengalami peningkatan nilai produksi sebesar 8,73%, dengan kontribusi kenaikan terbesar pada komoditas tanaman pangan sebesar 15,18% dan komoditas peternakan sebesar 14,81%. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan yaitu komoditas hortikultura sebesar 16,45% dan komoditas perkebunan menurun sebesar 2,65%.

4. Urusan Perdagangan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
c) Program Pengembangan Ekspor;
d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 78 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Perdagangan	DINAS PERINDUS-TRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		A PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit	4	4	100		
				1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit	4	4	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Unit sarana dan distribusi perdagangan yang tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)		4	4	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber	b Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah pasar yang terlayani kebersihan	UPTD	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	Sarana Distribusi Perdagangan	dan tersedianya SDM Pengelola						
				2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nilai pendapatan retribusi pasar, Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	UPTD	4	4	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	keg	4	4	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan	b Pemberdayaan Pengelola Sarana	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	keg	**4**	**4**	**100**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Distribusi Perdagangan							
				B PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	%	1,50	1,50	100		
				1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Kali	277	277	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan	a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Kali	277	277	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
				2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab./Kota	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	%	1,5	1,5	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terinformasinya Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Hari	365	365	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	Ekspor-tir	2	2	100		
				1 Penyelenggara-an Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk Ekspor Unggulan yang dibina	keg	2	2	100		
				D PROGRAM STANDARDISASI DAN	Prosentase UTTP yang tertera	%	53,97	53,97	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PERLINDUNG - AN KONSUMEN							
				1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya alat UTTP yang tertera/ tera ulang	keg	2780	2780	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang	buah	2.248	4.452	198,04	Bertambahnya SDM Penera sebanyak 3 personil dapat meningkatkan ketercapaian jumlah UTTP yang tertera/tera ulang. Tetapi masih kurang SDM Pengawasan Kemetrologian yang bertugas mengawasi kegiatan tera/tera ulang.	Mengusulkan SDM Pengawasan Kemetrologian ke BPKSDM dan mengoptimalkan SDM yang ada.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	70,27	70,27	100		
				1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan pemasaran produk dalam negeri	keg	6	6	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	UMKM	3	3	100		

2) Permasalahan

a) Masih kurangnya SDM Pengawasan Kemetrologian.
b) Masih kurangnya jaringan pemasaran produk UMKM.
c) Masih belum optimalnya pemeliharaan pasar-pasar daerah.
d) Masih belum tercukupinya kontainer/penampung sampah pada pasar-pasar.
e) Banyaknya bermunculan PKL baru yang belum terdaftar.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Mengusulkan tambahan SDM Pengawasan Kemetrologian dan optimalisasi SDM yang ada dengan mengikuti diklat pengawasan kemetrologian.
b) Optimalisasi promosi dan pemasaran melalui griya pamer Dekranasda dengan mengadakan event UMKM dan menerima kunjungan kerja dari luar daerah, media online seperti Instagram, aplikasi Simbok Blonjo, bekerja sama dengan toko swalayan untuk memasarkan produk UMKM yang sudah lolos kurasi dan melalui pameran dalam daerah maupun luar daerah, mengadakan event/ festival, lomba kriya serta mengikuti kegiatan dekranas/ *business matching* yang diselenggarakan pemerintah provinsi maupun pusat.
c) Melakukan inventarisasi kerusakan di pasar-pasar daerah, mendorong pedagang untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri dan mengusulkan untuk dilakukan perbaikan.
d) Mengusulkan pengadaan kontainer dan mengoptimalkan kontainer yang ada.
e) Mengusulkan pengadaan aplikasi pendataan PKL.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%. Demikian juga rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perdagangan ditunjukkan dengan indikator Capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 79 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	7.93	5,14	9,21	115,50	4,45

Sumber : data diolah oleh BPS Kebumen, 2023

Persentase peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan dari target 5,14% telah terealisasi 7,09% atau capaian kinerja urusan perdagangan 115,50%.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.248.266.760.000 dan tahun 2023 sebesar Rp. 4.805.470.570.000 sehingga diperoleh Prosentase PDRB ADHB Sektor Perdagangan sebesar 9,21%.

$$Prosentase\ PDRB\ ADHB\ Sektor\ Perdagangan$$

$$= \frac{(\text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n)} - \text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n}-1))}{\text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n}-1)}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{5.248.266.760.000 - 4.805.470.570.000}{4.805.470.570.000}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{442.796.190.000}{4.805.470.570.000}\ x\ 100\%\ = 9{,}21\%$$

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas di tahun 2023 mendapat capaian persentase peningkatan PDRB sektor Perdagangan sebesar 9,21% capaian masih lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,14%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing perdagangan dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{9{,}21}{5{,}14}\ x\ 100\%\ = 179{,}18\%$$

Nilai realisasi target meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 9,21% dengan target sebesar 5,14% maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya daya saing perdagangan sebesar 179,18% lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 101,79%. Peningkatan ini

menunjukkan tren positif dalam upaya meningkatkan daya saing perdagangan. Dengan pencapaian yang melebihi target, Kebumen dapat terus memperkuat posisinya di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun Data Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen disertai dengan kondisi pasar, sebagai berikut:

Tabel 3. 80 Data Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
1	Pasar Jatiluhur	Desa Jatiluhur Kec. Rowokele	2000	APBD	Rusak Berat
2	Pasar Karangjambu	Desa Karangjambu Kec. Sruweng	2005	APBD	Rusak Berat
3	Pasar Dorowati	Desa Dorowati Kec. Klirong	2000	APBD	Rusak Berat
4	Pasar Banyumudal	Desa Banyumudal Kec. Buayan	2015	DAK	Baik
5	Pasar Ayah	Desa Ayah Kecamatan Ayah	2011	TP	Baik
6	Pasar Karangsari	Desa Karangsari Kec. Buayan	2019	DAK	Baik
7	Pasar Tanjungsari	Desa Tanjungsari Kec. Petanahan	2005	APBD	Rusak Berat
8	Pasar Candirenggo	Desa Candirenggo Kec. Ayah	2011	DAK	Baik
9	Pasar Rowokele	Desa Rowokele Kec.Rowokele	2015	DAK	Baik
10	Pasar Kritig	Desa Kritig Kec. Petanahan	2018	DAK	Baik
11	Pasar Jatisari	Desa Jatisari Kec. Kebumen	2012	TP	Baik
12	Pasar Kelapa Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2016	APBD	Rusak
13	Pasar Sruni	Desa Sruni Kec. Alian	2014	TP	Baik
14	Pasar Jogosimo	Desa Jogosimo Kec. Klirong	2018	APBD	Baik
15	Pasar Caruban	Desa Caruban Kec. Adimulyo	2017	DAK	Baik
16	Pasar Sidomulyo	Desa Sidomulyo Kec. Adimulyo	2019	DAK	Baik
17	Pasar Giwangretno	Desa Giwangretno Kec. Sruweng	2015	TP	Baik
18	Pasar Tamanrejo	Kel Tamanwinangun Kec. Kebumen	2007	APBD	Rusak Berat
19	Pasar Indrakila	Desa Krakal Kec. Alian	2011	TP	Baik
20	Pasar Hewan Purbowangi	Desa Purbowangi Kec Buayan	2019	APBD	Baik
21	Pasar Demangsari	Desa Demangsari Kec. Ayah	2016	DAK	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
22	Pasar Kuwarasan	Desa Kuwarasan Kec. Kuwarasan	2017	APBD	Baik
23	Pasar Ungaran	Desa Ungaran Kec. Kutowinangun	2017	DAK	Baik
24	Pasar Puring	Desa Sitiadi Kec. Puring	2017	TP	Baik
25	Pasar Hewan Argopeni	Desa Argopeni Kec. Kebumen	2018	APBD	Baik
26	Pasar Bocor	Desa Bocor Kec. Buluspesantren	2016	TP	Baik
27	Pasar Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2012	TP	Baik
28	Pasar Tlogopragoto	Desa Tlogopragoto Kec. Mirit	2012	APBD	Baik
29	Pasar Ambal	Desa Ambalresmi Kec. Ambal	2011	TP	Baik
30	Pasar Petanahan	Desa Petanahan Kec. Petanahan	2013	APBD	Baik
31	Pasar Kabekelan	Desa Kabekelan Kec. Prembun	2018/2020	TP	Baik
32	Pasar Tumenggungan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2012	APBD	Baik
33	Pasar Kutowinangun I	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2013	TP	Baik
34	Pasar Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2012	TP	Baik
35	Pasar Wonokriyo	Kel Wonokriyo Kec. Gombong	2018	APBD	Baik
36	Pasar Karanggayam	Desa Karanggayam Kec Karanggayam	2014	APBD	Baik
37	Pasar Burung dan Klithikan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2019	APBD	Baik
38	Pasar Kayu Gombong	Desa Plumbon Kec. Karangsambung	2011	TP	Baik
39	Pasar Hewan Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2015	DAK	Rusak
40	Pasar Kutowinangun 2 (Ps Lama)	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2023	TP	Baik

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berkait dengan Pasar Rakyat yang dikelola Dinas terdapat 5 (lima) pasar rakyat kondisi rusak berat (Pasar Jatiluhur, Pasar Karangjambu, Pasar Dorowati, Pasar Tanjungsari, Pasar Tamanrejo), 2 (dua) pasar rakyat kondisi rusak (Pasar Kelapa Prembun, Pasar Hewan Karanganyar) dan 33 (tiga puluh tiga) pasar rakyat dalam kondisi baik. Perbaikan Pasar rakyat di tahun 2024 dilakukan sesuai skala prioritas sesuai ketersediaan anggaran dan berupaya diusulkan ke

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan dana alokasi khusus/alokasi tugas pembantuan.

Kenaikan Usaha Perdagangan berizin khususnya di bidang industri menggambarkan kesadaran pelaku usaha/industri akan pentingnya Izin usaha. Dengan legalitas izin usaha yang dimiliki maka peluang pasar semakin besar, dikarenakan untuk produk produk IKM yang ingin masuk atau diperjualbelikan ke Pasar/toko swalayan dipersyaratkan memiliki izin seperti NIB yaitu Nomor Induk Berusaha, SP-PIRT yaitu Sertifikat Produksi-Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Halal untuk produk makanan dan minuman. Setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memfasilitasi pembuatan NIB, SP-PIRT, berikut uji lab yang dipersyaratkan dan HAKI (legalitas Merk).

5. Urusan Perindustrian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 81 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Perindustrian	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		A PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	%	15,13	26,35	174,16	- Kenaikan permintaan produksi gula semut dan harga di pasaran - Terbangun-nya SIHT di Kebumen memacu tumbuhnya IKM Rokok berpita cukai.	- Mendorong pelaku usaha gula semut untuk mening-katkan kualitas dan kuantitas produksi agar dapat meme-nuhi perminta-an ekspor secara mandiri. - Mendorong IKM Rokok untuk mengu-rus perizinan pita cukai. - Untuk mengendali-kan harga

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											perlu dibentuk koperasi pelaku usaha gula semut dan rokok.
				1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang terbina	Orang	300	300	100		
				a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran	Dokumen	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan Perwilaya-han Industri						
				b Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Doku men	1	1	100		
				c Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Doku men	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3	3	100		
				B PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentasi Dokumen Perizinan yang Terfasilitasi	%	100	100	100		
				1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	Jumlah dokumen perizinan industri yang terfasilitasi	Dokumen	64	64	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan industri yang terfasilitasi	Dokumen	64	64	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1	1	100		
				a Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1	1	100		

2) Permasalahan

a) Sebagian besar Industri Kecil dan Menengah belum memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terkait Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

b) Produk dari IKM sebagian besar belum stabil, pelaku usaha industri kecil sering berganti bidang usaha karena usaha yang dijalankan sulit berkembang.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Sosialisasi terkait pentingnya SIINAS dan mendampingi pembuatan akun SIINAS serta memfasilitasi mendapatkan Sertifikat TKDN;

b) Melakukan Pembinaan, Pendampingan, pelatihan, bantuan peralatan, monitoring dan evaluasi untuk para pelaku usaha industri.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perindustrian, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 124,72 %. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan Perindustrian ditunjukkan dengan indikator Capaian Perindustrian sebagai berikut :

Tabel 3. 82 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	8.31	5,79	12,00	207,25	4.93

Sumber : Diolah oleh BPS Kebumen, 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dinilai atas dasar harga pada tahun berjalan. Tahun 2022 tercapai 8,31% pada tahun 2023 naik menjadi 12%, sehingga

capaian kinerja urusannya menjadi 207,25% dikarenakan adanya peningkatan jumlah industri, bertambahnya lowongan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID 19. Hal tersebut mempengaruhi nilai PDRB industri pengolahan yang dari tahun 2022 mulai naik di tahun 2023. Upaya pemerintah dalam membangkitkan kembali usaha yang beberapa tahun mengalami kemunduran yaitu dengan memberikan bantuan peralatan dan pelatihan bagi para pelaku usaha serta diadakannya event atau kegiatan yang memperkenalkan produk-produk Kabupaten Kebumen.

Sesuai data diolah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Industri Pengolahan di Kebumen pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.101.867.110.000 dan tahun 2023 sebesar Rp.7.954.081.950.000 sehingga diperoleh Prosentase PDRB ADHB Sektor Perindustrian sebesar 12,00%.

$$Prosentase\ PDRB\ ADHB\ Sektor\ Perindustrian$$
$$= \frac{(\ PDRB\ ADHB\ Tahun\ (n)\ -\ PDRB\ ADHB\ Tahun\ (n-1)}{PDRB\ ADHB\ Tahun\ \ (n-1)}\ x\ 100\ \%$$
$$= \frac{7.954.081.950.000 - 7.101.867.110.000}{7.101.867.110.000}\ x\ 100\%\ = 12{,}00\ \%$$

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas di tahun 2023 mendapat capaian Persentase Peningkatan Prosentase PDRB ADHB sektor Perindustrian sebesar 12,00% capaian lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,79%.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT dari data diatas dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi Pengukuran, sebagai berikut :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%$$
$$= \frac{12{,}00}{5{,}79}\ x\ 100\%\ = 207{,}25\%$$

Nilai realisasi target meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT sebesar 12,00% dengan target sebesar 5,79 % maka diperoleh capai indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT sebesar 6,21% lebih tinggi dari capaian tahun 2022.

Pada tahun ini, kinerja dinas berhasil mencapai persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan rokok bercukai KIHT sebesar 207,25%. Meskipun target awalnya adalah 49,92%, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berhasil mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi tantangan untuk mencapai hasil yang mengesankan. Dengan pertumbuhan sebesar 157,33% telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor pertanian dan industri tembakau. Produksi gula semut organik meningkat, menunjukkan komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Sementara itu, produksi rokok bercukai KIHT juga mengalami peningkatan, menandakan efisiensi dalam manajemen dan distribusi produk. Terbangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen dan terbentuknya sentra produksi gula semut organik kedepan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kebumen dan Indonesia pada umumnya. Sehingga Kebumen menjadi harum di kancah dunia bila produksi gula semut mampu melakukan pemasaran ke mancanegara dengan persyaratan produksi sesuai standar yang berlaku.

Capaian ini setara dengan pencapaian tahun 2022, menunjukkan konsistensi dan ketangguhan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menghadapi perubahan dan tantangan semoga kedepan dapat terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri gula semut organik dan produksi rokok bercukai KIHT.

6. Urusan Transmigrasi

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui program prioritas Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 83 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		A PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Keluarga Miskin daerah bencana yang difasilitasi perpindahannya ke daerah transmigrasi	KK	4	3	75	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Desa dan PDTT
				1 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4	3	75	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Desa dan PDTT
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah peserta transmigrasi	Orang	4	3	75	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Desa dan PDTT

2) Permasalahan

a) Kegiatan Fasilitas Transmigrasi sangat tergantung pada kuota dari pusat sehingga belum bisa memenuhi harapan masyarakat untuk dapat ikut serta transmigrasi.

b) Terbatasnya kuota alokasi penempatan transmigrasi pada tahun 2023 Kebumen mendapat alokasi sebanyak 3 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut:

- UPT Poso Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (1 KK)
- UPT Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (2 KK). Sehingga tidak dapat memenuhi target transmigrasi yang ditempatkan. Transmigrasi merupakan program given dari Provinsi Jateng sehingga Kabupaten Kebumen hanya dapat melaksanakan penempatan transmigrasi sesuai alokasi kuota transmigrasi tersebut

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat

b) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas di Provinsi terkait kuota transmigrasi dengan mempertimbangkan tingginya animo masyarakat yang mendaftar program transmigrasi:

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan transmigrasi diketahui rata-rata capaian kinerja Program dan Kegiatan adalah 75%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Pada tahun 2023 dilaksanakan program dan kegiatan transmigrasi, capaian kinerja Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan jumlah fasilitasi transmigrasi penduduk Kabupaten Kebumen. Jumlah KK yang difasilitasi pada kurun waktu 2021-2026 cukup fluktuatif. Secara lengkap capaian kinerja urusan transmigrasi tersaji dalam tabel di berikut ini:

Tabel 3. 84 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Transmigran yang ditempatkan	%	20	10	3	30	10

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2023 target transmigran adalah 10KK, tetapi hanya dapat diberangkatkan 3KK. Untuk jumlah KK yang ditargetkan dari tahun 2021 sampai 2026 setiap tahunnya adalah 10KK sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. 85 Targetkan Transmigran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Indikator	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2023

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Fungsi Perencanaan, Penelaitian dan Pengembangan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
c) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Aplikasi SEMARAK yang merupakan integrasi dari 3 aplikasi yaitu E-SAKIP yang berisi pelaporan kinerja instansi pemerintah (dikelola oleh Bagian Organisasi), aplikasi SIMPEL yang berisi capaian realisasi fisik dan keuangan (dikelola oleh Bagian Pembangunan) dan aplikasi SIMDALEV yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah (dikelola oleh Bappeda) masih dalam tahap pengembangan. Semangatnya adalah untuk memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja serta pelaporan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 86 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan	BAPPEDA		A PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90	100	111	Upaya menjaga konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mampu mencapai realisasi 100% dari target 90%	
				1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan	Dok	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Keg	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	2	2	100		
				2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				3 Kegiatan Pengendalian,	Jumlah dokumen monitoring,	Dok	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUN-AN DAERAH	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah urusan perencanaan bidang pemerintahan	urusan	21	21	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dan pembangunan manusia						
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	urusan	9	9	100		
			sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	urusan	12	12	100		
				2 Kegiatan Koordinasi	Jumlah urusan pembangunan	Urusan	13	13	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang perekonomian	Urusan	8	8	100		
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam	Urusan	5	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Urusan	7	7	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Urusan	7	7	100		
2	Penelitian dan Pengembangan		1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan OPD Teknis dalam pengembangan teknologi tepat guna serta peningkatan kerjasama dengan	A PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	75	66.67	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lembaga penelitian dan pengembangan								
				1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara-an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	Dok	7	7	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Dok	7	7	100		
				2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah produk pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	Produk	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					untuk pembangunan daerah						
				a Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi	Produk	6	6	100		

2) Permasalahan

a) Proses pengintegrasian aplikasi ke dalam Aplikasi SEMARAK belum mencakup keseluruhan sampai dengan penilaian kinerja individu
b) Belum optimalnya Sinergitas Lembaga Kelitbangan di kabupaten Kebumen
c) Belum optimalnya Fasilitasi dalam mendukung daya saing dan ekosistem inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Proses pengembangan aplikasi SEMARAK dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi
b) Direncanakan akan dibentuk jaringan penelitian
c) Direncanakan akan dibentuk Central Kekayaan Intelektual.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi perencanaan adalah 100%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100%.

Nomenklatur untuk masing-masing sub kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi, maka pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BAPPEDA telah mengembangkan sistem evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja pembangunan Kabupaten Kebumen yang disingkat SEMARAK. Aplikasi Semarak merupakan integrasi dari aplikasi E-SAKIP, SIMPEL, dan SIMDALEV.

5) Capaian Kinerja Urusan

Sasaran program urusan penunjang perencanaan yang dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah. Capaian kinerja urusan perencanaan BAPPEDA tahun 2023 sebesar 100%, yaitu terlaksananya:

a) Fasilitasi dan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan

a. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
b. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b) Tersusunnya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 87 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2022-2023

No.	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2023

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan selama periode 2023 antara lain penyusunan dokumen kajian daerah, pelaksanaan kegiatan KRENOVA dan fasilitasi riset-riset daerah.

Tabel 3. 88 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	72.73	77.08	75%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2023

2. Fungsi Keuangan

1) Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Keuangan	1 BPKPD		A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100		
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan regulasi	dok	10	10	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	dok	4	4	100		
				b Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	dok	2	2	100		
				c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	dok	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
				d Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga	dok	2	2	100		
				e Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Keg	5	5	100		
				2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Keg	4	4	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	a Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang terlayani pencairan Belanja Gaji berdasar penerbitan SP2D	Opd	52	52	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kondusivitas Wilayah								
				b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	opd	9	9	100		
				c Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan Rekonsiliasi DTH.RTH, dan Verifikasi SPM non Gaji	dok	52	52	100		
				d Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Dok	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyampaian pelaporan keuangan SKPD tepat waktu	dok	1.357	1.357	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD	dok	1.355	1.355	100		
				b Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LKPD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dok	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rekon dalam rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keg	3	3	100		
				d Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Bimtek Akuntansi	keg	1	1	100		
				e Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan BLUD	keg	1	1	100		
				4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	keg	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	b Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang		449	449	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah		mendapat alokasi Dana Desa (DD) Jumlah desa yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus, Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan keuangan untuk operasional TPQ, Jumlah Desa yang mendapat kawasan perdesaan (5 kawasan) pengembangan produk unggulan 5 kawasan (wisata, anyaman pandan, peternakan sapi, batik dan gula semut) dan terlaksananya revitalisasi bumdes sebagai pengelola ekonomi kawasan						
				c Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga		1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi BHPD, BHRD, Bagi hasil pihak ketiga untuk Perhutani dan KPIPW Serayu Bogowonto Sempor		449	449	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100		
				1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	dok	63	63	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan BMD OPD	keg	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMD	dok	3	3	100		
				c Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah unit BMD yang difasilitasi Pengamanannya	unit	156	156	100		
				d Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	jenis	5	5	100		
				e Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Laporan BMD	keg	2	2	100		
				f Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun	dok	2	2	100		
				g Pembinaan Pengelolaan Barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan	keg	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					barang milik daerah						
		2 BPKPD		A PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	107,14	107,14		
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	11	11	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa yang termonitor dan terevaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Desa	460	460	100		
				b Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan, sosialisasi dan keberatan	Kec	26	26	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Basis Data Pajak Daerah	Obyek	1.356.791	1.356.791	100		
				d Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD pengelola pendapatan	OPD	55	55	100		
				e Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	wajib pajak	1.354.791	1.354.791	100		
				f Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih di 11 jenis pajak daerah	orang	1.354.791	1.354.791	100		

2) Permasalahan

Meskipun hampir semua indikator kinerja program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2023 dapat terealisasi, masih ditemukan beberapa kendala/ permasalahan sebagai berikut:

a) Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
b) Kurang cermatnya OPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan.
c) Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini OPD belum konsisten dalam melaksanakan register risiko yang telah disusun.
d) Adanya peraturan baru mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.
b) Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan.
c) Optimalisasi peran APIP dalam penerapan SPIP di masing-masing OPD.
d) Melakukan sosialisasi tentang implementasi penerapan SIPD.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang Urusan Manajemen Keuangan adalah 103,33%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2023 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2022 terealisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD yang ke-6 kalinya

secara berturut-turut dalam 6 tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 3. 90 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			T.Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2021	WTP	WTP atas LKPD 2022	100%	WTP	100%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen 2023.

Berdasarkan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 166/S/XVIII.SMG/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, BPK RI memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi :

a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
b) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai.
c) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalitas ASN dengan penerapan sistem merit melalui Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem Merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem Merit meliputi 8 aspek yaitu: perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN, pembagian karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian; penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Kepegawaian Daerah; dan
b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 91 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepegawaian Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	90	99	108	Pengadaan ASN sudah sesuai dengan Formasi yang dilamar	
				1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN"	Kegiatan	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN	Dokumen	600	712	118	Pensiun APS dan Anumerta tidak bisa di prediksi	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Kepegawaian	Dokumen	2	2	100		
				2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kegiatan	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	Kegiatan	3	3	100		
				3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	Orang	157	106	67	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan tergantung usulan dari OPD	Membuat surat edaran terkait dengan aturan ijin belajar, tugas belajar dan usulan utk ujian PI dan ujian dinas

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Dokumen	200	1027	513	Banyaknya usulan dari perangkat daerah baik kenaikan jabatan, alih jabfung maupun pemberhentian	
				4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	4	100		
4	Pendidikan dan Pelatihan			B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	%	70,04	56	81,85	Kuota peserta diklat terbatas	Pengusulan penambahan kuota ke lembaga diklat lebih awal dilakukan
				1 Kegiatan	Penilaian dan	Kegiat	5	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Evaluasi	an					
				a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jenis	5	5	100		
				2 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jenis	5	5	100		

2) Permasalahan

a) Perencanaan Kebutuhan ASN

- Penyampaian Usulan kebutuhan ASN dari masing-masing perangkat daerah berjalan lambat;
- Peta jabatan yang belum dimutakhirkan sesuai kondisi saat ini dan mempertimbangkan dampak transformasi digital;

b) Pengadaan ASN

- Pengadaan ASN di Kabupaten Kebumen mengikuti kebijakan nasional berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga kesehatan) sehingga pengadaan tenaga teknis formasinya amat terbatas.
- Pelaksanaan pengadaan menyesuaikan jadwal secara nasional dan pada tahun 2023 dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Ini berakibat pada tahapan proses yang tidak selesai di akhir tahun 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024.

c) Sistem Informasi

- Belum dilaksanakan pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.
- Belum tersusunnya Perbup SIMPEG.

d) Manajemen Kinerja

- Dengan adanya perubahan Penilaian Kinerja maka diperlukan Perubahan dalam Sistem manajemen Kinerja.
- Pengembangan Kompetensi ASN belum memenuhi 20 jam dalam 1 tahun, sehingga Indeks Profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen masih Rendah.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Perencanaan Kebutuhan ASN

- Menyampaikan surat edaran ke masing-masing perangkat daerah dalam rangka penyampaian usulan kebutuhan ASN agar tepat waktu sesuai *timeline* yang ditentukan.
- Melakukan koordinasi ke Bagian Organisasi terkait penyusunan peta jabatan yang mempertimbangkan dampak adanya transformasi digital.

b) Pengadaan ASN

- Menyampaikan masukan pada saat evaluasi pelaksanaan pengadaan agar diberikan formasi tenaga teknis yang mencukupi sesuai usulan yang diajukan.

- Mengupayakan setiap tahapan proses pengadaan ASN tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panselnas.

c) Sistem Informasi

- Perencanaan pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Penyusunan dan penerapan Perbup SIMPEG dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Penyusunan SE pemutakhiran data SIMPEG bagi semua ASN.

d) Manajemen Kinerja

- Mengintegrasikan Sistem manajemen ASN di pemerintah kabupaten Kebumen.
- Mengembangkan Aplikasi SINAU dan membuat surat edaran ke OPD agar seluruh ASN dapat mengikuti diklat secara daring melalui SINAU, sehingga diharapkan semua PNS berhak mendapatkn Pengembangan Kompetensi selama 20 Jam pelajaran selama 1 tahun.
- Membuat Surat edaran ke Perangkat daerah untuk melakukan pendataan PNS yang sudah mengikuti diklat.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 94,93%. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan fungsi penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ditunjukkan dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 92 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	99,00	91	99	108	93,99
Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	71,34	72.08	59	81	77,21

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi Capaian Indikator Kinerja yang diampu BKPSDM tahun 2023 sebagai berikut:

a) Indikator Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan konsisten karena pengadaan ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
b) Indikator Persentase Pejabat Struktural ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural mengalami penurunan dari 71,34% menjadi 59% karena dipengaruhi oleh kuota dari lembaga penyelenggara diklat terbatas sehingga jumlah pejabat yang mendapatkan promosi jabatan masih banyak yang belum mengikuti diklatpim, sehingga persentase jumlah pejabat struktural yang seharusnya sudah mengikuti diklatpim belum sesuai dengan jenjang eselonnya.

Adapun uraiannya sebagai berikut :

a) Capaian Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan

Pada tahun 2023 Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan memperoleh capaian sebesar 108,00% yang diperoleh dari target sebesar 91,00% dapat terealisasi sebesar 99,00%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sejumlah 11.692 orang, sebanyak 11.689 orang sudah sesuai dengan jabatannya. Sedangkan 3 orang belum sesuai dengan formasi jabatannya.

b) Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

BKPSDM Kabupaten Kebumen sudah mengirim Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan ke lembaga diklat sebanyak 13 orang, Sampai dengan tahun 2023 Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan baik tingkat II, III maupun IV sesuai jenjang jabatannya sebanyak 320

orang dari total Jumlah Pejabat struktural yang ada sebanyak 538 orang atau masih ada 218 pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, sehingga diperoleh prosentase capaian sebesar 59%. Kabupaten Kebumen belum dapat mengirimkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim secara keseluruhan mengingat anggaran yang tersedia dan kuota diklat di lembaga penyelenggara diklat yang terbatas.

Target Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN adalah 600 orang dengan realisasi 712 dokumen disebabkan karena ada penambahan capaian realisasi pemberhentian selain karena PNS mencapai Pensiun BUP, PNS meninggal dunia, Pensiun Atas Permintaan Sendiri dan Pensiun karena Uzur.

Target Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan ada kenaikan 827 dokumen dari target awal 200 dokumen menjadi 1027 dokumen atau naik sebesar 513% disebabkan karena jumlah usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang jabatan Fungsional, Alih Jenjang Jabatan Fungsional, dan Pengangkatan dalam jabatan tidak bisa diprediksi secara tepat. Penerbitan berdasarkan usulan dari OPD, dimana PNS yang diusulkan karena telah mendapatkan Penetapan Angka Kredit sesuai yang dipersyaratkan.

4. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yaitu:

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan adalah Level Kapabilitas APIP sedangkan indikator kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah nilai persepsi korupsi Adapun capaian kinerja program dan kegiatan fungsi pengawasan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 93 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Leveling APIP	Level	3	3	100		
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	Obrik	412	729	176	Banyak mandatory sebelumnya belum masuk target Renja, seperti pemeriksaan Desa, kecamatan di seluruh kabupaten Kebumen	
				a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	OPD/ BUMD	6	23	383	Banyak mandatory sebelumnya belum masuk target Renja,	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	23	383		
				b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Paket	100	100	100		
					Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100		
				c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kali	5	5	100		
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	5	5	100		
				d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Obrik	98	131	134	Banyaknya tugas mandatory	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	48	94	196	Jumlah laporan berdasarkan penugasan	
				e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa	Desa	154	423	275	Terdapat mandatory untuk melakukan pemeriksaan seluruh desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	154	423	275		
				f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	Kali	5	5	100		
					Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	1	100		
				g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindak Lanju Auditi yang dimonitoring dan evaluasi	Obrik	48	48	100		
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Dokumen	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP						
				2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Obrik	33	88	267	Adanya mandatory pemeriksaan seluruh desa, kecamatan, aduan	
				a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang diselesaikan	Kasus	3	3	100		
					Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	Laporan	3	3	100		
				b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Obrik	30	85	100	Adanya mandatory pemeriksaan seluruh desa, kecamatan, aduan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	30	85	283		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	Nilai	3,40	3,90	115	Berdasarkan survey KPK	
				1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	7	7	100		
				a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dokumen	2	2	100		
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi	2	2	100		
				b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	5	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi	5	5	100		
				2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	OPD	50	52	104	Ada penamba han 2 pendam-pingan dan asistensi yaitu pada RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun	
				a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	50	52	104	Ada Penamba han 2 pendam pingan dan asistensi yaitu pada RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun	
					Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	50	52	104	Ada penamba han 2 pendam pingan dan asistensi yaitu pada RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	50	13	26	Terdapat perubahan kebijakan menjadi Reformasi Birokrasi Tematik dan General sehingga Reformasi Birokrasi yang semula diwajibkan seluruh perangkat daerah menjadi hanya terhadap perangkat daerah yang mendukung RB Tematik dan General, sehingga pendampingan dan asistensi penilaian reformasi birokrasi yang semula	Menyesuaikan target kinerja dengan kebijakan baru pada tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										ditargetkan 50 perangkat daerah, pendampingan hanya dilaksanakan kepada perangkat daerah yang mendukung RB Tematik dan General	
					Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendam pingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50	13	26	Terdapat perubahan kebijakan menjadi RB Tematik dan General sehingga Reformasi Birokrasi yang semula diwajibkan seluruh perangkat daerah menjadi hanya terhadap perangkat	Menyesuaikan target kinerja dengan kebijakan baru pada tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										daerah yang mendukung RB Tematik dan General, sehingga pendampingan dan asistensi penilaian reformasi birokrasi yang semula ditargetkan 50 perangkat daerah, pendampingan hanya dilaksanakan kepada perangkat daerah yang mendukung RB Tematik dan General	
				c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Pemberantasan Korupsi.							
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	8	100		
				d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	15	24	160	Pencanangan Zona Integritas (ZI) dilakukan kepada semua OPD yang semula direncanaakan hanya untuk 15 OPD	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	15	24	160	Pencanangan Zona Integritas (ZI) dilakukan kepada semua OPD yang semula direncanaakan hanya untuk 15 OPD	

2) Permasalahan

Berdasarkan tabel Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, target kinerja program dan kegiatan dapat tercapai, tapi masih dijumpai permasalahan sebagai berikut:

a) Penyusunan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya berbasis risiko. Untuk area pengawasan proses atas *Auditable Unit* desa, sekolah dan puskesmas belum sesuai dengan hasil pemetaan peta auditan yang telah diidentifikasi faktor risikonya, sehingga penentuan objek audit atas desa, puskesmas dan sekolah belum berbasis risiko;
b) Belum tercukupinya kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah. Sesuai Permendagri No.84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dari kebutuhan ideal sebesar 0,5% dari belanja APBD.baru tersedia Rp. 10.467.450.000 atau 0,3% dari belanja APBD TA 2023.
c) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 143 orang, namun baru tersedia 54 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 6 yaitu 5 PPUPD ahli madya dan 1 PPUPD Ahli Muda, sehingga masih kurang 40 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 81 auditor dan saat ini sudah ada 23 auditor sehingga masih kurang 42 auditor.
d) Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki sertifikasi profesi baru 11 orang dan 2 orang penyuluh antikorupsi bersertifikat;
e) Belum terpenuhinya jam pelatihan minimal 120 jam/tahun untuk per auditor dan PPUPD.
f) Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan;

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Pengiriman pejabat fungsional auditor dan PPUPD mengikuti diklat di pusdiklat, juga dilaksanakan Pelatihan Di Kantor Sendiri yang diikuti seluruh pegawai Inspektorat Daerah dengan narasumber pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat.

b) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan PKPT Berbasis Risiko, sehingga pada Penyusunan PKPT Tahun 2024 telah sepenuhnya berbasis risiko, yaitu telah disusun peta pengawasan (*audit universe*) berdasarkan area pengawasan proses atas *Auditable Unit* desa, sekolah (SD dan SMP) dan puskesmas telah sesuai dengan hasil pemetaan dan telah berbasis risiko.
c) Mengajukan kebutuhan pegawai Aparat Pengawas
d) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan etos kerja dan integritas tinggi, meskipun anggaran pengawasan belum mencapai 0,5% APBD

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan fungsi pengawasan diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 107,5%. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 161,75%.

Dalam menyusun perjanjian kinerja TA 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah mengacu pada target kinerja program dan kegiatan TA 2023 yang tercantum dalam DPA TA 2023 dan DPPA TA 2023. Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 94 Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Pegawasan Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	Nilai : 3,40	Nilai : 3,90	115%

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2023

Dalam perjanjian kinerja TA 2023 capaian target Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Program Penyelenggaraan Pengawasan menjadi perjanjian kinerja 4 (empat) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Inspektur Pembantu yang melaksanakan perjanjian kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan yaitu:

a) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa

b) Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah
c) Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Pemerintah Daerah dan BUMD
d) Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Adapun pencapaian target kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu menjadi perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

Target dan Realisasi Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan:

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal target 323 obrik realisasi 729 obrik. Kegiatan ini terbagi dalam 7 sub kegiatan yaitu:
    1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Pemerintah Daerah dan BUMD, dengan target kinerja pengawasan adalah 6 OPD/BUMD realisasi 23 OPD/BUMD. Kegiatan berupa audit kinerja pada RSUD Prembun, Audit Kinerja PD Apotik Lukulo, Audit Kinerja Tematik, yaitu program Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, program pemasaran pariwisata, program penyediaan dan pengembangan pertanian, program rehabilitasi sosial, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada Puskesmas dan Kecamatan, penilaian pelayanan publik pada 21 perangkat daerah, monitoring stok opname vaksin covid-19 per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan, Puskesmas Gombong II dan Puskesmas Sempor I, monitoring dan evaluasi hibah subsisdi bunga tahun 2022 PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda), monitoring dan evaluasi hibah bunga tahun 2022 PT. BPK BKK Jateng Cabang Sruweng.

    2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah, dengan target pengawasan 100 paket realisasi 100 paket. Kegiatan dilaksanakan melalui jasa konsultasi pemeriksaan paket pengadaan langsung tahun 2022 yang dilaksanakan pada triwulan ke-2 dan triwulan ke-3. Pemeriksaan pada triwulan ke-2 yaitu pemeriksaan pada 55 paket berupa pengecekan pekerjaan pengadaan langsung pada pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang Tahun 2022, dan pada pemeriksaan triwulan ke-3 untuk paket pengadaan langsung konstruksi pada 45 paket pekerjaan tahun 2022 yaitu pada belanja modal yang terdiri dari 27 paket pekerjaan pada 4 OPD dan 18 paket pekerjaan pada 11 kelurahan.
    3) Reviu laporan Kinerja merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Desa,

dengan target reviu 5 kali realisasi 5 kali. Kegiatan berupa Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Reviu LPPD, Reviu LKJIP, Reviu RKPD TA 2024, dan Reviu RKPD Perubahan TA 2023;

4) Reviu Laporan Keuangan, merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Daerah, target 98 obrik realisasi 131 obrik. Kegiatan berupa kas opname pada perangkat daerah, reviu dana alokasi fisik, reviu BLUD, reviu laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan biaya operasional sekolah, reviu penyerapan anggaran dan PBJ, reviu THR bagi ASN guru, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah (tata Kelola pajak) dan kegiatan pengawasan lainnya berupa pemeriksaan APBDes, reviu *earmarked*, reviu standar harga satuan daerah TA 2024, reviu ASB fisik, reviu P3DN, reviu hibah bantuan sosial.
5) Pengawasan Desa, merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa, target 154 desa realisasi 423 desa. Kegiatan berupa pemeriksaan APBD Desa.
6) Kerjasama Pengawasan Internal merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Khusus, target 5 kali realisasi 5 kali dan 1 kesepakatan Kegiatan berupa rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu pihak kejaksaan maupun polres. Selain itu juga terbentuk kesepakatan Kerjasama yaitu Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan APIP, merupakan perjanjian kinerja Sekretaris Inspektorat Daerah, target 48 obyek pemeriksaan realisasi 48 obyek pemeriksaan.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 33 obyek pemeriksaan realisasi 86 obyek pemeriksaan. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Penanganan penyelesaian kerugian negara merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Khusus, target 3 kasus realisasi 3 kasus;
   2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Khusus, target 33 obyek pemeriksaan

realisasi 85 obyek pemeriksaan. Capaian kinerja sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu merupakan capaian kinerja yang dilaksanakan Inspektur Pembantu Bidang Khusus dan Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dan BUMD dan Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dan BUMD dengan 34 obyek pemeriksaan, Inspektur Pembantu Bidang Khusus dengan 49 obyek pemeriksaan dan Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dengan 5 obyek pemeriksaan.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dalam perjanjian kinerja TA 2023, capaian target Kegiatan pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi menjadi perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dan BUMD dan Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi.

Target dan Realisasi Kegiatan pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, target 7 dokumen realisasi 7 dokumen. Kegiatan ini terbagi dalam 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Kinerja dan BUMD, target 2 dokumen realisasi 2 dokumen yaitu:
      - Keputusan Bupati kebumen Nomor 100.1.2/526 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/426 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2023;
      - Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen TA 2024.
   2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi, target 5 dokumen realisasi 5 dokumen yaitu :
      - Peraturan Bupati Kebumen tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
      - Surat Edaran Bupati tentang LHKAN

- Keputusan Bupati Kebumen tentang Desa Antikorupsi
- Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tentang Admin Program Pengendalian Gratifikasi
- Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tim Zona Integritas.

b) Pendampingan dan Asistensi target 52 perangkat daerah realisasi 52 perangkat daerah. Kegiatan pendampingan dan asistensi yang terdiri dari 4 sub kegiatan merupakan perjanjian kinerja Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi. Target dan realisasi masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut:
   1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, target 50 perangkat daerah, terealisasi 52 perangkat daerah sehingga capaian kinerja 104%. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Bimtek SPIP kepada 52 perangkat daerah, asistensi penilaian mandiri SPIP kepada perangkat daerah, penjaminan kualitas penilaian mandiri SPIP TA 2023.
   2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, target 50 perangkat daerah dan terealisasi 13 perangkat daerah, sehingga capaian kinerjanya 26%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pola pendampingan yaitu menjadi RB Tematik, sehingga yang semula seluruh OPD sekarang hanya beberapa OPD sesuai tema RB Tematik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan tematik reformasi birokrasi, yaitu tema kemiskinan, investasi dan stunting, penggunaan komponen dalam negeri dan pengendalian inflasi pada 13 perangkat daerah.
   3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi, target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan, sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi pengisian LHKPN dan LHKASN, sosialisasi pedoman MCP, fasilitasi penyusunan rencana aksi pemenuhan dokumen MCP, monitoring implementasi Pendidikan anti korupsi, monitoring MCP Triwulan I sampai IV, monitoring PPG, monitoring desa anti korupsi, peringatan hakordia.
   4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, target 15 perangkat daerah terealisasi 24 perangkat daerah sehingga capaian kinerjanya 160%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi/pendampingan Zona Integritas, Sosialisasi Pengisian LKE Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, Asistensi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, Reviu Penilaian

Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023. Tahun 2023, perangkat daerah yang diusulkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD dr. Soedirman, Puskesmas Kebumen 2, Puskesmas Pejagoan dan Puskesmas Kutowinangun. Tahun 2023, perangkat daerah yang diusulkan belum ada yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).hal ini dikarenakan Puskesmas belum ada 1 (satu) tahun dalam membangun zona Integritas, sedangkan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Dr. Soedirman belum lolos verifikasi lapangan karena nilainya masih kurang.

5) Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 95 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen 2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Maturitas SPIP	Nilai	3,13	3,20	3,19	99,69	3,50

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2023

Berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : PE.09.03/LHP-598/PW12/3/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah 3,19 dari target 3,20 sehingga capaian kinerjanya 99,69%. Adapun hasil evaluasi BPKP adalah sebagai berikut:

a) Penetapan Tujuan

1) Sasaran strategis perangkat daerah belum mendukung sasaran strategis Pemda, antara lain sasaran strategis perangkat daerah “Terkelolanya Energi Baru Terbarukan” belum mendukung sasaran strategis Pemda “Berkurangnya pengangguran”. Sasaran tersebut belum berorientasi hasil karena belum berdampak berdampak langsung pada gurita berkurangnya pengangguran
2) Indikator sasaran strategis Pemda belum cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis pemda, antara lain sasaran strategis

Pemda “Berkurangnya penduduk miskin” dengan indikator tingkat kemiskinan, belum memasukan indikator pendidikan, kesehatan, tingkat inflasi, dan peningkatan pendapatan. Hal ini karena dalam menetapkan indikator belum mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

3) Indikator sasaran strategis perangkat daerah belum memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, antara lain sasaran strategis perangkat daerah “Meningkatnya ketahanan pangan” dengan indikator “Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan” dengan target tahun 2023 sebesar 3%, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 5,62%. Hal ini karena evaluasi atas target tahunan dalam RPJMD 2021-2026 baru dilakukan saat ini (sedang berproses).

b) Komponen Struktur dan Proses

1) Belum seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi, dan hasil serta efektifitas tindak lanjut secara berkala, konsisten dan terdokumentasi untuk menangani residual risk sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja. Hal ini karena kegiatan evaluasi SPIP Terintegrasi belum merupakan prioritas Perangkat Daerah

2) Target kinerja SPIP Terintegrasi ditetapkan menjadi indikator kinerja Inspektorat Daerah yang seharusnya menjadi indikator Pemda (Setda). Hal ini karena kesalahan dalam menetapkan penanggungjawab IKU

3) APIP telah memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi namun perlu mengembangkan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada level sasaran strategis Pemerintah Daerah.

c) Komponen Pencapaian Tujuan

1) Masih terdapat temuan berulang dalam LHP BPK berupa kekuarangan volume pekerjaan dalam 3 tahun terakhir;

2) Jumlah temuan pada LHP BPK atas LKPD pada 5 tahun terakhir masih di atas 10, dengan rincian temuan tahun 2018 sebanyak 29 temuan, tahun 2019 sebanyak 15 temuan, tahun 2020 sebanyak 7 temuan; tahun 2021 sebanyak 12 temuan; dan tahun 2022 sebanyak 16 temuan.

5. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Transparansi dan Partisipasi Publik dilaksanakan melalui satu program prioritas yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 96 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
1	Transparasi dan Partisipasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	A PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	Indeks	30,20	32,16	106,49		rutin melaksanakan bimtek bagi petugas PPID OPD dan desa
				1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	PPID OPD dan Desa	154	164	106,49		rutin melaksanakan bimtek bagi petugas PPID OPD dan desa
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	PPID OPD dan Desa	154	164	106,49		rutin melaksanakan bimtek bagi petugas PPID OPD dan desa

2) Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Transparansi dan Partisipasi Publik adalah masih kurangnya SDM yang menangani secara khusus masalah PPID.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah rutin melaksanakan bimtek bagi petugas PPID OPD dan desa.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata- rata capaian Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik adalah sebesar 106,49%. Adapun rata-rata capaian kegiatan dari seluruh program adalah 106,49%.

5) Capaian Kinerja Urusan (IKU)

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya indeks PPID. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 97 Tabel Nilai dan Status Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Kebumen Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Keterbukaan informasi publik pemkab kebumen	Nilai dan status	80-89,9 (Menuju Informatif)	>90 (Informatif)	>90 (Informatif)	100	-

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2023

Capaian kinerja urusan Transparansi dan Partisipasi Publik selama periode 2023 adalah kategori informatif. Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik.

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
c) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3. 98 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat Daerah			A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Setda	nilai	84	89,57	106,63	Realisasi IKM sebesar 89,57 menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap layanan Sekretariat Daerah	
				1 Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	dok	4	4	100		
				A Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	dok	2	2	100		
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	dok	1	1	100		
				C Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi	dok	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Birokrasi	implementasi Reformasi Birokrasi						
		Bagian Umum		1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	159	159	100		
				B Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dok	4	4	100		
		Bagian Umum		2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				A Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	7	13	185,71	Frekuensi laporan yang semula arsip 2 bulan sekali menjadi setiap bulan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian Umum		3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
				B Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				D Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				E Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	2	2	100		
				F Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	bulan	12	12	100		
				G Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	laporan	120	200	166,67	Banyaknya undangan-	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"					undangan dan kegiatan-kegiatan yang harus dihadiri	
		Bagian Umum		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	64	64	100		
				A Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	5	250	Adanya meubelair yang mendesak harus segera diganti	
				B Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	30	750	Adanya peralatan dan mesin lainnya (laptop, komputer, printer) yang mendesak harus segera diganti	
				C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	2	25	1.250	Adanya sarana dan prasarana	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan gedung kantor atau bangunan lainnya					lainnya (kipas angin, ac) yang mendesak harus segera diganti	
		Bagian Umum		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				C Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	100		
				D Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian Umum		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	127	127	100		
				A Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemelihar, pajak dan Perizinan aan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya"	unit	109	136	124,77	Adanya kendaraan dinas yang mendesak harus segera diperbaiki	
				B Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	4	4	100		
				C Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	15	300	Adanya peralatan dan mesin lainnya (ac, genset, pompa air) yang mendesak harus segera dservice atau diperbaiki	
				D Pemeliharaan/Rehabil	Jumlah Gedung	unit	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
		Bagian Umum		7 Adminisrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	2	2	100		
				B Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	2	2	100		
				C Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala	Jumlah KDH/WKDH dan	orang	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah dan Wakil Kepala Daerah	keluarga yang melaksanakan medical chekup						
				D Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH	bulan	12	12	100		
		Bagian Umum		8 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12	100		
		Bagian		1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol	Jumlah layanan fasilitasi protokol	layanan	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Prokopim		dan Komunikasi Pimpinan	dan komunikasi pimpinan						
				A Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	layanan	3	8	266,67	Adanya layanan keprotokolan selain Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang harus dilayani (Kementerian, MPR, DPR-RI, Gubernur, BPK)	
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	3	8	266,67	Adanya layanan keprotokolan selain Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang harus dilayani (Kementerian, MPR, DPR-RI, Gubernur, BPK). Sehingga laporan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										kinerja juga berubah.	
				C Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen	layanan	3	8	266,67	Adanya dokumentasi keprotokolan dalam bentuk unggahan konten medsos, baliho, dan foto-foto selain Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang harus dilayani (Kementerian), MPR, DPR-RI, Gubernur, BPK).	
		Bagian perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				A Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan	Jumlah orang yang mengikuti	orang	120	1.240	1.033,33	Penambahan peserta	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perundang-Undangan	sosialisasi peraturan Perundang-undangan					sosialisasi ketentuan bidang cukai di Pondok Pesantren, karena masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi terkait rokok ilegal	
				B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD	Skor	2,78	3,27	117,63	Terjadi peningkatan capaian kinerja Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	
		Bagian Pemerinta		1 Administrasi Tata	Jumlah kegiatan Administrasi tata	Kegiat	3	3	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		han		Pemerintahan	Pemerintahan	an					
				A Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dok	1	3	300	Telah terealisasi 3 dokumen untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yaitu: SK tentang Penunjukkan Personil PPK, SK tentang Posko PPK dan SK tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye	
				B Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	dok	2	3	100	Telah terealisasi 3 dokumen yaitu: Perbup tentang Pemberian Honor bagi	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Ketua RT dan RW, SK tentang Rupabumi, dan SK tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat	
				C Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dok	2	2	100	Dokumen LPPD dan LKPJ	
		Bagian Pemerintahan		2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	dok	5	8	160	Jumlah realisasi MoU sebanyak 8 dokumen meliputi Kesepakatan Bersama antara Pemkab	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Kebumen dengan daerah-daerah lain, Perguruan Tinggi, PERTAMINA, dan BPJS	
				A Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	dok	5	8	160	Jumlah realisasi MoU sebanyak 8 dokumen meliputi Kesepakatan Bersama antara Pemkab Kebumen dengan daerah-daerah lain, Perguruan Tinggi, PERTAMINA, dan BPJS	
		Bagian Kesra		1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan	Kegiatan	15	15	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesejahteraan Rakyat	kebijakan kesejahteraan rakyat						
				A Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan , evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibumlinmas	Dokumen	4	4	100		
				B Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	7	7	100		
				C Sub Kegiatan Pengelolaan Bina	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi	Kegiatan	5	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Mental Spiritual	Pengelolaan Bina Mental Spiritual						
		Bagian Hukum		1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	Kegiatan	3	3	100		
				A Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah	dok	550	550	100		
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	kasus	12	12	100		
				c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	626	626	100		
				C PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	%	90	97,1	107,89	Berdasarkan hasil perhitungan dari komponen Indeks Kualitas Kebijakan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pembangunan (IKK) yang terdiri dari prosentase RUP yang diumumkan melalui SIRUP, jumlah pelanggan yang puas dengan nilai diatas 3,06, jumlah realisasi unit kerja yang difasilitasi kebijakan perekonomian, dan realisasi keuangan perangkat daerah menunjukkan realisasi yang melebihi target.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan sumber daya alam	Dokumen	4	4	100		
				A Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	2	2	100		
				B Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan,	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					statistik, persandian						
				C Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan Energi dan Air	Jumlahdokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Dokumen	1	1	100		
				2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Dokumen	3	3	100		
				A Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	2	100		
				B Sub Kegiatan Pengendalian dan	Jumlah Dokumen laporan monev	Doku	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Distribusi Perekonomian	pengendalian dan distribusi perekonomian	men					
		Bagian Adm. Pembangunan		1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	2	2	100		
				A Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan evaluasi program Pembangunan	laporan	12	12	100		
				B Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	12	12	100		
		Bagian PBJ		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan fasilitasi pengadaan melalui SPSE	Dokumen	10	10	100		
				A Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang	Dokumen	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan jasa						
				B Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Dokumen	1	1	100		
				C Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan fasilitasi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1	100		

2) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan antara lain:

a) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemerintah
b) Belum tepatnya pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang direncanakan.
c) Masih kurangnya inovasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta mengusulkan pengadaan.
b) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum tepat waktu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah dibuat, khususnya jadwal kegiatan dan rencana anggaran kas.
c) Mendorong untuk memunculkan inovasi sesuai tupoksi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan fungsi penunjang lainnya diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 109%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 103,33%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terealisasi di atas 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Selama tahun 2023 kinerja pelayanan publik Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik di Kabupaten Kebumen sampai tahun 2023 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dari target 84 mendapat capaian skor 89,57, sehingga presentase kinerjanya 106,63%. Namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 90.

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan termasuk memperhatikan pelayanan yang ramah anak atau bersifat inklusif, serta mempersingkat waktu pelayanan.

2. Sekretariat DPRD

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 99 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sekretariat	Sekretariat DPRD	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	8	8	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	yang tersusun						
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	3	3	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	31	31	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	dok	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang tersusun						
				3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kali Diklat/Seminar/ Workshop yang diikuti oleh ASN Sekretariat DPRD	kali	3	3	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi Perundang-undangan yang diikuti oleh ASN Setwan	kali	3	3	100		
				b bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	31	31	100		
				Kegiatan	Jumlah bulan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perundang-undangan						
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis	bulan	12	12	100		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan	Jumlah bulan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	unit	390	390	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabat yang dipelihara	unit	34	34	100		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	unit	25	25	100		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	220	220	100		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	unit	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kantor dan Bangunan Lainnya							
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	orang	50	50	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel Pakai-an Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD	stel	4	4	100		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical*	Jumlah Anggota DPRD yang	orang	50	28	56	Beberapa anggota	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Check Up DPRD	memperoleh layanan *medical check up*					DPRD tidak mengambil hak untuk *Medical Check Up*	
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Fasilita-si Fraksi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Fasilita-si Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah bulan pemenuhan fasilita-si rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan	Jumlah Bulan	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilita-si Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100		
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	Dokumen	27	23	85,18	3 Perda tidak disahkan dan 1 Naskah Akademik tidak disusun	
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda yang tersusun	Dokumen	2	2	100		
				Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	19	16	84,2	Raperda yang	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang dibahas				1	selesai dibahas pada tahun 2023 adalah 16 Raperda, sedangkan 3 Raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penanggulangan dan Penanganan Stunting dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pembahasannya diselesaikan pada Masa Persidangan I tahun 2024	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji	Dokumen	4	4	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteranga	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau	Dokumen	6	5	83,33	Raperda inisiatif DPRD yang diajukan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				n dan/atau Naskah Akademik	Naskah Akademik yang tersusun					oleh Alat Kelengkapan DPRD hanya 5 Raperda	
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen	6	6	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Dokumen	7	7	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun						
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	Kegiatan	6	6	100		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis	Jumlah Kali Bimbingan	Kali	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DPRD	Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan						
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kegiatan	2	2	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli	AKD	7	7	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	Orang	7	6	85,7	Karena tidak terjadi perubahan jumlah fraksi	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Hubungan	Kegiatan	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hubungan Masyarakat	Masyarakat DPRD						
				Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan	3	3	100		
				Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah untuk Anggota DPRD	Bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang	Dokumen	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					tersusun						
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD	Kali	3	3	100		
				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas	Dokumen	1	0	0	Tidak ada dokumen kerjasama	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										daerah yang dibahas oleh DPRD	
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Bulan	12	12	100		
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	Kegiatan	3	3	100		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas	Bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD						
					Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
					Sub Kegiatan Fasilita-si Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100		

2) Permasalahan

Pada tahun 2023 Dokumen Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) berisi 19 Raperda yang diagendakan selesai pada tahun 2023. pada perjalanannya terdapat 3 (tiga) Raperda yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penanggulangan dan Penanganan Stunting dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 telah diselesaikan dan telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 - 2044, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penanggulangan dan Penanganan Stunting dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan saat ini telah dilakukan pembahasan dan diharapkan selesai pada Masa Persidangan I Tahun 2024.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan diatas diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%, rata-rata capaian kegiatan adalah 92,82%. Hal tersebut disebabkan terdapat satu kegiatan yaitu Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang capaiannya 0% di mana pada tahun 2023 tidak ada dokumen kerjasama daerah yang dibahas oleh DPRD, selain itu anggaran untuk kegiatan ini juga telah dialihkan ke kegiatan lain pada Perubahan APBD 2023. Untuk capaian sub kegiatan, rata-ratanya adalah 96,95%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sehingga pada tahun ini kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen secara umum telah tercapai.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Formulasi penghitungannya adalah : Capaian fasilitasi pengawasan + Capaian fasilitasi pembahasan dokumen anggaran + fasilitasi pembentukan dan pembahasan peraturan daerah/peraturan DPRD + Fasilitasi penyerapan aspirasi + Fasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD dibagi 5.

Sebagaimana disebutkan diatas meskipun 5 (lima) Raperda tidak dapat terselesaikan pada tahun 2023, namun Sekretariat DPRD telah secara optimal memfasilitasi proses pembahasan Raperda-raperda tersebut melalui fasilitasi rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan, serta konsultasi ke pemerintah pusat/provinsi maupun studi referensi ke daerah-daerah lain.

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 100 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2023	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kebumen, 2023

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
b) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
c) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
d) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan
e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut :

Tabel 3. 101 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbang pol		A PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah per 100.000 pendu - duk	41,64	75,38	181,03	Meningkatnya rasio elemen masyarakat yang mendapat kan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebang saan melalui kegiatan seleksi Paskibra, Pelati han Paskibra, peringatan HUT RI, peringatan Hari Lahir Pancasila, dengan realiasa si sebanyak 1.018 orang dari target 562 orang	
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan	Kegiatan	23	23	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	**1**	1	100		
				B PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	%	67,59	67,59	100	Tahun 2023 tidak ada Pemilu, untuk capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam politik dengan diselenggaraka

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						proses Pemiu menggunakan capaian Pemilu tahun 2019. Anggaran pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemeritahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/ Pemilu Kepala Daerah serta pematauan situasi politik di gunakan untuk sosialisasi forum diskusi politik dan bantuan	nnya pendidikan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat tersebut dilaksanakan melalui forum-forum diskusi politik. Adapun sasaran forum diskusi politik adalah masyarakat umum serta calon pemilih pemula.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										keuangan Parpol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses Pemilu	
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	kegiatan	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	orang	2250	2250	100		
				C PROGRAM PEMBERDAYA	Cakupan Program Pemberdayaan dan	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA - KATAN	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
				1 KegiatanPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Orang	630	630	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wilayah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
			sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	36	36	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah per 100.000 pendu-duk	54,64	224,37	410,63	Peningkatan Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SOSIAL, DAN BUDAYA						Kebangsaan yang signifikan disebabkan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan sosiliasi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dari target 738 orang terealisasi 3.030 orang.	
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	lokasi	5	64	1.280	Penambahan lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya karena adanya	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										penambahan anggaran.	
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	orang	738	3.030	410,57	Penambahan sasaran Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah karena adanya penambahan anggaran.	
			Sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	orang	400	400	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengahyat Kepercayaan di Daerah.						
				E PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29	100	155,54	Konflik Berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi telah 100% ditangani.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	5	5	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	orang	130	130	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik	serta Penanganan Konflik di Daerah						
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	130	130	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Konflik di daerah							
				c Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	4	100		
				e Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Dokumen	**5**	5	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
				f Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	**5**	5	100		

2) Permasalahan

Permasalahan dalam bidang politik yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah, diantaranya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 80%, maka tingkat capaian partisipasi masyarakat dalam pemilu tingkat Kabupaten Kebumen sebesar 67,59% masih dbawah capaian Provinsi Jawa Tengah. Peran perempuan dalam politik juga masih rendah, dimana tingkat partisipasi anggota dewan perempuan pada DPRD Kabupaten Kebumen adalah 22% dari 50 anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam politik dengan diselenggarakannya pendidikan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat tersebut dilaksanakan melalui forum-forum diskusi politik yang berlokasi di desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen. Adapun sasaran forum diskusi politik adalah tokoh-tokoh masyarakat, calon pemilih pemula dan pemilih perempuan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan pemerintahan umum diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 189,44%, sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 336%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan unsur pemerintahan umum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 102 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	KINERJA 2023			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	64,29	100	155,54	78,57

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Kebumen 2023

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen antara lain:

a) Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat kabupaten dan kecamatan, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani;
b) Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah serta Puskomin (Pusat Komunikasi) yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini dan deteksi dini;
c) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.
d) Adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, moderasi beragama dan toleransi serta memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, sehingga hal ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial.

3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

Pelaksanaan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kabupaten Kebumen melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan urusan kewilayahan sebagai berikut:

Tabel 3. 103 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kewilayahan	1 Adimulyo	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	91	90,81	99,9	Unsur Sarana Prasarana dengan nilai 84,39. Unsur Prosedur dengan nilai 90,82. Unsur Persyaratan dengan nilai 90,87.	Unsur Sarana Prasarana: akan ditingkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan public. Unsur Prosedur: akan membuat standar operasional prosedur yang tidak berbelit-belit. Unsur Persyaratan: persyaratan akan diperjelas dan dipublikasikan di media informasi Kecamatan Adimulyo.
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK,	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)						
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan	Keg	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	23	23	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD)	Dok	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	Desa	23	23	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	10	10	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	Desa	23	23	100		
				C PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				1 Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	10	10	100%		
				a Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	dok	4	4	100%		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	dok	6	6	100%		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN mendapatkan gaji dan tunjangan kerja	Bulan	12	12	100%		
				b Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (GU, TU Dll)	Bulan	12	12	100%		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100%		
				a Peneyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	Bulan	12	12	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan minum rapat	bulan	12	12	100%		
				c Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100%		
				d Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100%		
				e Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan Penyediaan bahan/material	bulan	12	12	100%		
				f Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100%		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12	100%		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100%		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100%		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	bulan	12	12	100%		
				5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	unit	4	4	100%		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit	11	11	100%		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	bulan	12	12	100%		
				c Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100%		
		2 Alian	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	86,92	91,96	105,8	Meningkatnya Respon Masyarakat terhadap SOP Pelayanan	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	jenis	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian)	Jenis	7	7	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek Kondusifitas Kepala Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Desa dengan indek Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	75	75	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah Desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	keg	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan K	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	3	3	100		
				c Rekomendasi Pengangkatan dn Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Rekomendasi	Desa	16	16	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran	Keg	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					Ketentraman dan Ketertiban Umum						
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes, Jumlah Kegitan Pra Musrenbangcam, Jumlah Kegiatan Musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,,UKS,Sosial Masyarakat,Pemuda dan UKS , BUMDES dan Kepemudaan	Keg	4	4	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako) , Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes	Keg	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusanp emerintah daerah	%	100	100	100		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Perencanaan Perangkat Daerah	daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2024)						
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkjip,dan profil Desa/Kel)	Dokumen	5	5	100		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangn SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2	2	100		
				Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyedinaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyedinaan jasa	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi sumber daya air dan listrik						
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	25	25	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15	15	100		
		3 Ambal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	86	83.58	96,62	kendala jaringan internet sehingga pelayanan kurang optimal	*maintenance* jaringan internet
				1 Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan non perizinan	Jumlah jenis permohonan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, SKCK	jenis	6	6	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	keg	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan UUD pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan Memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase desa dengan indeks desa membangun dan katagori maju dan mandiri	%	29,17	29,17	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	desa	32	32	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				dan pengawasan Pemerintah Desa							
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi keuangan desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Desa	32	32	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Rakor sinkronisasi dan perencaan pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	kali	4	4	100		
				c Sub Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Orang	72	72	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Perencaan Pembangunan Partisipatif	Jumah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel	Desa	32	32	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Paket kegiatan yang dilaksanakan	Paket	4	4	100		
				f Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi TKP2KDES	Desa	32	32	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra 2026, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan petrangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji,tunjangan dan tamsil	0rang	17	17	100		
				b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD/	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (kabel,lampu, terminal saklar)	jenis	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggadaan	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan bahan bancaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan per uud ngan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan /Material	jumlah bulan penyediaan bahan/Material	bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarkan	bulan	12	12	100		
				g Penataan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Fasilitasi Arsip	bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan Jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pemeliharaan barang milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,Perizinan,Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit penyediaan Jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinasoperasional atau lapangan	unit	24	24	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	13	13	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit pemeliharaan dan mesin lainnya	unit	1	1	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	1	100		
		4 Ayah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan publik Kecamatan	%	89,5	88,31	98,67	-Blangko E-KTP kurang -Sinyal sering trouble -Aplikasi sering	Mengajukan Surat Permohonan ke Disdukcapil dan Dinas Kominfo

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
			Penciptaan Kondusivitas Wilayah							berubah-ubah dari Kemendagri -Setiap cetak KTP harus Download IKD	
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	9	9	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	9	9	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100		
				1 penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	3	3	100		
				a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar negara republik indonesia Tahun 1945, pelestarian Bineka tunggal ika serta pemerintahan dan	Jumlah Kegiatan Dalam rangka HUT RI dan hari jadi	Keg	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia							
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	0,344	0,944	274	Perhitungan Indeks Desa Membangun 17:18 (Keseluruhan Desa)	
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Keg	8	8	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendaya gunaan aset desa	Desa	18	18	100		
				b Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	2	2	100		
				c Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	1	1	100		
				d fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa	jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				e Fasilitasi penyelenggaraan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan	Keg	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Ketentraman dan Ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum						
				f Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Musren bangdes dan musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				g Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan PKK, Jumlah Kegiatan Pembinaan sosial Masyarakat, jumlah kegiatan pembinaan UKS, Jumlah kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keg	4	4	100		
				h Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Keg	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (LKPJ, LKJIP, LPPD LK SKPD)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	orang	20	18	90	Mutasi Pegawai	
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kamtor	bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Dartah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				a Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Laptop, microphone)	unit	3	3	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor	bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	13	13	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	8	8	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	unit	1	1	100		
		5 Bonorowo	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
			Kondusivitas Wilayah								
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP,Renstra 2026)	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	Dokumen	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per Undang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	Bulan	12	12	100		
				e Penyediaan bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	10	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	2	2	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	Unit	23	23	100		
				a Penyediaan Jasa, Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	Jumlah bulan/unit Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	unit	12	12	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan mebel	unit	14	14	100		
				c Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	unit	15	15	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				d Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan srutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks	88,5	83,5	95	Indeks Kepuasan Msyarakat terhadap	Peningkatan mutu pelayanan baik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik Kecamatan					Pelayanan menurun karena sistem sering error	pada unsur SDM dan sistemnya
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	9	9	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan(KK,KTP, Kartu Kelahiran,Surat Kematian,Pindah Datang,Rekom SKCK,Ijin Keramaian,KIA,Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	24,05	24,05	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitasi APBDes)	Desa	11	11	100		
				b Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fsilitsi dlam rangka	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					pelaksanaan pemilihan kepala desa						
				c Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Jumlah drsa yang terfasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Desa	3	3	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	Dokumen	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
		6 Buayan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	86	92,37	107,4	Banyak pemohon dari Kecamatan lain	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan	Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan indeks desa membangun Katagori Maju dan Mandiri	%	29,17	45	154,2	9 dari 20 Desa sudah masuk kategori Desa Mandiri	
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Keg	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	20	20	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	20	20	100		
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Desa	3	3	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan	Keg	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Ketentraman dan Ketertiban Umum	ketentraman dan ketertiban umum						
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakt desa	Keg	5	5	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	Keg	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan tunjangan	orang	14	12	85,7	2 ASN pensiun per Februari dan Mei 2023	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	dokumen	4	4	100		
				. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	unit/jenis	4	4	100		
				b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	Bulan	12	12	100		
				e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				f Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	unit	3	3	100		
				a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	unit	1	1	100		
				5 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat -menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	3	3	100		
				a Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan	Jumlah paket/unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan	unit	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				dinas operasional atau lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional						
				b Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	3	3	100		
		7 Buluspesan-tren	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	%	86	94,2	109,5	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat dalam memperoleh layanan	
				1 Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	8	8	100		
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait non perizinan	Jenis	8	8	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					sesuai penugasan Kepala Daerah						
				a Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahu 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuha NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan indeks Desa Membangun Maju dan Mandiri	%	29,17	29,17	100		
				1 Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	keg	3	3	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuanagan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	21	21	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan	Jumlah dokumen Sinkronisasi	Dok	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				pembangunan daerah dan pembangunan desa	perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa						
				c Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	2	2	100		
				d Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pembangunan Parsitipatif	Keg	2	2	100		
				e Fasilitasi penyusunan program dan pelaksaaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Kepemudaan,UKS, Bumdes,dan Sosmasy)	Keg	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (SEMBAKo dan TKP2KDes)	Keg	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				perencanaan perangkat daerah							
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	6	6	100		
				Kegiatan Administrasi Keuan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlahn Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12	100		
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	26	26	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan	Jumlah Unit penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	unit	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	1	100		
		8 Gombong	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	%	86	88,06	102,4	Responden dari masyrakat terkait pelayanan publik di Kec.Gombong sudah memuaskan	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100		
					Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan	%	84	87,24	103,85	Responden dari masyrakat terkait pelayanan publik di Kel Gombong dan Kel Wonokriyo sudah memuaskan	
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan	kelurahan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel	kali	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	paket	25	25	100		
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	kegiatan	18	18	100		
				d Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan	dokumen	4	4	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	58,33	58,33	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kegiatan	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan	Desa/Kel	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kali	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	Desa/Kel	14	14	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa(PKK,Sosial, UKS)	kegiatan	9	9	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi Kegiatan Sembako dan TKP2Kdes/Kel	Desa/Kel	14	14	100		
				E PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	okumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	5	5	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan tunjangan	orang/bl	29	29	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor(kabel, lampu, terminal, saklar)	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah bulan Penyediaan Barang	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Catakan dan Penggandaan	Catakan dan Penggandaan						
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Pengelolaan arsip	bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	4	4	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listriklatan dan mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	29	29	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional komunikasi, sumber daya air, dan listriklatan dan mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah	unit	15	15	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerjarasioanlkomunikasi, sumber daya air dan listriklata dan Mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah	unit	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung	unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kantorin / pemeliharaan perbaikan Peralatan kerjarasionalkomunikasi, sumber daya dan listriklatan dan Mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah						
		9 Karanganyar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	84	84.58	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		%	100	100	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Bulan	12	12	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek konduksifitas kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah .	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.	kegiatan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Jumlah kegiatan dlam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	Keg	3	3	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Desa	7	7	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasililitasiPengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	desa	7	7	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa SKPD	dok	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Pelatihan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	keg	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif .	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Musrenbangdes/kec	keg	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	keg	4	4	100		
		10 Karanggayam	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					(LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev						
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	1	100		
				a Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	orang	14	14	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU, LS, UP)	Jenis	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	Tahun	1	1	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatusahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	18	18	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	Unit	16	16	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	1	100		
				c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	16	16	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	19	19	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/ operasional	Unit	9	9	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Unit	8	8	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung kantor	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	86,3	81,57	94,52	Belum tercapai target keouasan masyarakat, khususnya pada unsur-unsur: Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Produk Layanan, Unsur Sarana dan Prasarana	-Dalam memberikan pelayanan petugas akan lebih tepat waktu. -Melaksanakan sosialisasi terkait produk layanan Unit Pelayanan Publik (UPP). -Akan ditingkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan(KTP,KK,Kartu Kelahiran,Surat Kematian,Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keraimaian, KIA, Legalisasi Umum)	jenis	9	9	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum seseui Penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dala rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pemeliharaan Keutuhan Negara							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	34,04	34,04	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasiitasi, Rekomindasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Kegiatan	8	8	100		
				a Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dab Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	19	19	100		
				b Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Desa	1	1	100		
				c Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	2	2	100		
				d Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen SinkronisasiPercepatan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				f Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				g Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				h Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes/kel dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		
	Kecamatan	11 Karangsambung	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dok	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja , RKA, DPA,RKAP dan DPPA)	Dok	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP,SAKIP,/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dok	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	17	20	118	Adanya Penambahan Pegawai	
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dok	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordiasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit	4	4	100		
				a SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Paket	1	1	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	38	38	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	20	20	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100		
				d Sub Kegiatan pemelihaaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap	%	86	88,36	102	Meningkatnya Respon	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik Kecamatan					Masyarakat terhadap SOP Pelayanan	
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	5	5	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara& Resepsi HUT RI , Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	78	78	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	keg	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	14	14	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa	desa	3	3	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	desa	7	7	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	dok	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				dengan Pembangunan Desa							
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisapenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	keg	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	keg	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	keg	4	4	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	keg	2	2	100		
		12 Kebumen	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	90,5	92,18	101,3	Semakin baiknya pelayanan di kecamatan dan lima kelurahan serta tidak adanya tarif/biaya terhadap pelayanan yang diberikan	
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non Periziinan yang dilaksanakan	jenis	4	4	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	keg	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	%	29,17	50	171,41	Semakin baiknya pelaksanaan pemerintahan di desa	
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan	Keg	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pegelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa	Desa	24	24	100		
				b Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dok	1	1	100		
				c Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan	Dok	1	1	100		
				d Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum	keg	1	1	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang difasilitasi	keg	2	2	100		
				g Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial	keg	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pemberdayaan Masyarakat Desa	masyarakat yang terfasilitasi						
				h Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes dan Pendampingan Desa (Bansos) yang terfasilitasi	keg	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	Dokumen	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah yang disusun)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	3	100		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah	Orang	40	40	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					ASN yang mendapatkan Tamsil						
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit /jenis komponen instalasi listrik/penerangan angunan kantor (Kabel, Lampu, terminal Saklar	Jenis	4	4	100		
				b Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
		13 Klirong	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamtan	%	86	86,96	101,12	Target awal IKM adalah 86,00 tercapai 86,96 menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan	
				1 Pelaksanaan Urusan pemerintah yang	Jumlah urusan pemerintahaan	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat						
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait non perizinan	Jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahu 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuha NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan indeks Desa Membangun Maju dan Mandiri	%	29,17	37,5	128	Capaian IDM desa untuk kategori maju dan mandiri tahun 2023 bisa tercapai 9 desa dari target semula 7 desa sehingga capaian 128%	
				1 Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Keg	8	8	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	24	24	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Jumlah desa terfasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pembangunan desa	Dok	1	1	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				d Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				e Fasilitasi penyusunan program dan pelaksaaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Kepemudaan,UKS, Bumdes, Permakanan dan Sosmasy)	keg	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasiliatasi Penanggulangan Kemiskinan (SEMBAKO dan DTKS)	keg	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Admninistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Admninistrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	paket	2	2	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	paket	3	3	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	3	3	100		
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	36	36	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	10	10	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	unit	21	21	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	20	20	100		
				d Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	1	100		
		14 Kutowinangun	Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi melalui e-gov dan Peningkatan Kapabilitas Aparatur	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	3	100		
				3 Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan material	Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				B PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	33	33	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	kegiatan	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	19	19	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen singkronnisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	dokumen	2	2	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa(pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	Kegiatan	4	4	100		
				e Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	100	92,92	92,92	Kategori Nilai IKM sudah “Sangat Baik” menunjukkan bahwa pelayanan sudah memuaskan masyarakat	
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		
		15 Kuwarasan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan publik kecamatan	%	86	93,44	108,44	menigkatnya pelayanan bagi masyarakat	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan non Perizinan	Jumlah bulan Pelayanan Perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan,	Kegiatan	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan						
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	22	22	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (IPMD dan Profil)	Dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Bumdes, Usaha Kesehatan Sekolah)	Kegiatan	5	5	100		
				e Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2Kdes)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan penunjang urusanp emerintah daerah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				1 Kegiatan perncanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Doumen Perencaan Perangkat Derah yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12	100		
				a Sug Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyeduiaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulah Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	100		
				3 Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daearah	Presentase Terlasananya Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	Jumlah Bulan Penyedian Komonen Listrik	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-uandangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perudang undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
	Kecamatan	16 Mirit	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan dan	Dokumen	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi perencanaan yang disusun						
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA,RKAP dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	Dokumen	6	6	100		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	Dokumen	4	4	100		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub kegiatanPenyediaan Komponen Instalasi	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor						
				b Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	Bulan	12	12	100		
				e Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan Rak Arsip)	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Televisi, Bracket TV,Laptop dan Speaker Portable)	Unit	4	4	100		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	13	13	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Dinas Operasional atau Lapangan							
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	5	5	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	indeks	86,14	89,97	104,45	Kategori IKM Kecamatan Mirit sangat baik	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	keg	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	86	86,36	99,58	IDM Kecamatan Mirit untuk Desa maju 100%, mandiri 4 Desa	
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan	keg	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitasi APBDes)	Desa	22	22	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Desa	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	22	22	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Data Kemiskinan dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
		17 Padureso	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	84	72,6	86,43	Pada Triwulan ke-4 responden tidak mengisi SKM	Rapat Evaluasi agar tidak terulang di tahun 2024
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Perekaman KTP, Dokumen KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran	jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	24,05	33,33	138,59	Dari 9 (sembilan) Desa yang status Mandiri 2 Desa, Maju 2 Desa dan berkembang 5 desa	
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum						
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Desa	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, UKS BUMDesa)	Kegiatan	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (sembako dan TKP2KDes)	Kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA,	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					RKAP, DPPA, Renstra 2026)						
				b Sub Kegiatan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKjIP, SPIP, LPPD)	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU,TU,UP,LS)	Dokumen	4	3	75	Tidak mengajukan TU karena akan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan	Pengajuan dengan mekanisme GU dimaksimalkan
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor (Kabel, lampu, Terminal, Saklar)	Jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Bulan Penyediaan Barang	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan						
				d Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	3	3	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Unit	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	8	8	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	4	4	100		
		18 Pejagoan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamtan	%	91	91,59	100,65	Pelayanan sudah sesuai standar	
				1 Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat	jenis	4	4	100		
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah pelayanan Non Perijinan yang Dilaksanakan	jenis	4	4	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PEMERINTAHAN UMUM							
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	keg	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa dengan indeks membangun kategori maju dan mandiri	%	29.17	74.76	256,29	Kategori Desa Maju yg ditargetkan 5 Desa sudah mencapai 11 Desa dari total 13 Desa yang ada di Kec. Pejagoan	
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	keg	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	13	13	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyeleggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	dok	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam	keg	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Kepemudaan, UKS,Bumdes, Sosmas)	keg	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (sembako dan TKP2KDes)	keg	2	2	100		
				g Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	dok	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
				h Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dok	1	1	100		
		19 Petanahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Yang Disusun (Renstra, Renja, Rka, Dpa, Dppa, Rkap, Renstra 2026)	dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Data Perangkat Daerah Yang Disusun	dokumen	5	5	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN Yang Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan Dan Jumlah ASN Yang Mendapatkan Tamsil	bulan	12	12	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Bulan Pengelola Administrasi Keuangan (TU,GU,LS,UP)	bulan	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penganggaran	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis	bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	unit	3	3	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan dan mesin lainnya	unit	3	3	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit	30	30	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					Urusan Pemerintahan Daerah						
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	unit	6	6	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	unit	12	12	100		
				c Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	unit	10	10	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	88,36	92,39	104,56	Dalam Pelayanan Paten, tidak hanya melayanai warga Kecamatan Petanahan, tetapi banyak juga yang berasal dari luar kecamatan.	
				1 Kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		
				0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Persentase	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun	persentase	29,17	90,48	310,18	Dari 21 desa di Kecamatan Petanahan, 19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kategori Maju dan Mandiri					desa sudah masuk kategori desa maju dan Mandiri.	
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Desa	21	21	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	21	21	100		
				b Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasiliitasi Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	2	2	100		
				c Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				d Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,	Kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pemberdayaan Masyarakat Desa	UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)						
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes/Kel dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		
		20 Poncowarno	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERIN TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	persen	86	90,44	105,16	Meningkatnya respon terhadap SOP pelayanan	
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	5	5	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	persen	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	persen	29,17	29,17	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	kegiatan	7	7	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	desa	11	11	100		
				b Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				d Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	kegiatan	4	4	100		
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100		
				. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	13	13	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	jenis	4	3	75	pengajuan dengan mekanisme TU tidak direkomendasikan, akan mempengaruhi kinerja keuangan	
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang	8	8	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	3	3	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	unit	2	2	100		
				b Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	1	1	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	24	24	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	12	12	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	1	1	100		
		21 Prembun	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	100	90,04	90,04	Target yang dientry pada DPA tidak sesuai dengan Renja	Input data agar lebih cermat
				1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat	Jenis	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan, pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jumlah jenispelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP,KK,Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang)	Jenis	7	7	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	keg	1	1	100		
				a Sub Kegiatan ,Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia	jJumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval,Resepsi HUT RI)	keg	1	1	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun katgori maju dan mandiri	%	100	61,53	61,53	8 desa kategaori maju dari total 13 desa	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
				1 Kegiatan ,Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Kegiatan	7	7	100		
				a Sub Kegiatan , Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	13	13	100		
				b Sub Kegiatan,Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kegiatan	1	1	100		
				c Sub Kegiatan, Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen singkronisasi percepatan pembangunan derah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumah kegiatan fasilitasi penyelengggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				e Sub Kegiatan, Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	jumlah Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				f Sub kegiatan, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kegiatan	4	4	100		
				0 Sub Kegiatan, Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan sembako)	kegiatan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan playanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100		
				. Kegiatan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	11	11	100		
				a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	dokumen	5	5	100		
				b Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dalev, SAKIP,LKPJ,LKJiP, SPIP, LPPD)	dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan ,Administrasi keuangan perangkat daerah	jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	orang	17	18	105,88	Bulan September bertambah 1 pegawai	
				b Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU,TU,UP,LS)	dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas	orang	17	17	100		
				a Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	orang	17	17	100		
				4 Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor (kabel,lampu,terminal, saklar)	jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				d Sub Kegiatan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	jumlah bulan penyediaan bahan /material	bulan	12	12	100		
				f Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggaraan	kegiatan	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	bulan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	13	13	100		
				a Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	16	16	100		
				6 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		
				7 Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	37	37	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	24	14	58,33	Kendaraan kepala desa ikut dimasukan pemeliharaan kecamatan	Input data agar lebih cermat
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	11	11	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100		
		22 Puring	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
			Kondusivitas Wilayah								
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra 2026)	dok	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	dok	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	dok	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				3 Administasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	1	1	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjanng urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan oemerintahan daerah	unit	19	19	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	unit	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional						
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian)	jenis	7	7	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PEMERINTAHAN UMUM	Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah						
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desaa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	23	23	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	keg	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dok	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	keg	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako).	Keg	2	2	100		
		23 Rowokele	Mewujudkan Pelayanan dikecamatan yang baik dan berkualitas	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	indek	86	87,19	101,38	IKM Telah Tercapai 101,38 Dari Target. 86,00. Hal ini Menunjukan bahwa masyarakat telah puas terhadap pelayanan yang diterima	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terlaksananya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	presen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan non perizinan yangdilaksanakan (KTP,KK,Kartu kelahiran, Surat kematian ,Pindaj Datang, KIA	jenis	6	6	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indekz Kondusivitas Kecamatan	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Penugasan Kepala Daerah	sesuai penugasan Kepala Daerah						
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan indes desa membangun Katagori Maju dan Mandiri	indeks	54,54	81,81	150	Dari 11 Desa diwilayah Kecamatan Rowokele,9 Desa dengan kategori maju, 2 Desa Dengan Katagori Berkembang	
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	desa	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Pendayagunaan Aset Desa							
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	desa	3	3	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES, soaial Masyarakat)	kegiatan	4	4	100		
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penaggulangan kemiskinan TKP2Kdes/kel dan bansos sembako)	dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABBUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun (renja, RKA,DPA,RKAP,DPPA,Renstra 2026	dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun (LKJIP. SAKIP, LAKIP,LKPJ,LPPD, Dalev, SPIP)	dokumen	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan tunjangan dan Jumlah ASN Yang mendapatkan Tamsil	dokumen	15	15	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (TU,GU,UP,LS)	dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
				b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip Dinamis	Bulan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	unit	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	1	100		
				5 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat -menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Penyediaan jasa komunikasi,sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	17	17	100		
				a Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	12	12	100		
				b Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jml unit pemeliharaan peralatan danmesin	unit	0	0	100		
		24 Sadang	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	86	91,96	106,93	Unsur persyaratan masih harus ditingkatkan nilainya	Memperjelas, mempublikasikan dan memampang di papan pengumuman dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
			Kondusivitas Wilayah								melalui website dan media sosial.
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				B PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun	%	29,17	75,45	259	Dari 7 desa di wilayah Kecamatan	Mempertahankan persentase desa dengan indeks

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kategori Maju dan Mandiri					Sadang dengan kategori maju sejumlah 4 desa, 1 desa kategori mandiri dan 1 desa kategori berkembang	desa membangun dengan kategori maju dan mandiri dan meningkatkan untuk desa yang masih berkembang
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentrama dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa (Pembinaan PKK, Sosmas, UKS dan BUMDes)	Kegiatan	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes dan Rakor sembako)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Unit	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	28	28	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	10	10	100		
				b Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebel	Unit	4	4	100		
				c Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	8	8	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	100		
		25 Sempor	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	dokumen	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					perangkat daerah yang tersusun						
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP,SPIP, LPPD)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	orang	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	jenis	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)						
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/kali	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	9	9	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan banguinan lainnya	unit	6	6	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Prosentase terlaksananya urusan	%	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat						
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran)	Dokumen	5	5	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kebumen)	kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahn Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa	desa	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan	kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Perencanaan Pembangunan Partisipatif	musrenbangdes dan Musrenbangcam						
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa)	kegiatan	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes)	kali	16	16	100		
		26 Sruweng	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	87	89.02	102,32	Ada 3 unsur yang nilainya rendah yaitu : Waktu Pelayanan, Produk, Layanan Persyaratan	Dari ke 3 unsur tersebut akan di sesuai kan dengan SOP dan disosialisasikan ke 21 desa
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	laporan	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	%	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi ,rekomendasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	keg	2	2	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	21	21	100		
				2 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dok	3	3	100		
				a Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	1	1	100		
				b Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlahdokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				c Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	Desa	21	21	100		
					Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	Keg	1	1	100		
					Jumlah kegiatan musrenbangcam	Keg	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				3 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	4	4	100		
				a Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Fasilitasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan (TKP2K Desa) dan Dansos Sembako)	Laporan	2	2	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	11	11	100		
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (renja,rka,dpa,dppa,rkap, renstra 2024)	Dokumen	3	3	100		
				b. Evaluasi Kinerja Perangfkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev,lkpj,sakip,lkjip,profil)	Dokumen	2	2	100		
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan	bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
					administrasi keuangan perangkat daerah						
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji,tunjangan dan tamsil	Orang	16	16	100		
				b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD/	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangfkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100		
				b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	2	2	100		
				a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	100		
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	7	7	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Unit	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
				Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan						
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	1	1	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan /rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100		

b. Permasalahan, Upaya Mengatasi, dan Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

1) Kecamatan Adimulyo

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Adimulyo diantaranya:

1) Adanya kekosongan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.dan staff tehnis pada Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban.
2) Kurangnya sarana prasarana seperti komputer, laptop, dan printer.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

Strategi peningkatan kinerja di masa datang terhadap tiga unsur nilai terendah adalah sebagai berikut:

1) Mengusulkan pengisian jabatan yang kosong ke BKPSDM.
2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan pengadaan sarana prasarana.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program dari 4 program yang dilaksanakan adalah 99,9%. Adapun rata-rata capaian kegiatan dari 9 kegiatan yang dilaksanakan adalah 100%.

2) Kecamatan Alian

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Informasi Persyaratan dokumen kelengkapan Pelayanan belum jelas diketahui oleh masyarakat
2) Nilai IKM untuk unsur waktu pelayanan di Kecamatan Alian dengan nilai rendah
3) Belum semua pegawai diberikan fasilitas sarana prasarana kantor seperti laptop/komputer printer sendiri sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan;
4) Kecamatan Alian belum tersedia fasilitas Mushola

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Persyaratan akan diperjelas dan dipampang di papan pengumuman
2) Lebih memperhatikan SOP waktu pelayanan sesuai dengan SOP Pelayanan yang ada.

3) Selalu merawat fasilitas yang ada dalam ruang pelayanan, memperhatikan sarana dan prasarana bagi pegawai Kantor Kecamatan Alian,Kabupaten Kebumen demi menunjang kegiatan pelayanan yang lebih baik.
4) Membuat sekat di sebelah ruang rumah Dinas Camat

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 101,45% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

3) Kecamatan Ambal

a) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan adalah:

Printer, laptop dan pendingin ruangan untuk pelayanan publik sudah tidak optimal.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

Mengusulkan pengadaan laptop dan printer. Sedangkan pendingin ruangan belum teranggarkan di tahun 2024.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 99,15%% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

4) Kecamatan Ayah

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Stok blangko E-KTP belum mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah dan sekitarnya, dan komputer yang untuk mencetak kk dan akta mengalami gangguan pada jaringan.
2) Inventarisasi barang BMD berupa sepeda motor sudah tidak layak pakai
3) Banyaknya lokasi rawan bencana antara lain bencana longsor, banjir, pohon tumbang.
4) Pendingin ruangan di ruang pelayanan kurang maksimal

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Koordinasi dengan pihak terkait (Disdukcapil), permohonan penambahan stok blangko untuk wilayah Kecamatan Ayah dan sekitarnya serta mengajukan surat permohonan ke Dinas Kominfo untuk melakukan perbaikan jaringan komputer.
2) Koordinasi dengan pihak terkait (BPKPD) , menyiapkan anggaran untuk perbaikan kendaraan dinas Kecamatan Ayah
3) Koordinasi dengan pihak terkait (BPBD, DINSOS P3A, dan PMI), dalam penanggulangan bencana dan antisipasi pencegahan bencana di wilayah Kecamatan Ayah
4) Belum ada Anggaran untuk pengadaan

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 143,16%. kemudian rata-rata capaian kegiatan 100%.

5) Kecamatan Bonorowo

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Kekosongan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dan Staf;
2) Kurangnya sarana pendukung untuk cetak KTP
3) Masih kurangnya sarpras pendukung pelayanan publik;

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Segera mengusulkan kekosongan jabatan ke BPKSDM;
2) Mengusulkan sarana pendukung cetak KTP ke Disdukcapil;
3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan mengusulkan penataan ruang pelayanan publik;

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 98,75%. Kemudian untuk rata-rata capaian kegiatan 100%.

6) Kecamatan Buayan

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Sumber Daya Manusia (SDM) perlu peninkatan kompetensi
2) Sumber Daya Manusia di Kecamatan Buayan di Tahun 2023 sudah banyak yang usia menjelang pensiun, sehingga berdampak pada banyak personal yang tidak/belum dapat mengoperasikan IT.
3) Kurangnya sarana dan Prasarana
4) Kurang maksimalnya fungsi dari pendingin ruangan (AC) di Ruang Pelayanan.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Perlu adanya usulan personil untuk mengikuti diklat/pelatihan.
2) Memaksimalkan alat yang tersedia dan pemeliharaan sarana yang ada.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 115,4% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

7) Kecamatan Buluspesantren

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) SDM kurang sehingga mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2) Anggaran gaji dan tunjangan pegawai tidak terserap maksimal disebabkan ada beberapa jabatan yang kosong.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Usulan penambahan pegawai
2) Mencermati antara DPA dan Perbup supaya sinkron dan mengusulkan kembali di tahun berikutnya.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 102,3% dan rata-rata capaian kegiatan 100 %

8) Kecamatan Gombong

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan di kecamatan gombong antara lain:

1) Kurangnya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dan hasil kerja kerja kurang maksimal
2) Kurangnya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti leptop, komputer, dan printer.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Permintaan usulan PNS, CPNS dan PPPK ke BKPSDM
2) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan mengoptimalkan penggunaannya

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 101,25% dan rata-rata capaian kegiatan 100 %

9) Kecamatan Karanganyar

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Adanya deviasi di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan terdapat 9 pegawai yang pensiun (Kecamatan 2 orang dan Kelurahan 7 orang)
2) Kurangnya sarana prasarana seperti komputer, laptop, dan printer.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Mengusulkan kekosongan pejabat dan sfat ke BKPSDM. Saat ini staf Kecamatan telah terisi, tetapi untuk kelurahan masih terdapat kekurangan 2 orang pegawai.
2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan pengadaan sarana prasarana.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 100%. kemudian untuk rata-rata capaian kegiatan 100%.

10) Kecamatan Karanggayam

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Ketersediaan sarana dan prasarana kurang (laptop dan printer)
2) Belum tersedianya lokasi parkir khusus pemohon

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana (laptop dan printer) yang sudah ada dan tahun 2024 mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana (laptop dan printer)
2) Menyediakan lokasi parkir khusus pemohon

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 98,63 % dan rata-rata capaian kegiatan 100 %.

11) Kecamatan Karangsambung

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Kecamatan Karangsambung belum tersedia fasilitas mushola;
2) Sarana dan Prasarana Kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang Peserta Rapat harus mencari Pinjaman sedangkan Anggaran sewa tidak tersedia.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Membuat sekat tempat arsip yang difungsikan sebagai mushola;
2) Meminjam kursi ke kantor balaidesa terdekat;

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 97,09 % dan rata-rata capaian kegiatan 100 %

12) Kecamatan Kebumen

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Refocusing anggaran pada belanja Barang Milik Daerah sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
2) Untuk Kecamatan Kebumen belum bisa cetak KTP sendiri;
3) Perbandingan pegawai dan jumlah desa yang dilayani tidak sebanding mengakibatkan pelayanan tidak maksimal

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Mengoptimalkan aset yang ada, kemudian untuk kegiatan yang terkena refocusing anggaran akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya;
2) Mengusulkan untuk dapat dicukupi peralatan cetak KTP;
3) Mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melayani masyarakat serta mengusulkan penambahan personil.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 115,12% dan rata-rata capaian kegiatan 100%

13) Kecamatan Klirong

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Banyak warga masyarakat kecamatan belum memahami tentang lamanya proses dan persyaratan pelayanan administrasi;
2) Kompetensi pelaksana pelayanan masih perlu ditingkatkan berkaitan dengan teknologi terbaru;
3) Kurangnya sarpras pelayanan sehingga pelayanan masih terganggu.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Membuat publikasi tentang waktu dan persyaratan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sehingga masyarakat memahami.
2) Dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan publik.
3) Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui proses perencanaan penganggaran di awal.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program masuk kategori sangat tinggi dimana rata-rata capaiannya adalah 107,28% untuk program dan 100% untuk kegiatan.

14) Kecamatan Kutowinangun

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Kurangnya kompetensi SDM sehingga kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2) Kurangnya PNS di tahun 2024 karena Pensiun 4 orang sehingga kurang maksimal dalam pelayanan
3) Belum semua pegawai diberikan fasilitas sarana prasaana kantor seperti laptop yang sudah usia tua dan printer yang masih bergabung sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan
4) Kecamatan Kutowinangun belum tersedia fasilitas musholla
5) Informasi persyaratan dokumen pelayanan belum diketahui masyarakat

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Optimalisasi SDM
2) Penambahan PNS karena banyaknya PNS di Tahun 2024 yang Purna Tugas
3) Pengadaan fasilitas kantor seperti laptop dan printer yang memadai dan memenuhi standar kerja, dan perawatan fasilitas yang ada di Kecamatan Kutowinangun
4) Ruang kosong digunakan untuk melaksanakan sholat
5) Persyaratan akan dperjelas dan dipampang di papan pengumuman

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 98,93 % dan rata-rata capaian kegiatan 100 %.

15) Kecamatan Kuwarasan

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Informasi persyaratan dokumen kelengkapan pelayanan belum jelas diketahui oleh masyarakat;
2) Seringnya mutasi pegawai dan adanya beberapa posisi jabatan yang mengalami kekosongan sehingga menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan;
3) Belum semua pegawai diberikan fasilitas sarana prasarana kantor seperti laptop/printer sendiri sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan;

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Persyaratan akan diperjelas dan dipampang di papan pengumuman;
2) Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mengisi kekosongan pejabat yang belum ada;
3) Melakukan perawatan fasilitas yang ada

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 102,11% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

16) Kecamatan Mirit

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Sarana dan prasarana dikecamatan Mirit masih kurang seperti komputer, laptop, LCD outdoor, sarpras PATEN
2) Belum adanya ruang khusus untuk arsip
3) Kurangnya SDM yang memadai

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan seefisien mungkin
2) Penyimpanan arsip masih di masing-masing Seksi
3) Untuk menyelesaikan kegiatan dibentuk team work

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 100% dan rata-rata capaian kegiatan 100%

17) Kecamatan Padureso

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Sarana dan prasarana masih kurang dan kondisi banyak yang tidak layak pakai
2) Kurangnya jumlah SDM
3) Belum optimalnya pola kerja pegawai
4) Masih pengaruhnya kondisi geografis di kecamatan
5) Masih minimnya tenaga yang ada di pelayanan karena yang melayani dari tenaga P2K

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Membuat dan mengusulkan untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor
2) Mengajukan permohonan penambahan pegawai
3) Dengan adanya pelatihan, peningkatan kapasitas bagi pegawai
4) Letak geografis Kecamatan Padureso yang sebagian besar pegunungan
5) Pelatihan, bimtek untuk tenaga P2K dan usulan tambahan usulan Pegawai Negeri Sipil.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 106,25% dan rata-rata capaian kegiatan 100%

18) Kecamatan Pejagoan

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Sarana kendaraan dinas untuk monitoring belum mencukupi mengingat wilayah Kecamatan Pejagoan sebagian besar adalah wilayah pegunungan.
2) Sarana Prasarana untuk pelayanan belum memadai karena masih

dengan sarpras lama.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Melakukan koordinasi dengan Bidang Aset agar bisa disediakan kendaraan yang bisa mendukung monitoring.
2) Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memenuhi sarpras pelayanan yang sesuai standar.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 152,31% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

19) Kecamatan Petanahan

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan sebagai berikut:

1) Alat rekam dan cetak KTP belum tersedia.
2) Fasilitas ruang pelayanan belum memadai.
3) Tenaga operator pelayanan terbatas (masih merangkap tugas lain)
4) Kurangnya kapasitas/ kemampuan SDM perangkat daerah Kecamatan Petanahan.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Berkoordinasi dengan Dukcapil kebumen terkait permohonan alat rekam dan cetak KTP.
2) Mengupayakan adanya kegiatan pemeliharaan ruang pelayanan pada tahun anggaran 2024.
3) Berkonsultasi dan mengajukan permohonan kepada Disdukcapil untuk dilakukan pelatihan bagi operator agar bisa menambah tenaga operator pelayanan.
4) Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi karyawan/ staf untuk meningkatkan keterampilan bekerja.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 171,58% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

20) Kecamatan Poncowarno

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Di Kecamatan Poncowarno terdapat 13 orang PNS, 8 orang struktural dan 5 orang staf, 4 orang diantaranya hampir memasuki masa purna tugas sehingga untuk kinerja dari staf tersebut sudah tidak optimal.
2) Belum adanya bangunan gudang arsip, sehingga untuk dokumen arsip belum tertata dengan baik. Ini dapat mempengaruhi kenyamanan pegawai dalam bekerja, karena kantor terlihat kurang tertata, disana sini banyak dokumen arsip.
3) Kurang disiplinnya aparatur pemerintah desa.
4) Belum terlaksananya tertib pengelolaan keuangan desa.
5) Pengembangan potensi pertanian yang masih belum sinergis.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Dengan mengoptimalkan SDM yang ada untuk pelaksanaan kinerja kecamatan.
2) Menjadwalkan minimal sebulan sekali untuk memilah arsip dinamis, aktif dan inaktif.
3) Mendorong komitmen desa untuk pelaksanaan apel pagi, mendorong penandatanganan pakta integritas dan mendorong penyusunan Perkades jam kerja.
4) Pembinaan dan pengawasan berkala untuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa desa untuk Perencana Keuangan di desa-desa Kecamatan Poncowarno.
5) Fasilitasi penyelenggaraan sarasehan PPDI, konferensi Kepala Desa dan konferensi Sekdes.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 101,29% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

21) Kecamatan Prembun

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Keterbatasan sarana prasana penunjang seperti pendingin ruangan,

komputer, laptop dan printer.

2) Kebutuhan sumber daya manusia masih kurang dan banyak yang pensiun.
3) Pengelolaan tata ruang yang belum representatif.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Mengajukan permohonan anggaran untuk belanja barang.
2) Mengajukan kebutuhan pegawai ke BKPSDM.
3) Perlu ada renovasi.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 87,89% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

22) Kecamatan Puring

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Sering terjadi keterlambatan blangko KTP
2) Terdapat peralatan yang kurang memadai, terutama komputer

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Rutin pengajuan bon blangko KTP ke Disdukcapil
2) Pengajuan untuk pengadaan komputer baru

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 100% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

23) Kecamatan Rowokele

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Adanya kekeringan, kebakaran dan bencana Lainnya
2) Untuk Kecamatan Rowokele belum bisa cetak KTP sendiri;

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana
2) Mengusulkan untuk dapat dicukupi peralatan cetak KTP;

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 112,85% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

24) Kecamatan Sadang

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Kurangnya sarana prasarana personal komputer, printer dan pendingin ruangan
2) Belum tersedianya parkir untuk pengunjung pemohon layanan
3) Akses jalan dari jalan raya menuju kantor kecamatan licin dan curam

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengusulkan pengadaan printer dan pendingin ruangan. Adapun untuk personal komputer sudah dianggarkan pada anggaran tahun 2024.
2) Disediakan lokasi parkir terbuka untuk pengunjung pemohon layanan di halaman kecamatan
3) Dilakukan pengurugan dan pemadatan secara swadaya

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 141,48% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

25) Kecamatan Sempor

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Sempor adalah sebagai berikut:

1) Waktu pelayanan masih dirasa belum cepat oleh masyarakat
2) Kompetensi pelaksana belum sesuai dengan harapan masyarakat yang dilayani;
3) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam ruang pelayanan ada yang tidak berfungsi dengan baik yaitu pendingin ruangan (AC) sehingga mengurangi kenyamanan.

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Unsur Waktu Pelayanan upaya mengatasinya adalah dengan semaksimal mungkin menjaga ketersediaan blanko KTP elektronik;
2) Memberikan pemahaman dan motivasi agar memberi pelayanan prima kepada masyarakat yang dilayani;
3) Menjaga kenyamanan ruang pelayanan agar tetap sejuk.

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 100% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

26) Kecamatan Sruweng

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Di Kecamatan Sruweng sering terjadi kekosongan blangko KTP
2) Di Kecamatan Sruweng Akses internet sering terjadi gangguan

b) Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Mengusulkan tambahan blangko KTP ke Disdukcapil
2) Melaporkan ke Diskominfo untuk dapat dilakukan perbaikan jaringan internet

c) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 92,90% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

3.1.8 Evaluasi Capaian

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKD dan IKU sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. 104 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Berikut kami sajikan rekapitulasi hasil pencapaian indikator sasaran IKU Kabupaten Kebumen :

Tabel 3. 105 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	1	3	4	2	2		
2	Misi 2	1	3	5	2	3		
3	Misi 3	2	6	6	2	4		
4	Misi 4	1	2	2	1	1		
5	Misi 5	2	4	4	2	2		
	Jumlah	7	18	21	9	12		
Prosentase (%)					42,86%	57,14%		

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Hasil analisis bahwa dari 7 (tujuh) tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja/sasaran, diketahui bahwa 9 (sembilan) indikator sasaran atau 42,86% pencapaiannya dengan kriteria **Baik Sekali**, 12 (dua belas) indikator sasaran atau 57,14% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 113,35% atau bermakna **Baik Sekali**.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3. 106 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,45
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,70
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,84
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,64
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,35
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.657,88
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.578,40
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.316,85
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.414,73
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,40-5,50
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	59,27
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	29,82
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 3. 107 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00	90,16	107,33%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,00	66,11	95,81%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,45	3,7	107,25%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,70	73,83	100,18%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,84	7,86	100,26%
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,64	13,37	97,02%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,35	93,05	99,7%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,0%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.657,88	5.129,97	90,67%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.578,40	6.427,04	140,38%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.316,85	11.081,89	89,97%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.414,73	4.244,69	96,15%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00	16,34	97,88%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,40-5,50	5,11	107,09%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	59,27	64	107,98%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19	67,16	90,52%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29	100,00	155,55%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	29,82	88,07	295,34%
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100	100,00%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100,00	100	100,00%
Rata-Rata						**113,35%**

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 108 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	87,69	84,00	90,16	107,33%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,18	65,49	69,00	66,11	95,81%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,44	3,45	3,7	107,25%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,70	73,70	73,83	100,18%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,85	7,84	7,86	100,26%
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,36	13,64	13,37	97,02%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,05	93,35	93,05	99,7%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100,00	100,00	100,0%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5,090,09	8.143,7	5.657,88	8.143,7	151,85
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	7.101,9	4.578,40	7.101,9	163,65

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,81	17.356,4	12.316,85	17.356,4	148,67
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.109,0	4.414,73	96,15%	4.244,69
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,41	15,00-16,00	16,34	97,88%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,92	5,40-5,50	5,11	107,09%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	55,34	59,27	64	107,98%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	68,17	74,19	67,16	90,52%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100,00	64,29	100,00	155,55%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	34,89	29,82	88,07	295,34%
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100,00	100	100,00%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100,00	100	100,00%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 3. 109 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
				2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	87,69	84,00	90,16	107,33%	**86**	**104,84**
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,85	65,49	69,00	66,11	95,81%	77	85,86
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,44	3,45	3,7	107,25%	3,6	102,78
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,70	73,70	73,83	100,18%	74	99,77
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,85	7,84	7,86	100,26%	8,14	96,56%
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,36	13,64	13,37	98,02%	13,94	95,91%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,05	93,35	93,05	99,7%	93,65	99,58
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100,00	100,00	100,0%	100	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5,090,09	5.040,1	5.657,9	5.130,0	90,67%	6.643,72	77,22%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	5.992,6	4.578,4	6.427,0	140,38%	5.376,15	119,55%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,81	10.393,1	12.316,9	11.081,9	89,97%	14.462,95	130,51%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.109,0	4.414,7	4.244,7	96,15%	5.183,96	81,88%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,41	15,00-16,00	16,34	97,88%	13,00-13,50	78,96
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,92	5,40-5,50	5,11	107,09%	5,10-5,20	101,73
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	55,34	59,27	64	107,98%	70,69	78,29
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	64,43	74,19	67,16	90,52%	74,45	90,21%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
				2021	2022	Target	Realisasi	Capaian		
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	64,29	100,00	155,55%	78,57	127,28
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	100	29,82	88,07	295,34%	43,05	204,62
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100,00	100	100,00%	100	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100,00	100	100,00%	100	100

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

e. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

A. Tujuan Pertama : Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan pertama sebagai berikut:

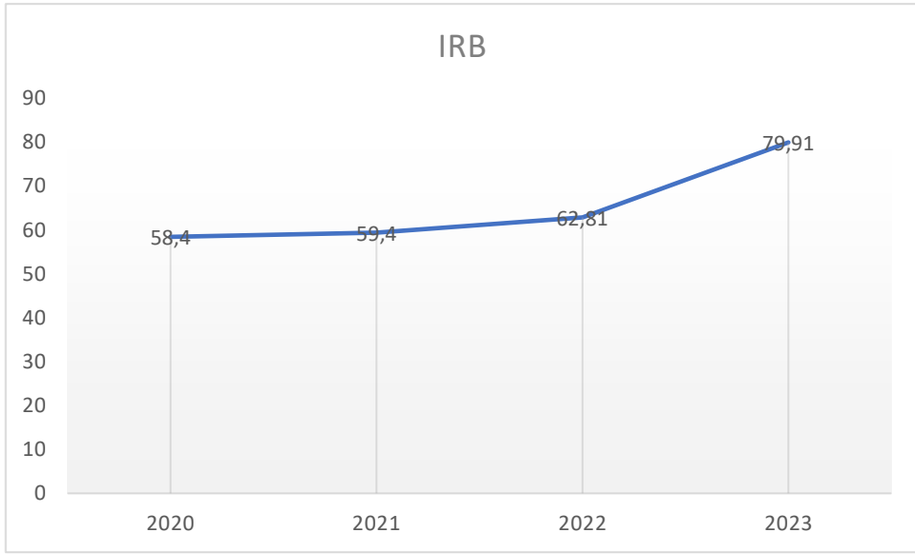
Tabel 3. 110 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62,81	63,33	79,91	126,18%	69,33	115,26%

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 telah mencapai target dengan realisasi 79,91 dengan capaian kinerja 126,18 % atau kategori capaian Baik Sekali.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja IRB tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 115,26 %

Nilai IRB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 3 Realisasi IRB 2020-2022

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2023 lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemkab Kebumen. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Penetapan rencana aksi oleh kepala daerah
2. Perbaikan rencana aksi yang mendukung pelaksanaan kegiatan reformasi birokasi general maupun tematik.

Terhadap rekomendasi di atas **solusi atau rencana tindak lanjut** yang dapat dilaksanakan antaralain :

1. Koordinasi dan kompilasi rencana aksi dari perangkat daerah yang mendukung reformasi birokrasi general dan tematik
2. Fasilitasi penyusunan rencana aksi baik untuk kegiatan reformasi birokrasi genaral maupun tematik
3. Monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan rencana aksi.

Tujuan Pertama diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

   Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), rumusan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

   Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja IKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 111 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja IKM

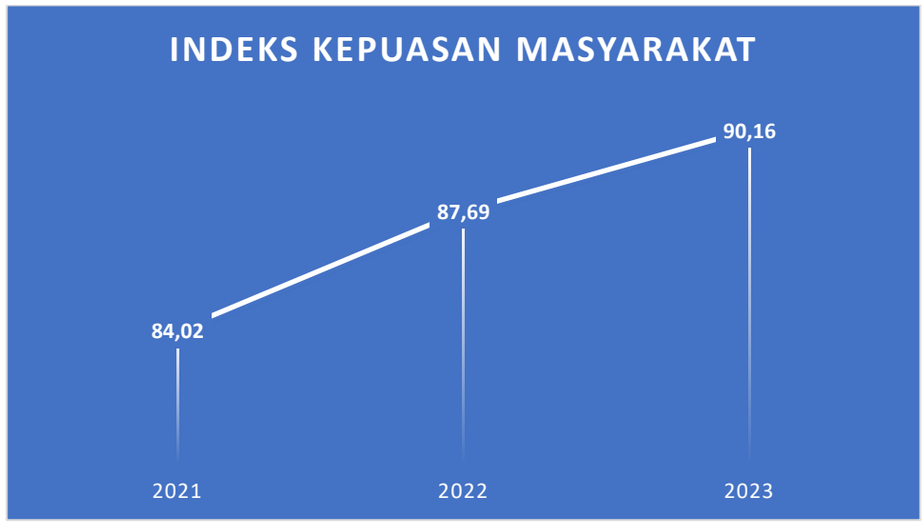
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,69	84,00	90,16	107,33%	86	104,84%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen

IKM Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 90 ,16 dengan capaian kinerja 107,33 % atau kategori capaian **Baik Sekali.**

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja IKM tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 104,84 %

Nilai IKM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 4 Nilai IKM Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir

Nilai IKM telah mencapai target namun demikian masih ada 3 (tiga) unsur dari 9 (sembilan) Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang masih perlu perbaikan. Prioritas unsur pelayanan dan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Waktu Pelayanan

   Perlu dilakukan publikasi waktu penyelenggaraan pelayanan publik oleh UPP baik melalui media elektronik (website, medsos, dll) maupun non elektronik (papan informasi, buklet, pamphlet, baliho, poster dll);

b. Sarana dan Prasarana

   Dilaksanakan analisis kebutuhan dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik selanjutnya diproses melalui perencanaan penganggaran sesuai ketentuan; dan

c. Prosedur

   Melakukan monitoring dan evaluasi atas prosedur penyelenggaraan pelayanan publik (review dokumen standar operasional prosedur)

b. Sasaran 2 dari Tujuan Pertama : Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB dan Opini BPK yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Realisasi dan capaian kinerja dari sasaran Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut:

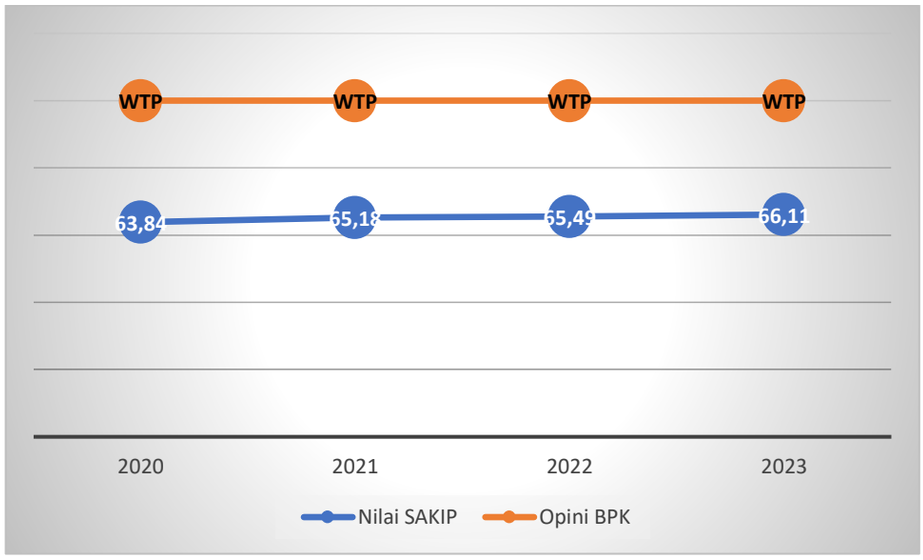
Tabel 3. 112 Realisasi dan Capaian Kinerja Dari Sasaran Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
	Nilai SAKIP	65,49	69,00	66,11	95,81%	77	85,86%
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP dan Opini BPK telah mencapai target yang ditetapkan.

Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 95,81% atau kategori capaian Baik, sedangkan Opini BPK capain kinerjanya 100% atau kategori capaian Baik.

Adapun grafik perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 5 Perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023

Kendala dalam mencapai target Nilai SAKIP adalah adanya pejabat yang Pensiun/ Mutasi yang berdampak pada *Transfer knowledge* antar pejabat / pelaksana yang membidangi akuntabilitas kinerja belum maksimal, sehingga dalam pemenuhan dokumen SAKIP tidak lengkap maupun dalam Penyusunan laporan kinerja yang belum disertai analisis yang jelas.

Solusi atau rencana tindak lanjut kedepan guna mencapai target ditahun yang akan datang:

1. Fasilitasi desk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk perangkat daerah

2. Bimbingan Teknis Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi pejabat/ pelaksana perencanaan

Sementara itu beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai predikat WTP adalah keterbatasan kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta pengawasan dalam implementasinya dan belum seluruh aset/tanah pemda sudah bersertifikat. Oleh karenanya beberapa langkah tindak lanjut sangat diperlukan guna memastikan capaian WTP tersebut mampu dipertahankan, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan pendapatan daerah, dengan melalui program diklat dan pelatihan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemahaman aparatur OPD dengan memberikan Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan BMD secara berkala;
3. Melaksanakan program pensertifikatan aset/tanah pemda secara bertahap;
4. meningkatkan sinergi dengan APIP Inspektorat daerah guna memastikan tata kelola keuangan Pemda berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Sasaran 3 dari Tujuan Pertama : Terwujudnya birokrasi yang kapabel

Terwujudnya birokrasi yang kapabel diukur dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementertian PAN dan RB.

Realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

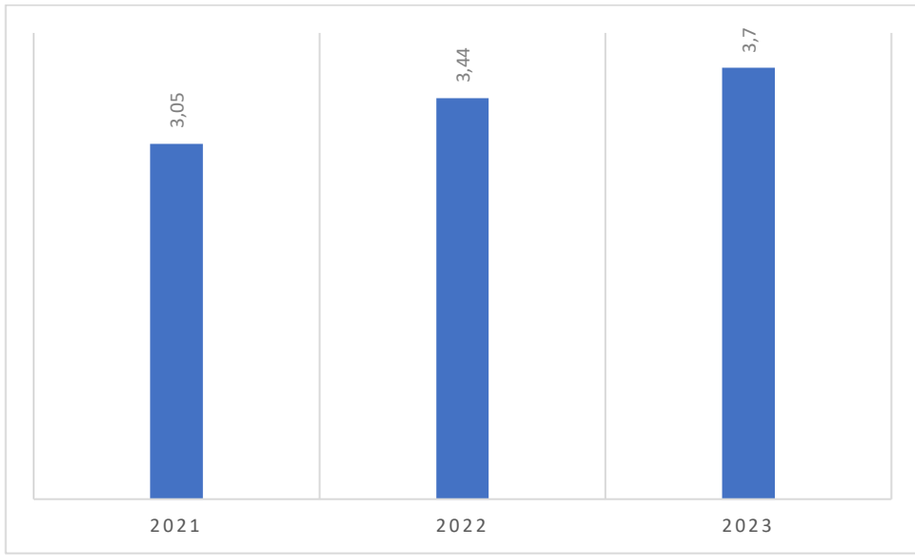
Tabel 3. 113 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks SPBE	3,44	3,45	3,70	107,25%	3,6	102,78%

Indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 3,70 dengan capaian kinerja 107,25 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks SPBE tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 102,78 %

Indeks SPBE dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 6 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2023

Indeks SPBE tahun 2023 lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan SPBE.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kinerja capain SPBE adalah belum lengkapnya pedoman formal untuk manajemen SPBE seperti pedoman manajemen risiko, manajemen asset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK. Hal ini menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Solusi akan dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja adalah:

1. Pengembangan pedoman manajemen SPBE dapat merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Permenpan RB nomor 5 tahun 2020, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021, dan Permen PPN/Bappenas nomor 16,17,18 tahun 2020. Pedoman ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan manajemen SPBE yang lebih optimal.
2. Perlu implementasi pedoman yang dikembangkan untuk seluruh Perangkat Daerah sehingga terjadi keseragaman dalam penerapan dan dalam pemenuhan indikator serta kriteria penilaian.

B. Tujuan Kedua : Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

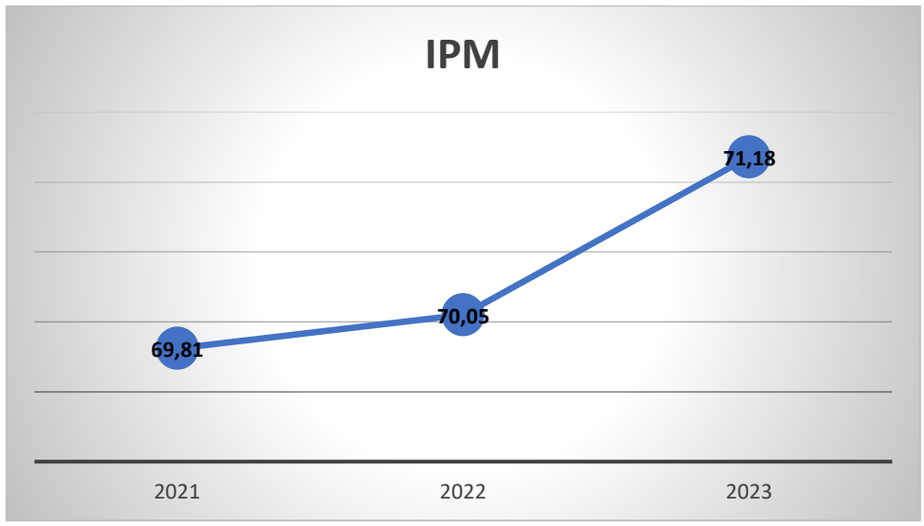
Tabel 3. 114 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Tujuan Kedua

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,79	71,00	71,88	101,24%	72,5	99,14%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 71,88 dengan capaian kinerja 101,24 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja IPM tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 99,14 %

Nilai IPM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 7 Realisasi IPM 2021-2023

Realisasi IPM tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan Kedua diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan diukur dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

Tabel 3. 115 Realisasi dan Capaian Dari Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

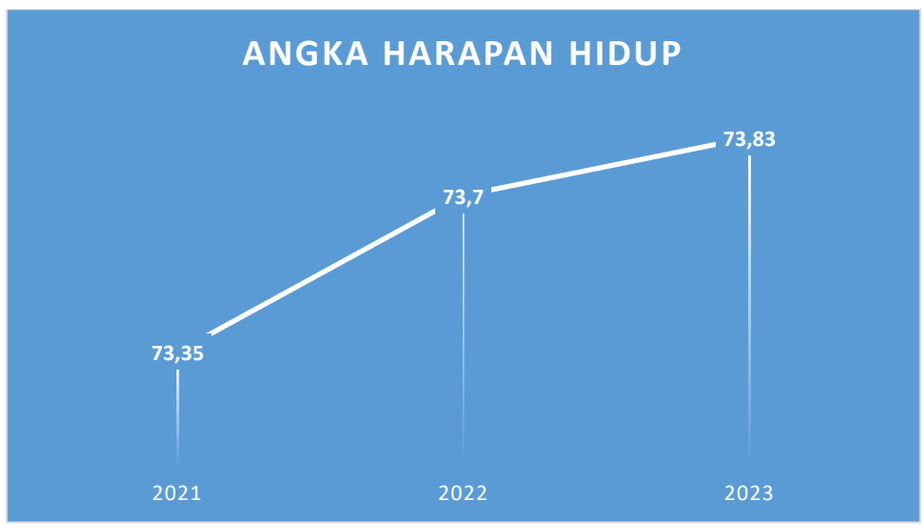
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Angka Harapan Hidup	73,7	73,70	73,83	100,18%	74	99,77%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 73,83 dengan capaian kinerja 100,14 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja AHH tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 99,77 %

Angka Harapan Hidup dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 8 Realisasi Angka Harapan Hidup 2021-2023

Realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang akan datang adalah meningkatkan upaya kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat dengan integrasi paket pelayanan Kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup.

Solusi atau rencana tindak lanjut yang akan datang antara lain:

1. Integrasi pelayanan primer.
2. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagai tolak ukur indikator derajad Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan rujukan secara terintegrasi.

b. Sasaran 2 Tujuan Kedua : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Realiasi dan capaian indikator kinerja Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 116 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,85	7,84	7,86	100,26%	8,14	96,56%
2	Harapan Lama Sekolah	13,36	13,64	13,37	98,02%	13,94	95,91%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019).

Realisasi Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2023 sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,86 tahun dari target yang ditetapkan

sebesar 7,84 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 7,86 tahun atau telah menamatkan/menyelesaikan kelas VII sehingga capaian kinerjanya 100,26 % atau kategori capaian **Baik Sekali.**.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Kurang Mampu (BKM). Selain itu, keberhasilan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk perusia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C bisa berjalan dengan baik.

Sedangkan Realisasi Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 capaian kinerja 98,02% atau kategori **Baik**, dari kondisi target Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 adalah 13,54 tahun dan realisasi capaiannya 13,37 tahun, yang artinya sacara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,36 tahun atau setara dengan Diploma I.

Ketidaktercapaian target Harapan Lama Sekolah masih disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kemiskinan, tidak bersekolah diusia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (bekerja, mengikuti orangtua bekerja di luar Kebumen, kemauan bersekolah rendah), pernikahan dini, putus sekolah, dan usia sekolah berada di pondok pesantren tanpa mengikuti pendidikan formal/kesetaraan (SD/MI/SMP/MTs/sederajat).

Upaya untuk menjawab permasalahan antara lain:

1. Memfasilitasi Guru Tidak Tetap untuk dapat mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Akselerasi pengusulan pengelola BMD dari sekolah;
3. Penguatan kualitas 8 standar pendidikan;
4. Beasiswa Kurang Mampu (BKM) bagi siswa kelas 6 SD/MI dan siswa kelas 9 SMP/MTs;
5. Meningkatkan akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) minimal berakreditasi baik (B);
6. Fasilitasi kepada guru Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
7. Meningkatkan kapasitas SDM guru dengan mengikutsertakan Pelatihan Profesi Guru (PPG) dan diklat sejenisnya;

8. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Universitas Terbuka) untuk memberikan fasilitasi kepada guru untuk dapat memenuhi kualifikasi pendidikan strata 1.

c. Sasaran 3 Tujuan Kedua : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Cakupan Perlindungan Anak. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 117 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA)

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Pembangunan Gender	93,05	93,35	93,26	99,90%	93,65	99,58%
2	Cakupan Perlindungan Anak	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Realisasi dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 93,26 atau dengan capaian 99,90 % atau kategori capaian **Baik**, sedangkan realisasi dari indikator kinerja Cakupan Perlindungan Anak telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100% atau dengan capaian 100% atau ketegori capaian **Baik**.

Permalahan dalam upaya mencapai target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) antaralain:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, Pengeluaran Per Kapita perempuan, angka partisipasi Perempuan dalam parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga masih rendah
2. Rendahnya daya saing tenaga kerja Perempuan dan budaya patriarki yang masih kental di masyarakat
3. Adanya fakta budaya (keengganan/malu/tidak ada keberanian) anak korban kekerasan untuk melapor.
4. Belum optimalnya peran KPAD (Kelompok Pelindungan Anak Desa) dalam pencegahan kasus kekerasan berbasis gender.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antarlain:

1. Peningkatan Gerakan Ayo Sekolah untuk mencegah Angka Putus Sekolah, pendidikan politik perempuan, sosialisa si PUG ke masyarakat lebih masif lagi.
2. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
3. Peningkatan kapasitas bagi KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di wilayahnya masing-masing.

C. Tujuan Ketiga : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah diukur dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi. Realiasi dan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

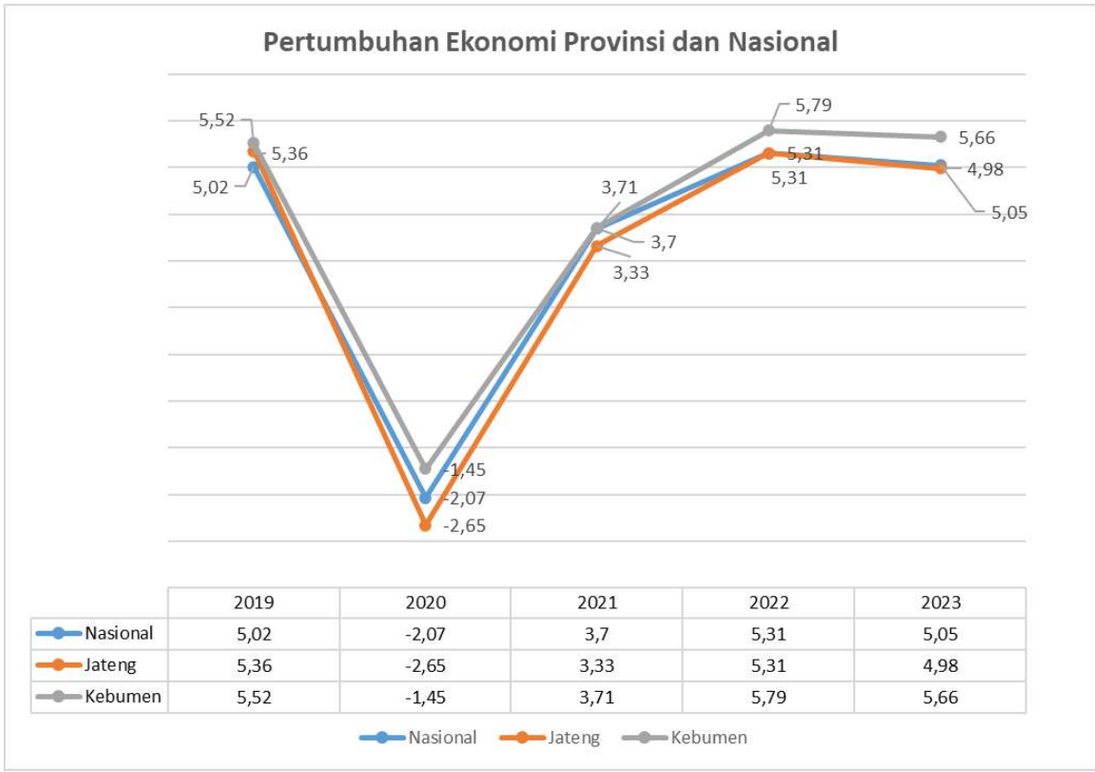
Tabel 3. 118 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,79	4,05-5,36	5,66	102,9%	5,00-5,50	102,91%

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 5,66 dengan capaian kinerja 102,9% % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 lebih rendah dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 102,91 %.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Jateng dan Kebumen dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jateng, dan Kebumen

Pertumbuhan ekonomi Kab Kebumen 2019-2023 memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Jateng dan Nasional serta selalu tumbuh lebih tinggi dibanding Jateng dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kab Kebumen (5,66%) masuk dalam urutan ketiga tertinggi di Jawa Tengah setelah Kota Semarang (5,79%) dan Kabupaten Klaten (5,7%).

Tujuan ketiga diturunkan dan dibagi menjadi 4 (empat sasaran dan 4 indikator sasaran yang merupakan turunan dari pertumbujan ekonomi antaralain:

a. Sasaran 1 Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer
b. Sasaran 2 Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder
c. Sasaran 3 Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier
d. Sasaran 4 Tujuan ketiga : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah

Capaian dari empat sasaran secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 3. 119 Capaian Dari Empat Sasaran

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	PDRB ADHK Sektor Primer	5.040,1	5.657,9	5.130,0	90,67%	6.643,72	77,22%

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
2	PDRB ADHK Sektor Sekunder	5.992,6	4.578,4	6.427,0	140,38%	5.376,15	119,55%
3	PDRB ADHK Sektor Tersier	10.393,1	12.316,9	11.081,9	89,97%	14.462,95	130,51%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	4.109,0	4.414,7	4.244,7	96,15%	5.183,96	81,88%

Sasaran dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 5.130,0 atau dengan capaian 90,67% atau kategori capaian **Baik**. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, PDRB ADHK sektor primer yang didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,78%, sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar -0,52%.

Realisasi dalam meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder telah mencapai target dengan realisasi 6.427,0 dengan capaian kinerja 140,38% % atau kategori capaian **Baik Sekali**. Berdasarkan angka realisasi 2023, PDRB ADHK Sektor Sekunder mengalami pertumbuhan secara keseluruhan. Distribusi pada sektor sekunder masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dari tahun 2022. Pada lapangan usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 9,89%.

Sasaran peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier tidak mencapai target yang ditetapkan dengan Realisasi 11.081,9 dengan capaian kinerja 89,97% atau kategori capaian **Baik.** Pada tahun 2023, secara keseluruhan PDRB ADHK sektor tersier mengalami pertumbuhan. Distribusi pada sektor tersier masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan sebesar 5,75% dari tahun 2022. Disusul oleh sektor Jasa Pendidikan yang tumbuh 4,59% dan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 8,76% dari tahun 2022.

Sasaran dalam meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah tidak mencapai target dengan realisasi tahun 2023 sebesar 4.244,7 dengan capaian kinerja 96,15% atau kategori capaian **Baik.**

D. Tujuan Keempat : Meningkatkan pemerataan pembangunan

Meningkatkan pemerataan pembangunan diukur dengan indikator kinerja Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia). Realiasi dan capaian indikator kinerja Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dapat dilihat pada tabel berikut:

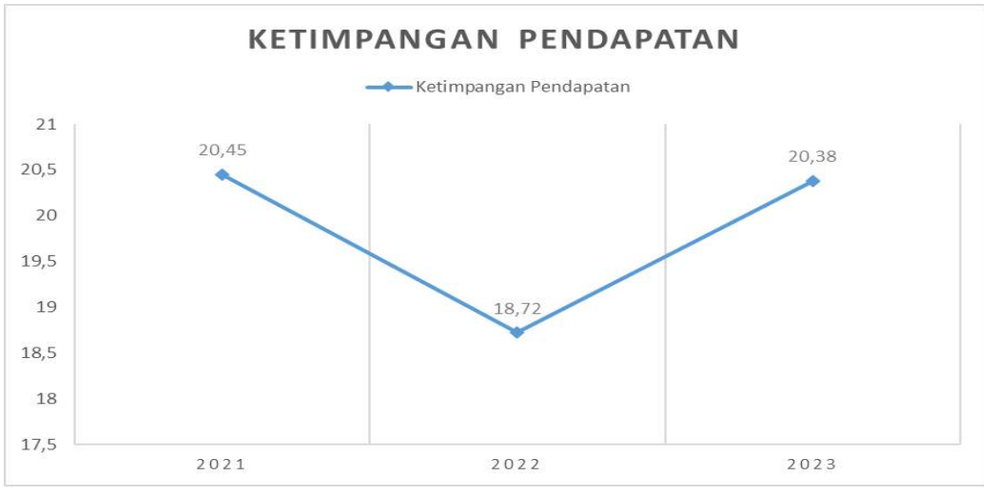
Tabel 3. 120 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia)

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	18,72	21,00	20,38	97,05%	22	92,64%

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 20,38 dengan capaian kinerja 97,05 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja Ketimpangan Pendapatan tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 92,64 %.

Ketimpangan Pendapatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 10 Ketimpangan Pendapatan Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan.

1. 40% penduduk dengan pendapatan rendah,
2. 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan
3. 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan diukur dengan prosentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia Kabupaten Kebumen tahun 2023 yaitu 20,38 persen yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen tergolong rendah. Hal ini merujuk pada definisi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

Permasalahan dalam upaya mencapai target Pertumbuhan Ekonomi antara lain:

1. Terjadi perlambatan pertumbuhan pada beberapa sektor PDRB, antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian, Transportasi pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Industri Pengolahan serta sektor Jasa Lainnya.
2. Masih relative rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, yang belum mampu kembali pada kondisi sebelum pandemi Covid 19, walaupun saat ini telah menunjukkan trend yang meningkat

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang adalah dengan mendorong beberapa sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. Kebumen antara lain adalah :

1. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas melalui peningkatan produktifitas pertanian antara lain dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan sarana prasarana, fasilitasi alsintan, benih dan pupuk, pengembangan kelembagaan pertanian, perbaikan teknologi penanganan pasca panen, mendorong investasi , riset dan pengembangan di sektor pertanian.
2. Mendorong pertumbuhan sektor industry pengolahan melalui upaya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelaku usaha, pengembangan kelembagaan, perluasan pemasaran, penguatan riset dan pengembangan serta penajaman hilirisasi hasil pertanian dalam arti luas
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang akan mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor transportasi dan akomodasi makan dan minum serta jasa lainnya, melalui upaya peningkatan kapasitas SDM pariwisata, pengembangan sarana prasarana pariwisata, pengembangan kelembagaan, mendorong

investasi, riset dan pengembangan pariwisata, peningkatan jejaring dan kerjasama dengan berbagai stakeholder serta peningkatan daya tarik wisata.

4. Memperluas akses ke layanan keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi investasi serta pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Tujuan keempat diturunkan menjadi 2 (dua) sararan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 Tujuan keempat : Berkurangnya penduduk miskin

Sasaran Berkurangnya penduduk miskin diukur dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan. Realiasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 121 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Tingkat Kemiskinan	16,41	16,00-17,00	16,34	97,9%	13,00-13,50	78,96%

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan (16-17) dengan realisasi 16,36 dengan capaian kinerja 97,9 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Kemiskinan tahun 2023 lebih rendah 0,07 dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 78,96 %

Permasalahan dalam upaya mencapai target Tingkat Kemiskinan antara lain:

1. Tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kurang fleksibel untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas *By Name By Address* (BNBA)
3. Masih didapati Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga menghambat tahap intervensi, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu syarat menerima bantuan sosial
4. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus ditetapkan *By Name By Address* (BNBA) satu tahun sebelum tahun

anggaran, sementara kasus baru yang sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera harus menunggu anggaran perubahan

5. Banyaknya Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen masih terbatas dalam melaksanakan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah
6. Belum optimalnya akses kesempatan kerja
7. Rendahnya akses infrastruktur dasar
8. Pengendalian inflasi untuk menjaga garis kemiskinan perlu dimaksimalkan.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui entry NIK satu persatu di aplikasi dan melaksanakan verval Data Terpadu Jawa Tengah (Provinsi) yang didalamnya terdapat variabel-variabel untuk perangkingan status kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan verval ketidaklayakan untuk menonaktifkan Program Bansos bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu, meninggal dan pindah
3. Mencarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat, seperti: berkoordinasi dengan Sentra Satria Baturraden dan BAZNAS
4. Mengoptimalkan tugas pendamping SDM PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang sudah ada dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait
5. Berkoordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Kesejahtreraan Sosial (LKS) dan panti sosial milik Provinsi
6. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Rumah Singgah
7. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
8. Memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan di dalam dan di luar daerah Kabupaten Kebumen
9. Memaksimalkan pencapaian akses infrastuktur dasar bagi penduduk miskin perlu terus dilakukan.
10. Komoditas pembentuk garis kemiskinan baik makanan dan bukan makanan inflasinya perlu dijaga.

b. Sasaran 2 Tujuan keempat : Berkurangnya pengangguran

Sasaran Berkurangnya pengangguran diukur dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Realiasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 122 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,92	5,40-5,50	5,11	107,09%	5,2	101,73%

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 5,11 dengan capaian kinerja 107,09 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 101,73 %.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja antaralain*:*

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, meningkatnya penempatan tenaga kerja
2. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja dengan kebijakan yang diarahkan pada: Peningkatan pelayanan kinerja dan Keuangan, Peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Terdapat inovasi-inovasi baru yang dibuat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.Inovasi tersebut diantaranya adalah Inovasi dalam Pelayanan Antar Kerja dengan Patriot (Pelayanan AK-1, Karier, Pelatihan dengan info loker kewilayah), Inovasi Si Pemikat (Sinergi Pelindungan PMI, Keluarga dan Masyarakat).
4. Keluarga dan Masyarakat, Pemerintah desa dan stakeholder dalam bekerja keluar negeri), Inovasi Gayatri (Gerbang Layanan Terpadu PMI LTSA) memudahkan akses layanan keluar negeri melalui layanan terpadu satu atap)

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain:

1. Kondisi pencari kerja setiap Tahun Rata-rata diatas 11.00 orang, sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak angka tersebut sehingga disparitas antara jumlah lowongan kerja yang harus disediakan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja akan menyebabkan banyak pencari tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Era Revolusi Industri modern berdampak positif dan negative kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan, Era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan lama yang sudah ada.
3. Teknologi Informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara Komputerisasi.Oleh karena itu Pencari Kerja juga harus respon terhadap perkembangan zaman.
4. Rendahnya minat bekerja di daerah sendiri dikarenakan UMK rendah
5. Adanya Informasi lowongan pekerjaan baik dalam dan luar negeri lewat media sosial yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten.
7. Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah.
8. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi
9. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran.

Rencana tindak lanjut yang akan datang untuk mempertahankan kinerja antara lain:

1. Bersinergi dengan Sekolah dan Universitas dalam Upaya mendorong transformasi/paradigma dalam era sekarang dengan upaya memberikan pemahaman tentang Ketenagakerjaan melalui Rapat Koordinasi dengan sasaran Kepala SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang nanti diimplementasikan dalam kurikulum yang bisa link dengan dunia kerja.
2. Memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta Career Development Center (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi sebagai upaya agar dapat bekerja.
3. Intervensi Pencari Kerja dengan kegiatan mini *Job Fair*, *Job Canvasing* (mencari lowongan kerja dan memasarkan tenaga kerja kepada perusahaan serta layanan karir bergerak
4. Fasilitasi Rekut Tenaga Kerja oleh Perusahaan Di Dinas Tenaga Kerja
5. Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri
6. Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri ke Pencari Kerja dan Masyarakat Era Revolusi Industri modern berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan. Perlindungan secara komprehensif pada Pekerja Migran Indonesia baik yang Calon PMI maupun PMI purna penempatan

E. Tujuan Kelima : Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 123 Realiasi dan Capaian Indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	59,19	63,75	64,97	101,91%	71,82	90,46%

Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 64,97 dengan capaian kinerja 101,91 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,46 %

Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibagi menjadi dua sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran 1 Tujuan kelima : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

   Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 124 Realiasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	55,34	59,27	64,00	107,98%	70,69	90,54%

Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah pada Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 64 dengan capaian kinerja 107,98 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,54 %

Permasalahan dalam upaya mencapai target Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah antara lain:

1. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum teridentifikasi dan tertangani oleh pemerintah daerah
2. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni.
3. Masih adanya kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani.
4. Akses sanitasi masyarakat masih rendah meliputi pengolahan limbah domestik, sampah dan drainase
5. Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih perlu ditingkatkan terutama penerangan jalan umum, traffic light, warning lamp, rambu, marka, guard rail sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda
6. Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan jalan dan mengakibatkan umur efektif jalan yang berkurang lebih cepat
7. Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolahan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagaian masih mengandalkan air bersih non perpipaan
8. Kurang optimalnya fungsi drainase dengan masih ditemukan genangan air dan daerah rawan banjir

9. Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarkat sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau
10. Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang diwilayah Kabupaten Kebumen
11. Adanya alih fungsi sawah irigasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor pendorong dalam upaya mencapai target Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah antara lain:

1. Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Bantuan dari CSR dan swadaya masyarakat dalam pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Alokasi DAK Penugasan penanganan sanitasi untuk pembanguanan tangki septik individu di desa dengan prevalensi tinggi.
4. Bantuan hibah perlengkapan jalan dari pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah
5. Alokasi DAK Pembangunan SPAM. Serta alokasi Banprov jalan untuk Pembangunan jalan.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antar lain:

1. Melakukan updating data rumah secara periodik melalui aplikasi SIRUMAH
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah di tingkat pusat/provinsi, BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah (BAZNAS/Komunitas dll) untuk bersinergi dalam menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya menangani kawasan kumuh sesuai dengan kewenangannya.
4. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menyediakan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
5. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
6. Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan

7. Mendorong Masyarakat untuk melakukan skema kegiatan SPAM antar desa sangat membantu Masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum
8. Mengoptimalkan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan, jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Sasaran 2 Tujuan kelima : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 125 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,43	74,19	67,16	90,52%	74,45	90,21%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 67,16 dengan capaian kinerja 90,52 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,21 %.

Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH KAB	73,80	73,92	64,43	68,17	67,16
IKLH PROV	66,27	67,37	66,27	66,85	68,59
IKLH NAS	66,55	70,27	71,43	72,42	72,54

Gambar 3. 11 Perbandingan IKLH Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Tahun 2023 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional dan IKLH Provinsi yaitu sebesar 67,16 dan masih termasuk kategori **"SEDANG".** Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode laporan IKLH sejak tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dari Kementerian LHK. Dari hasil pengujian tahun 2023 melalui aplikasi online tersebut terdapat penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Penurunan nilai IKA paling signifikan pada tahun 2023 karena dari hasil input data yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dari total 118 data hanya 76 data yang terverifikasi yang berasal dari data waduk/embung karena kurangnya parameter pokok IKA yakni kecerahan, klorofil, dan total nitrogen. Adanya musim kemarau panjang akibat *El Nino* dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak menyebabkan nilai IKA turun.

Luasan tutupan lahan masih belum selesai input dalam aplikasi IKLH dan sebagian besar tidak terverifikasi karena kurangnya peta yang terbaru, keterbatasan waktu, sumber daya manusia dan anggaran untuk pembaharuan/inventarisasi tutupan lahan dan RTH Kabupaten Kebumen untuk kepentingan perhitungan IKLH yang update setiap tahunnya.

Selain itu adanya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada level nasional dan provinsi sedangkan kabupaten/kota tidak ada komponen IKAL dalam perhitungan IKLH sehingga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain masih relevan namun jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi dan Nasional menjadi tidak relevan. Selain itu, yaitu adanya perbedaan target IKLH setiap Kabupaten/Kota yang sangat tergantung reraturan daerah masing-masing dalam menentukan target IKLH, sehingga terdapat dua jenis capaian yaitu capaian

terhadap Target IKLH dan Capaian IKLH itu sendiri yang keduanya memiliki kategori atau rentang masing-masing. Berikut ditampilkan daftar capaian IKLH seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Tabel 3. 126 Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 pada 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Kabupaten Banjarnegara	42,68	89,36	42,39	61,52	SEDANG
2	Kabupaten Banyumas	51,79	87,45	47,59	65,31	SEDANG
3	Kabupaten Batang	41,67	85,72	45	60,24	SEDANG
4	Kabupaten Blora	58	88,05	64,65	71,62	BAIK
5	Kabupaten Boyolali	50	82,55	41,82	61,39	SEDANG
6	Kabupaten Brebes	50,43	86	49,08	64,54	SEDANG
7	Kabupaten Cilacap	48,95	92,45	44,82	65,66	SEDANG
8	Kabupaten Demak	66,6	84,43	26,78	65,1	SEDANG
9	Kabupaten Grobogan	51,05	86,87	58,16	67,12	SEDANG
10	Kabupaten Jepara	32	85,54	43,8	56,27	SEDANG
11	Kabupaten Karanganyar	53,68	84,37	52,85	65,93	SEDANG
12	**Kabupaten Kebumen**	**51,74**	**90,41**	**50,63**	**67,16**	**SEDANG**
13	Kabupaten Kendal	44,29	79,56	40,52	57,75	SEDANG
14	Kabupaten Klaten	58,46	88,16	26,56	63,5	SEDANG
15	Kabupaten Tegal	58,82	88,33	40,68	66,8	SEDANG
16	Kabupaten Kudus	52,67	81,92	35,72	60,8	SEDANG
17	Kabupaten Magelang	54,07	89,55	42,01	65,8	SEDANG
18	Kabupaten Pati	50	82,9	37,67	60,63	SEDANG
19	Kabupaten Pekalongan	33,64	83,98	58,28	59,42	SEDANG
20	Kabupaten Pemalang	53,33	85,49	52,4	66,15	SEDANG
21	Kabupaten Purbalingga	56,67	88,7	44,04	66,87	SEDANG
22	Kabupaten Purworejo	47,89	88,74	63,31	67,81	SEDANG
23	Kabupaten Rembang	54,29	88,37	47,11	66,52	SEDANG
24	Kabupaten Semarang	50	86,1	52,03	65,07	SEDANG
25	Kabupaten Sragen	50,74	89,84	43,1	64,91	SEDANG
26	Kabupaten Sukoharjo	52,86	87,32	31,95	62,24	SEDANG
27	Kabupaten Temanggung	64,07	85,1	48,9	69,27	SEDANG
28	Kabupaten Wonogiri	55,45	88,33	36,67	64,66	SEDANG
29	Kabupaten Wonosobo	52,5	88,6	47,92	66,12	SEDANG
30	Kota Magelang	66,67	83,05	27,85	64,8	SEDANG
31	Kota Pekalongan	48,86	80,33	24,39	56,24	SEDANG
32	Kota Salatiga	44,29	84,84	33,62	58,38	SEDANG
33	Kota Semarang	46	80,55	31,63	56,84	SEDANG
34	Kota Surakarta	50	91,08	31,78	62,65	SEDANG
35	Kota Tegal	51,11	88,12	34,58	62,48	SEDANG

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 67,16 dengan rincian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 51,74; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,41; dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 50,63. Meskipun capaian tersebut belum mampu mencapai angka target yang sudah ditentukan, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada kabupaten/kota lain se-Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen mendapat **peringkat ke-4**

(keempat) terbaik setelah Kabupaten Blora (71,62), Kabupaten Temanggung (69,27), dan Kabupaten Purworejo (67,81).

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Mengidentifikasi sumber pencemar air, baik dari usaha dan/atau kegiatan domestik (perumahan dan permukiman), industri (skala mikro kecil menengah), dan jasa (rumah sakit, perkantoran, dan lainnya) untuk kemudian dilakukan upaya pengendalian berupa sosialisasi pencegahan pencemaran, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pembuatan dan pemasangan papan informasi peringatan pada lokasi-lokasi yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) laboratorium lingkungan melalui pelatihan / sertifikasi keahlian pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Menambah titik-titik lokasi pemantauan air dan udara sehingga lebih menggambarkan kondisi (representatif) Kabupaten Kebumen.
4. Menginventarisasi ruang terbuka hijau (RTH) baik publik maupun privat di seluruh Kabupaten Kebumen.
5. Mengaktifkan kembali program *Car Free Day* (CFD) dan gerakan sejenisnya

F. Tujuan Keenam : Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat

Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 127 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesalehan Sosial

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kesalehan Sosial	80,36	77,00-77,50	82,16	106,0%	80,00-80,50	102,06%

Indeks Kesalehan Sosial pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 82,16 dengan capaian kinerja 106 % atau kategori capaian **Sangat Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kesalehan Sosial tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 102,06 %

Tantangan mempertahankan capaian kinerja kedepan perubahan perkembangan dan suhu politik/ pemilu, informasi dan hoaks dari medsos yg dapat mempengaruhi perilaku Kesalehan Sosial warga masyarakat kebumen.

Sedangkan upaya untuk mempertahan capaian kinerja dengan senantiasa sosialisasi kondusivitas sosial kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta seluruh stakeholder yang ada di Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tujuan keenam diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis yakni:

a. Sasaran 1 Tujuan keenam : Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan

Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan diukur dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi. Realisasi dan capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 128 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100	64,29	100,00	155,55%	78,57	127,28%

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 100 dengan capaian kinerja 155,55 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya

Ekonomi tahun 2023 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 127,28 %

Rumusan Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi didapat dari Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani (JKD) dibagi Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Terjadi (JKT) dikalikan 100%.

Secara rinci perbandingan jumlah konflik yang ditangani sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3. 129 Perbandingan Jumlah Konflik Yang Ditangani

Tahun	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Terjadi	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani
2020	0	0
2021	5	5
2022	40	40
2023	106	106

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen, 2023.

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 130 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir

Indikator Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	2021	57,14 %	100%	175,01%
	2022	60,71%	100%	164,72%
	2023	64,29	100,00	155,55%

Keberhasilan indikator Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi didukung oleh:

1. Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sehingga setiap ancaman, tantangan, hambatan dan ganguan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani.
2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini serta Pusat Komunikasi dan Informasi yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna

mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini serta penanganan konflik .

3. Sinergitas antar Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.
4. Adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaran Bangsa Indonesia (FPBI) dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, toleransi, memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, serta membangun moderasi beragama dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial.
5. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman berpolitik yang bermartabat.
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Pemilu Damai 2024.

Upaya mempertahankan target kinerja yang akan datang dengan membangun jejaring dan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder dan elemen Masyarakat.

b. Sasaran 2 Tujuan keenam : Meningkatnya pembangunan kebudayaan

Meningkatnya pembangunan kebudayaan diukur dengan indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 131 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Budaya Yang Dilestarikan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase budaya yang dilestarikan	100	29,82	88,07	295,34%	43,04	204,62%

Persentase budaya yang dilestarikan pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 88,07 dengan capaian kinerja 295,34 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Rumusan Persentase Budaya yang dilestarikan adalah persentase kesenian yang dikembangkan ditambah persentase benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang dilestarikan dibagi 2 (dua). Sehingga realisasi dari pencapaian Indikator kinerja Persentase Budaya yang dilestarikan secara rinci masing-masing sub indikator sebagai berikut:

Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan, dengan Rumus : jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 132 Indikator Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Tahun	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata	Capaian %
2020	20	91	21,98
2021	0	91	0
2022	35	130	26,92
2023	99	130	76,15

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen 2023

Indikator persentase kesenian yang dikembangkan, dengan rumus: Jumlah kebudayaan /jumlah kegiatan x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 133 Indikator Persentase Kesenian Yang Dikembangkan

Tahun	Jumlah kebudayaan	Jumlah kegiatan	Capaian %
2020	2	5	40,00
2021	3	5	60,00
2022	3	7	42,86
2023	33	33	100

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen 2023

Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan telah menjadi fokus utama dalam upaya memelihara dan mempromosikan kekayaan budaya. Sejalan dengan pencapaian sasaran strategis, beberapa keberhasilan, kegagalan, dan solusi telah teridentifikasi.

Faktor Keberhasilan dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Penetapan Destinasi Budaya:
   - Keberhasilan: Identifikasi dan penetapan destinasi budaya baru berhasil menambahkan variasi dan kedalaman kekayaan budaya dalam destinasi pariwisata.
   - Analisis: Proses ini berhasil meningkatkan daya tarik destinasi, mengundang minat wisatawan untuk menjelajahi aspek budaya yang unik dan autentik.
2. Pemeliharaan Situs Bersejarah:
   - Keberhasilan: Investasi dalam pemeliharaan situs bersejarah membawa dampak positif pada kondisi dan daya tarik situs-situs tersebut.
   - Analisis: Peningkatan ini memastikan bahwa warisan budaya yang penting tetap terjaga dengan baik, memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi wisatawan.
3. Peningkatan Kesadaran Wisatawan:
   - Keberhasilan: Program edukasi budaya berhasil meningkatkan pemahaman wisatawan tentang sejarah dan tradisi lokal.
   - Analisis: Wisatawan yang lebih teredukasi cenderung menghargai dan menghormati warisan budaya, menciptakan interaksi yang lebih positif antara wisatawan dan komunitas setempat.

Tantangan mencapai target kinerja:

1. Kurangnya Partisipasi Komunitas Lokal:
   - Kegagalan: Tidak mencapai tingkat partisipasi yang diharapkan dari komunitas lokal dalam program pemeliharaan budaya.
   - Analisis: Kurangnya keterlibatan komunitas lokal dapat mengurangi keberlanjutan upaya pemeliharaan budaya. Masyarakat setempat perlu lebih diajak berpartisipasi dalam keputusan dan implementasi program.
2. Ketidakseimbangan Pendanaan:
   - Kegagalan: Terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi pendanaan untuk pemeliharaan situs bersejarah dan program edukasi budaya.
   - Analisis: Prioritas yang tidak seimbang dapat mengakibatkan penelantaran beberapa aspek budaya yang mungkin memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan.

Solusi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang:

1. Penguatan Kolaborasi dengan Komunitas Lokal:
   - Solusi: Meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan komunitas lokal melalui dialog terbuka, pelibatan aktif, dan pembentukan kemitraan yang inklusif.
2. Pengaturan Pendanaan yang Lebih Seimbang:
   - Solusi: Mengevaluasi dan mengatur ulang alokasi pendanaan untuk memastikan adanya keseimbangan antara pemeliharaan situs bersejarah dan program edukasi budaya.
3. Meningkatkan Kampanye Edukasi Wisatawan:
   - Solusi: Mengintensifkan kampanye edukasi budaya kepada masyarakat/ wisatawan melalui berbagai media untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati kekayaan budaya lokal.

G. Tujuan Ketujuh : Mewujudkan kondusitivas wilayah

Mewujudkan kondusitivas wilayah diukur dengan indikator kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah. Realisasi dan capaian indikator Indeks Kondusivitas Wilayah yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 134 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kondusivitas Wilayah Yang Dilestarikan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kondusivitas Wilayah	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Indeks Kondusivitas Wilayah pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah tahun 2023 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %

Perhitungan Indeks Kondusivitas Wilayah diperoleh dari persentase penegakan peraturan daerah ditambah persentase desa tangguh bencana dibagi dua. Secara terperinci permasalahan dan solusi mencapai target dijelaskan pada dua sasaran strategis berikut:

a. Sasaran 1 Tujuan ketujuh : Meningkatnya ketertiban masyarakat

Mewujudkan kondusitivas wilayah diukur dengan indikator kinerja Persentase Penegakan Perda. Realisasi dan capaian indikator Indeks Persentase Penegakan Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 135 Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Persentase Penegakan Perda

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Penegakan Perda	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Indeks Kondusivitas Wilayah pada Tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah tahun 2023 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %

Dengan rincian jumlah capaian penegakan perda dan perkada yang ditegakan pada Tahun 2023 ini pada tabel berikut :

Tabel 3. 136 Rincian Perda-Perda Yang Ditegakkan

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1.	Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 pelanggar	-
2.	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	16.747	
2.1	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	178 orang	Dari 18 tempat hotel/kost/hunian
2.2	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	17 orang	1924 botol miras
2.3	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7 tempat	Tempat Hiburan malam
2.4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	43 pelajar	Operasi pelajar
2.5	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	6 toko	2875 botol tanpa ijin edar
2.6	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	212 orang	ODGJ, anak jalanan, dan PGOT
2.7	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	15.827 buah reklame	Penertiban reklame

			(Spanduk, Banner, bendera, baliho)
2.8	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	457 PKL	Penertiban PKL
3.	Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	42	-
Jumlah		16.796	Kasus

Dari banyaknya kasus yang sudah ditangani sebagian besar diselesaikan dengan surat teguran dan pembinaan pada pelanggar yang melanggar disaat proses penegakan perda dan perkada, sedangkan proses sidang yang dijalankan sejumlah 30 orang terdakwa dengan pelanggaran perda nomor 4 Tahun 2020 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Upaya untuk mempertahankan capaian kinerja adalah :

1. Berkoordinasi dengan OPD terkait (pengampu) untuk meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi Perda
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan Perda
3. Membangun jejaring dengan stakeholder dalam kegiatan penegakan Perda

b. Sasaran 2 Tujuan Ketujuh : Terwujudnya wilayah tangguh bencana

Terwujudnya wilayah tangguh bencana diukur dengan indikator kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana. Realisasi dan capaian Persentase Desa Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 137 Realisasi dan Capaian Persentase Desa Tangguh Bencana

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Persentase Desa Tangguh Bencana pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana tahun 2022 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %.

Persentase Desa Tangguh Bencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 138 Persentase Desa Tangguh Bencana

Tahun	Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah Desa	Capaian %
2020	70	70	100,00
2021	390	390	100,00
2022	60	60	100,00
2023	30	30	100,00

Pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa di kabupaten kebumen serta peningkatan kapasitas Destana yang telah dilaksanakan sudah sesuai target yang direncanakan namun masih mengalami permasalahan antara lain:

1. Belum siapnya sumber daya manusia untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana, masih ada masyarakat yang memiliki kesibukan lainnya sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan yang bersangkutan berhalangan hadir;
2. Keterbatasan anggaran sehingga program Desa Tangguh bencana tidak sampai dengan penyediaan sarana dan prasaranya;
3. Kwalitas Desa Tangguh belum tercermin dalam pelaksanaan penanggulangan bencana oleh desa, masih tingginya ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten/ BPBD

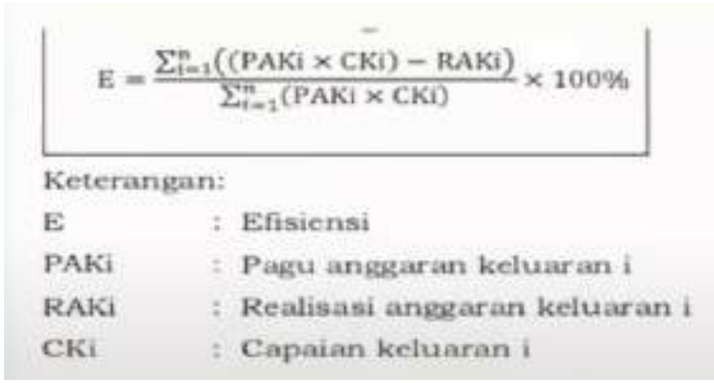
Solusi atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Meningkatkan program/kegiatan sosialisasi dan pelatihan destana yang telah dilakukan dengan menambah unsur-unsur perwakilan masyarakat serta lebih banyak mengembangkan fasilitator Desa Tangguh Bencana dari Desa;
2. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dengan menyesuaikan kondisi kerawanan bencana pada masing masing desa di Kabupaten Kebumen;

Mendorong Desa Tangguh Bencana yang ada untuk saling kerjasama sehingga pada saat terjadi kedaduratan bencana yang bisa ditangani Desa bisa terselesaikan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *ouput* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah - rendahnya.



$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	:	Efisiensi
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i
CKi	:	Capaian keluaran i

Gambar 3. 12 Perhitungan Efisiensi Anggaran

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi Anggaran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 139 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MISI 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi								
	Tujuan								
	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	126,18						
	Sasaran								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,33	Program Pendaftaran Penduduk	1.889.168.682	1.864.479.350	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100,00	1,3
				Program Pencatatan Sipil	224.153.000	223.249.716	Cakupan Pendaftaran Sipil	100,00	0,4
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	969.656.000	941.299.151	Presentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	2,9
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.500.000	78.746.933	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	5,7
				Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	34.171.241.000	33.067.769.265	Nilai IKM Setda	106,63	9,2
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23.444.762.000	22.667.281.813	Nilai EKPPD	117,63	17,8

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Perekonomian dan Pembangunan	1.473.483.000	1.396.703.651	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	106,67	11,1
				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	41.173.223.000	40.604.769.877	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD	100,00	1,4
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.924.831.000	15.210.557.886	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	100,00	10,1
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.764.574.000	18.914.288.622	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	67,3
				Program Kepegawaian Daerah	2.080.283.000	1.407.403.109	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	109,80	38,4
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.879.526.000	1.778.242.450	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	93,27	-1,4
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.405.460.457	59.188.741.393	Indeks kondusifitas Kecamatan	100,00	5,2
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.600.993.000	1.580.419.780	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	107,33	8

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.199.219.000	9.096.856.820	Indeks Kepuasan masyarakata terhadap pelayanan publik di kelurahan	102,92	3,9
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	401.891.000	399.755.350	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	0,5
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.331.363.000	4.273.561.354	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	245,00	59,7
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	95,81	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	174.000.000	171.259.307	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	115,25	14,6
		2 Opini BPK	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.254.237.335	2.989.979.646	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,35	-14,3
				Program Pengelolaan Arsip	365.822.000	365.066.263	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	99,48	-0,3
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.345.676.000	5.245.635.348	Cakupan pelayanan penunjang urusan	100,00	1,9

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							pemerintahan daerah		
				Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.196.614.000	1.179.022.595	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	111,11	11,3
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	636.688.000	619.683.455	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100,00	2,7
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	482.039.000	475.689.611	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	88,89	-11,0
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.576.542.000	8.433.420.917	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	1,7
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.216.908.000	1.192.932.811	Nilai Leveling APIP	100,00	2,0
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	674.000.000	667.637.555	Indeks Persepsi Korupsi	114,71	13,6
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	21.045.103.000	20.062.391.420	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	4,7
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	681.849.851.000	680.366.607.925	Persentase Capaian	98,34	-1,5

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000	1.696.729.074	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00	1,4
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000	5.067.031.269	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	101,94	2,9
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	107,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.962.087.000	4.714.602.927	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	5,0
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.656.843.000	5.576.658.357	Indeks PPID	106,49	7,4
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.061.125.000	3.028.602.398	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	115,32	14,2
	MISI 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya								
	Tujuan								
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	101,24						
	Sasaran								

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100,18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	430.705.523.272	412.745.486.271	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	4,2
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.128.059.000	123.152.323.558	Persentase Capaian SPM Kesehatan	99,26	3,2
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.402.385.000	3.313.798.383	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100,00	2,6
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	548.172.000	547.419.504	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100,00	0,1
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.171.781.000	3.064.315.298	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	129,79	25,6
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	553.801.000	552.678.670	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,53	-4,5
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17.236.330.000	16.977.177.744	Persentase prestasi Olahraga (persen)	95,46	-3,2
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	605.930.000	604.242.710	Cakupan prestasi kepramukaan	104,99	5,0
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah	100,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	772.366.456.727	750.653.812.267	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	2,8
				Program Pengelolaan Pendidikan	221.827.858.000	219.319.618.505	Angka Partisipasi Kasar	98,92	0,1

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	18.918.000	18.915.820	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	100,00	0,0
		2 Harapan Lama Sekolah	97,95						
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks Pembangunan Gender	99,90	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	592.281.000	589.977.195	cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	328,60	69,7
				Program Perlindungan Perempuan	141.840.000	139.640.250	cakupan program perlindungan perempuan	100,00	1,6
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	30.644.000	30.209.000	cakupan program peingkatan kualitas keluarga	127,96	23,0
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	31.996.000	31.951.000	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100,00	0,1
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	142.622.000	140.637.600	kategori kabupaten layak anak (KLA)	100,00	1,4
				Program Perlindungan Khusus Anak	262.701.000	256.774.184	Cakupan perlindungan khusus anak	100,00	2,3
				Program Pengendalian Penduduk	715.390.000	660.651.702	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	156,02	40,8

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.907.193.000	10.264.431.187	Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	110,13	14,5
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.066.108.000	6.903.004.998	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	101,63	3,9
		2 Cakupan Perlindungan Anak	100,0						
	MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan								
	Tujuan								
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	102,91						
	Sasaran								
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	90,67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.852.649.000	2.811.114.860	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1126,13	91,2
				Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.092.215.000	3.016.078.548	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	110,87	12,0

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	53.456.000	52.610.400	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100,00	1,6
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	383.464.000	381.371.504	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	85,57	-16,2
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.149.436.000	13.243.058.961	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	286,77	69,5
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.264.532.053	11.930.652.125	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	82,73	-17,6
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.019.714.000	1.969.164.086	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	8,65	-1027,1
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	591.132.000	561.182.620	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12,00	-691,4
				Program Perizinan Usaha Pertanian	50.068.000	49.367.250	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100,00	1,4

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Penyuluhan Pertanian	2.436.022.000	2.333.759.541	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	100,00	4,2
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	140,38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.259.591.000	4.058.374.133	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	4,7
				Program Penataan Desa	31.000.000	30.927.000	Persentase Desa Tertata	100,00	0,2
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.871.496.000	1.860.451.568	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100,00	0,6
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	797.147.000	795.728.947	Jumlah Bumdesa yang meningkat Klasifikasinya	103,57	3,6
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.126.963.000	2.119.726.076	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00	0,3
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000.000	19.874.700	Persentase Koperasi yang Sehat	83,33	-19,3
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	277.287.000	266.081.564	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	135,22	29,0
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	445.730.000	429.165.134	Persentase Advokasi kepada Koperasi	136,03	29,2
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.836.560.000	1.740.302.449	Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas	127,64	25,8

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengembangan UMKM	2.058.007.000	1.976.006.349	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya	227,50	57,8
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.118.500.000	1.109.864.013	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	174,03	43,0
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	80.366.000	79.572.295	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	100,00	1,0
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	43.554.000	43.155.903	Terinformasikannya Jumlah Dokumen Informasi Industri	100,00	0,9
3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	89,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.836.327.773	6.522.217.273	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	4,6
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.100.585.000	3.011.941.094	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	99,49	2,4
				Program Pemasaran Pariwisata	2.390.924.000	2.320.188.566	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	162,35	40,2
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60.000.000	59.515.950	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk	500,00	80,2

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							pengembangan kompetensi tingkat dasar		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.050.281.850	10.431.303.699	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	5,6
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	19.333.696.000	18.809.503.612	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	95,47	-1,9
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	218.227.000	217.039.173	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	609,33	83,7
				Program Pengembangan Ekspor	325.366.000	323.644.489	Jumlah Nilai Ekspor IKM	1987,67	95,0
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	173.754.000	171.671.936	Persentase UTTP Yang Tertera	148,34	33,4
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	639.474.000	633.541.053	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	140,26	29,4
4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	96,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.962.509.000	3.780.903.145	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	4,6
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	74.900.000	73.995.278	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	156,67	36,9

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Promosi Penanaman Modal	223.983.000	219.049.650	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	100,00	2,2
				Program Pelayanan Penanaman Modal	283.240.000	282.914.312	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100,00	0,1
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	399.188.000	393.488.420	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	101,54	2,9
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	23.880.000	23.629.960	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100,00	1,0
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	10.000.000	9.988.177		100,00	0,1
	Tujuan								
	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	97,05						
	Sasaran								

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	97,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.554.504.000	4.241.248.848	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	6,9
				Program Pemberdayaan Sosial	38.030.000	37.674.020	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	100,73	1,7
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.384.000	3.237.350	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00	4,3
				Program Rehabilitasi Sosial	1.833.139.000	1.827.901.786	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	104,94	5,0
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.240.994.000	3.136.613.405	cakupan perlindungan jaminan sosial	107,83	10,2
				Program Penanganan Bencana	779.335.000	772.104.610	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota	100,00	0,9
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.200.000	14.200.000	prosentase TMP yang di kelola	100,00	0,0

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.777.974.000	18.420.820.022	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	1,9
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	40.000.000	39.661.300	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00	0,8
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662.381.000	656.389.787	Persentase diverivikasi dan ketahanan pangan	103,84	4,6
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.094.537.000	1.087.099.670	Persentase Desa yang tertangani kerawanan pangan	102,67	3,3
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	95.166.000	94.017.500	Persentase Hasil Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	101,81	3,0
2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	107,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.885.294.000	5.816.951.124	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	1,2
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	456.152.000	455.239.487	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai”A”	100,00	0,2
				Program Penempatan Tenaga Kerja	532.464.000	530.719.872	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	109,20	8,7

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Hubungan Industrial	157.276.000	157.028.500	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	150,00	33,4
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	139.000.000	138.374.027	Persentase Transmigran yang di tempatkan	30,00	-231,8
	MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan								
	Tujuan								
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	101,9						
	Sasaran								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	107,98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.923.320.000	21.112.535.528	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	93,10	-3,4
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.424.055.000	14.363.651.284	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,39	5,3
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.840.213.000	10.908.262.842	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	113,60	18,9

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.461.678.000	5.183.455.571	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	95,01	0,1
				Program Penataan Bangunan Gedung	4.300.007.000	4.125.001.260	Prosentasi Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	99,59	3,7
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.088.638.000	9.576.434.277	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100,00	5,1
				Program Penyelenggaraan Jalan	109.214.422.288	105.407.880.235	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	94,27	-2,4
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	99.699.000	97.700.200	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100,00	2,0
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	581.133.000	579.659.081	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100,00	0,3
				Program Pengembangan Perumahan	533.801.000	532.653.390	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100,00	0,2
				Program Kawasan Permukiman	2.138.286.000	2.084.167.409	Persentase penanganan kawasan permukiman	104,77	7,0

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
							kumuh dibawah 10 ha		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.130.900.000	2.100.372.754	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	96,70	-1,9
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.937.729.000	9.895.948.801	Persentase peningkatan akses air limbah aman	172,65	42,3
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.718.448.000	6.203.712.539	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,38	5,2
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32.326.952.000	31.587.678.476	Indeks Infrastruktur Perhubungan	96,00	-1,8
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.730.556.000	12.339.942.311	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	3,1
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	342.358.000	332.736.963	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	110,00	11,6
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.263.719.400	1.247.652.807	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	90,52	-9,1
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.374.753.600	2.360.814.567	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	110,02	9,6

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	38.531.000	38.147.354	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	100,43	1,4
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.055.000	68.869.614	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	82,84	-20,4
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	82.043.000	81.814.863	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	97,25	-2,5
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	46.656.000	46.453.400	Persentase fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup	141,66	29,7
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.464.000	15.179.500	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100,00	7,8
				Program Pengelolaan Persampahan	9.779.565.000	9.703.525.876	Persentaase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	130,48	24,0
	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat								
	Tujuan								
	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	106,01						
	Sasaran								

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.591.242.581	3.458.436.561	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	3,7
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000	410.838.741	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	762,56	87,0
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	25.692.385.000	25.562.296.650	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	100	0,5
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000	236.958.200	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	0,2
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.722.842.000	1.713.797.770	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	901,23	89,0
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	1.321.847.000	1.300.335.154	Persentase Penanganan	155,55	36,8

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
				Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi		
2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	295,34	Program Pengembangan Kebudayaan	4.139.238.000	3.896.224.927	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	290,87	67,6
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	20.169.774.000	19.704.577.373	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	295,37	66,9
	Tujuan								
	Mewujudkan kondusitivas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00						
	Sasaran								
1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.520.403.955	9.935.555.445	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	91,15	-3,6
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.832.835.027	7.521.297.054	Persentase Penegakan Perda	100,00	4,0
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.292.221.000	3.182.648.044	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	118,58	18,5

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	Indikator Program	Capaian (%)	Efisiensi
2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.898.526.284	3.773.919.597	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	96,80	0,0
				Program Penanggulangan Bencana	5.439.657.000	5.239.533.179	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	3,7
	Rata-rata		111,27				Rata-rata	146,43	
	Keterangan : *unaudited*						Efisiensi		7,8

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka **7,8** dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20 sampai dengan 20)

Ditinjau dari aspek efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 140 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Tujuan						
	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	126,18				
	Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,33	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100,00	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pendaftaran Sipil	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	Menunjang
				Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Nilai IKM Setda	106,63	Menunjang
				Program Pemerintahan dan	Nilai EKPPD	117,63	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Kesejahteraan Rakyat			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	106,67	Menunjang
				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD	100,00	Menunjang
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	100,00	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	109,80	Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya	93,27	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kondusifitas Kecamatan	100,00	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan		Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakata terhadap pelayanan publik di kelurahan	102,92	Menunjang
				Program Penyelenggaraa	Cakupan pelayanan	100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				n Urusan Pemerintahan Umum	penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	245,00	Menunjang
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	95,81	Program Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	115,25	Menunjang
		2 Opini BPK	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,35	Menunjang
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	99,48	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	111,11	Menunjang
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100,00	Menunjang
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	88,89	Menunjang
				Program Penunjang Urusan	Cakupan pelayanan penunjang	100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	urusan pemerintahan daerah		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Leveling APIP	100,00	Menunjang
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Korupsi	114,71	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	98,34	Menunjang
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	101,94	Menunjang
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	107,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	106,49	Menunjang
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	115,32	Menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	101,24				
	Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan	Angka Harapan Hidup	100,18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	pelayanan kesehatan			Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	99,26	Menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100,00	Menunjang
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100,00	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	129,79	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,53	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi Olahraga (persen)	95,46	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan prestasi kepramukaan	104,99	Menunjang
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah	100,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar	98,92	Menunjang
							Menunjang
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
		2 Harapan Lama Sekolah	97,95				
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks Pembangunan Gender	99,90	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	328,60	Menunjang
				Program Perlindungan Perempuan	cakupan program perlindungan perempuan	100,00	Menunjang
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	cakupan program peingkatan kualitas keluarga	127,96	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100,00	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	kategori kabupaten layak anak (KLA)	100,00	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100,00	Menunjang
				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	156,02	Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	110,13	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	101,63	Menunjang
		2 Cakupan Perlindungan Anak	100,0				
	Tujuan						
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	102,91				

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah						
	Sasaran						
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	90,67	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.126,13	Menunjang
				Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	110,87	Menunjang
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100,00	Menunjang
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	85,57	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	286,77	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	82,73	Menunjang
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	8,65	Menunjang
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12,00	Menunjang
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi	100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Izin Usaha Pertanian		
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	100,00	Menunjang
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	140,38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	100,00	Menunjang
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100,00	Menunjang
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdesa yang meningkat Klasifikasinya	103,57	Menunjang
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00	Menunjang
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	83,33	Menunjang
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	135,22	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	136,03	Menunjang
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas	127,64	Menunjang
				Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya	227,50	Menunjang
				Program Perencanaan dan	Persentase pertumbuhan produksi gula	174,03	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pembangunan Industri	semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT		
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terinformasikan nya Jumlah Dokumen Informasi Industri	100,00	Menunjang
							Menunjang
3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	89,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	99,49	Menunjang
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	162,35	Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	500,00	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	95,47	Menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	609,33	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Nilai Ekspor IKM	1987,67	Menunjang
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Yang Tertera	148,34	Menunjang
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	140,26	Menunjang
4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	96,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	156,67	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	100,00	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100,00	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	101,54	Menunjang
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	97,05				
	Sasaran						
1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	97,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pemberdayaan Sosial	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	100,73	Menunjang
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00	Menunjang
				Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	104,94	Menunjang
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial	107,83	Menunjang
				Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	prosentase TMP yang di kelola	100,00	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase Desa yang tertangani	100,00	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	kedaulatan dan kemandirian pangan		
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase diverivikasi dan ketahanan pangan	103,84	Menunjang
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang tertangani kerawanan pangan	102,67	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	101,81	Menunjang
2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Penganggur an Terbuka	107,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai”A”	100,00	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	109,20	Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	150,00	Menunjang
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang di tempatkan	30,00	Menunjang
	Tujuan						
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	101,9				
	Sasaran						
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Indeks Kualitas	107,98	Program Penunjang Urusan	Cakupan Pelayanan Penunjangan	93,10	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Infrastruktur Daerah		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,39	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	113,60	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	95,01	Menunjang
				Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentasi Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	99,59	Menunjang
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100,00	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	94,27	Menunjang
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100,00	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100,00	Menunjang
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100,00	Menunjang
				Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman	104,77	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					kumuh dibawah 10 ha		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	96,70	Menunjang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan akses air limbah aman	172,65	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,38	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	96,00	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	110,00	Menunjang
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	90,52	Menunjang
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	110,02	Menunjang
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	100,43	Menunjang
				Program Pembinaan dan	Persentase pengawasan	82,84	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	97,25	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup	141,66	Menunjang
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentaase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	130,48	Menunjang
	Tujuan						
	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	106,01				
	Sasaran						
1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penangan an Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	762,56	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	901,23	Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	155,55	Menunjang
2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	295,34	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	290,87	Menunjang
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	295,37	Menunjang
	Tujuan						
	Mewujudkan kondusitivas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00				
	Sasaran						
1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	91,15	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program	Indikator Program	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100,00	Menunjang
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	118,58	Menunjang
2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	96,80	Menunjang
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Menunjang
	Rata-rata		111,27	Total	Rata-rata	146,70	

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa 125 (seratus dua puluh lima) Program dengan rata-rata capaian kinerja 146,70 menunjang dan 28 (dua puluh delapan) indikator tujuan/ sasaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan/sasaran sebesar **111,27** atau Kategori Kinerja **Baik Sekali.**

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 3. 141 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Peraturan Daerah			
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Sebagai Pedoman Pemilihan, dalam proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen
2	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019	Sebagai Pedoman daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3	Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019	Sebagai legalitas daerah dalam mengelola PAD melalui transaksi digital
4	Sistem Kesehatan Daerah	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012	Sebagai pedoman dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten kebumen
5	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020	Sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
6	Badan Usaha Milik Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam Pembentukan, pendirian dan pembinaan BUMDesa
7	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011	Sebagai pedoman dalam Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen
8	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen	Pasal 60A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Perubahan nama Ratih TV menjadi KEBUMEN TV
9	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
10	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
11	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Sebagai pedoman dalam Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
12	Penetapan Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Penetapan desa dan penegasan batas desa
13	Pengelolaan Sampah	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012	Menyediakan instrumen kebijakan dalam pengelolaan sampah
14	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 - 2053	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Memberikan legalitas dan pedoman bagi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
15	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	APBD Tahun Anggaran 2024
16	Garis Sempadan	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan
Peraturan Bupati			
1	Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022	Mengatur pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Kebumen
2	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
3	Perlindungan dan Pelayanan Bagi Aparatur	Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018	Mengatur Perlindungan dan Pelayanan Bagi Aparatur Sipil

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen		Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
4	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen
5	Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016	Mengatur Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
6	Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Mengatur Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
7	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022	Mengatur pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Kebumen
8	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
9	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Mengatur Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
10	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022	Mengatur pelaksanaan pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
11	Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022	Mengatur besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
12	Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Mengatur pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen
13	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021	Mengatur Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
14	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
15	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023	Mengatur Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
16	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Mengatur mekanisme perubahan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
17	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
18	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021	Mengatur pemberian tambahan jasa sebagai penghasilan yang sah bagi Petugas Penunjang Kegiatan/Lapangan
19	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Mengatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
20	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Mengatur pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
21	Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 83 Tahun 2022	Mengatur Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
22	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 158 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	Permenpan RB Nomor 3 tahun 2023	Mengatur penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
23	Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur pedoman pemberian penghargaan berupa perjalanan ibadah umroh atas biaya APBD
24	Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Mengatur penerapan Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
25	Pengembangan Kawasan Taman Bumi (Geopark) Kebumen Menuju Unesco Global Park	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022	Sebagai pedoman Pengembangan Kawasan Taman Bumi (Geopark) Kebumen Menuju Unesco Global Park
26	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022	Mengatur tata cara pelelangan ikan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI
27	Perbahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023		
28	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Mengatur Perubahan pedoman Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa
29	Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015	Mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
30	Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Mengatur Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
31	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021	Mengatur Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
32	Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
33	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018	Mengatur kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE di Daerah
34	Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2021	Mengatur Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen
35	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
36	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Sebagai pedoman dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
37	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
38	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Temabakau Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Temabakau Kabupaten Kebumen		
39	Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik
40	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
41	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Mengatur Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
42	Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai pedoman Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
43	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 1 Tahun 2023	Mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
44	Sistem Informasi Surat Rekomendasi Izin Penelitian	Permendagri Nomor 3 Tahun 2018	Mengatur pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian melalui sistem elektronik
45	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja fisik
46	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021	Mengatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
47	Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	Sebagai Pedoman dalam Pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
48	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	Sebagai pedoman dalam Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
49	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam penanggulan Tuberkulosis di Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penanggulangan Tuberkulosis		
50	Belanja Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mirko, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam pemberian Belanja Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mirko, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen
51	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai pedoman dalam penyaluran dana Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023
52	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
53	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
54	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Sebagai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
55	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
56	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
57	Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012	Sebagai pedoman dalam Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen
58	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
59	Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Kebumen
60	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
61	Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022	Mengatur Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen		Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
62	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
63	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
64	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen
65	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen
66	Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018	Mengatur Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
67	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023	Sebagai pedoman dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
68	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020	Sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen
69	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Mengatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
70	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2023	Sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
72	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
73	Pedoman Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018	Sebagai pedoman Pedoman Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen		Pemerintah Kabupaten Kebumen
74	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
75	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019	Penetapan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026
76	Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011	Mengatur besaran Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
77			
78	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017	Mengatur Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
79	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen		Penetapan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen
80	Besaran Prosentase dan Pertimbangan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		Penetapan Besaran Prosentase dan Pertimbangan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
81			
82	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023	Penetapan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
Keputusan Bupati			
1.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
2.	Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2023		Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
3.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
4.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
5.	Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
6.	Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Darah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Darah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
7.	Pembentukan Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
8.	Pembentukan Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian Kabupaten Kebumen Tahun 2023
9.	Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2023	Penetapan Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
10.	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
11.	Pemberian Pengurangan secara Otomatis terhadap Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pemberian Pengurangan secara Otomatis terhadap Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023
12.	Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal di

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Lokal di Kabupaten Kebumen Tahun 2023		Kabupaten Kebumen Tahun 2023
13.	Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
14.	Pembentukan Tim Penilaia Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2023-2025	Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009	Terbentuknya Tim Penilaia Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2023-2025
15.	Pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan Organisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Pengelola Dana Bantuan Organisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
16.	Pembentukan Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
17.	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
18.	Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggran 2023
19.	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2021	Terbentuknya Panitia Seleksi Calon Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
20.	Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022	Terbentuknya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
21.	Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2023	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2023
22.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023	Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
23.	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020	Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
24.	Penunjukan Lembaga Profesional yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2021	Penetapan Penunjukan Lembaga Profesional yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
25.	Pemberhentian Budiono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016	Penetapan Pemberhentian Budiono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
26.	Pengangkatan Khanifudin Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016	Penetapan Penjabat Kepala Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
27.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 73/PP.04.1-SD/3305/2023	Penetapan Perubahan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
28.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
29.	Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
30.	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
31.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
32.	Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, dan Pengurus Barang Pengelola di Lingkungan Pemerintah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, dan Pengurus Barang Pengelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Kebumen Tahun Anggaran 2023
33.	Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupatpen Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupatpen Kebumen Tahun Anggaran 2023
34.	Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
35.	Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
36.	Besaran Nilai Wajar Sewa/ Nilai Limit Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/ Nilai Limit Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
37.	Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
38.	Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Permendagri Nomor 36 Tahun 2018	Penetapan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
39.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
40.	Penerima Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
41.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebuemn Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebuemn Periode Tahun 2019-2025
42.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
43.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
44.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
45.	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
46.	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Manunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Manunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
47.	Pembentukan Tim Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023	Penetapan Tim Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
48.	Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Menkominfo Nomor 35 Tahun 2014	Penetapan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
49.	Penunjukan Pejabat Penjual/ Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Penunjukan Pejabat Penjual/ Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
50.	Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Tim Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
51.	Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
52.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Perubahan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
53.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 433 Tahun 2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Perubahan Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
54.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023	Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
55.	Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2023	Penetapan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
56.	Desa Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019	Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
57.	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Dokter menjadi Pejabat Pelaksana selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dr. Jen Latifah Helmi	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS
58.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
59.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabulitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabulitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
60.	Penernima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2019	Penetapan Penernima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
61.	Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019	Terbentuknya Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
62.	Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
63.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
64.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ambalresmi Kecamatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Kebumen Periode Tahun 2019-2025
65.	Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022	Terbentuknya Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Kebumen
66.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/853/KEP/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021	Penetapan Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di kabupaten Kebumen
67.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020	Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022
68.	Penunjukan Pengguna Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Milik Daerah Pengguna, dan Pengurus Barang Milik Daerah Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2022	Penetapan Penunjukan Pengguna Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Milik Daerah Pengguna, dan Pengurus Barang Milik Daerah Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
69.	Pembentukan Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
70.	Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2016	Terbentuknya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kebumen Tahun 2023
71.	Pembentukan Tim Penilai Anugerah Usaha Terbaik Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penilai Anugerah Usaha Terbaik Tahun 2023
72.	Pembentukan Desa Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018	Terbentuknya Desa Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
73.	Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Penguasaaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Teknis Penyelesaian Penguasaaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Kebumen
74.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
75.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Kebumen Periode Tahun 2019-2025
76.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
77.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
78.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentnian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode tahun 2019-2025
79.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
80.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
81.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
82.	Pembentukan Tim Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Kebumen
83.	Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kebumen	Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 11 Tahun 2021	Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kebumen
84.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
85.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
86.	Pemberhentian Waliman dari Jabatannya sebagia Kepala Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Waliman dari Jabatannya sebagia Kepala Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
87.	Pengangkatan Ngafifah, S.E. Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengangkatan Ngafifah, S.E. sebagai Penjabat Kepala Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
88.	Pengesahan Pengangkatan Sri Maryati sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sri Maryati sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
89.	Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2013	Terbentuknya Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen
90.	Pembentukan Tim Penyelenggara Kebumen International Expo Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Penyelenggara Kebumen International Expo Tahun 2023
91.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
92.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
93.	Pembentukan Tim Penyelenggara Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor 047/ADM/DP-APKASI/II/2023	Terbentuknya Tim Penyelenggara Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
94.	Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
95.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
96.	Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012	Terbentuknya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
97.	Penerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2021	Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
98.	Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
99.	Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
100.	Penerima Belanja Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Bersidat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Bersidat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
101.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan IV Tahun 2022	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan IV Tahun 2022
102.	Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Terbentuknya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kebumen
103.	Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023	Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Kebumen
104.	Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kebumen Tahun 1444 H / 2023 M	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012	Terbentuknya Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kebumen Tahun 1444 H / 2023 M
105.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 823/ 111 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019	Terbentuknya Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pemerintah Kabupaten Kebumen		
106.	Pembentukan Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
107.	Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.215/PMK.07/2021	Terbentuknya Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Kebumen
108.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran2023
109.	Penerima Tambahan Jasa kepada Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2023	Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
110.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 2 Tahun 2023 tentang Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
111.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Anas Fauzi,M.M.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
112.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Pengawas Koperasi Ahli Muda menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Eko Purnomo, S.M.,M.M.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
113.	Penerima Belanja Hibah kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
114.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Bendhaara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Pembantu dan Bendahra Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
115.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Skait Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Skait Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
116.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
117.	Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023	Terbentuknya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kebumen
118.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendhaara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahra Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Bendhaara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahra Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
119.	Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023/ 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2022	Penetapan Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023/ 2024
120.	Pembentukan Tim Pelaksana Event Idul Fitri 1444H pada Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Pelaksana Event Idul Fitri 1444H pada Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
121.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 185/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
122.	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Koperasi ke-	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Panitia Peringatan Hari Koperasi ke-

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	76 Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023		76 Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
123.	Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen	Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/ 2021	Penetapan Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen
124.	Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019	Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Kebumen
125.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
126.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
127.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
128.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
129.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
130.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun2 019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun2 019-2025
131.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
132.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
133.	Penerima Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012	Penetapan Penerima Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022
134.	Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian	Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007	Terbentuknya Tim Penyelesaian Kerugian

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023		Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
135.	Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2021	Terbentuknya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
136.	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022
137.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
138.	Perubahan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 421/ 113 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
139.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pekuweon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pekuweon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
140.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
141.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023	Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020	Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun 2023
142.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023		Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
143.	Pembentukan Tim Penanganan dan Pengendalian Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Dengan Pendekatan One Health di Kabupaten Kebumen	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Penanganan dan Pengendalian Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Dengan Pendekatan One Health di Kabupaten Kebumen
144.	Pembentukan Tim Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
145.	Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Penetapan 3 Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
146.	Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022	Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
147.	Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Masa Jabatan Tahun 2023-2028	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018	Terbentuknya Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Masa Jabatan Tahun 2023-2028
148.	Besaran Harga Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tambak Dinas, Lahan Pesisir dan Pasar Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Besaran Harga Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tambak Dinas, Lahan Pesisir dan Pasar Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen
149.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 240/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Penetapan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
150.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
151.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
152.	Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
153.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
154.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 41 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	Perubahan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kebumen
155.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
156.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 433 Tahun 2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Pusat Kesehatan Masyarakat
157.	Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama Handoyo/ CV. Trio Bumen Jaya Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012	Penetapan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Nama Handoyo/ CV. Trio Bumen Jaya Tahun 2023
158.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarel	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarel

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
159.	Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
160.	Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan, Strategi dan Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2028	Permennakertrans Nomor PER.16/MEN/XI/2010	Terbentuknya Tim Penyusun Kebijakan, Strategi dan Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2028
161.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 51 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan perubahan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
162.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah keada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah keada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor
163.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
164.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
165.	Penerima Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2023	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
166.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
167.	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012	Penetapan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
168.	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
169.	Pemenang Lomba Menyusun menu dan Makanan Sehat Sehari Bagi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Pemenang Lomba Menyusun menu dan Makanan Sehat Sehari Bagi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
170.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
171.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Sanitasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Sanitasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
172.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan I Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan I Tahun 2023
173.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Berupa Peralatan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Berupa Peralatan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2023		dan Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2023
174.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
175.	Penerima Anugerah Usaha Terbaik Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Penetapan Penerima Anugerah Usaha Terbaik Kabupaten Kebumen Tahun 2023
176.	Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013	Terbentuknya Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
177.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022	Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020	Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022
178.	Peta Binaan Rumah Sakit Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	Penetapan Peta Binaan Rumah Sakit Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kebumen
179.	Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
180.	Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
181.	Penunjukan Panitia Pelaksana pada Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022	Penetapan Panitia Pelaksana pada Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kebumen Tahun 2023
182.	Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
183.	Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Penetapan Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
184.	Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen
185.	Usulan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023	Penetapan Usulan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
186.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
187.	Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
188.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
189.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
190.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
191.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
192.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Periode Tahun 2019-2025
193.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
194.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
195.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
196.	Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengugna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengugna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
197.	Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
198.	Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Jalan untuk Parkir Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Jalan untuk Parkir Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen
199.	Penerima Hibah semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/ Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2022	Penetapan Penerima Hibah semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/ Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
200.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 317/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Penetapan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
201.	Peresmian Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa antar Waktu Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa antar Waktu Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
202.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
203.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
204.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
205.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
206.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
207.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
208.	Peresmian Anggota Bdan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Bdan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
209.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
210.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
211.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
212.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
213.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian,

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
214.	Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
215.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 103 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023	Penetapan perubahan Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Kebumen
216.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 159 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan perubahan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
217.	Pemenang Lomba Menyusun Menu dan Makanan Sehat Sehari Bagi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Pemenang Lomba Menyusun Menu dan Makanan Sehat Sehari Bagi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
218.	Pemberhentian Senin Yuwono, S.E. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Senin Yuwono, S.E. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
219.	Pengangkatan Imam Setyo Falidin, S.Pd. Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
220.	Pembentukan Pengelola Lumbung Sosial di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011	Terbentuknya Pengelola Lumbung Sosial di Kabupaten Kebumen
221.	Pembentukan Tim Kampung Siaga Bencana Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011	Terbentuknya Tim Kampung Siaga Bencana Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
222.	Pembentukan Tim Kampung Siaga Bencana Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011	Terbentuknya Tim Kampung Siaga Bencana Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
223.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 446 Tahun 2022 tentang Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
224.	Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Nama PT. Semen Gombong Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2019	Penetapan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Nama PT. Semen Gombong Tahun 2023
225.	Pemberhentian Kuswarini dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kuswarini dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
226.	Pengangkatan Hj. Sri Sulistyowati, S.H., M.Si. Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
227.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 413.3/ 210 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021	Penetapan perubahan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen
228.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Balada PAK-KIS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Surat Kemenpan RB Nomor : B/567/PP.02/2022	Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Balada PAK-KIS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
229.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Ketapel 17 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Surat Kemenpan RB Nomor : B/567/PP.02/2022	Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Ketapel 17 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
230.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kios Pelanduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Surat Kemenpan RB Nomor : B/567/PP.02/2022	Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kios Pelanduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
231.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
232.	Pengesahan Pengangkatan Arif Khamidi sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Arif Khamidi sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
233.	Pemberhentian Sutomo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Menganti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sutomo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Menganti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
234.	Pengangkatan Jumadi, S.M. Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Menganti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Menganti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
235.	Kontingen Kabupaten Kebumen pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI Tahun 2023 di Pati Raya	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015	Penetapan Kontingen Kabupaten Kebumen pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke XVI Tahun 2023 di Pati Raya
236.	Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-394	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2019	Penetapan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-394
237.	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 54 Tahun 2007	Terbentuknya Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kebumen
238.	Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pad Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pad Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
239.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 433 Tahun 2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		
240.	Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2022	Penetapan Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022
241.	Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Barang Milik Daerah berupa Jalan untuk Parkir Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Barang Milik Daerah berupa Jalan untuk Parkir Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen
242.	Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2013	Terbentuknya Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kebumen
243.	Pembentukan Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559	Terbentuknya Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023
244.	Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559	Penetapan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2023
245.	Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
246.	Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
247.	Penunjukan Pengawal dan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Pengawal dan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
248.	Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2017	Penetapan Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2023
249.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 342/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Penetapan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
250.	Pembentukan Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kebumen
251.	Pemberhentian Agus Rianto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Agus Rianto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
252.	Pengangkatan Trim Subagyo Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
253.	Pemberhentian Kasani dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen karen Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kasani dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen karen Meninggal Dunia
254.	Pengangkatan Lulut Subagyo, S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
255.	Pemberhentian Susanto, S.H. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Susanto, S.H. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
256.	Pengangkatan Sugiyanto, S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
257.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Grogolbeningsari	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Grogolbeningsari

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
258.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
259.	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045
260.	Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 55 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
261.	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indoensia dan Hari Jadi ke-394 Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indoensia dan Hari Jadi ke-394 Tahun 2023 Kabupaten Kebumen
262.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 823/ 302 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	Perubahan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
263.	Pemberhentian Sakirin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sakirin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
264.	Pengangkatan Tusianingsih, S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
265.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan II Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan II Tahun 2023
266.	Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 3 Tahun 2017	Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
267.	Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
268.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Desa Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
269.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
270.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
271.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
272.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 070/ 399 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	Perubahan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen
273.	Perubahan Keduabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
274.	Pembentukan Badan Pengelola Geopark Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2023	Terbentuknya Badan Pengelola Geopark Kebumen
275.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 363/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Penetapan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023
276.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2022	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
277.	Pemberhentian Harunurosid dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Harunurosid dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Ayamputih Kecamatan Buluspesantren		Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren
278.	Pengangkatan Parijo, S.Pd. Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren
279.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Sidayu Kecamatan Gombong dan sekolah Dasar Negeri 2 Sidayu Kecamatan Gombong menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Sidayu Kecamatan Gombong dan sekolah Dasar Negeri 2 Sidayu Kecamatan Gombong menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen
280.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Seboro Kecamatan Sadang dan Sekolah Dasar Negeri 2 Seboro Kecamatan Sadang menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Seboro Kecamatan Sadang dan Sekolah Dasar Negeri 2 Seboro Kecamatan Sadang menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
281.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Sempor Kecamatan Sempor dan Sekolah Dasar Negeri 3 Sempor Kecamatan Sempor menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Sempor Kecamatan Sempor dan Sekolah Dasar Negeri 3 Sempor Kecamatan Sempor menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
282.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 3 Jatinegara Kecamatan Sempor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatinegara Sempor menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 3 Jatinegara Kecamatan Sempor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatinegara Sempor menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
283.	Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kebumen
284.	Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen dengan Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Gombong	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen dengan Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Gombong
285.	Pembentukan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020	Terbentuknya Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
286.	Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019	Penetapan Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023		Publik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
287.	Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020	Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
288.	Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021	Terbentuknya Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen
289.	Pembentukan Tim Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
290.	Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
291.	Pembentukan Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022
292.	Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019	Terbentuknya Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2023
293.	Pengesahan Pengangkatan Misbakhul Munir sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Misbakhul Munir sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
294.	Inovasi Pusat Layanan Karir Bergerak "PATRIOT" pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Inovasi Pusat Layanan Karir Bergerak "PATRIOT" pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
295.	Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
296.	Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020	Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
297.	Pemberhentian Faiq Hasan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Faiq Hasan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
298.	Pengangkatan Susiyanto, S.E. Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen		
299.	Pemberhentian Achmad Bahrun, S.H. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Achmad Bahrun, S.H. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
300.	Pengangkatan Chabib Nasrudin, S.ST., M.PS.Sp Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
301.	Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
302.	Juara Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Penetapan Juara Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2023
303.	Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019	Penetapan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
304.	Pembentukan Tim Penyusun Analis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabuapten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Analis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabuapten Kebumen Tahun Anggaran 2024
305.	Pemberhentian Tasrip dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Tasrip dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
306.	Pengangkatan Turiman, S.H. Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen
307.	Pemberhentian Moh. Asad Saeful Umam dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Moh. Asad Saeful Umam dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
308.	Pengangkatan Khanifudin Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kebumen Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penatapan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sumberadi Kecamatan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		Kebumen Kabupaten Kebumen
309.	Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
310.	Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat Pemerintah Kabupaten Kebumen
311.	Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendagri Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen Tahun 2023
312.	Penobatan Bunda Literasi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020	Penetapan Penobatan Bunda Literasi di Kabupaten Kebumen
313.	Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
314.	Pembentukan Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Kebumen	SE Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 25/SE/DC/2023	Terbentuknya Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Kebumen
315.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa dan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa dan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen
316.	Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kebumen	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006	Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kebumen
317.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
318.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antara Waktu Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antara Waktu Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
319.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Peridoe Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Peridoe Tahun 2019-2025
320.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
321.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
322.	Peresmian Pemberhentia Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentia Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
323.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
324.	Pembentukan Panitia Kejuaraan Antar Kampung Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 di Kabupaten Kebumen	Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Nomor BO.00/8.10.12/ III/VIII/2023	Terbentuknya Panitia Kejuaraan Antar Kampung Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 di Kabupaten Kebumen
325.	Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017	Terbentuknya Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045
326.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
327.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
328.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
329.	Pemberhentian Rokhmanudin, S.Ag. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Rokhmanudin, S.Ag. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
330.	Pengangkatan Wasiman Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
331.	Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018	Penetapan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
332.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sutrisno, S.Sos.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
333.	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2023
334.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
335.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
336.	Peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
337.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
338.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
339.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
340.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
341.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
342.	Pemberhentian Yahudi Anifudin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Yahudi Anifudin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
343.	Pengangkatan Marsum Jabatan Pengadministrasi Keuangan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
344.	Pembentukan Tim Verifikasi Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Verifikasi Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
345.	Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2023	Penetapan Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
346.	Pembentukan Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
347.	Pemberhentian Munarso dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen karen Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Munarso dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen karen Permintaan Sendiri

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
348.	Pengangkatan Daroji, S.Pd., M.Pd. Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
349.	Pembentukan Panitia seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2021	Terbentuknya Panitia seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
350.	Perubahan Keempatbelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabuapten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
351.	Perubahan Kelimabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
352.	Perubahan Keenambelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
353.	Perubahan Ketujuhbelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		
354.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022	Kepmenpan RB Nomor 571 Tahun 2023	Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022
355.	Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2023-2026	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017	Terbentuknya Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2023-2026
356.	Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
357.	Perubahan Kedelapan belas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
358.	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 470/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
359.	Pembentukan Tim Transformasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Transformasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
360.	Pembentukan Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	Terbentuknya Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Kebumen
361.	Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	Terbentuknya Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Kebumen
362.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 823/ 302 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019	Perubahan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
363.	Rekening Dana Bantuan Kebencanaan Corporate Social Responbility pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Rekening Dana Bantuan Kebencanaan Corporate Social Responbility pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2023		Kebumen Tahun Anggaran 2023
364.	Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2023/ 2024	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009	Penetapan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2023/ 2024
365.	Pilot Project Pembangunan Desa Cerdas di Kabupaten Kebumen	SE Bupati Kebumen Nomor 400.10.3.4/4226	Penetapan Pilot Project Pembangunan Desa Cerdas di Kabupaten Kebumen
366.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9/ 146 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
367.	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020	Terbentuknya Panitia Seleksi Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen
368.	Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Lari Kebumen Beach Marathon Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022	Terbentuknya Panitia Penyelenggara Lomba Lari Kebumen Beach Marathon Tahun 2023
369.	Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019	Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023
370.	Pemberhentian Mochamad Chanif dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Mochamad Chanif dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Permintaan Sendiri
371.	Pengangkatan Rumadi, S.E. Jabatan Sekretaris Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
372.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 59 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
373.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 58 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
374.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		
375.	Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Penetapan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
376.	Peta Binaan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021	Penetapan Peta Binaan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen
377.	Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan III Tahun 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Triwulan III Tahun 2023
378.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
379.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
380.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 159 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga uang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga uang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
381.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
382.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
383.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 463/ 95 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
384.	Calon Transmigran Tahap Kedua Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2017	Penetapan Calon Transmigran Tahap Kedua Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2023
385.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
386.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
387.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.6.1/ 158 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Penetapan perubahan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
388.	Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Objek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Objek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
389.	Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahu 2024 di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahu 2024 di Kabupaten Kebumen
390.	Pemberhentian Tursino, S.H. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Tursino, S.H. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
391.	Pemberhentian Paryoto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Paryoto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
392.	Pemberhentian Musitah dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Rogodono Kecamatan Buayan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Musitah dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Rogodono Kecamatan Buayan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
393.	Pemberhentian Daryadi dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Daryadi dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jatiroto Kecamatan Buayan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen karena Masa Jabatannya		Kabupaten Kebumen karena Masa Jabatannya
394.	Pemberhentian Sakun dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sakun dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
395.	Pemberhentian Sumaji dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sumaji dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
396.	Pemberhentian Puji Rohwatin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Puji Rohwatin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
397.	Pemberhentian Istiyatun, S.S. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Istiyatun, S.S. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
398.	Pemberhentian Nur Suprapti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Nur Suprapti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
399.	Pemberhentian Tasino dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Tasino dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
400.	Pemberhentian Khamid dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Khamid dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
401.	Pemberhentian Tri Budi Wahono,S.T. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Tri Budi Wahono,S.T. Dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
402.	Pemberhentian Jumiran dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Jumiran dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
403.	Pemberhentian Sadat Purnomo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sadat Purnomo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya		Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
404.	Pemberhentian Sunarto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sunarto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
405.	Pemberhentian Prayogi Yuli Purbowo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Prayogi Yuli Purbowo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
406.	Pemberhentian Sodikul Anwar dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sodikul Anwar dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
407.	Pemberhentian Mohamad Muhdor dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Mohamad Muhdor dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
408.	Pemberhentian Fahmi Huda,S.Sos. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Fahmi Huda,S.Sos. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
409.	Pemberhentian Wahidun Kusniyanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Wahidun Kusniyanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
410.	Pemberhentian Paeri dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tlogowulung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Paeri dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tlogowulung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
411.	Pemberhentian Mohamad Agus Setiyo Budi dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Mohamad Agus Setiyo Budi dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
412.	Pemberhentian Muslichudin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Muslichudin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
413.	Pemberhentian Khojin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Khojin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya		Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
414.	Pemberhentian Eni Budiwati dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Eni Budiwati dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
415.	Pemberhentian Suparno dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Suparno dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
416.	Pemberhentian Urip Widodo, S.Sy. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Urip Widodo, S.Sy. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
417.	Pemberhentian Agus Sujoko, B.A. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Agus Sujoko, B.A. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
418.	Pemberhentian Riyanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Riyanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
419.	Pemberhentian Supyan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Donosari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Supyan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Donosari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
420.	Pemberhentian Suparti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Suparti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
421.	Pemberhentian Budiono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Budiono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
422.	Pemberhentian Abdul Hakim Kudus dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Abdul Hakim Kudus dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
423.	Pemberhentian Drs. Sutrisno dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Drs. Sutrisno dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya		
424.	Pemberhentian Ngadiyo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Ngadiyo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
425.	Pemberhentian Purwanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Purwanto dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
426.	Pemberhentian Wikan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Wikan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
427.	Pemberhentian Sofingi,S.Pd.I dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Sofingi,S.Pd.I dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
428.	Pemberhentian Admin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Admin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
429.	Pemberhentian Ardi Abdul Mu'adz dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Ardi Abdul Mu'adz dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
430.	Pemberhentian Hermansah dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Binangun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Hermansah dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Binangun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
431.	Pemberhentian Agus Mulyono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Agus Mulyono dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
432.	Pemberhentian Tugino Setyo Raharjo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Tugino Setyo Raharjo dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya
433.	Pemberhentian Edi Muhajirin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Totogan Kecamatan Karangsambung Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Edi Muhajirin dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Totogan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen karena Berakhir Masa Jabatannya		
434.	Pengesahan Pengangkatan Samijo sebagai Kepala Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Samijo sebagai Kepala Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
435.	Pengesahan Pengangkatan Paryoto sebagai Kepala Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Paryoto sebagai Kepala Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
436.	Pengesahan Pengangkatan Musitah sebagai Kepala Desa Rogodono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Musitah sebagai Kepala Desa Rogodono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
437.	Pengesahan Pengangkatan Jamaludin sebagai Kepala Desa Nogorari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Jamaludin sebagai Kepala Desa Nogorari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
438.	Pengesahan Pengangkatan Sarijo sebagai Kepala Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sarijo sebagai Kepala Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
439.	Pengesahan Pengangkatan Hadi Waluyo sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Hadi Waluyo sebagai Kepala Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen
440.	Pengesahan Pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
441.	Pengesahan Pengangkatan Muhlisin sebagai Kepala Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Muhlisin sebagai Kepala Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
442.	Pengesahan Pengangkatan Khamid sebagai Kepala Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Khamid sebagai Kepala Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
443.	Pengesahan Pengangkatan Moh. Baequni,S.Pt sebagai Kepala Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Moh. Baequni,S.Pt sebagai Kepala Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
444.	Pengesahan Pengangkatan Sunarto sebagai Kepala Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sunarto sebagai Kepala Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen
445.	Pengesahan Pengangkatan Khamid sebagai Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Khamid sebagai Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
446.	Pengesahan Pengangkatan Saodi sebagai Kepala Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Saodi sebagai Kepala Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen
447.	Pengesahan Pengangkatan Tri Budi Wahono, S.T. Sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Tri Budi Wahono, S.T. Sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen
448.	Pengesahan Pengangkatan Jatmiko Aji, S.H. Sebagai Kepala Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Jatmiko Aji, S.H. Sebagai Kepala Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
449.	Pengesahan Pengangkatan Sunarto sebagai Kepala Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sunarto sebagai Kepala Desa Sidogede Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
450.	Pengesahan Pengangkatan Puji Bambang Sekdanarko sebagai Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Puji Bambang Sekdanarko sebagai Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
451.	Pengesahan Pengangkatan Sodikul Anwar sebagai Kepala Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sodikul Anwar sebagai Kepala Desa Mulyosri Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
452.	Pengesahan Pengangkatan Mohammad Fatkhurokhim sebagai Kepala Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Mohammad Fatkhurokhim sebagai Kepala Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen
453.	Pengesahan Pengangkatan Fahmi Huda, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Fahmi Huda, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen
454.	Pengesahan Pengangkatan Turyono sebagai Kepala Desa Tlogowulung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Turyono sebagai Kepala Desa Tlogowulung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
455.	Pengesahan Pengangkatan Nurchamid sebagai Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Nurchamid sebagai Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
456.	Pengesahan Pengangkatan Nurhabib sebagai Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Nurhabib sebagai Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
457.	Pengesahan Pengangkatan Muhamad Khusni Mubarok sebagai Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Muhamad Khusni Mubarok sebagai Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
458.	Pengesahan Pengangkatan Zaenal Muttaqin sebagai Kepala Desa Tanahsari	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Zaenal Muttaqin sebagai Kepala

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen		Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
459.	Pengesahan Pengangkatan Setiawan sebagai Kepala Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Setiawan sebagai Kepala Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
460.	Pengesahan Pengangkatan Sugiyanto sebagai Kepala Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sugiyanto sebagai Kepala Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
461.	Pengesahan Pengangkatan Asror Muhlisin sebagai Kepala Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Asror Muhlisin sebagai Kepala Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
462.	Pengesahan Pengangkatan Yanti sebagai Kepala Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Yanti sebagai Kepala Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
463.	Pengesahan Pengangkatan Suparno sebagai Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Suparno sebagai Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
464.	Pengesahan Pengangkatan Akhmad Mujamil Mustofa, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Akhmad Mujamil Mustofa, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
465.	Pengesahan Pengangkatan Dwi Ari Sunarko sebagai Kepala Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Dwi Ari Sunarko sebagai Kepala Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen
466.	Pengesahan Pengangkatan Maryono sebagai Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Maryono sebagai Kepala Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
467.	Pengesahan Pengangkatan Budiono sebagai Kepala Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Budiono sebagai Kepala Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
468.	Pengesahan Pengangkatan Supyan sebagai Kepala Desa Donosari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Supyan sebagai Kepala Desa Donosari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
469.	Pengesahan Pengangkatan Riyanto sebagai Kepala Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Riyanto sebagai Kepala Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
470.	Pengesahan Pengangkatan Abdul Hakim Kudus sebagai	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Abdul Hakim Kudus sebagai Kepala Desa

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kepala Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan		Mangli Kecamatan Kuwarasan
471.	Pengesahan Pengangkatan Sodikin sebagai Kepala Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sodikin sebagai Kepala Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
472.	Pengesahan Pengangkatan Singgih Bayu Pamungkas sebagai Kepala Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Singgih Bayu Pamungkas sebagai Kepala Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
473.	Pengesahan Pengangkatan Purwanto sebagai Kepala Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Purwanto sebagai Kepala Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
474.	Pengesahan Pengangkatan Sukirno, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sukirno, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
475.	Pengesahan Pengangkatan Misrun sebagai Kepala Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Misrun sebagai Kepala Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
476.	Pengesahan Pengangkatan Admin sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Admin sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
477.	Pengesahan Pengangkatan Joko Setiyono sebagai Kepala Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Joko Setiyono sebagai Kepala Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen
478.	Pengesahan Pengangkatan Hermansyah seabagai Kepala Desa Binangun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Hermansyah seabagai Kepala Desa Binangun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
479.	Pengesahan Pengangkatan Sadat Purnomo, S.Si. Sebagai Kepala Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sadat Purnomo, S.Si. Sebagai Kepala Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
480.	Pengesahan Pengangkatan Edi Muhajirin sebagai Kepala Desa Totogan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Edi Muhajirin sebagai Kepala Desa Totogan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen
481.	Pengesahan Pengangkatan Sangidun sebagai Kepala Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sangidun sebagai Kepala Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen
482.	Pengesahan Pengangkatan Lukman Hakim sebagai Kepala Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Lukman Hakim sebagai Kepala Desa Kaligending Kecamatan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Karangsambung Kabupaten Kebumen
483.	Perubahan Kesembilan Belas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
484.	Perubahan Kedua puluh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
485.	Perubahan Kedua puluh satu atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
486.	Penunjukan Lembaga Profesional yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2021	Penetapan Lembaga Profesional yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen
487.	Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/ 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 552/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dam Pemilihan Umum Tahun 2024
488.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.1/ 199 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/ Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Perdesaan/ Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		
489.	Perubahan Kedua puluh dua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
490.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 450/ 92 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Besifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Besifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
491.	Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2019	Penetapan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
492.	Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2023/ 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2023/2024
493.	Pemberhentian Subiani dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Subiani dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen karena Meninggal Dunia
494.	Pengangkatan Suhartoyo, S.E. Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
495.	Pengesahan Pengangkatan Supono sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Menganti Kecamaran Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Supono sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Menganti Kecamaran Sruweng Kabupaten Kebumen
496.	Pengesahan Pengangkatan Paimin sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Paimin sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
497.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2022	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
498.	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Kebumen
499.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 973 / 379 Tahun 2022 tentang Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
500.	Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan gedung Negara di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022	Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan gedung Negara di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
501.	Perubahan Keduapuluh Tiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
502.	Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Operasional Penyelenggaraan Event/ Festival kepada Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 55 Tahun 2022	Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Operasional Penyelenggaraan Event/ Festival kepada Desa di Kabupaten Kebumen
503.	Tarif Air Minum dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2020	Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Tahun 2024
504.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 421/ 113 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
505.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
506.	Pasar Pagi Kebumen sebagai Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018	Penetapan Pasar Pagi Kebumen sebagai Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen
507.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 823/ 302 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019	Perubahan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
508.	Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	Penetapan Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
509.	Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/ 434 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2023
510.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10.1/ 260 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
511.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.2.1/ 174 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
512.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 40 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
513.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
514.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiroto Kecamatan Buayan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiroto

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
515.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2023	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
516.	Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 443 Tahun 2022 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet, Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet, Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2023
517.	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya yang Diperbantukan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendikbud Ristek Nomor 36 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya yang Diperbantukan Kabupaten Kebumen Tahun 2023
518.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.3.5.6/ 326 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
519.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/ 49 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penjual/Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Perubahan Pejabat Penjual/Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
520.	Perubahan Kedua puluh empat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
521.	Perubahan Kedua puluh lima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 432 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023		Kebumen Tahun Anggaran 2023
522.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Aditya Wahyu Indra Cahya	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
523.	Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2028	Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989	Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2028
524.	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 450/ 92 Tahun 2023 tentang Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
525.	Status Bangunan Masjid Jami' Saka Tunggal Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sebagai Bangunan Cagar Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Penetapan Status Bangunan Masjid Jami' Saka Tunggal Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sebagai Bangunan Cagar Budaya
526.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/ 426 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023	Permendagri Nomor 19 Tahun 2023	Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
527.	Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 615/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
528.	Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022	Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
529.	Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
530.	Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
531.	Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
532.	Pembentukan Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2023/2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014	Terbentuknya Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2023/2024
533.	Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018	Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
534.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Permendagri Nomor 19 Tahun 2023	Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
535.	Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
536.	Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 270/20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Surat Ketua KPU Kabupaten Kebumen Nomor 656/PP.04.1-SD/ 3305/2023	Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
537.	Pengesahan Pengangkatan Drs. Frans Haidar, MPA sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen untuk Masa Jabatan Tahun 2023-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020	Penetapan Pengesahan Pengangkatan Drs. Frans Haidar, MPA sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen untuk Masa Jabatan Tahun 2023-2027
538.	Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
539.	Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2024
540.	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Kalirejo Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/05.140/1/ 2010	Penetapan Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Kalirejo Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
541.	Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	Penetapan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024
542.	Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan	Permendagri Nomor 47 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Peneliti Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan
543.	Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006	Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten
544.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
545.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
546.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Puliharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Puliharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
547.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Puliharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Puliharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
548.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
549.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
550.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
551.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
552.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
553.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
554.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
555.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
556.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalipoh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalipoh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
557.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalipoh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalipoh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
558.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
559.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalijering Kecamatan Padureso	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalijering Kecamatan Padureso

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025		Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
560.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
561.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2025
562.	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Gombong Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/05.140/1/ 2010	Penetapan Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Gombong Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
563.	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) Gombong Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/05.140/1/ 2010	Penetapan Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) Gombong Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen

3.2.1 Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian atau pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Kebumen merupakan proses dimana pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja, aktivitas ekonomi dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah Kebumen. Perekonomian Kabupaten Kebumen merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional provinsi Jawa Tengah, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah Kabupaten Kebumen atau sebaliknya.

Perekonomian Kabupaten Kebumen merupakan sub atau bagian dari perekonomian Jawa Tengah secara regional dan Indonesia secara nasional, dengan perkembangan yang dinamis menyesuaikan kondisi perekonomian regional, nasional bahkan internasional di beberapa sektor tertentu. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global. Ekspansi dan kontraksi yang terjadi pada perekonomian nasional berimbas terhadap perekonomian di daerah termasuk di Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan

bahwa perihal ekonomi sangat berhubungan dan memiliki indikasi saling mempengaruhi dalam situasi perekonomian dunia yang sangat terbuka.

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Inflasi juga mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Sedangkan, ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010, secara umum mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 35.763.804,43 juta rupiah dengan kontribusi dari kategori Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 22,24 persen dan 20,03 persen. Menurut perhitungan, pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Kebumen memiliki PDRB per kapita sebesar 25.750,07 ribu rupiah. Pada tahun 2023, berdasarkan angka laju pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 5,66 persen.

Tabel 3. 142 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2023

NO	Indikator	2021	2022	2023
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	29.563,14	32.614, 64	35.763,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,71	5,79	5,66
3	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	21,82	23,78	25,75

Tingkat inflasi Kabupaten Kebumen tahun kalender 2023 sebesar 2,89 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,89 persen. Nilai tersebur dari nilai laju inflasi harga konsumen Jawa Tengah (tahun dasar = 2018) *Year-on-Year* sebesar 2,89. Nilai laju inflasi *Year-on-Year* Jawa Tengah tersebut lebih tinggi dari nilai laju inflasi *Year-on-Year* Indonesia yaitu sebesar 2,61. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks beberapa kelompok pengeluaran. Informasi inflasi menjadi tolok ukur stabilitas perekonomian daerah. Pada Desember 2023, gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,62. Kabupaten Kebumen IHK mengikuti (*sister city*) kota terdekat yakni Kota Cilacap inflasi sebesar 0,18 persen dengan IHK sebesar 116,49. Indek Perkembangan Harga (IPH) Kab. Kebumen berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun 2023 yang disumbang oleh Komoditas Beras, Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah dan Gula Pasir.

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras. Peningkatan harga komoditas pangan menyebabkan peningkatan garis kemiskinan. Tren garis kemiskinan Kab Kebumen lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten tetangga.

Pengendalian harga pangan yang simultan dengan peningkatan pendapatan menjadi salah satu program prioritas penangulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, sektor pertanian masih menjadi menyumbang 3 besar PDRB Kebumen selama lima tahun terakhir. Untuk mendukung pengendalian inflasi pangan, meningkatkan nilai tukar petani serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen, telah diinisiasi pendirian BUMD Pangan (PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya) yang telah beroperasional sejak Februari 2023. Program Pengendalian Harga Pangan tersebut mendukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan merupakan program prioritas kolaboratif yang mengintegrasikan hulu hilir pertanian dan distribusi barang yang bertujuan untuk Pengendalian Harga Pangan untuk menjaga stabilitas inflasi dan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan pengendalian inflasi di daerah melalui perluasan kerjasama antar daerah untuk penyediaan komoditas pangan penyumbang inflasi, melibatkan partisipasi aktif dari desa dalam pengendalian inflasi menggunakan dana desa untuk penyelenggaraan pasar murah dan gerakan tanam cabai serentak, melakukan kerjasama dengan satgas pangan dalam pengawasan penjualan beras dan sidak berkala ke pedagang besar, menyusun database arus barang, dengan membangun sistem logistik daerah, bekerjasama dengan swasta, pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan pasar murah serta alokasi anggaran APBD Kabupaten untuk subsidi harga konsumen.

Optimalisasi peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) melalui penguatan kapasitas kelembagaan, serta kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait lintas sector dalam upaya pengendalian inflasi dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, menjaga daya beli masyarakat dan komunikasi efektif.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis permasalahan daerah merupakan permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023, antara lain:

1. Profesionalisme Aparatur
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
3. Pengembangan Perekonomian Daerah
4. Pembenahan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi
5. Peningkatan Kondusifitas Wilayah

3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan prioritas:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya:
    a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
    b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik;
    c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
    a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
    b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
    a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
    b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;

c. Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan;
d. Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
   a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
   b. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
   c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
   d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi;
   e. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
5. Peningkatan kondusifitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
   a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
   b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
   c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

3.2.4 Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur kelembagaan inovasi daerah; sumber daya inovasi daerah; dan jaringan inovasi daerah. Secara kelembagaan diampu oleh bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen. Kegiatan penelitian dan pengembangan termasuk fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi daerah antara lain berupa pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaringan invensi dan inovasi masyarakat, koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pada lingkup pemerintah daerah. Penguatan jejaring kelitbangan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan juga dilakukan dalam rangka mendukung penyusunan kebikan berbasis riset. Hilirisasi hasil-hasil invensi dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian dilaksanakan dalam rangka penyampaian hasil dan meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan. Upaya perlindungan kekayaan intelektual diinisiasi melalui fasilitasi pengajuan hak cipta bagi inventor.

Penyelenggaraan inovasi daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi daerah dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang ada. Langkah-langkah kolaboratif dengan meningkatkan sinergitas dengan semua stakeholder terkait, terus dilakukan dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Program Pemanfaatan Pekarangan Lestari "Kebun Kita Agrismart"

Inovasi ini dilaksanakan dengan melakukan pendekatan membumikan pemanfaatan pekarangan. Inovasi ini sekaligus mendukung penanganan rawan pangan dan penanggulangan *stunting* serta mendukung penganekaragaman pangan. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap ketahanan pangan keluarga juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 526/259/2021 tentang Gerakan Optimalisasi Lahan Pekarangan. Salah satu wujud inovasi pemanfaatan pekarangan adalah AgriSMART yang bertempat di komplek Pendopo Bupati Kebumen sebagai percontohan. Selanjutnya tim Agrismart yang didukung oleh para penyuluh pertanian dan peternakan di 26 kecamatan siap memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah. Kebun kita dapat dijadikan contoh sebagai bentuk pemanfaatan pekarangan dengan berbagai komoditas dan teknologi seperti konsep integrated farming yang mengintegrasikan sub sektor pertanian tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya dan peningkatan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu konsep Agrismart juga dapat menjadi wahana wisata edukasi bagi anak untuk mengajarkan tentang dunia pertanian, serta dapat dijadikan tempat pelatihan teknologi pertanian sederhana dan murah. Disisi lain konsep Agrismart juga mengedepankan estetika dan hasil dari pemanfaatan pekarangan bagi peningkatan gizi keluarga sehingga mendukung penanganan rawan pangan dan penanggulangan stunting serta mendukung penganekaragaman pangan yang sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu TANI MULYO.

2. Pengembangan Agrobisnis Melalui *Corporate Farming*

Pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, namun sektor ini belum mampu menjadi sektor andalan dalam mensejahterakan masyarakat khususnya penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Sebagian besar masyarakat miskin Kabupaten Kebumen adalah petani. Beberapa permasalahan yang melingkupi sektor pertanian antara lain masalah SDM petani, kurangnya skala usaha sehingga tidak memenuhi skala ekonomis, kurangnya produktivitas, dan rendahnya nilai tambah produk pertanian. Selain itu kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain dengan pengembangan pertanian untuk mendorong pengelolaan usaha pertanian secara kolektif melalui *corporate farming*. *Corporate farming* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan

manajemen. Melalui *corporate farming* para petani dengan kondisi kepemilikan lahan yang terbatas dapat berkonsolidasi dengan petani lainnya dalam pola manajemen yang lebih baik guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Adapun pelaksana pengelolaan *corporate farming* melalui Gabungan Kelompok Tani. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 *corporate farming* telah dirintis di 18 desa pada 18 kecamatan dengan luasan 5 Ha pada masing-masing lokasi dan direncanakan akan dilanjutkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

3. Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran, Keluarga dan Masyarakat melalui "SIPEMIKAT"

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran Kabupaten Kebumen sebesar 5,9% pada tahun 2022 dengan total pencari kerja yang tercatat sebesar 13.620 orang tetapi jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sebesar 11.317, dan disisi lain potensi produksi tenaga kerja lulusan SMA/SMK yang berkompetisi mencari pekerjaan berjumlah sekitar 15.000 per tahun. Kondisi ini menjadikan sebagian tenaga kerja di Kabupaten Kebumen memilih bekerja sebagai pekerja migran atau bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang ditempatkan selama tiga tahun terakhir sebesar 3.358 orang. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan terkait pekerja migran. Setidaknya terdapat 18 kasus pada Tahun 2023 yang ditangani Balai Pelayanan Plindungan PMI (BP3MI).

Upaya peningkatan perlindungan pada PMI Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen membangun sistem kolaborasi yang terintegrasi atau "SIPEMIKAT" SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. Inovasi ini bertujuan agar upaya pelindungan PMI lebih komprehensif merupakan sinergi pentahelix berkomitmen untuk memaksimalkan upaya pelindungan serta pemberdayaan PMI. Dalam pelaksanaanya terdapat pilar SIPEMIKAT sebagai pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi Calon PMI, PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini melibatkan stakeholder seperti perangkat daerah terkait seperti Disdukcapil, dinas kesehatan, dan melibatkan instansi vertical seperti imigrasi, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI, serta pengadilan agama.

Hingga saat ini telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 272 Perdes dan 337 database calon PMI, PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen. SIPEMIKAT, Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat bertujuan upaya pelindungan PMI lebih

komprehensif, terbit peraturan desa, replikasi Desa Migran Produktif di 26 kecamatan, terbangun database PMI pada semua desa/kelurahan, pelibatan PMI dan keluarganya dalam kegiatan pembangunan dengan anggaran desa, community parenting untuk anak PMI yang ditinggalkan, serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

4. Inovasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK)

Awalnya pemantauan harga kebutuhan pokok dilaksanakan dengan cara petugas datang ke pasar dan menanyakan harga komoditi ke pokmas, kemudian dicatat dan direkap, lalu kembali lagi ke kantor dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada pimpinan. Hal ini merupakan kendala yang besar bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yakni terkait dengan lamanya waktu pemantauan, keterbatasan SDM yang mengakibatkan hanya dapat memantau 2 Pasar saja, lamanya penyusunan laporan, penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, masyarakat sulit memperoleh informasi dan sulitnya melihat perkembangan harga guna memprediksi permasalahan yang dihadapi.

Dari permasalahan itu kemudian dibuatlah Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK) dalam bentuk website www.simbok.kebumenkab.go.id, aplikasi smartphone android berupa SIMBOK Kebumen dan aplikasi SIMBOK Petugas. Simbok Petugas digunakan oleh petugas untuk melakukan input data dengan SmartPhone android guna memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan. Data tersebut secara otomatis terkirim ke system yang ada di Website SIMBOK untuk diolah.

Dalam website SIMBOK kemudian data-data harga dari masing-masing pasar tersebut tersajikan secara realtime dan memberikan sajian data dalam bentuk yang menarik dan mudah digunakan seperti dalam bentuk tabel harga per-pasar, per-hari, per-minggu, per-bulan, per-tahun, dalam bentuk grafik perubahan harga tiap komoditi, perbandingan harga komoditi antara pasar satu dengan pasar lainnya dan pengguna juga dapat mendownload data tersebut dalam bentuk format pdf dan exel. Memberikan informasi akurat, cepat dan berkualitas terkait perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) secara periodik guna mengetahui kenaikan atau penurunan harga barang diluar harga normal.

Dengan inovasi teknologi informasi SIMBOK, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar rakyat di wilayah kabupaten kebumen dapat terpantau secara realtime setiap pagi dan dapat diakses oleh seluruh OPD, stakeholder dan masyarakat umum, juga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2022 adanya pengembangan pada aplilkasi SIMBOK pada menu home untuk informasi harga dengan *Early Warning System* dimana pengguna bisa mengetahui naik atau turunnya harga suatu komoditas dan memantau harga komoditas yang disajikan dalam bentuk statistik per pasar dan statistik per komoditas. Pada tahun 2023, aplikasi SIMBOK mengalami pembaharuan tampilan berupa SIMBOK mobile yang langsung bisa di download di website dan perbandingan harga pasar per pasar. Website SIMBOK juga telah diintegrasikan dengan website lain antara lain blonjo.kebumenkab.go.id, corona.kebumenkab.go.id dan skm.kebumenkab.go.id

5. PUSKESOS "Rumah Harapan"

Merupakan inovasi yang diinisasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Dilatarbelakangi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) RUMAH HARAPAN dan pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Sosial Republik Indonesia berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) RUMAH HARAPAN. Fungsi dari PUSKESOS RUMAH HARAPAN adalah sebagai media / wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk berkonsultasi, menyampaikan aduan berkaitan dengan kemiskinan serta memberikan informasi tentang program perlindungan sosial.Terdapat 10 Layanan yang disediakan yaitu : (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi Pelayanan Jamkesda, (5) Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako, (6) Rekomendasi adopsi anak, (7) Rehabilitasi PGOT dan ODGJ, (8) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS, (10) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA). Dalam penyelenggaraan PUSKESOS RUMAH HARAPAN, Dinsos P3A Kabupaten Kebumen berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, BUMN dan Swasta. Saat ini sudah direplikasi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) PUSKESOS RUMAH HARAPAN di tingkat desa Kabupaten Kebumen

Pada tahun 2023, Inovasi ini mempunyai suatu kebaruan yaitu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SI RAMAH) yang sudah terhubung dengan aplikasi DESA ONLINE. SI RAMAH dilengkapi dengan *manual book* dan video tutorial yang dapat di akses pada website Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen https://dinsosp3a.kebumenkab.go.id.

Layanan sosial yang dapat dimanfaatkaan dalam menu SI RAMAH pada aplikasi DESA ONLINE meliputi usulan rekomendasi KIS APBD, rekomendasi Baznas dan ID DTKS sebagai pengingat pada operator SIKS-NG agar diusulkan secara paralel untuk mendapatkan KIS APBN. Masyarakat cukup hadir ke Balai Desa dengan membawa data diri meliputi foto-foto KK, KTP, rumah tampak depan, foto ruang tamu, foto dapur, foto kamar mandi dan foto selfi.

6. Inovasi Penataan Ruang Terbuka Publik Sebagai Bagian Dari Pengembangan Pusat Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif

Berawal dari belum optimalnya penyediaan ruang terbuka publik untuk melakukan berbagai aktivitas berupa olahraga, hiburan, kesenian, sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan serta belum optimalnya pusat ekonomi berkelanjutan yang dapat diandalkan sebagai bagian dari upaya akselerasi perekonomian, maka Pemda Kabupaten Kebumen melakukan sebuah terobosan baru yaitu dengan melakukan inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi yang dilakukan adalah melalui revitalisasi dan penataan ulang infrastruktur ruang terbuka publik yang ada sehingga tetap mampu berperan sebagai ruang terbuka publik yang inklusif, sekaligus memperluas fungsi sebagai sarana berbagai aktivitas seperti olahraga, kesenian, ekonomi serta sosial budaya

Inovasi ini dilaksanakan di Koridor Perkotaan Kebumen, Moro Soetta di sepanjang ruas Jalan Soekarno - Hatta yang dulunya disebut Jalan Pahlawan, hingga Jalan Merdeka di seputaran Alun-alun Kebumen, dilanjutkan sepanjang Jalan Sutoyo hingga terhubung ruas Jalan Kusuma yang berada di pusat perkotaan Kebumen yang mempunyai nilai fungsi dan aksesibititas sosial ekonomi yang tinggi sebagai poros pertumbuhan ekonomi.

Kondisi sebelum dilakukan revitalisasi infrastruktur, koridor perkotaan Kebumen kurang representatif keberadaannya, ruas jalan tersebut belum mampu mewadahi perkembangan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Permasalahan yang timbul diantaranya drainase yang kurang lancar sehingga terjadi genangan pada waktu hujan, parkir di kedua bahu jalan, pergerakan transportasi lambat, spesifikasi trotoar yang kurang nyaman sebagai pedestrian, banyaknya PKL serta ruang terbuka hijau (RTH) yang terbatas.

Inovasi ini berupaya menawarkan sudut pandang baru kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang publik. Masyarakat yang selama ini memiliki kebutuhan terhadap ruang dan menuntut akan pemenuhannya (pusat aktivitas masyarakat dan gedung kesenian) ditawarkan dengan konsep pemanfaatan ruang publik terbuka untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut. Caranya

adalah dengan mengubah bentuk, desain, tampilan dan peruntukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan akan ruang publik yang ada.

Inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melibatkan beberapa perangkat deerah dengan jenis kegiatan berupa pembangunan Drainase Pengendalian banjir/genangan air di wilayah pasar Tumenggungan dan sekitarnya, pembangunan sarana perdagangan induk yang representative dan integrative (Pasar Pagi), pembangunan ruang publik terbuka yang inklusif dan multi fungsi yang mampu mendorong berbagai aktivitas mayarakat (rehabilitasi Alun alun dan pembangunan Pusat Kuliner "Kapal Mendoan" (Mangan Enak karo Dolan), pembangunan aksesibilitas ruang publik terbuka yang berkualitas (revitalisasi jalan).

7. MIE KERITING (Makanan Instan cEgah KERdil dan stunTING)

Merupakan inovasi yang diusung oleh Kabupaten Kebumen melalui UPTD Puskesmas Kebumen 2. Sebagai salah satu upaya mewujudkan Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Kebumen, Puskesmas Kebumen II berhasil menciptakan sebuah inovasi di bidang pangan yaitu "MIE KERITING". Inovasi ini muncul dengan adanya prevalensi angka stunting yang cukup tinggi. Inovasi Mie Keriting merupakan makanan instan yang dibuat dari bahan utama ganyong dan kelor, serta bahan lain yang dibutuhkan sesuai "ISI PIRINGKU", Mie Keriting telah melalui uji laboratorium, memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar/P-IRT, hak cipta, SK Gubernur Jateng Pemenang Inovasi, hak paten, MoU dengan BRIDA Jateng.

MIE KERITING sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat dalam pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita atau sebagai altenatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting. Inovasi MIE KERITING merupakan pemenang utama dari Lomba KRENOVA Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 dan pemenang harapan Lomba KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pada Tahun 2023 Inovasi MIE KERITING berhasil masuk dalam nominasi TOP 45 Inovasi Kemenpan RB Republik Indonesia. Tingkat keberhasilan inovasi MIE KERITING dibuktikan adanya penurunan angka prevalensi stunting yang semula 18,31% (2020) turun menjadi 12,03% (2021) di wilayah kerja Peskesmas Kebumen 2.

8. Inovasi BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya (*off-taker* hasil pertanian pada *corporate farming*)

BUMD PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupeten Kebumen dan bertujuan untuk

mengelola sumber daya dan layanan ekonomi tertentu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kebumen. Off-taker akan bisa menjadi bagian penting dari strategi penjualan dan pemasaran *corporate farming*, terutama untuk menghasilkan produk pertanian dalam skala besar. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) bertindak sebagai *off-taker* yang akan membeli produk pertanian dihasilkan oleh *corporate farming* di Kabupaten Kebumen.

Program *corporate farming* akan dikelola oleh 14 kelompok di 8 kecamatan pada musim tanam 2 berlangsung yaitu bulan April karena menggunakan metode pethuk galur dengan metode pembiayaan adalah Yarnen. PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) akan mengambil hasil petani dengan kualitas bagus dan ada sistem perjanjian dengan petani terkait pengambilan hasil panen. Kegitan ini akan tergantung pada strategi bisnis *corporate farming*, kebutuhan pasar dan kondisi ekonomi serta regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. *Corporate farming* harus selalu menjalin hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan *off-taker* guna memastikan pasokan dan penjualan produk yang lancar.

Beberapa dampak positif dengan adanya inovasi ini, antara lain: a). Peningkatan efisiensi: *Corporate farming* menggunakan teknologi modern dan operasi skala besar, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi beras, b). Akses terhadap modal dan sumber daya: *Corporate farming* memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, mesin, dan teknologi yang lebih besar, yang dapat membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi, c). Akses pasar: Penetrasi *Corporate farming* memiliki akses yang lebih baik ke pasar, jaringan distribusi, dan pembeli sehingga memberikan lebih banyak peluang bagi petani padi untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, d). Pendapatan yang stabil: Bekerja dengan entitas *Corporate farming*, petani padi memiliki pendapatan yang lebih stabil melalui kontrak atau harga yang terjamin, sehingga mengurangi paparan mereka terhadap fluktuasi pasar.

3.2.5 Penghargaan yang diterima

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan manusia dan pelayanan publik telah menghasilkan penghargaan-penghargaan sebagai berikut :

1. Top Pembina BUMD 2023
2. Kabupaten Kreatif Indonesia
3. Penghargaan Bakti Ekonomi Desa
4. Peringkat 10 besar nasional untuk layanan pelatihan dan pendampingan rutin Digitalisasi Usaha dan Marketing serta Advertising (Iklan) bagi PLUT Kebumen
5. Pasar rakyat bersertifikat SNI
6. Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Tahun 2023 Kategori Nindya

7. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Anugerah Revolusi Mental 2023 dari Kemenko PMK untuk kategori gerakan Indonesia Mandiri
9. Penanganan terhadap penyakit Frambusia di masyarakat
10. Penghargaan Obsession Award 2023 Kategori Best Regional leaders atau pimpinan daerah terbaik
11. Kabupaten Terbaik Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023
12. Zona Hijau atau Opini Kualitas tertinggi oleh ombudsman RI
13. Digital Government Award atau Anugerah pemerintahan digital Tahun 2023
14. Kategori Baik dalam penerapan system Merit Manajemen ASN 2023
15. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 Kategori B Predikat Baik
16. Penghargaan indeks kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Predikat Baik

3.3 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2022

Tabel 3. 143 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2022 dan Rencana tindak lanjut

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
A. Mekanisme dan Prosedur					
1	Berdasarkan PP nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraa Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa LKPJ Bupati akhir tahun anggaran harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan DPRD diberikan waku pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dengan waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima. Seperti kita ketahui penyerahan LKPJ sudah masuk batas terakhir penyerahan dan hal ini selalu terjadi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan waktu pembahansan yang dimiliki oleh DPRD juga terbatas, kami minta kepada Eksekutif untuk tahun-tahun berikutnya agar disiapkan dengan baik dan bias diserahkan kepada DPRD lebih awal	Bagian Pemerintahan	Telah dilakukan penyusunan LKPJ melalui tahapan mekanisme pengumpulan data dari OPD setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.	Tahapan penyusunan LKPJ di awali dengan penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimana sebagian dari data SPM dan LPPD juga di masukan dalam laporan LKPJ. Sehingga penyelesaian LKPJ Setelah SPM dan LPPD.	Dilakukan Koordinasi dengan OPD untuk percepatan pengumpulan data dukung yang dibutuhkan. Berdasarkan PP nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa LKPJ Bupati akhir tahun anggaran harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, telah kami laksanakan sesuai mekanisme dan tidak melewati batas akhir pengumpulan.
2	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati atau LKPJ merupakan dokumen resmi Pemerintah Derah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diserahkan secara resmi oleh Bupati kepada DPRD melalui rapat paripurna DPRD. Maka dari itu dalam penyajian informasi dan data dalam LKPJ tentunya harus akurat	Bagian Pemerintahan	Telah dilakukan perbaikan-perbaikan	Pengintegrasian dan kompilasi data perlu koordinasi dengan OPD	Penyusunan LKPJ Tahun 2023 telah di lakukan reviu bersama OPD penyedia data

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	dan bias dipertanggungjawabkan. Dokumen LKPJ tahun 2022 yang diterima oleh DPRD masih banyak ditemukan kesalahan penulisan, kesalahan narasi, seperti penulisan prioritas dana rah kebijakan, kebijakan perubahan, kesalahan penyajian data dan lain sebagainya. Kedepan DPRD merekomendasikan semua dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan kualitas dokumennya disertai dengan informasi dan data yang akurat serta akuntabel.				
B. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan					
1	Arah kebijakan Tahun 2022 adalah “peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan opengov dan pengembangan system pendidikan dan kesehatan adaptif bencana”. Tetapi capaian indikator pembangunan infrastruktur justru tidak tercapai dengan baik, hal ini bias terlihat dari Indeks kualitas infrastruktur yang capaian realisasinya minus atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yaitu hanya 57,22 lebih rendah dari tahun 2021 yang sudah mencapai 58,41. Indikator proporsi jalan capaiannya juga menurun, tahun 2021 jalan dalam kondisi baik sepanjang 365.191 KM sedangkan di tahun 2022 hanya 292.179 KM. Begitu juga untuk capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang hanya tercapai 76,31%. Kedepan DPRD merekomendasikan untuk arah	BAPPEDA, BPKPD	Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya	Munculnya kebujakan pemerintah pusat berupa mandatory spending yang tidak selalu selaras dengan pemerintah daerah	Singkronisasi program/kegiatan prioritas daerah dengan mandatory spending (mengoptimalkan irisan program/kegiatan)

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	kebijakan benar-benar secara konsisten bisa diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan, anggaran dan capaian targetnya bisa tercapai.				
2	Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Capaian IPM diukur dengan indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Dalam LKPJ capaian IPM pada tahun 2022 adalah 70,79 meningkat sedikit dari tahun 2021. Walaupun secara target IPM tercapai, tetapi ada indikator yang tidak tercapai yaitu Harapan Lama sekolah, sedangkan Pengeluaran Perkapita dalam LKPJ tidak disajikan pencapaian targetnya. DPRD merekomendasikan terkait dengan IPM Kedepan untuk terus ditingkatkan.	DISDIK, DINKES, DISPERINDAG, DISTAPANG, DISPARBUD,	Kami sepakat dengan rekomendasi DPRD untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah 71.88 naik 1.09 dibanding tahun 2022 sebesar 70.79 (hasil sensus 2010) atau naik 0.59 dari tahun 2022 sebesar 71.29 (hasil sensus 2020). IPM dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM. AHH Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 adalah 73,83 Dibandingkan dengan AHH tahun 2022 adalah 73,70 naik sebesar 0,13 pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi perbaikan beberapa indikator pelayanan kesehatan di antaranya Jaminan Kesehatan sebesar 96,76%, capaian SPM Kesehatan pada indikator pelayanan Kesehatan bayi dan indikator pelayanan Kesehatan balita sebesar 100%. Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13.37 sediit mengalami kenaikan (0.01) dari Harapan Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 13.36. Sedangkan untuk Pengeluaran per Kapita tahun 2023 sebesar Rp.9.734.000,- atau naik Rp.452.000,- dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 9.282.000,-.	- Terkait dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah disebabkan karena banyaknya penduduk yang usia tua dengan pendidikan rendah atau tidak sekolah - Banyaknya pendduduk yang tidak merubah data dalam jenjang pendidikan terakhir	Menaikan rata-rata lama sekolah dengan : - Memfasilitasi jenjang pendidikan non formal (Paket A/B/C) - Optimalisasi layanan pendidikan non formal baik mandiri atau kolaboratif (pondok pesantrean dengan bersekolah)

<table>
<tr><th>NO</th><th>REKOMENDASI DPRD</th><th>OPD PENANGGUNG JAWAB</th><th>TINDAK LANJUT</th><th>PERMASALAHAN</th><th>SOLUSI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Data pengeluaran perkapita tdk merupakan indikator kinerja urusan pemerintah daerah, tetapi masuk pada indikator kinerja makro yg disajikan pada dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dgn sumber data dari BPS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>DPRD memberikan apresiasi terhadap pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah yang capaian targetnya mencapai 116,43%. Dalam rangka meningkatkan Kemandirian fiskal DPRD merekomendasikan untuk terus ditingkatkan dari hasil pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan masih banyak potensi PAD yang masih bias dioptimalkan, selain itu DPRD juga merekomendasikan untuk melakukan optimalisasi penagihan piutang pajak dan retribusi karena dari pengamatan yang dilakukan banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan. Seperti contoh banyak obyek pajak dan retribusi yang belum dilakukan penagihan, penggunaan taping box yang banyak tidak berfungsi, penilaian pajak yang menggunakan self assessment masih jauh dari kewajaran dan sebaginya.</td><td>BPKPD</td><td>Upaya peningkatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah terus diupayakan oleh BPKPD maupun OPD pengelola Pendapatan Lainnya, mulai dari upaya intensifikasi piutang PBB dan Retribusi,pemutakhiran data, pemasangan Tapping Box, hingga pendataan objek pajak atau retribusi baru.</td><td>1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak maupun wajib retribusi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya
2. Keterbatasan kapasitas maupun kualitas SDM mulai dari penilai pajak,penagih pajak/retribusi hingga pemeriksa pajak</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Belanja subsidi dan bansos realisasi anggarannya rendah, untuk belanja subsidi hanya sebesar 62,77% dan belanja bansos sebesar 83,27%. Pada tahun 2021 belanja bansos dan subsidi menjadi temuan BPK. Kedepan untuk bisa ditingkatkan</td><td>BPKPD, DINSOS, DINKES, BAGIAN KESRA,</td><td>Kedepan akan ditingkatkan realisasi anggaran dengan didukung data penerima bantuan yang akurat dan akuntabel.</td><td></td><td>Dilakukan inventarisasi data penerima bantuan sebagai berikut :

Rekapitulasi Hibah Dan Basos OPD Kabupaten Kebumen
<table><tr><th>NO.</th><th>Nama OPD</th><th>Hibah</th><th>Bansos</th></tr><tr><td>1</td><td>DISDIKPORA</td><td>v</td><td>v</td></tr></table></td></tr>
</table>

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	realisasi anggarannya dengan di dukung data penerima bantuan yang akurat dan akuntabel.			2 DINKES PPKB v v 3 DINAS PU v 4 DISPERKIMHUB v v 5 DINSOS v v 6 DLHKP v v 7 DISPERINDAG v v 8 DINSOS v v 9 DISPARBUD v 10 DISTAPANG v 11 SATPOL PP v 12 SETDA v v	
5	DPRD merekomendasikan untuk melakukan optimalisasi manajemen aset. Karena permasalahan aset merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan khususnya tanah-tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau dipakai oleh pihak lain	BPKPD	Optimalisasi manajemen aset dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022 yaitu pelaksanaan pensertifikatan tanah Pemda dan pada tahun 2023 dilaksanakan Sensus BMD.	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah menyebabkan proses pensertifikatan tanah pemda tidak bisa diselesaikan seluruhnya.	Proses pensertifikatan tanah Pemda dilakukan secara bertahap
6	Pada tahun 2022 terdapat beberapa pekerjaan yang gagal lelang dan terlambat dalam penyelesaian pekerjaaannya. DPRD merekomendasikan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk lebih ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaannya dan utuk pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD perubahan DPRD merekomendasikan agar dilaksanakan mendahului anggaran dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu untuk paket-	BAGIAN PBJ	Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan diajukan oleh PPK dengan memperhatikan Perencanaan Kebutuhan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan	Terdapat review Perencanaan Pekerjaan dan Peletakan anggaran kas yang tidak sesuai	Meletakan anggaran kas sesuai kebutuhan waktu pekerjaan dan mengusulkan paket pekerjaan lebih awal/tender dini

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	paket pengadaan barang dan jasa yang bias segera dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk bias dilaksanakan di triwulan awal sehingga ada perputaran ekonomi dan tidak menumpuk di akhir tahun. Sehingga secara waktu dan tahapan proses pengadaan abarang dan jasa sampai dengan pelaksanaan dapat dikerjakan, kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya akan merugikan masyarakat.				
7	DPRD melihat berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) daerah ada sebanyak 5 indikator kinerja utama daerah yang belum bisa tercapai, DPRD meminta untuk tahun 2023 beberapa IKU daerah yang belum tercapai untuk diperhatikan dan untuk IKU daerah yang sudah tercapai untuk bisa dipertahankan.	BAGIAN ORGANISASI, BAPPEDA	Telah dillaksanakan review dan evaluasi pencapaian kinerja atas masing-masing indikator kinerja. (Rata-rata Lama Sekolah, Indeks Pembangunan Gender, Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Permasalahan formulasi perhitungan dan tata cara evaluasi indikator kinerja yang berubah, serta indikator kinerja yang tidak tercapai di pengaruhi oleh faktor-faktor: 1. Rata-rata Lama Sekolah: putus sekolah, kemiskinan, keinginan sendiri tidak bersekolah, pernikahan dini, mengaji di pondok pesantren dan tidak bersekolah di sekolah formal/non formal 2. Indek Pembangunan Gender: rata-rata lama sekolah pada Perempuan masih rendah, pengeluaran perkapita pada perempuan masih rendah, masih tingginya perkawinan di usia anak dan masih banyaknya kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK: 4. Tingkat Pengangguran Terbuka: terbatasnya jumlah	Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah maupun stakeholder terkait untuk mencapai target indikator kinerja

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
				lowongan pekerjaan, industri 4.0 adanya beberapa lapangan pekerjaan yang diganti menggunakan teknologi 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dari total 118 data hanya 76 data yang terverifikasi, sedangkan lainnya tidak terverifikasi karena kurangnya peta dan koordinat lokasi lahan	
8	Rekomendasi dari Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi masih ada 8 rekomendasi yang Belum terselesaikan. Terkait rekomendasi dari Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, DPRD meminta untuk bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rekomendasi tersebut.	BAGIAN ORGANISASI	Telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	Dengan adanya perubahan roadmap reformasi birokrasi maka berubah pula tata cara penilaiannya dan pengiriman rencana aksi dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi melalui aplikasi menpan rb	Rencana aksi dan laporan rencana aksi yang dibuat oleh unit kerja di *back up* menggunakan softfile
		BAGIAN ORGANISASI, BKPSDM	Telah dibangun platform belajar mandiri Massive Open Online Course (MOOC) berbasis website melalui portal sinau.kebumenkab.go.id sehingga dapat dilaksanakan Bimbingan Teknis Core Value ASN berAKHLAK secara online yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan penambahan wawasan ASN	Dengan metode MOOC yang dilaksanakan pada jam kerja pelayanan menyebabkan tidak optimalnya peserta mengikuti pembelajaran	Diusulkan pelaksanaan MOOC di luar jam kerja pelayanan
		BAGIAN HUKUM	Telah terbit Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 975/18 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Instruksi Bupati, dan Kesepakatan Bersama. Selain itu, eLegan sudah	Perangkat Daerah (user) masih mengajukan permohonan koreksi manual dan e-letter, *tracking* belum bisa berjalan optimal, aplikasi masih sering *error*	Sosialisasi penggunaan eLegan kepada Perangkat Daerah (sebagai user), koordinasi dan maintenance aplikasi dengan Dinas Kominfo

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			terintegrasi dengan JDIH Kabupaten Kebumen.		
		BAPPEDA	Sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah berikutnya yaitu RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 dan Renstra PD 2025-2030		
		BKPSDM	telah dilaksanakan Asesment secara online bekerjasama dengan Pemprov Jabar pelaksanaan 9 Agustus 2023,	Pada tahun 2023 merencanakan assessment untuk 500 orang tetapi karena keterbatasan anggaran hanya dapat dilaksanakan untuk 165 orang terdiri dari Pejabat administrator, Pejabat Pengawas, JF hasil Penyetaraan, dan staf potensial	Tahun 2024 merencanakan assessment dengan Pemprov Jawa Barat, dengan target peserta 150 orang (menyesuaikan ketersediaan anggaran)
		BAGIAN ORGANISASI	Mengkaji/menelaah ketentuan perUUan dan referensi lain terkait kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan tidak sesuai standar: Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut SKM setiap triwulan	Belum semua petugas pelayanan dapat mengimplementasikan standar pelayanan prima	Triwulan II Tahun 2024, menyusun draft Perbup Pemberian Kompensasi bagi penerima layanan tidak sesuai standar, Rapat koordinasi dan monev triwulanan tindak lanjut hasil SKM
		INSPEKTORAT	Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 menambah Unit Kerja yang dijadikan penilaian Zona Integritas yang semula 3 Unit Kerja (DPMPTSP, Disdukcapil, RSDS Dr. Soedirman) diperluas menjadi 7 Unit Kerja yaitu DPMPTSP, Disdukcapil, RSDS Dr. Soedirman, Disarpus Kabupaten Kebumen dan 3 Puskesmas (Puskesmas Pejagoan, Puskesmas Kebumen 2, dan Puskesmas Kutowinangun)	Berdasarkan Penilaian Kemenpan RB, baru 1 Unit Kerja yaitu DPMPTSP yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sedangkan untuk 6 Unit Kerja lainnya yang diusulkan belum dapat memperoleh predikan WBK. Hal ini disebabkan: 1. RSDS Dr. Soedirman tidak lolos desk evaluasi karena Pembangunan ZI belum dapat menunjukkan target-target prioritas dan tujuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2. Disarpus tidak lolos desk evaluasi karena belum terdapat	Pada tahun 2024 akan diusulkan kembali ke Kemenpan RB untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
				analisis dampak perubahan sebelum dan sesudah adanya inovasi 3. Disdukcapil tidak lolos verifikasi lapangan karena Perbaikan yang dilakukan oleh Disdukcapil belum didasarkan pada isu Strategis dari harapan pengguna layanan, sehingga belum mampu meneyelesaikan masalah utama unit kerja. 4. Puskesmas Pejagoan, Kebumen 2 dan Kutowinangun tidak lolos desk evaluasi karena Pembangunan ZI belum 1 tahun.	
		INSPEKTORAT	Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan evaluasi atas kebijakan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi dan Whistleblowing System.	Sudah dilaksanakan	
C. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan					
1	Angka partisipasi kasar targetnya adalah 82,5% sedangkan realisasinya hanya 81,37%, tidak tercapainya target angka partisipasi kasar khususnya untuk SMP/MTS/Paket B disebabkan oleh faktor seperti: Pernikahan dini, faktor kemiskinan, Sebagian penduduk usia SMP yang ada di pesantren tidak mengikuti pendidikan formal/kesetaraan. Pendidikan dasar merupakan hak dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah, maka dari itu DPRD merekomendasikan untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan segera mengatasi beberapa factor	DISDIKPORA	Melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada satuan pendidikan. Mengoptimalkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Melakukan kerjasama dengan pondok pesantren untuk mendorong agar para santri juga mengikuti pendidikan formal.	Masih adanya budaya masyarakat dan tuntuan ekonomi menikahkan anak pada usia dini. Masih terdapat siswa kurang mampu yang belum terdaftar pada Program Indonesia Pintar (PIP). Masih terdapat pondok pesantren yang belum bersedia melaksanakan pendidikan formal.	Mengintensifkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada satuan pendidikan dengan melibatkan lintas sektor (KUA, Dinsos P3A, Puskesmas) Memasukan usulan baru terhadap siswa yang belum terdaftar pada PIP Mengintensifkan kerjasama dengan pondok pesantren untuk mendorong agar para santri juga mengikuti pendidikan formal dan melibatkan lintas sektor (Kemenag, Bagian Kesra)

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	penyebab permasalahan dalam hal pendidikan.				
2	Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI dans SMP/MTs tidak bisa teralisasi 100%, padahal salah satu permasalahan dalam pencapaian target pendidikan khususnya APK adalah faktor kemiskinan, DPRD meminta kedepan untuk bisa dimaksimalkan pemberian bantuan sosial siswa kurang mampu, selain itu validasi dan verifikasi untuk penentuan sasaran siswa kurang mampu juga harus ditingkatkan.	DISDIKPORA	Sepakat dengan masukan dari DPRD. Untuk Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2023 telah terealisasi 100%.	Masih terdapat anak yang kurang mampu yang belum mendapatkan Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs	Mengusulkan penambahan kuota untuk Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs
1	Dalam LKPJ tahun 2022 Pelayanan BLUD (program, kegiatan, dan capaian kinerjanya) tidak dijelaskan. Kedepan DPRD merekomendasikan pelayanan BLUD untuk dijelaskan dan dimasukan dalam LKPJ. Selain itu terkait dengan BLUD untuk bisa melakukan peningkatan pelayanan, karena masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelayanan BLUD khususnya RSDS, dalam meningkatkan pelayanan BLUD DPRD merekomendasikan untuk melakukan penataan SDM sesuai dengan beban kerja, struktur jabatan agar tidak ada penumpukan pekerjaan pada hanya satu atau dua orang saja	DINKES PPKB	Laporan kinerja BLUD Tahun 2023 dimasukkan dalam LKPJ. Telah dilakukan Anjab ABK dilanjutkan penataan sesuai Anjab ABK yang ada	Penataan dan penempatan pegawai RSUD Dr. Soedirman belum sesuai Anjab ABK	Telah dilakukan penataan SDM sesuai Anjab ABK termasuk mutasi internal RSUD dr. Soedirman.
2	Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan tidak bisa tercapai terdapat beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu	DINKES PPKB	Evaluasi perhitungan target sasaran kinerja sesuai mampu laksana, Tahun 2023 SPM pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu melahirkan, pelayanan kesehatan balita tercapai 100%.		Advokasi penggunaan sesuai juknis dan penyelarasan dengan kebijakan yang berlaku di daerah

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	melahirkan, pelayanan kesehatan balita dan lain sebagainya. Selain itu layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, capaiannya juga hanya 97,54%. Kedepan DPRD merekomendasikan standar pelayanan minimum (SPM) untuk bisa dilaksanakan secara optimal sehingga target 100% bisa tercapai sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2016 dan Permenkes nomor 4 tahun 2019				
3	Angka kematian ibu di tahun 2022 mencapai 29 kasus kematian, tetapi capaian target kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan ibu bersalin tidak bisa mencapai 100% dan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif juga capaiannya hanya 89,09% hal ini tentunya harus menjadi perhatian, ke depan harus bisa dioptimalkan. Terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melaporkan pelayanan kehamilan tentunya harus ada teguran karena terkait angka kematian ibu merupakan indikator utama kesehatan	DINKES PPKB	Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia. Meningkatkan koordinasi jejaring pada fasilitas kesehatan non pemerintah.	Adanya perbedaan kebijakan pemanfaatan anggaran DAK pada regulasi Juknis dari Pusat dan regulasi kebijakan pemanfaatan anggaran di daerah.	Advokasi penggunaan sesuai juknis dan penyelarasan dengan kebijakan yang berlaku di daerah
4	Angka kematian bayi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan (tahun 2018 : 134 kasus; 2019 : 136 kasus; 2020 : 136 kasus; tahun 2021 : 157 kasus; tahun 2022: 168 kasus). Tetapi kegiatan dan anggaran untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir capaiannya selalu tidak bisa	DINKES PPKB	Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia. Penanganan kualitas kesehatan bayi ditingkatkan secara kualitas program dan pelayanan	Adanya perbedaan kebijakan pemanfaatan anggaran DAK pada regulasi Juknis dari Pusat dan regulasi kebijakan pemanfaatan anggaran di daerah.	Advokasi penggunaan sesuai juknis dan penyelarasan dengan kebijakan yang berlaku di daerah

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	mencapai 100%. Hal ini menandakan tidak ada atau kurangnya keseriusan dinas kesehatan dalam menangani kematian bayi. DPRD meminta untuk mengambil langkah langkah serius dan membuat rencana aksi terkait dengan penurunan angka kematian bayi.				
5	Penanganan Stunting merupakan kegiatan prioritas yang dicanangkan selama beberapa tahun ini, tetapi kondisi balita dengan kurang gizi dan gizi buruk pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Gizi kurang tahun 2021 sebanyak 0,55% naik menjadi 1,04% di tahun 2022 (terus mengalami kenaikan sejak tahun 2018). Yang disayangkan capaian pengelolaan pelayanan kesehatan balita realisasinya hanya 95,25%. Seperti halnya angka kematian bayi penanganan balita dengan gizi kurang dan gizi buruk juga membutuhkan keseriusan dari dinas kesehatan terkait penurunan gizi kurang dan gizi buruk.	DINKES PPKB	Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia.	Adanya perbedaan kebijakan pemanfaatan anggaran DAK pada regulasi Juknis dari Pusat dan regulasi kebijakan pemanfaatan anggaran di daerah.	Advokasi penggunaan sesuai juknis dan penyelarasan dengan kebijakan yang berlaku di daerah
6	Dalam rangka pemenuhan universal health coverage (UHC) DPRD merekomendasikan pada akhir tahun 2023 eksekutif melakukan langkah langkah konkret dan terukur agar universal health coverage (UHC) bisa tercapai 95%	DINKES PPKB	Tahun 2023 telah tercapai kinerja melebihi target Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 96,76% dari target 95%	Adanya penon aktifan segmen lain (APBN, APBD Provinsi, maupun mandiri) yang akan memperberat beban APBD Kabupaten Kebumen	Mengajukan kuota PBI anggaran APBN melalui Dinas Sosial
1	Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Memiliki target pada Tahun 2022 yaitu 74,23% dan realisasi masih dibawah target yaitu 73,82%. Permasalahan yang ada di	BINA MARGA	Realitanya memang setiap tahun anggaran penanganan jalan selayaknya ada peningkatan/penambahan jumlah, karena faktor inflasi mempengaruhi nilai indeks penanganan (per KM panjang	- Adanya pengurangan dari Pagu Anggaran - Personil/Tenaga kerja Penyedia Jasa dan Konsultan Supervisi kurang kompeten	- Penanganan Jalan sesuai dengan Kebutuhan Skala Prioritas - Memastikan personil sesuai dengan Kebutuhan pekerjaan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	tahun 2022 adalah karena curah hujan yang tinggi dan banyaknya kendaraan ODOL/Melebihi kapasitas. Mengingat banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak maka DPRD merekomendasikan untuk penambahan anggaran infrastruktur khususnya jalan selain itu juga dalam pelaksanaan pekerjaan untuk ditingkatkan kualitasnya dan membuat pengawasan serta pengaturan terkait pengguna jalan atau kendaraan yang melebihi kapasitas dengan berkordinasi dengan dinas perhubungan		Jalan) baik itu Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan juga berubah nilai besarannya. Untuk pelaksanaan pekerjaan kita tingkatkan dengan Penekanan pelaksanaan sesuai Kontrak kepada Penyedia Jasa, meningkatkan kerja Konsultan Supervisi/pengawas dan Monev dari UPT dan Juga Dinas, untuk output hasilya sesuai dengan Spesisikasi dalam Kontrak Untuk pembatasan kendaraan yang lewat, kita sudah menganggarkan rambu-rambu peringatan batasan kendaraan yang lewat di RAB suatu pekerjaan Jalan (Lelang/Tender)		- Menganggarkan pengadaan rambu-rambu larangan/pembatasan kendaraan yang lewat
1	Terkait dengan adanya surat Mensos No B5/MS/01-02/1/2023 tentang tindak lanjut temuan BPK RI Tahap 1 dan 3 tanggal 5 Januari 2023. dikeluarkan 2 SK mensos di bulan Januari 2023 tentang penghapusan bansos (PBI) sekaligus DTKS dan bansos lainnya (SK 31/HUK/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebanyak 1.756 jiwa yang dikeluarkan dari DTKS dan penerima bansos. SK 18/HUK/2023 tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 10.386 jiwa yang dikeluarkan dari DTKS dan penerima bansos, untuk segera ditindaklanjuti	Dinsos P3A	Pengusulan ulang oleh desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)	Penidaklayakan DTKS/bansos yang sebenarnya sudah pisah KK tetapi masih terdaftar dalam satu KK pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)	Update data kependudukan oleh masyarakat dan dilakukan pengusulan kembali oleh desa/kelurahan melalui aplikasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
1	Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan urusan lingkungan hidup sangat bagus bahkan melebihi 100%, tetapi belum bisa memberikan kontribusi pada indikator kinerja urusan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Melakukan upaya perbaikan kualitas air dan udara serta membuat update data RTH dan Tutupan Lahan di Kabupaten Kebumen, Meningkatkan uji emisi kendaraan dan peningkatan infrastruktur transportasi massal, penambahan *bicycle*	Terhadap capaian indikator urusan lingkungan hidup yaitu Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) yang di targetkan di tahun 2023 sebesar 74,19 tetapi hanya tercapai 67,16 atau capaiannya	Menyusun rencana aksi pengendalian air dan udara serta peningkatan IKL di Kabupaten Kebumen, dengan :

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	hidup, hal ini terlihat dari indikator indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditargetkan sebesar 74,10 capaian indeksnya hanya 68,17 atau hanya sebesar 91,99%. Kedepan untuk indikator kinerja urusan untuk lebih diperhatikan, dan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan jangan hanya berorientasi pada output dan menghabiskan anggaran tetapi harus memperhatikan outcome atau indikator kinerja urusannya.		*path* (jalur sepeda) di wilayah perkotaan, sabuk hijau, dan kemitraan pengelolaan RTH dengan pihak swasta.	sebesar 90,41%, hal tersebut dikarenakan terdapat permasalahan dari 3 komponen penyusunnya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), sebagai berikut : 1. Indeks Kualitas Air (IKA) : Terjadinya fenomena **el-nino** yang menyebabkan kemarau panjang di Indonesia tahun 2023 yang lalu, dampaknya debit aliran air di sungai menurun dan konsentrasi unsur pencemar menjadi tinggi. 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) : Penambahan jumlah penduduk, kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara serta berkurangnya vegetasi hijau menjadi alasan mengapa kualitas udara di Kabupaten Kebumen menurun. 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) : Belum semua RTH dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya di Kabupaten Kebumen teridentifikasi dengan baik (nama, koordinat, luas, dan delineasi pada Google Earth), data masih berfokus pada RTH wilayah perkotaan saja. Data hutan rakyat di Kabupaten Kebumen masih belum terupdate, terakhir update pada tahun 2018 (Data didapatkan dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah).	1. Melakukan identifikasi sumber pencemaran air dan udara 2. Adanya Implementasi kebijakan terhadap pengendalian yang dilakukan (fasilitasi IPAL dan pengelolaan sampah, 3. Dukungan kebijakan : Review/revisi penetapan target IKLH pada Perda (RPJMD), Perbup, serta Renstra. Dukungan SDM serta anggaran APBD untuk peningkatan IKLH, baik di DLHKP, maupun OPD terkait. 4. Khusus untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL), rencana aksi yang dilakukan antara lain : a. Terus mendata dan mendelineasi RTH maupun Tutupan Vegetasi Relevan lainnya melalui GoogleEarth/Citra Satelit terkini guna menambah data yang sudah ada b. Menyusun dan mengesahkan SK untuk RTH-RTH yang belum di-SK-kan saat ini c. Pengelolaan RTH jangan terbatas dengan kawasan perkotaan saja, namun menyeluruh / seluruh wilayah Kab. Kebumen d. Meningkatkan tutupan lahan melalui kegiatan penanaman di lahan terbuka serta pembuatan RTH-RTH baru

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
				Selain permasalahan tersebut di atas juga adanya penentuan target yang terlalu tinggi pada RPJMD dan Renstra DLHKP periode tahun 2021-2026 serta Perda RPPLH. Meskipun target tidak tercapai tetapi IKLH di Kabupaten Kebumen menduduki peringkat ke-4 tertinggi se-Jawa Tengah.	e. Koordinasi lebih lanjut dengan DLHK Prov.Jateng terkait data hutan rakyat dan hutan negara yang ter-update
1	Terkait dengan andalalin ditemukan permasalahan Kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha untuk mengajukan dokumen andalalin dan masih banyak bangunan yang belum memiliki dokumen andalalin	Disperkimhub Kab. Kebumen	Sosialisasi dan penegakan Perda No. 19 Tahun 2017 tentang Andalalin pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan peserta para pengusaha, pengembang, RSU	Kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha untuk mengajukan dokumen andalalin dan masih banyak bangunan yang belum memiliki dokumen andalalin	Sosialisasi dan penegakan Perda No. 19 Tahun 2017 tentang Andalalin tanggal 15 Agustus 2023 Untuk melaksanakan penilaian Andalalin dibentuk Tim dengan tugas dan fungsi : a. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi; dan b. Menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi
1	Permasalahan yang ada dalam urusan pariwisata adalah kecenderungan wisatawan ke obyek wisata yang baru. Hal ini dikarenakan 8 tempat pariwisata yang dimiliki oleh Pemda tidak melakukan inovasi, padahal anggaran renovasi dan promosi	DISPARBUD	- Pada tahun 2023 Disparbud telah membangun wahana modern Pandan Kuning Park di Petanahan - Pengecatan obyek wisata	Kurangnya inovasi wisata	1. Melakukan inovasi di tempat-tempat pariwisata yang sudah ada. Inovasi tersebut berupa pengembangan atraksi baru, penyediaan fasilitas yang lebih menarik, atau penggunaan teknologi untuk

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	yang dibelanja cukup banyak tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisata ke tempat wisata yang dikelola oleh Pemda. Kedepan DPRD merekomendasikan untuk melakukan inovasi selain itu kegiatan promosi juga harus tepat sasaran dan bisa berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan				meningkatkan pengalaman pengunjung. 2. Kegiatan promosi diarahkan secara tepat sasaran, dengan mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pasar wisatawan. Kerjasama dengan pihak terkait, termasuk asosiasi pariwisata, agen perjalanan, dan media, dapat memperkuat efektivitas promosi.
2	DPRD merekomendasikan untuk segera ditangani, terkait permasalahan masih ada pungli oleh oknum diluar petugas pemerintah yg mengakibatkan potensi pendapatan hilang tidak masuk kas pendapatan daerah. Pungli merupakan kejadian yang terjadi setiap tahun dan belum terselesaikan sampai dengan sekarang sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah daerah	DISPARBUD	- Dilakukan pembinaan kepada para pengelola obyek wisata dan pelaku usaha pariwisata	Kurangnya pengawasan	1. Penguatan Pengawasan: Perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pariwisata, termasuk penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat dalam praktik pungli. 2. Sosialisasi dan Edukasi: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pariwisata tentang bahaya dan konsekuensi dari praktik pungli, serta pentingnya melaporkan praktik pungli kepada otoritas yang berwenang. 3. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Perlu adanya kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menangani praktik pungli ini secara menyeluruh dan tegas. 4. Menempatkan tenaga keamanan ditempat wisata

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
					5. Pengelolaan parkir tetap terpusat loket ttp ada petugas diparkiran utk mengatur posisi kendaraan shg tidak ada dobel pungutan 6. Menggunakan aplikasi e tiketing untuk melancarkan pelayanan dan memastikan keterbukaan informasi serta data kunjungan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (pembangunan/ rehabilitasi Jaringan irigasi Usahatani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) terealisasi 107.482 meter dari kebutuhan sepanjang 613.500 meter atau hanya terealisasi 15,52% dari target 20%. Mengingat kebutuhan prasarana pertanian sangat dibutuhkan oleh petani dan banyak yang tidak terealisasi ditahun 2022 maka untuk tahun 2023 untuk lebih diprioritaskan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Mendorong desa bersama kelompok tani melakukan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian dengan anggaran desa maupun swadaya masyarakat	Untuk 2022 : anggaran untuk JUT, Jides, JITUT dan dam parit sekitar Rp.6.876.442.000,- tercapai target 107.482 meter dengan rincian pembangunan tahun 2021 adalah 101.332 meter dan pembangunan tahun 2022 adalah 6.150 meter). Padahal untuk mencapai target 20% (target 122.700 meter) dibutuhkan anggaran Rp.19.231.000.000,- (kekurangan panjang adalah 122.700 - 107.482= 15.218 meter, dengan asumsi 15.218 m x Rp.900.000). Jadi ada kekurangan anggaran di tahun 2022 sekitar 13 Milyar (19 M - 6 M = 13 M) untuk mencapai target tersebut	- Mengusulkan alokasi anggaran dari APBN - Dukungan anggaran APBD
2	Salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan minus adalah sektor ekonomi pertanian, padahal sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen bertumpu pada sektor pertanian sehingga kondisi ini memberikan kontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan, dalam rangka meningkatkan target urusan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	- Akan dilaksanakan bimtek dan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan pendampingan oleh penyuluh di 26 BPP. - Peningkatan kelembagaan petani melalui kegiatan Corporate Farming (CF) di 26 Kecamatan	1. Dukungan anggaran untuk melaksanakan revitalisasi kelembagaan masih terbatas 2. Pengelolaan usahatani masih banyak yang konvensional dengan luas lahan yang kecil sehingga pengelolaan usahatani masih belum efektif dan efisien	1. Dukungan anggaran 2. pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan petani 3. pembinaan dan pendampingan manajemen usaha tani melalui Corporate Farming 4. Pendampingan pengelola CF untuk pengelolaan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	pertanian dan serta menurunkan angka kemiskinan maka DPRD meminta urusan pertanian untuk melakukan inovasi dan revitalisasi kelembagaan pertanian.			3. Kepercayaan petani terhadap pengelola CF masih kurang	usahatani yang efektif dan efisien
3	Data pertanian merupakan data yang penting dalam perumusan kebijakan pertanian, DPRD melihat selama ini banyak data-data pertanian yang masih kurang akuntabel dan belum terintegrasi dengan baik, DPRD merekomendasikan terkait dengan pengelolaan data urusan pertanian untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	1. Rapat Koordinasi secara berkala , 2. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh, 3. penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pendukung pendataan statistik pertanian, 4. pengelolaan data dan informasi pertanian, 5. peningkatan kompetensi penyuluh 6. Evaluasi data-data pertanian 7. evaluasi kinerja SDM pengumpul data/penyuluh dan petugas perekap tingkat kabupaten 8. optimalisasi dan koordinasi	1. Kurangnya petugas pengumpul data/penyuluh 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tersedia khususnya dalam pendataan statistik pertanian terintegrasi 3. Belum optimalnya Informasi dan Data base pertanian yang Accurate, Accessible, dan Accountable 4. Kualitas & kompetensi SDM 5. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan (akurat, valid)	1. Optimalisasi Koordinasi secara berkala, 2. Peningkatan Kapasitas SDM, 3. Optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran pendukung pendataan statistik pertanian yang tersedia, 4. Pengelolaan data dan informasi pertanian, 5. Peningkatan kompetensi penyuluh
1	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) meningkat tajam dari 195 pelanggaran ditahun 2021 menjadi 307 pelanggaran ditahun 2022. Begitu juga jumlah pelanggaran Perda dari hanya 65 pelanggaran ditahun 2021 meningkat sangat tajam menjadi 5525 pelanggaran ditahun 2022. Ke depan DPRD merekomendasikan dalam perhitungan jumlah pelanggaran dihitung berdasarkan jenis Perda yang dilanggar dan subjek pelanggaran bukan berdasarkan titik lokasi pelanggaran serta meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dengan melibatkan DPRD dan stake holder lainnya.	SATPOL PP	Sepakat dengan masukan DPRD, untuk pelaporan jumlah pelanggaran dihitung berdasarkan jenis Perda yang dilanggar dan subyek pelanggaran, dan meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dengan melibatkan stake holder lain (Dinas Kesehatan, DPMPTSP, DLHKP)	Sosialisasi belum terlaksana secara maksimal dikarenakan luasnya jangkauan	Menambah anggaran sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi secara lebih intensif

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA- 090.02.4.039600/2023 tanggal 30 November 2022 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Rincian Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000,- terealisasi Rp.2.838.039.699,- atau sebesar 94,60%.

Tabel 4. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2023

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Perdagangan RI	SP DIPA-090.02.4.039600/ 2023	Program Perdagangan Dalam Negeri/Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan/Output Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen	3.000.000.000	2.838.093.699	94.60%	1	100%	

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

Tabel 4. 2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	10.087.758.000	10.087.758.000	100	100	100	DINAS PMD
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	2.206.830.000	2.206.830.000	100	100	100	DINAS PMD
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	169.948.912.000	169.946.366.500	100	99.98 - Tidak terealisasi sebesar Rp2,545,500.00 - Karena ada perangkat desa yang meninggal dunia	99,98	DINAS PMD
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Kepada Desa (Dana Desa)	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	416.756.373.000	416.756.373.000	100	100	100	DINAS PMD

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	163 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	30.945.910.000	30.945.910.000	100	100	100	DINAS PMD
6	Bantuan Keuangan Operasional TPQ	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	2.245.000.000	2.240.000.000	99,8	Terealisasi 448 desa, 1 Desa tidak mencairkan karena tidak memiliki TPQ dengan ijin operasional yaitu Desa Karangglonggong Kec. Klirong.	99,8	BAGIAN KESRA

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kebumen, 2023

4.2 Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memperhatikan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan capaian kinerjanya 100% dan realisasi anggaran 94.60% dimana tidak terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 dan capaian kinerjanya serta permasalahan dan solusinya diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2023 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen.

Sistematika penulisan LKPJ ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tentang Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup positif yang ditandai adanya peningkatan indikator-indikator kinerja dengan harapan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target dan perolehan hasil yang optimal.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga Allah Subhanahuwata’ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridhonya kepada kita semua dalam memajukan Kabupaten Kebumen.